

Raperda Kabupaten Bandung Nomor ... Tahun 2016

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021



*Pemerintah
Kabupaten Bandung*

Sabilulungan.



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10);
 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Dan BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang Daerah yang mengatur struktur dan pola tata ruang Daerah.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

BAB II
RPJMD
Pasal 2

RPJMD tahun 2016-2021 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD tahun 2005-2025.

Pasal 3

Selain mengacu pada RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RPJMD memperhatikan Rencana Pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;

- c. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan Daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. penetapan indikator kinerja Daerah; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (2) Ketentuan mengenai uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 memuat Visi, Misi, dan Program Bupati, arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap kepala SKPD.

- (3) Kepala SKPD yang membidangi perencanaan daerah menghimpun, menganalisis, dan menyusun hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjadi bahan bagi penyusunan RPJMD periode berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

- (1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen RPJMD tahun 2016-2021 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
- (3) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7, maka perubahan tersebut akan dimuat dalam dokumen RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 Agustus 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 7



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang.....	1-1
1.2. Dasar hukum Penyusunan	1-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	1-5
1.4. SistematikaPenulisan.....	1-7
1.5. Maksud dan Tujuan.....	1-8
1.5.1. Maksud	1-8
1.5.2. Tujuan	1-9
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	2-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	2-1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	2-13
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	2-17
2.1.4. Demografi.....	2-26
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2-30
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	2-30
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	2-35
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	2-40
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	2-41
2.3.1. Fokus Layanan rusan Wajib	2-41
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	2-81
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	2-86
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	2-88
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	2-92
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	2-94
2.4.4. Status Desa (Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa)	2-95
2.4.5. Fokus Sumber Daya Manusia	2-96
2.4.6. Tingkat Ketergantungan.....	2-96
BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN.....	3-1
3.1. Kinerja Keuangan Lima Tahun Terakhir	3-1
3.1.1. KinerjaPelaksanaan APBD.....	3-1
3.1.2. Neraca Daerah	3-4



3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Lima Tahun Terakhir	3-11
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	3-16
3.2.2. Analisis Pembiayaan.....	3-19
3.3. Kerangka Pendanaan	3-23
3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Megikat Serta Prioritas Utama	3-23
3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah.....	3-25
3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan	3-30
BAB 4 ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS	4-1
4.1. Permasalahan Pembangunan	4-1
4.2. Isu Strategis	4-24
BAB 5 PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	5-1
5.1. Visi	5-1
5.2. Misi.....	5-4
5.3. Tujuan dan Sasaran	5-10
BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	6-1
6.1. Strategi Pengembangan.....	6-1
6.2. Arah Kebijakan.....	6-12
BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	7-1
BAB 8 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN.....	8-1
BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA	9-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi Topografi Wilayah Kabupaten Bandung	2-5
Tabel 2.2	Penggunaan Lahan Eksisting di Kabupaten Bandung Tahun 2011	2-8
Tabel 2.3	Potensi Panas Bumi di Kabupaten Bandung	2-15
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	2-29
Tabel 2.5	Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	2-31
Tabel 2.6	Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Berlaku	2-32
Tabel 2.7	Perkembangan Kontribusi PDRB Menurut Sektor Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Konstan 2000	2-33
Tabel 2.8	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstran (Hk) Kbaupaten Bandung Tahun 2010 - 2014)	2-34
Tabel 2.9	Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014	2-35
Tabel 2.10	Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2013-2014.....	2-38
Tabel 2.11	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014.....	2-42
Tabel 2.12	Rasio Ketersediaan Sekolah Berdasarkan Usia Sekolah di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014	2-44
Tabel 2.13	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2014	2-45
Tabel 2.15	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014	2-47
Tabel 2.16	Cakupan Puskesmas yang Telah Memenuhi Standar Tenaga Kesehatan	2-48
Tabel 2.17	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014	2-48
Tabel 2.18	Persentase Balita Gizi Baik di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014	2-49
Tabel 2.19	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014	2-50
Tabel 2.20	Proporsi Jumlah Jembatan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2013.....	2-51
Tabel 2.21	Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2013.....	2-52
Tabel 2.22	Panjang Drainase dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bandung Tahun 2014	2-53
Tabel 2.23	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2013	2-54
Tabel 2.24	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2013	2-55
Tabel 2.25	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014.....	2-56
Tabel 2.26	Luas Ruang Terbuka Hijau Per Kecamatan di Kabupaten Bandung Tahun 2014	2-57
Tabel 2.27	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2013	2-58
Tabel 2.28	Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2014	2-58



Tabel 2.29	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2014.....	2-58
Tabel 2.30	Rasio Izin Trayek di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014	2-59
Tabel 2.31	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2014	2-60
Tabel 2.32	Perkembangan VCR di Kabupaten Bandung	2-61
Tabel 2.33	Status Penaatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2013.....	2-62
Tabel 2.34	Pengujian Air dan Udara di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2013	2-63
Tabel 2.35	Persentase Pencapaian SPM Pelayanan Informasi Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (% PI-SKT).....	2-65
Tabel 2.36	Persentase Volume Sampah yang Tertangani di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014.....	2-65
Tabel 2.37	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2009-2014.....	2-66
Tabel 2.38	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2012-2013	2-66
Tabel 2.39	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014.....	2-66
Tabel 2.40	Rasio Penduduk yang Memiliki KK di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2014	2-67
Tabel 2.41	Rasio Bayi Berakta Kelahiran di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014.	2-67
Tabel 2.42	Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014	2-67
Tabel 2.43	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2013.....	2-68
Tabel 2.44	Rasio Akseptor KB di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014.....	2-68
Tabel 2.45	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014.....	2-69
Tabel 2.46	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014	2-69
Tabel 2.47	Jumlah Sarana Sosial di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2014	2-70
Tabel 2.48	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bandung Tahun 2013-2014	2-70
Tabel 2.49	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014	2-71
Tabel 2.50	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014	2-71
Tabel 2.51	Jumlah UKM dan Koperasi di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014	2-72
Tabel 2.52	Jumlah Omzet Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2010 - 2014	2-72
Tabel 2.53	Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2014	2-72
Tabel 2.54	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2012 - 2014	2-73
Tabel 2.55	Perkembangan Kesenian di Kabupaten Bandung Tahun 2014.....	2-73
Tabel 2.56	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2014	2-74
Tabel 2.57	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2012 - 2014.....	2-74
Tabel 2.58	Persentase Penyelesaian Penegaka Hukum di Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2014.....	2-75
Tabel 2.59	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2013.....	2-76
Tabel 2.60	Realisasi dan Target Capaian Skor PPH Ketersediaan Pangan Tahun 2011 - 2014	2-76



Tabel 2.61	Realisasi dan Target Capaian Skor PPH Konsumsi Pangan Tahun 2011-2014	2-77
Tabel 2.62	Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014	2-77
Tabel 2.63	Jumlah LSM Aktif di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014	2-78
Tabel 2.64	Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014	2-78
Tabel 2.65	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku Tahun 2012 - 2014.....	2-79
Tabel 2.66	Jumlah Arsip di lingkungan Pemkab Bandung Tahun 2012 - 2014.....	2-79
Tabel 2.67	Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana (Teknologi) Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2014	2-79
Tabel 2.68	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014	2-80
Tabel 2.69	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014	2-80
Tabel 2.70	Indikator Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura Kabupaten Bandung Tahun 2011-2013.....	2-81
Tabel 2.71	Indikator Peternakan di Kabupaten Bandung Tahun 2011-2013.....	2-82
Tabel 2.72	Indikator Kehutanan di Kabupaten Bandung Tahun 2011-2014.....	2-82
Tabel 2.73	Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2011-2014	2-84
Tabel 2.74	Indikator Capaian Pariwisata di Kabupaten Bandung Tahun 2011 - 2014	2-84
Tabel 2.75	Indikator Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2011 - 2014	2-85
Tabel 2.76	Indikator Capaian Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2011 - 2014	2-85
Tabel 2.77	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014	2-86
Tabel 2.78	Jumlah Transmigrasi Menurut Jenis Tahun 2012-2014	2-86
Tabel 2.79	Angka Konsumsi Rata-Rata RT Per Kapita Sebulan di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2013	2-89
Tabel 2.80	Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2013	2-90
Tabel 2.81	Produktivitas Per Sektor di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014	2-91
Tabel 2.82	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2013.....	2-92
Tabel 2.83	Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014	2-93
Tabel 2.84	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014	2-94
Tabel 2.85	Lama Proses Perizinan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2013.....	2-94
Tabel 2.86	Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2013.....	2-95
Tabel 2.87	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	2-96
Tabel 2.88	Rasio Lulusan S1, S2, dan S3 di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014	2-96
Tabel 2.89	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014	2-97
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015 Kabupaten Bandung	3-3
Tabel 3.2	Rata- rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 - 2015	3-5
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun	3-6
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Bandung	3-7
Tabel 3.5	Rata- rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015	3-7
Tabel 3.6	Rata- rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011- 2015	3-9
Tabel 3.7	Analisis Rasio Keuangan Tahun 2011 - 2015	3-14



Tabel 3.8	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bandung.....	3-22
Tabel 3.9	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015	3-23
Tabel 3.10	Rekapitulasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bandung Tahun 2011- 2015.....	3-24
Tabel 3.11	Defisit Riil Kabupaten Bandung.....	3-25
Tabel 3.12	Komposisi Penutup Riil Anggaran Kabupaten Bandung.....	3-25
Tabel 3.13	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bandung	3-27
Tabel 3.14	Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Bandung.....	3-29
Tabel 3.15	Proyeksi Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021	3-31
Tabel 3.16	Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bandung tahun 2016 - 2021	3-37
Tabel 3.17	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Kabupaten Bandung.....	3-39
Tabel 3.18	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung	3-39
Tabel 4.1	Angka Tidak Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Bandung	4-2
Tabel 4.2	Penyebab Siswa Tidak Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Bandung.....	4-2
Tabel 4.3	Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung	4-26
Tabel 5.1	Visi RPJPD, RPJMN, dan RPJMD	5-1
Tabel 5.2	Prioritas Pembangunan Berdasarkan RPJPN dan RPJPD	5-1
Tabel 5.3	Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021	5-2
Tabel 5.4	Misi Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung.....	5-8
	Keterkaitan Antara Isu Strategis dan Misi Pembangunan.....	5-8
Tabel 5.5	Keterkaitan Antara Isu Strategis dan Misi Pembangunan.....	5-9
Tabel 5.6	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021.....	5-10
Tabel 5.7	Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Kabupaten Bandung dengan Tujuan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Bart.....	5-14
Tabel 6.1	Strategi Pengembangan Terkait Misi Untuk Meningkatkan Kualitas dan Cakupan Layanan Pendidikan	6-2
Tabel 6.2	Strategi Pengembangan Terkait Misi Untuk Mengoptimalkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	6-3
Tabel 6.3	Strategi Pengembangan Terkait Misi Untuk Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Terpadu Dengan Tata Ruang Wilayah Serta Memperhatikan Aspek Kebencanaan	6-4
Tabel 6.4	Strategi Pengembangan Terkait Misi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	6-5
Tabel 6.5	Strategi Pengembangan Terkait Misi Untuk Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Memiliki Competitive Advantage	6-6
Tabel 6.6	Strategi Pengembangan Terkait Misi Untuk Memelihara dan Mengelola Lingkungan Hidup Dalam Menciptakan Pembangunan Kabupaten Bandung yang Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Aspek Kebencanaan	6-7
Tabel 6.7	Strategi Pengembangan Terkait Misi Untuk Meningkatkan Kemandirian Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat	6-8
Tabel 6.8	Strategi Pengembangan Terkait Misi Untuk Meningkatkan Pelayanan	



	Publik Melalui Reformasi Birokrasi	6-9
Tabel 6.9	Strategi Pengembangan Terkait Misi Untuk Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum.....	6-10
Tabel 6.10	Strategi Pengembangan Terkait Misi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	6-11
Tabel 6.11	Matriks Keterkaitan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	6-23
Tabel 7.1	Indikator Tujuan dan Sasaran.....	7-1
Tabel 7.2	Kebijakan Umum dan Program Pengembangan Daerah Terkait Misi 1 ...	7-2
Tabel 7.3	Kebijakan Umum dan Program Pengembangan Daerah Terkait Misi 2 ...	7-6
Tabel 7.4	Kebijakan Umum dan Program Pengembangan Daerah Terkait Misi 3 ...	7-10
Tabel 7.5	Kebijakan Umum dan Program Pengembangan Daerah Terkait Misi 4 ...	7-19
Tabel 7.6	Kebijakan Umum dan Program Pengembangan Daerah Terkait Misi 5 ...	7-21
Tabel 7.7	Kebijakan Umum dan Program Pengembangan Daerah Terkait Misi 6 ...	7-25
Tabel 7.8	Kebijakan Umum dan Program Pengembangan Daerah Terkait Misi 7 ...	7-28
Tabel 7.9	Kebijakan Umum dan Program Pengembangan Daerah Terkait Misi 8 ...	7-29
Tabel 7.10	Kebijakan Umum dan Program Pengembangan Daerah Terkait Misi 9 ...	7-33
Tabel 8.1	Sinergitas dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat	8-2
Tabel 8.2	Keterkaitan Misi, Prioritas dan Fokus Pembangunan Kabupaten Bandung.....	8-4
Tabel 9.1	Indikator Kinerja Daerah Tahun 2016 - 2021	9-2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Posisi RPJM Daerah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1-6
Gambar 2.1	Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Bandung.....	2-3
Gambar 2.2	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bandung	2-4
Gambar 2.3	Peta Topografi Kabupaten Bandung	2-10
Gambar 2.4	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung	2-11
Gambar 2.5	Peta Kawasan Resapan Air	2-12
Gambar 2.6	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah.....	2-17
Gambar 2.7	Wilayah Potensi Bencana di Kabupaten Bandung	2-19
Gambar 2.8	Peta Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Bandung	2-22
Gambar 2.9	Peta Kawasan Risiko Gunung Berapi di Kabupaten Bandung.....	2-23
Gambar 2.10	Peta Rawan Gempa Bumi di Kabupaten Bandung	2-24
Gambar 2.11	Peta Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Bandung	2-25
Gambar 2.12	Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2014	2-26
Gambar 2.13	Peta Persebaran Penduduk Kabupaten Bandung	2-27
Gambar 2.14	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bandung	2-28
Gambar 2.15	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung (Juta Rupiah)	2-30
Gambar 2.16	Laju Inflasi PDRB	2-35
Gambar 2.17	Pencapaian IPM Kabupaten Bandung	2-36
Gambar 2.18	Sebaran Nilai IPM (Metode Lama) di Kabupaten Bandung Tahun 2015...	2-37
Gambar 2.19	Perkembangan IPM (Metode Baru) Kabupaten Bandung Tahun 2011 - 2015	2-38
Gambar 2.20	Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bandung	2-39
Gambar 2.21	Angka Melek Huruf di Kabupaten Bandung	2-40
Gambar 2.22	Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD/Sederajat.....	2-43
Gambar 2.23	Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SMP/Sederajat.....	2-43
Gambar 2.24	Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SMA/Sederajat.....	2-44
Gambar 2.25	Indeks Kesehatan Kabupaten Bandung	2-46
Gambar 2.26	Angka Harapan Hidup Kabupaten Bandung.....	2-46
Gambar 2.27	Cakupan Puskesmas yang Telah Memenuhi Standar Tenaga Kesehatan .	2-48
Gambar 2.28	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi.....	2-51
Gambar 2.29	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung	2-87
Gambar 2.30	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rupiah)	2-88
Gambar 2.31	Indeks Daya Beli Masyarakat Kabupaten Bandung.....	2-88
Gambar 2.32	Purchasing Power Parity Kabupaten Bandung dalam Ribu Rupiah	2-89
Gambar 3.1	Analisis Kebijakan Perekonomian Kabupaten Bandung	3-36
Gambar 4.1	Diagram Permasalahan Sektor Pendidikan Kabupaten Bandung.....	4-3
Gambar 4.2	Diagram Permasalahan Sektor Kesehatan Kabupaten Bandung	4-4
Gambar 4.3	Diagram Permasalahan Penataan Ruang Kabupaten Bandung	4-5
Gambar 4.4	Diagram Permasalahan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.....	4-8
Gambar 4.5	Diagram Permasalahan Sektor Sumber Daya Air Kabupaten Bandung	4-10
Gambar 4.6	Diagram Peran Pemerintah dalam Sektor Perumahan Rakyat di Kabupaten Bandung	4-11



Gambar 4.7	Diagram Permasalahan Sektor Perhubungan Kabupaten Bandung	4-12
Gambar 4.8	Diagram Permasalahan Sosial Kabupaten Bandung	4-14
Gambar 4.9	Diagram Permasalahan Sektor Pertanian Kabupaten Bandung	4-17
Gambar 4.10	Diagram Permasalahan Sektor Industri Kabupaten Bandung	4-19
Gambar 4.11	Diagram Peran Pemerintah Daerah Dalam Sektor Perdagangan di Kabupaten Bandung	4-21
Gambar 4.12	Diagram Permasalahan Sektor Koperasi Modal Kabupaten Bandung.....	4-22
Gambar 4.13	Diagram Permasalahan Sektor Penanaman Modal Kabupaten Bandung ..	4-24
Gambar 4.14	Hasil Pembobotan Isu Strategis Kabupaten Bandung	4-26

The image shows the main building of the Bandung Regency Office (Kantor Bupati Bandung). It is a large, multi-story building with a prominent central tower and a wide staircase leading up to the entrance. The building is surrounded by lush greenery, including palm trees. The text 'KANTOR BUPATI BANDUNG' is visible on a sign in front of the building. The title 'BAB 1 PENDAHULUAN' is overlaid in large yellow letters on the right side of the image.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, daerah memiliki kewenangan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berfungsi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Adapun dalam proses penyusunannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Daerah dibagi kedalam tiga *time frame* perencanaan, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Rencana Pembangunan Tahunan. Dengan mengacu pada arahan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025 yang telah diperdakan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011.

Sehubungan telah berakhirnya implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode kedua serta sejalan dengan berakhirnya masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Bandung periode 2010 - 2015, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021. Melalui penyusunan RPJMD Tahun 2016 – 2021 ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi arah pembangunan daerah dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah, serta mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung untuk unggul dalam persaingan yang semakin ketat di lingkungan global. Sejalan dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 25 Ayat (2) serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 69 Ayat (2), RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 memuat penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang kemudian dijabarkan kedalam arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, program lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif serta rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka mensinergikan rencana jangka menengah dengan



rencana pembangunan jangka panjang serta mengikuti arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 ini dilaksanakan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang bersebelahan.

RPJMD merupakan perencanaan strategis yang disusun melalui proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian, serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. RPJMD merupakan integrasi antara manifestasi potensi sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Hal ini terkait juga dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah yang berkonsep *good governance* dan *clean government*.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021, beberapa landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

- a. Landasan Idiil Pancasila
- b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 18 ayat 6
- c. Landasan Operasional, yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat ;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;



28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 No. 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takniliyah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 26);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

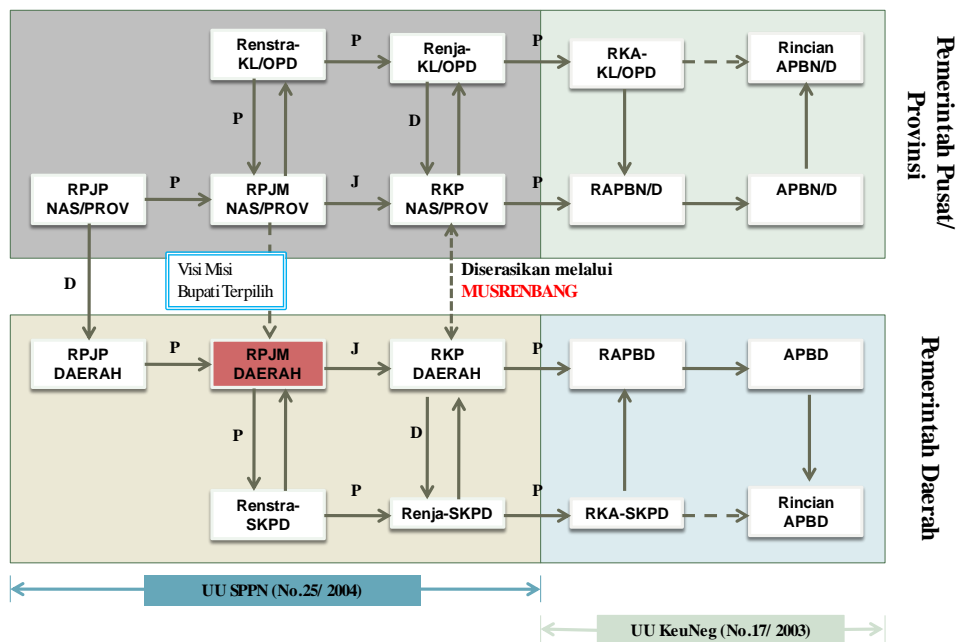
Penyusunan RPJMD didalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berpedoman keada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN serta visi dan misi bupati terpilih. RPJMD ini yang kemudian akan dijabarkan menjadi RKPd dan juga merupakan pedoman bagi Renstra Perangkat Daerah. Hal ini juga sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 54 ayat 2 bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota disusun dengan



memuat visi, misi dan program bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih, yang perlu disinkronkan atau berpedoman kepada RPJD Kabupaten/Kota, rencana struktur dan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lain yang berbatasan.

Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 dengan struktur dan pola tata ruang yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 dilakukan sebagai dasar pertimbangan penetapan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Bandung. Sementara sinkronisasi muatan RPJMD dengan muatan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam rangka penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung dengan arah, kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat untuk bidang-bidang pembangunan sesuai kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah. Adapun, sinkronisasi RPJMD Kabupaten Bandung dengan RPJMD dan RTRW kabupaten lainnya dilakukan sebagai upaya penyelarasan pembangunan jangka menengah daerah untuk sektor atau urusan yang bersifat lintas kewilayahan.

Posisi RPJM Daerah Dalam Sistem Rencana Pembangunan Nasional diilustrasikan oleh Gambar 1.1 berikut.



GAMBAR 1.1

POSISI RPJM DAERAH DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2015

Keterangan:

D: Diacu;

J: Dijabarkan;

P: Pedoman



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, yang terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan juga kerangka pendanaan daerah.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat analisis isu-isu strategis yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah dijelaskan berdasarkan tiap bidang pembangunan daerah, baik dari segi internal maupun eksternal.

Analisis profil daerah diharapkan mampu menunjukkan kesenjangan antara pencapaian saat ini dengan pencapaian yang diharapkan di tiap bidang pembangunan daerah sehingga akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan bidang pembangunan daerah.

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini memberikan gambaran mengenai kejelasan arah, fokus, dan perspektif visi dan misi Pembangunan Daerah dan kemudahannya untuk diterjemahkan ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah. Pada bagian ini dilakukan analisis sejauh mana visi dan misi yang ada memenuhi kaidah-kaidah perumusan visi, misi dan sasaran yang akan dituju.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Penyajian strategi dan arah kebijakan dapat menggambarkan dan menjelaskan hubungan setiap strategi



dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Selain itu, disajikan pula penjelasan mengenai hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada bab ini dijelaskan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai pedoman transisi Meliputi pedoman transisi untuk mengisi kekosongan akibat pengaruh perubahan arahan kebijakan dan transisi pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD serta kaidah pelaksanaan dalam implementasi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021.

1.5 Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD ini yaitu:

1. Menyediakan dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam menentukan prioritas program lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana pembangunan tahunan daerah.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD, serta masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program kepala daerah selama lima tahun.



1.5.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, diantaranya:

1. Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu 20 tahunan.
2. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih.
3. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.





BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung yang digunakan sebagai basis data acuan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah ini meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Pada subbab ini akan diuraikan penjelasan mengenai aspek geografis dan demografi Kabupaten Bandung yang mencakup karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, serta penjelasan mengenai kondisi kependudukan Kabupaten Bandung.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Bandung terletak pada $107^{\circ} 22'$ – $108^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 41'$ – $7^{\circ} 19'$ Lintang Selatan. Adapun secara administratif, Kabupaten Bandung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2012 wilayah administratif Kabupaten Bandung meliputi 31 Kecamatan, 270 desa dan 10 kelurahan dengan total area seluas 176.238,67 Ha.

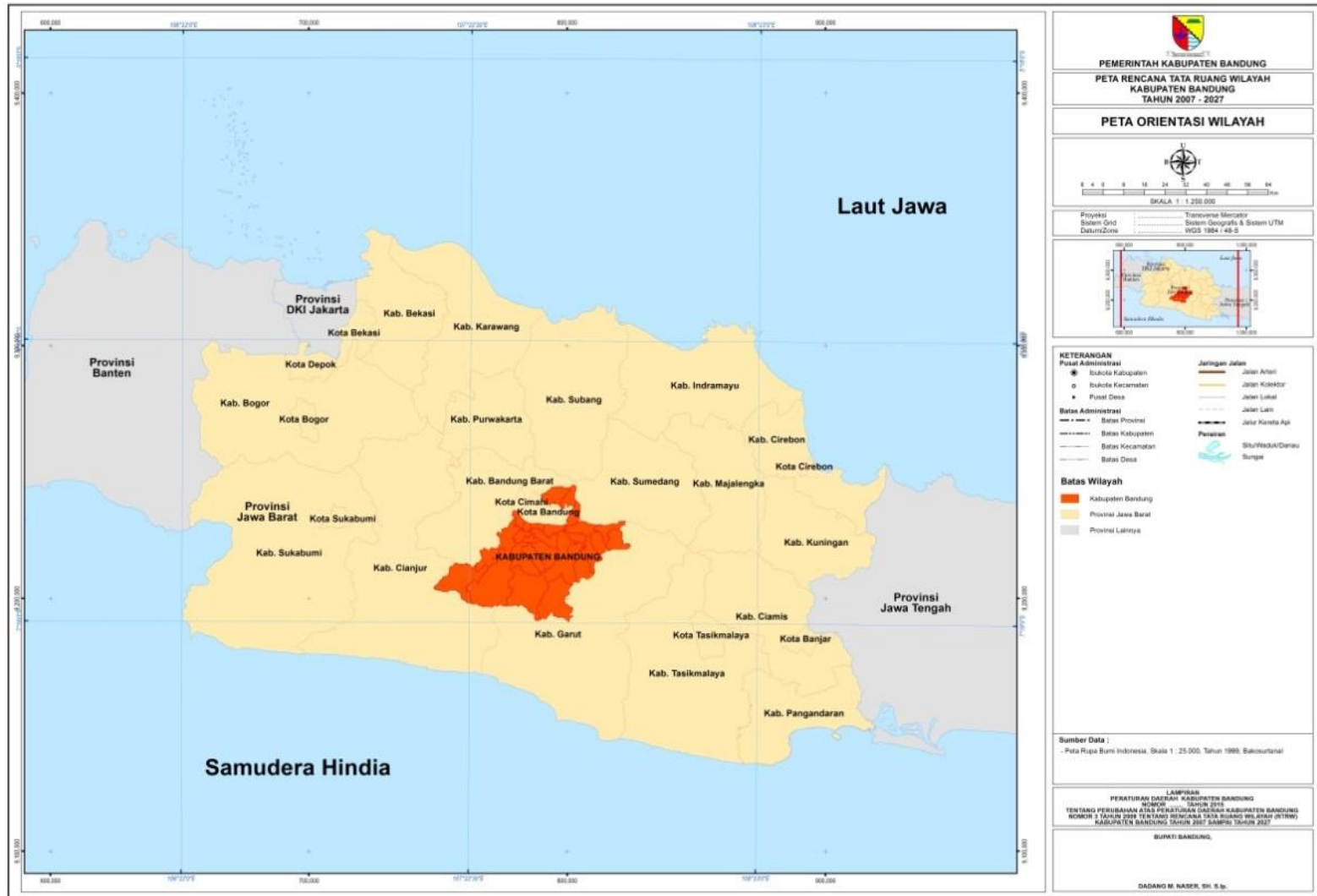
Dalam konstelasi Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung berbatasan secara langsung dengan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut. Batas wilayah administratif Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;

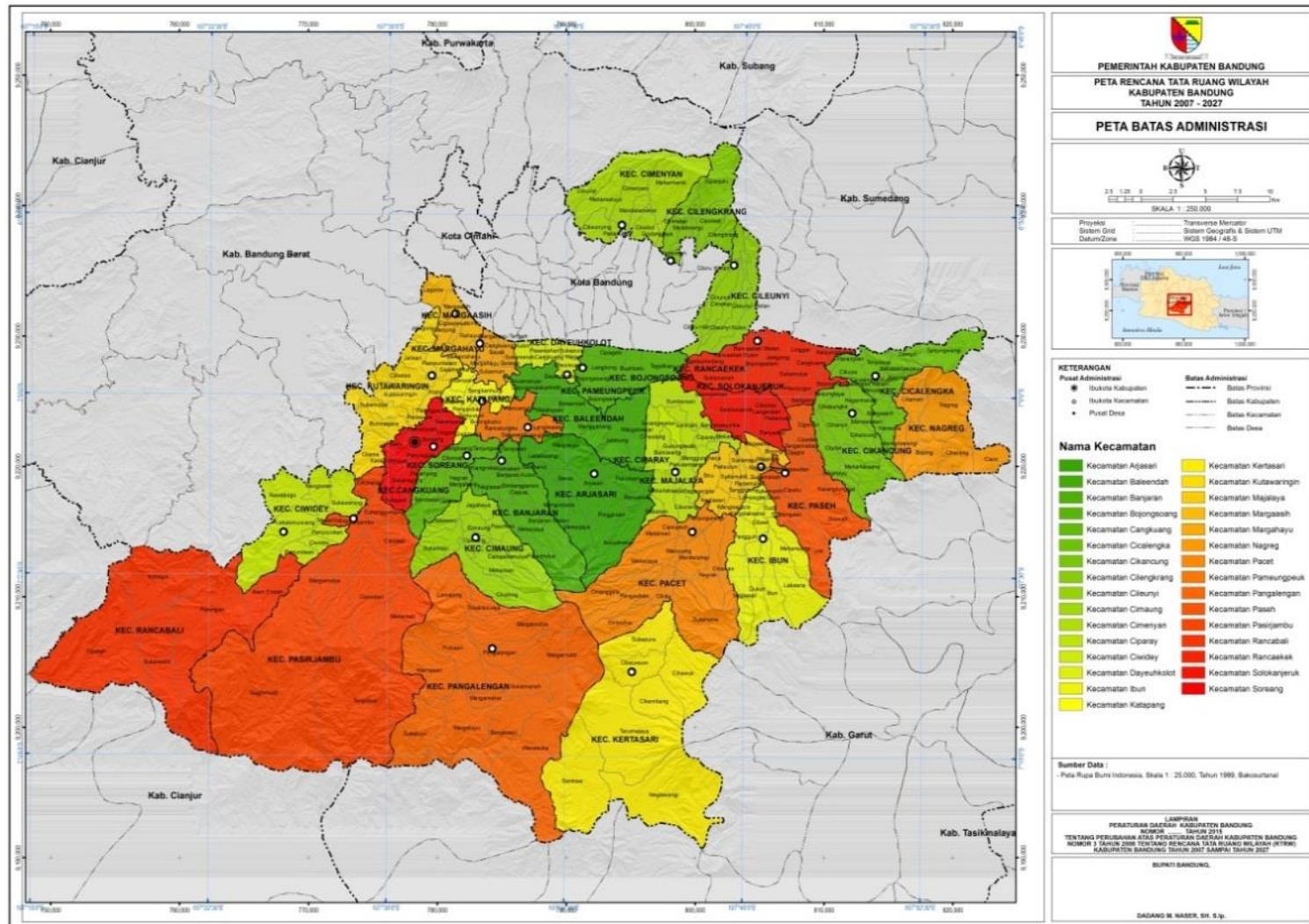


- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

Secara rinci, orientasi wilayah Kabupaten Bandung dalam konstelasi Provinsi Jawa Barat serta batas wilayah administratif Kabupaten Bandung ditunjukkan oleh gambar 2.1 dan gambar 2.2. berikut.



GAMBAR 2.1
PETA ORIENTASI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA



GAMBAR 2.2
PETA WILAYAH ADMINISTRATIF KABUPATEN BANDUNG

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA



B. Topografi

Kabupaten Bandung termasuk wilayah dataran tinggi dengan kemiringan lereng antara 0-8%, 8-15% hingga di atas 45%. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung berada diantara bukit-bukit dan gunung-gunung, seperti:

Berdasarkan topografinya, sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung merupakan pegunungan atau daerah perbukitan dengan ketinggian yang bervariasi antara 500 m hingga 1.812 m di atas permukaan laut. Secara tidak langsung, kondisi topografi Kabupaten Bandung inilah yang mempengaruhi iklim Kabupaten Bandung yang cenderung sejuk dengan suhu berkisar antara 18⁰ C hingga 24⁰ C. Secara umum topografi Kabupaten Bandung dapat dibedakan kedalam tiga jenis topografi yaitu dataran, lereng/ punggung bukit dan Lembah/ DAS. Topografi tersebut cenderung bervariasi untuk setiap wilayah. Informasi detail mengenai topografi setiap kecamatan di Kabupaten Bandung disajikan pada tabel 2.1.

TABEL 2.1
KLASIFIKASI TOPOGRAFI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

No.	Wilayah Pengembangan	Kecamatan	Topografi Wilayah	Ketinggian (mdpl)
1	WP Soreang	Kec. Soreang	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	700-825
		Kec. Kutawaringin	Dataran, Lereng/ Punggung Bukit	500-1.100
		Kec. Katapang	Dataran	675 – 700
		Kec. Rancabali	Lereng/Punggung Bukit	1.200 sd 1.550
		Kec. Pasirjambu	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	1.000-1.200
		Kec. Ciwidey	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	700 sd 1.200
2	WP Baleendah	Kec. Baleendah	Dataran	600 – 715
		Kec. Dayeuhkolot	Dataran	600
		Kec. Bojongsoang	Dataran	681 – 687
3	WP Banjaran	Kec. Banjaran	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	750 – 800
		Kec. Pangalengan	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	984 – 1571



No.	Wilayah Pengembangan	Kecamatan	Topografi Wilayah	Ketinggian (mdpl)
		Kec. Cangkuang	Dataran, Lereng/ Punggung Bukit	700 – 710
		Kec. Cimaung	Lereng/Punggung Bukit	765 – 1.057
		Kec. Arjasari	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	550 – 1.000
		Kec. Pameungpeuk	Dataran	650-675
4	WP Majalaya	Kec. Majalaya	Dataran	681 – 796
		Kec. Ciparay	Dataran	678 – 805
		Kec. Pacet	Dataran, Lereng/Punggung Bukit, Lembah/ DAS	700 – 1.116
		Kec. Kertasari	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	1.250 – 1.812
		Kec. Paseh	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	600 – 800
		Kec. Ibum	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	700 – 1.200
		Kec. Solokan Jeruk	Dataran	671-700
5	WP Cicalengka	Kec. Cicalengka	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	667 – 850
		Kec. Nagreg	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	715-948
		Kec. Cikancung	Dataran	600-1.200
6	WP Cileunyi	Kec. Cileunyi	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	600-700
		Kec. Rancaekek	Dataran	608-686
7	WP Cimenyan - Cilengkrang	Kec. Cimenyan	Lereng/Punggung Bukit	750 – 1.300
		Kec. Cilengkrang	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	600-1.700
8	WP Margaasih- Margahayu	Kec. Margaasih	Dataran	600
		Kec. Margahayu	Dataran	700

Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2012

Informasi detail mengenai topografi Kabupaten Bandung disajikan dalam Peta Topografi pada Gambar 2.3



C. Geologi

Ditinjau berdasarkan geologi wilayah, Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang berada dalam Kawasan Cekungan Bandung. Sekeliling kawasan cekungan Bandung tersebut dikelilingi oleh deretan pegunungan sebagai berikut:

- Di Utara terdapat Bukit Tunggul dengan tinggi 2.200 m, Gunung Tangkuban Parahu dengan tinggi 2.076 m, yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta.
- Di Selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 m, Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m, dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, yang berbatasan dengan Kabupaten Garut.
- Dibagian barat Kawasan Cekungan Bandung, terdapat sederetan intrusi andesit dan dasit yang membentuk punggung- punggung tidak teratur.
- Adapun di bagian timur Kawasan Cekungan Bandung di apit oleh Gunung Krenceng dan Gunung Mandalawangi.

Morfologi Kabupaten Bandung yang merupakan bagian dari Cekungan Bandung tersebut menjadikan Kabupaten Bandung tergolong potensial sebagai tempat akumulasi air tanah.

D. Hidrologi

Kabupaten Bandung memiliki potensi hidrologi berupa sumber daya air yang cukup melimpah, baik air bawah tanah maupun air permukaan. Air permukaan terdiri dari 4 danau alam, 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai. Pemanfaatan sumber air permukaan pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri, dan sosial lainnya. Pemanfaatan air tanah dalam (kedalaman 60-200 m) dipergunakan untuk keperluan industri, non industri, dan sebagian kecil untuk rumah tangga.

Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM terutama di wilayah perkotaan.

Kabupaten Bandung memiliki kondisi curah hujan rata-rata mencapai 3-6 mm per tahun. Potensi air yang begitu besar tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan banyak genangan banjir di berbagai wilayah.



E. Klimatologi

Kabupaten Bandung memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 12°C sampai 24°C dengan kelembaban antara 75 % pada musim hujan dan 87 % pada musim kemarau.

F. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Bandung terdiri atas kawasan lindung, kawasan budidaya pertanian, non pertanian, dan kawasan lainnya. Penggunaan lahan di kawasan lindung meliputi belukar, danau/waduk, hutan, rawa, semak, dan sungai. Sedangkan kawasan budidaya pertanian meliputi kebun campur, perkebunan, sawah, ladang, dan tegal. Besaran penggunaan lahan setiap lahan disajikan dalam table 2.2.

TABEL 2.2
PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING TAHUN 2011

No	Uraian Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)
A	Kawasan lindung	59.620,61	33,83
1	Belukar	17.694,40	10,04
2	Danau/ waduk	357,38	0,20
3	Hutan	37.291,00	21,16
4	Rawa	12,74	0,01
5	Semak	3.821,57	2,17
6	Sungai	443,51	0,25
B	Kawasan budidaya pertanian	93.797,73	53,22
1	Kebun campur	8.170,97	4,64
2	Perkebunan/ kebun	25.709,88	14,59
3	Sawah	37.851,73	21,48
4	Sawah tadah hujan	10,96	0,01
5	Tegal/ ladang	22.054,19	12,51
C	Kawasan budidaya non pertanian	21.928,32	12,44
1	Bandara/jalan/jalan ka/stasiun/terminal	3.664,72	2,08
2	Industri/tambang	1.446,32	0,82
3	Institusi/kantor	339,62	0,19
4	Lapangan golf/stadion/lapangan/taman	167,50	0,10
5	Perumahan/komplek permukiman/pasar/pertokoan	16.310,17	9,25
D	Lainnya	892,00	0,51
	Total	176.238,67	100,00

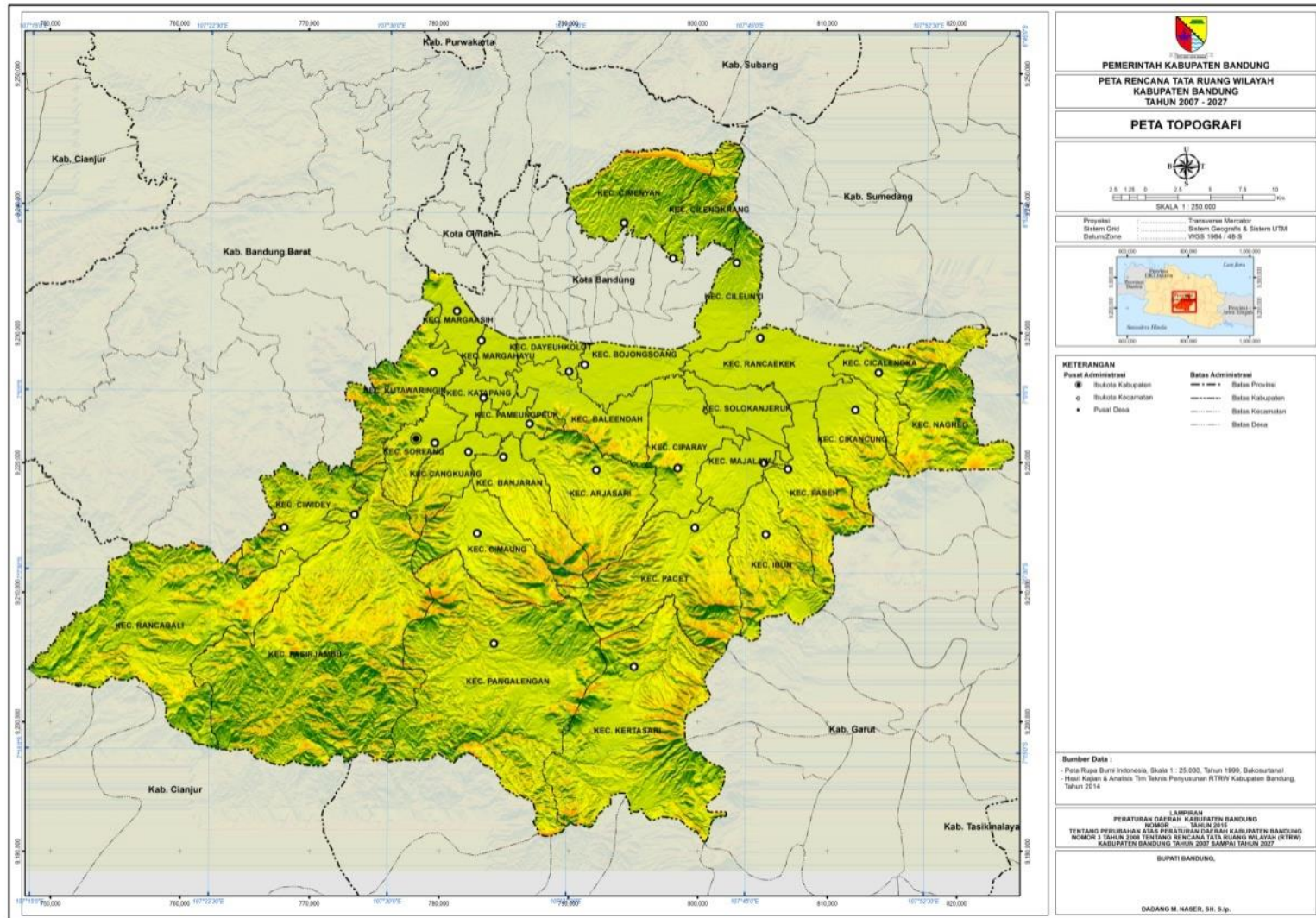
Sumber: Hasil Olahan Citra Satelit Tahun 2011, Bappeda

Sebagian besar lahan Kabupaten Bandung, yaitu seluas 53,22% dari luas keseluruhan 176.238,67 Ha berfungsi sebagai kawasan budidaya pertanian. Adapun sisanya yaitu 33,83% berupa kawasan

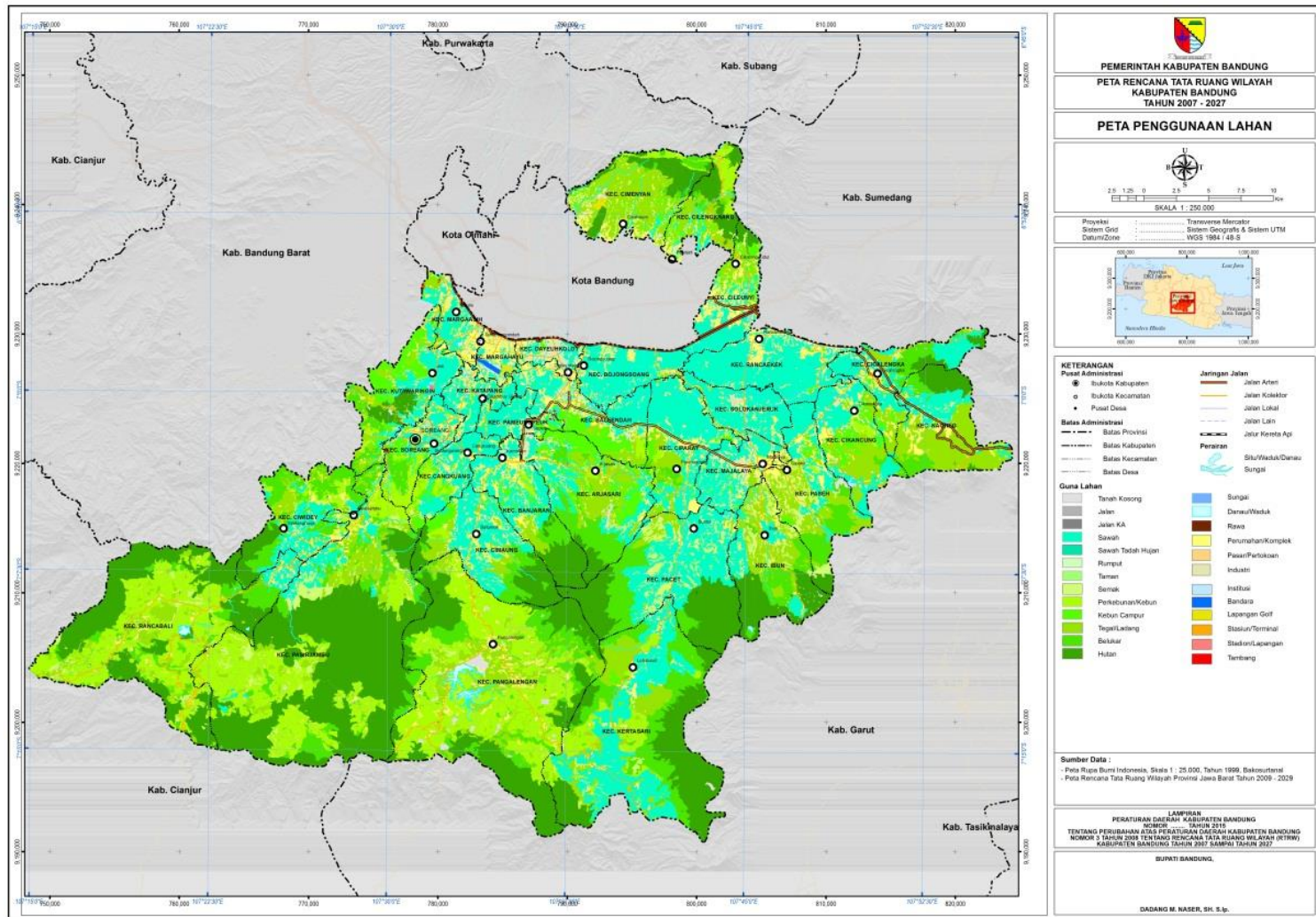


lindung, 12,44% berupa kawasan budidaya non pertanian, dan 0,51% berupa kawasan lainnya. Persentase ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung masih berupa kawasan ruang terbuka, yang mana mampu menyerap air larian hujan yang mencapai 2.000-3.500 mm per tahun. Berdasarkan luas lahan terbuka yang ada di Kabupaten Bandung, baik yang berupa kawasan lindung maupun kawasan budidaya, tanah di Kabupaten Bandung memiliki kemampuan untuk menyerap air sebanyak 0,793-2,115 miliar meter kubik per tahun.

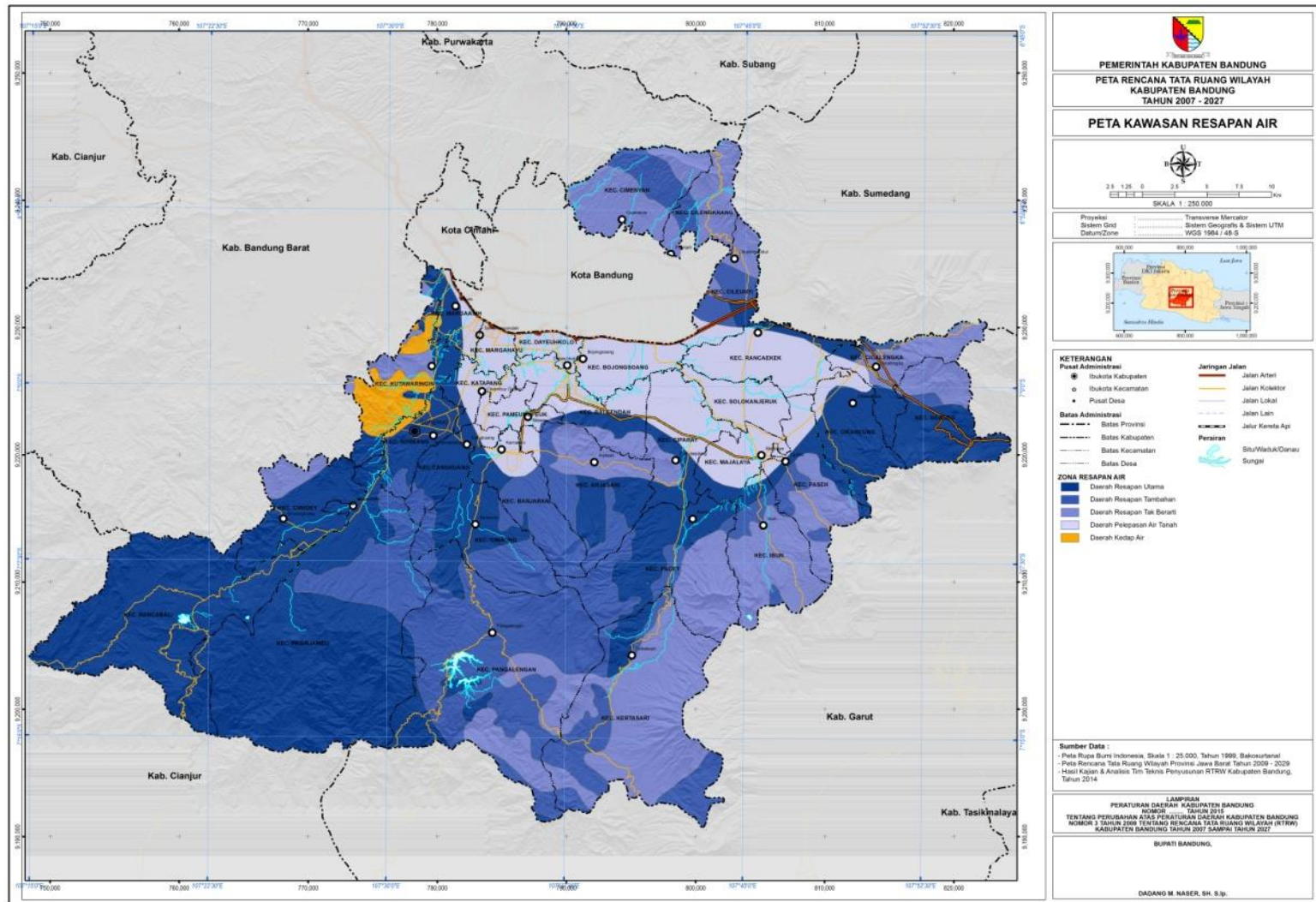
Potensi kawasan resapan air ini jika dikelola dengan baik dapat dioptimalkan sebagai salah satu cara untuk mengendalikan banjir pada saat puncak musim hujan tiba. Kawasan resapan air di Kabupaten Bandung dibagi menjadi 5 kategori, yaitu daerah resapan utama, daerah resapan tambahan, daerah resapan tak berarti, daerah pelepasan air tanah, dan daerah kedap air. Daerah resapan utama di Kabupaten Bandung terletak lebih banyak di bagian selatan, diantaranya di Kecamatan Rancabali, Kecamatan Pasirjambu, dan Kecamatan Ciwidey. Sementara, daerah kedap air di Kabupaten Bandung terletak di Kecamatan Kutawaringin. Daerah pelepasan air tanah di Kabupaten Bandung terletak di Kecamatan Margahayu, Kecamatan Katapang, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Solokanjeruk, dan Kecamatan Majalaya. Oleh sebab itu, pada musim penghujan, daerah-daerah yang berada di kecamatan tersebut seringkali mengalami masalah banjir karena merupakan kawasan pelepasan air tanah. Peta kawasan resapan air di Kabupaten Bandung secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar 2.5.



GAMBAR 2.3
PETA TOPOGRAFI KABUPATEN BANDUNG
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA



GAMBAR 2.4
PETA PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN BANDUNG
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA



GAMBAR 2.5
PETA KAWASAN RESAPAN AIR
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA



2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan data guna lahan yang telah dijelaskan sebelumnya, kawasan budidaya pertanian mendominasi lahan di Kabupaten Bandung dengan persentase luas diatas 50%. Lahan budidaya pertanian yang luas ini menjadi potensi yang luar biasa bagi Kabupaten Bandung dalam hal pengelolaan pertanian.

Selain dipengaruhi oleh penggunaan lahan, potensi pertanian juga dipengaruhi oleh topografi dari wilayah itu sendiri. Kabupaten Bandung memiliki topografi yang bervariasi yang menyebabkan komoditas unggulan pertanian dari masing-masing wilayah juga bervariasi dan memiliki kekhasannya sendiri.

Komoditas unggulan pertanian yang dimiliki Kabupaten Bandung tidak hanya diunggulkan di tingkat kabupaten, tetapi juga menembus tingkat provinsi dan nasional. Komoditas tersebut dapat dikategorikan sebagai komoditas khas Kabupaten Bandung, dimana kekhasan tersebut dapat dilihat dari perbedaan karakteristik komoditas yang dimiliki Kabupaten Bandung dengan daerah lainnya.

Perbedaan karakteristik komoditas ini diantaranya berdasarkan jenis komoditas, besaran produksi serta cita rasa yang dimilikinya. Komoditas pertanian khas Kabupaten Bandung yang menjadi unggulan diantaranya yaitu strawberry, kopi serta sapi perah dan produk turunannya.

Selain pertanian, sektor industri pengolahan pun memiliki kontribusi yang berarti bagi perekonomian di Kabupaten Bandung. Aktivitas industri pengolahan ini dilakukan di lahan kawasan budidaya non pertanian khususnya lahan industri. Pada tahun 2011 tercatat lahan kegiatan industri di Kabupaten Bandung mencapai luas 1.408,88 Ha dengan jumlah unit industri sebanyak 711. Industri tersebut meliputi industri besar, menengah, dan kecil yang didominasi industri tekstil dan produk turunannya.

Adapun potensi pengembangan wilayah yang dikembangkan saat ini antara lain:

1) Kawasan Agropolitan Ciwidey.



Kawasan Agropolitan Ciwidey meliputi 3 Kecamatan yaitu, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Rancabali yang biasa disebut "Kawasan Pacira". Secara umum kawasan Pacira memiliki banyak potensi pertanian dan peternakan. Untuk potensi pertanian terdapat tanaman pangan dan hortikultura, sedangkan potensi peternakan terdapat sapi perah.

Jenis komoditi unggulan yang paling banyak di wilayah Pacira untuk tingkat desa yaitu sapi perah tersebar di 19 desa, padi sawah tersebar di 18 desa, buncis, tomat dan cabe tersebar di 11 desa, alpukat dan pisang tersebar di 11



desa, teh rakyat tersebar di 9 desa, kopi tersebar di 7 desa, dan strawberry tersebar di 6 desa.

2) Kawasan Agropolitan Pangalengan.

Mengacu pada masterplan agropolitan Kecamatan Pangalengan 2006-2010 telah ditetapkan tiga komoditas unggulan untuk sektor pertanian, antara lain jagung, kentang dan kubis. Meskipun saat ini belum ada kajian terbaru mengenai potensi komoditas agropolitan, akan tetapi mengingat hasil pengamatan lapangan menunjukkan kondisi yang tidak jauh berbeda, maka pengembangan komoditas jagung, kentang dan kubis tetap perlu menjadi salah satu fokus pengembangan.

Selain produk sayuran, Pangalengan memiliki beberapa potensi di sektor perkebunan dan peternakan, yang meliputi:

- Perkebunan teh, baik milik swasta, negara, maupun perkebunan rakyat.
- Perkebunan kopi (sebagian besar milik masyarakat), dan
- Peternakan, dengan adanya industri makanan olahan seperti industri pembuatan dodol, karamel, kerupuk susu, dan sebagainya.



3) Panas Bumi.

Kabupaten Bandung memiliki potensi energi panas bumi sebesar 2.711 megawatt (mW). Dari jumlah tersebut, yang sudah termanfaatkan (ter-install) mencapai ± 697 mW masing-masing di wilayah Kamojang, Wayang Windu, Darajat, Patuha, dan Area Cibuni.

Energi yang berasal dari Kabupaten Bandung sudah mampu mensuplai kebutuhan energi listrik Jawa-Madura-Bali dan ini akan terus berkembang dengan adanya perluasan di area Kamojang, Wayang Windu, dan Patuha dengan total rencana perluasan mencapai sekitar 360 MW. Bahkan sejak bulan Mei 2012, telah dimulai pembangunan PLTP Patuha Unit I dengan kapasitas 55 MW.



Informasi detail mengenai potensi panas bumi di Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 2.3.



TABEL 2.3
POTENSI PANAS BUMI DI KABUPATEN BANDUNG

No	WKP Panas Bumi	Pemegang WKP	Lapangan PLTP	Pengembang	Potensi (MW)	Kapasitas Terpasang (MW)
1	Pangalengan	PT Geothermal Energy	Wayang Windu	Star Energy Geothermal Wayang Windu	400	227
			Patuha	PT Geo Dipa Energi	706	-
2	Kamojang-Darajat	PT Geothermal Energy	Kamojang	PT Geothermal Energy	855	200
				Chevron Geothermal Indonesia	610	270
3	Cibuni	PT Yala Tekno Geothermal	Cibuni	PT Tekno sarana Energi Geothermal	140	0
	Jumlah				2.711	697

Sumber: Dinas SDAPE Kabupaten Bandung Tahun 2013

4) Kawasan Pariwisata

Kabupaten Bandung banyak memiliki panorama pariwisata yang cukup indah dan alami di Kawasan Bandung Selatan serta merupakan tujuan utama kunjungan domestik dari Bandung maupun dari luar Bandung bahkan dari mancanegara, adapun kawasan pariwisata dimaksud terdiri dari:

- a. Kawasan Pariwisata Alam, meliputi: Gunung Patuha/Kawah Putih, Ranca Upas, Cimanggu, Walini, Situ Patengan, Kawah Cibuni, Curug Cisabuk (Kecamatan Rancabali), Gunung Puntang, arung jeram lamajang (Kecamatan Cimaung), Cibolang, Punceling, Situ Cileunca, Kawah Gunung Papandayan, Arung Jeram Palayangan (Kecamatan Pangalengan), Situ Cisanti (Kecamatan Kertasari), Kawah kamojang, Situ Ciarus (Kecamatan Ibum), Gunung Keneng (Kecamatan Ciwidey), Curug Cinulang (Kecamatan Cicalengka), Curug Eti (Kecamatan Paseh), Situ Sipatahunan (Kecamatan Baleendah), Oray Tapa (Kecamatan Cimenyan), Batukuda (Kecamatan Cileunyi), Curug Cilengkrang (Kecamatan Cilengkrang).
- b. Kawasan Pariwisata Budaya, meliputi: Gunung Padang (Kecamatan Ciwidey), Rumah adat Cikondang, Rumah Hitam (Kecamatan Pangalengan), Rumah Adat Bumi Alit (Kecamatan Banjaran), Situs Kampung Mahmud (Kecamatan



Margaasih), Situs Karang Gantung (Kecamatan Pacet), Situs Bojongmenje (Kecamatan Rancaekek), Sentra Seni Jelesong (Kecamatan Baleendah), Sentra Seni Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), Sentra Kerajinan (Kecamatan Pasirjambu), Sentra Wisata Seni Benjang (Kecamatan Cileunyi).

c. Kawasan Pariwisata Agro, meliputi:

– Agrowisata Sayuran:

Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan.

– Agrowisata Strawberry:

Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Ibum, Kecamatan Paseh.

– Agrowisata Teh:

Kertamanah,
Malabar (Kecamatan Pangalengan),
Rancabali (Kecamatan Rancabali),
Gambung (Kecamatan Pasirjambu).

– Agrowisata Herbal:

Kecamatan Rancabali,
Kecamatan Pasirjambu,
Kecamatan Ciwidey.
Kecamatan Pangalengan



d. Kawasan Pariwisata Terpadu dan Olahraga: Stadion Si Jalak Harupat (Kecamatan Kutawaringin), Arena Golf Margahayu/BIG (Kecamatan Margahayu), arena Dago Golf (Kecamatan Cimenyan), Kawasan Wisata Terpadu Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), serta Kawasan Pariwisata Terpadu Sekitar Situ Cileunca (Kecamatan Pangalengan).

5) Potensi Kawasan

Berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung, terdapat beberapa kawasan yang memiliki fungsi strategis, struktur dan pola ruang. Kawasan prioritas yang akan dikembangkan meliputi:

a. Kawasan Terpadu Kota Baru Tegalluar.

Kawasan Terpadu Kotabaru Tegalluar merupakan kawasan strategis dengan luas ±3.500 ha yang terdiri dari pengembangan kawasan pemukiman skala besar, kawasan industri, pengembangan waduk/danau buatan, dan kawasan rekreasi.

b. Kawasan Terpadu Permukiman dan Industri Margaasih.



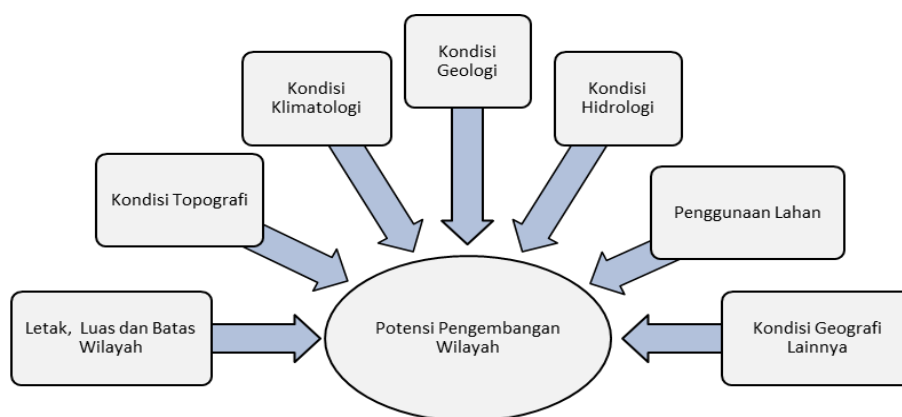
Kawasan Terpadu Permukiman dan Industri Margaasih merupakan kawasan strategis dengan luas ± 450 ha untuk pengembangan kawasan industri non-polutif.

c. Kawasan Terpadu Stadion Olahraga Si Jalak Harupat.

Pengembangan Kawasan Terpadu Stadion Olahraga Si Jalak Harupat diarahkan menjadi kawasan strategis yaitu sebagai kawasan pertumbuhan baru dengan peruntukan lahan kawasan pengembangan fasilitas umum olahraga dan rekreasi. Kawasan Terpadu Stadion Olahraga Si Jalak Harupat dipersiapkan oleh Provinsi Jawa Barat untuk menjadi tuan rumah PON ke-XIX tahun 2016. Kawasan ini memiliki luas ± 740 ha yang terdiri dari kawasan inti stadion (sport centre) dengan luas ± 130 ha dan kawasan pendukung dengan luas ± 610 ha terletak di Kecamatan Kutawaringin yang diarahkan untuk kegiatan jasa/perdagangan, perumahan, industri non polutif serta kegiatan komersial lainnya.



Kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan wilayah adalah sebagai berikut.



GAMBAR 2.6

KERANGKA PEMIKIRAN POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Sumber: Bappeda Kab. Bandung Tahun 2015

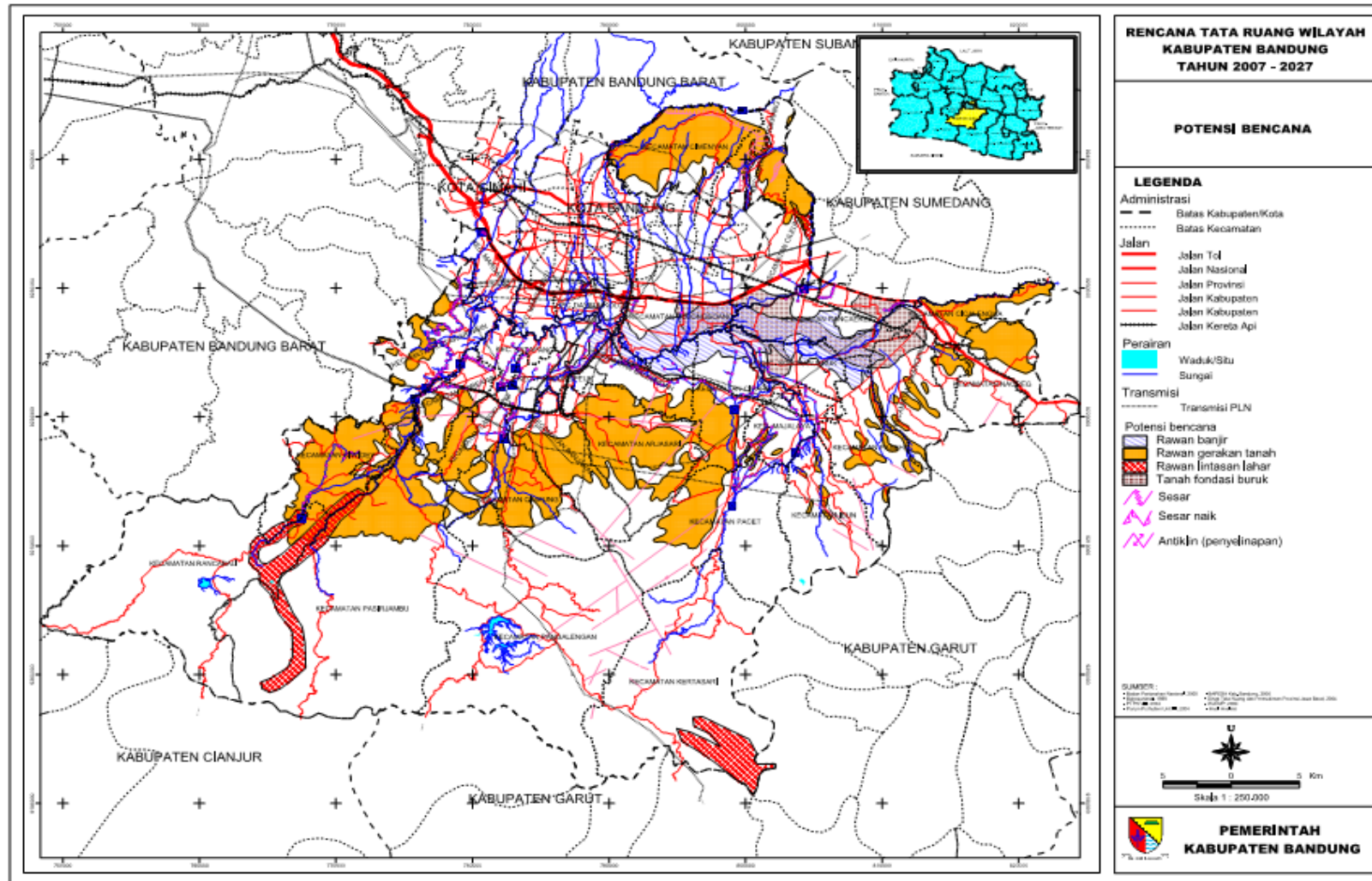
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Bandung merupakan dataran tinggi berbentuk cekungan di mana sungai Citarum sebagai sentral cekungan menjadi muara bagi anak-anak sungai dari utara, selatan, dan timur. Kondisi geografis tersebut menyebabkan tingkat kerentanan bencana alam di Kabupaten Bandung cukup tinggi.



Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2011, Kabupaten Bandung menduduki peringkat keempat tingkat rawan bencana diantara 494 kabupaten yang ada di Indonesia. Sedangkan di tingkat Provinsi Jawa Barat menempati ranking ketiga setelah Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Tingginya tingkat kerentanan bencana diukur dari berbagai faktor diantaranya jumlah kasus yang terjadi hingga potensi wilayahnya.

Informasi detail mengenai potensi bencana di Kabupaten Bandung ditunjukkan oleh Peta Potensi Bencana, Gambar 2.7 berikut.



GAMBAR 2.7
WILAYAH POTENSI BENCANA DI KABUPATEN BANDUNG
Sumber: Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bandung 2007-2027



Kondisi geografis Kabupaten Bandung yang berupa dataran tinggi berbentuk cekungan dikombinasikan dengan banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi baik dari pertanian dan daerah resapan menjadi permukiman maupun kawasan hutan menjadi lahan pertanian musiman menyebabkan tingginya sedimentasi dan bencana banjir. Selain itu, terganggunya sistem jaringan irigasi dan drainase juga berakibat pada timbulnya genangan dan banjir di beberapa titik lokasi terutama wilayah permukiman seperti banjir di Cieunteung-Baleendah, Dayeuhkolot serta jalan terusan Kopo.

Kondisi ini juga dipengaruhi oleh status daerah pada lokasi-lokasi tersebut yang merupakan daerah pelepasan air tanah, sehingga air tidak dapat terserap di daerah tersebut dan pada akhirnya menimbulkan banjir. Tingkat banjir dengan status tinggi terdapat di Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Bojogsoang, dan Kecamatan Baleendah. Peta kawasan rawan banjir di Kabupaten Bandung dapat dilihat lebih rinci pada gambar 2.8.

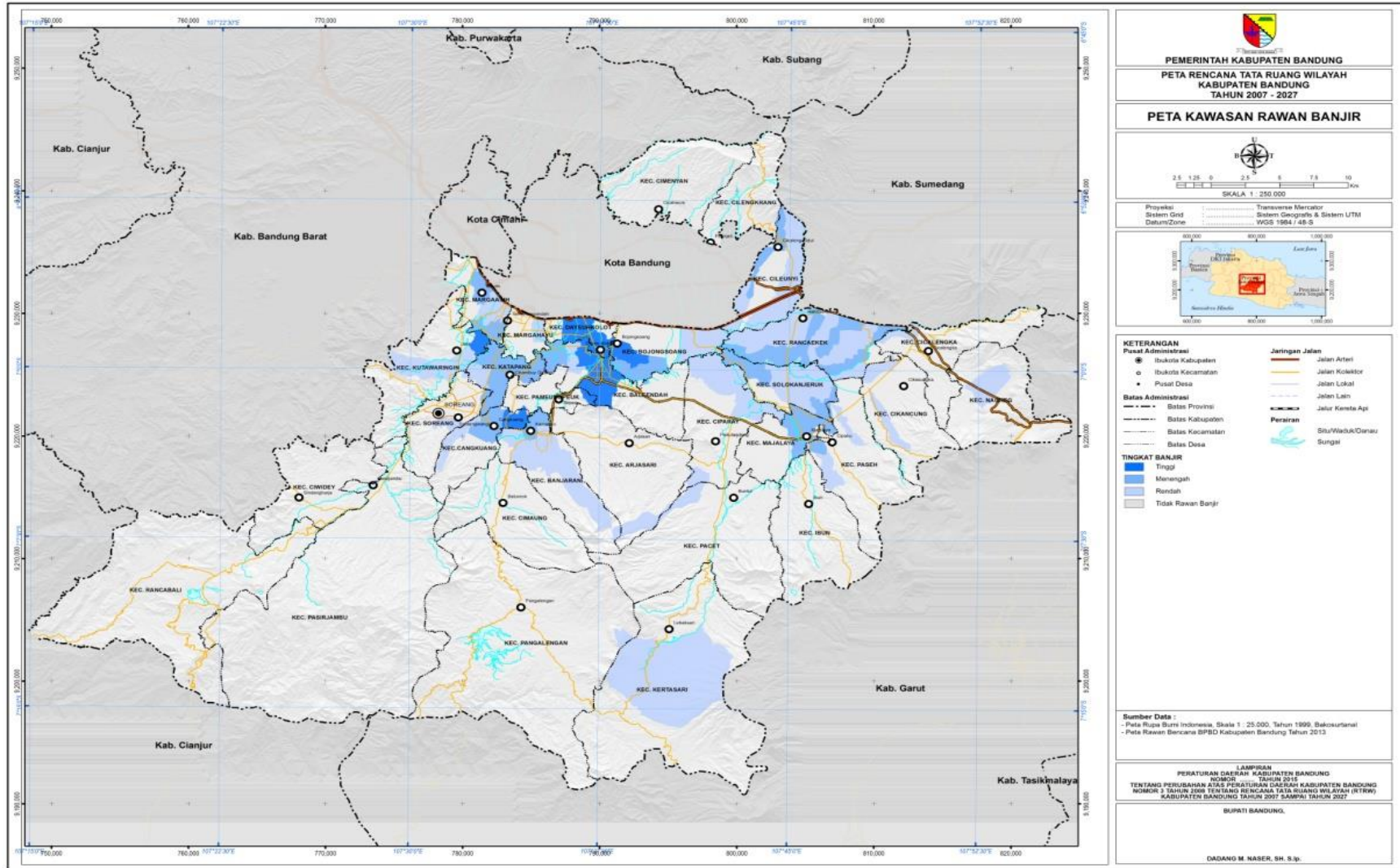
Selain itu, Kabupaten Bandung juga berisiko mengalami bencana letusan gunung berapi di bagian selatan dan timur Kabupaten Bandung. Namun zona bahaya gunung berapi ini masih berada pada zona I dan zona II, dimana bukan merupakan zona dengan tingkat kerentanan paling tinggi. Kecamatan yang berada di zona I bahaya gunung berapi adalah Kecamatan Kertasari, Kecamatan Ibum, dan Kecamatan Paseh. Sementara kecamatan yang berada di zona II adalah Kecamatan Kertasari dan sebagian kecil daerah di Kecamatan Ibum dan Kecamatan Paseh. Lokasi persebaran kawasan risiko gunung berapi dapat dilihat secara rinci pada gambar 2.9.

Selain risiko bencana banjir dan gunung berapi, Kabupaten Bandung juga rawan terhadap bencana gempa bumi. Tingkat risiko bencana ini cukup tinggi karena pada sebagian besar luas wilayah Kabupaten Bandung memiliki tingkat kerentanan gempa yang tinggi dan sebagian lainnya memiliki tingkat kerentanan menengah. Tingkat kerentanan gempa dengan status tinggi berada di Kecamatan Rancabali, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Cimaung, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Ibum, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Cicalengka, dan sebagian Kecamatan Rancaekek. Sementara kecamatan lainnya berada pada tingkat kerentanan gempa dengan status menengah. Secara rinci, persebaran kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada gambar 2.10.

Bencana lainnya yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bandung adalah risiko gerakan tanah mengingat topografi dan kontur wilayahnya yang berbukit-bukit dengan beda ketinggian dataran memiliki rentang yang cukup lebar. Kawasan rawan gerakan tanah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, dimulai dari bagian utara dengan tingkat kerentanan gerakan tanah sangat rendah, menuju bagian tengah dan selatan Kabupaten Bandung yang memiliki tingkat kerentanan rendah dan menengah, serta beberapa kawasan di bagian selatan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.

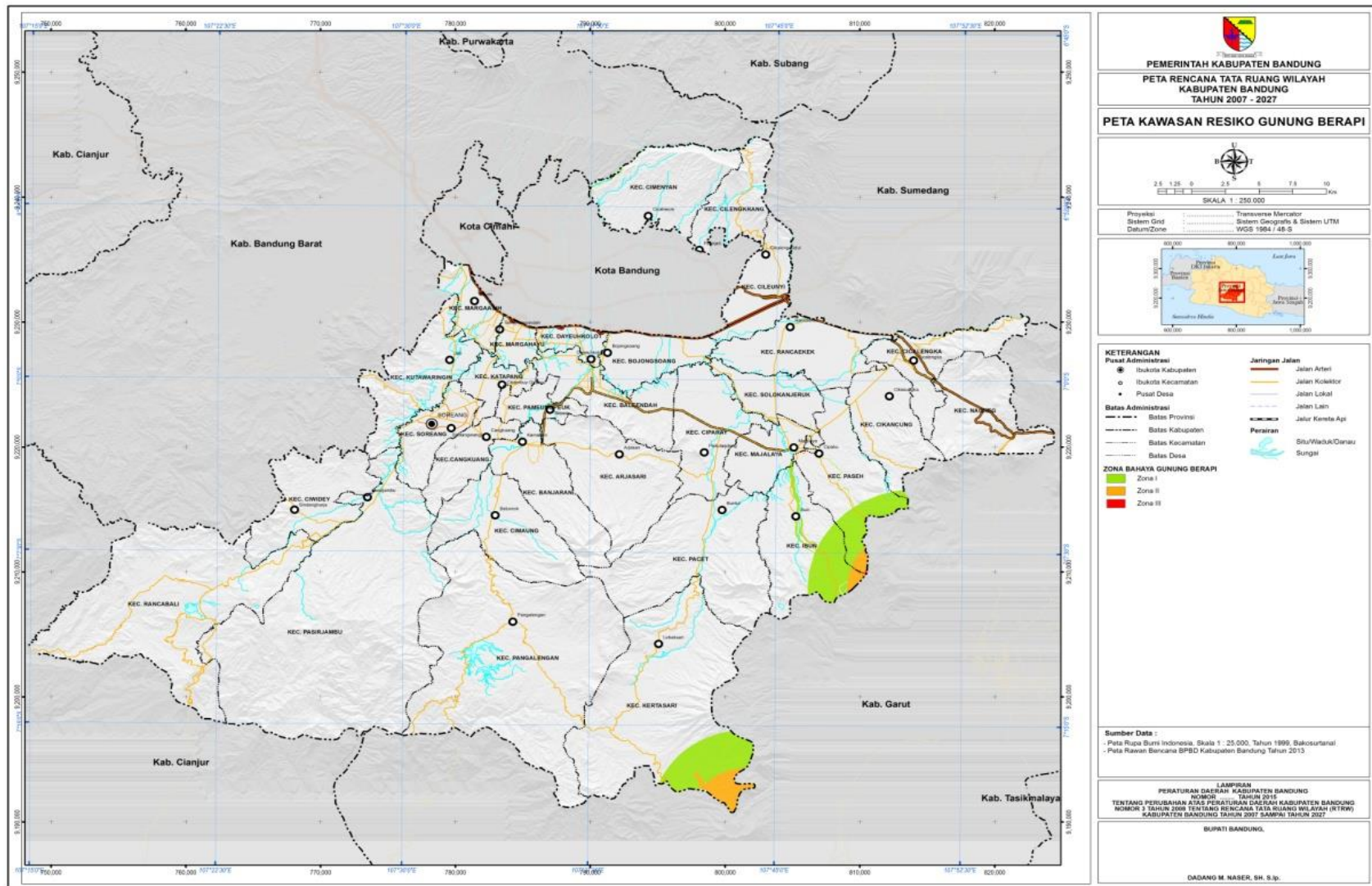


Daerah dengan tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi hanya terdapat di sebagian kecil daerah di Kecamatan Rancabali dan Kecamatan Pasirjambu. Sementara sebagian besar daerah lainnya memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah menengah hingga sangat rendah. Secara rinci, persebaran kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Gambar 2.11.



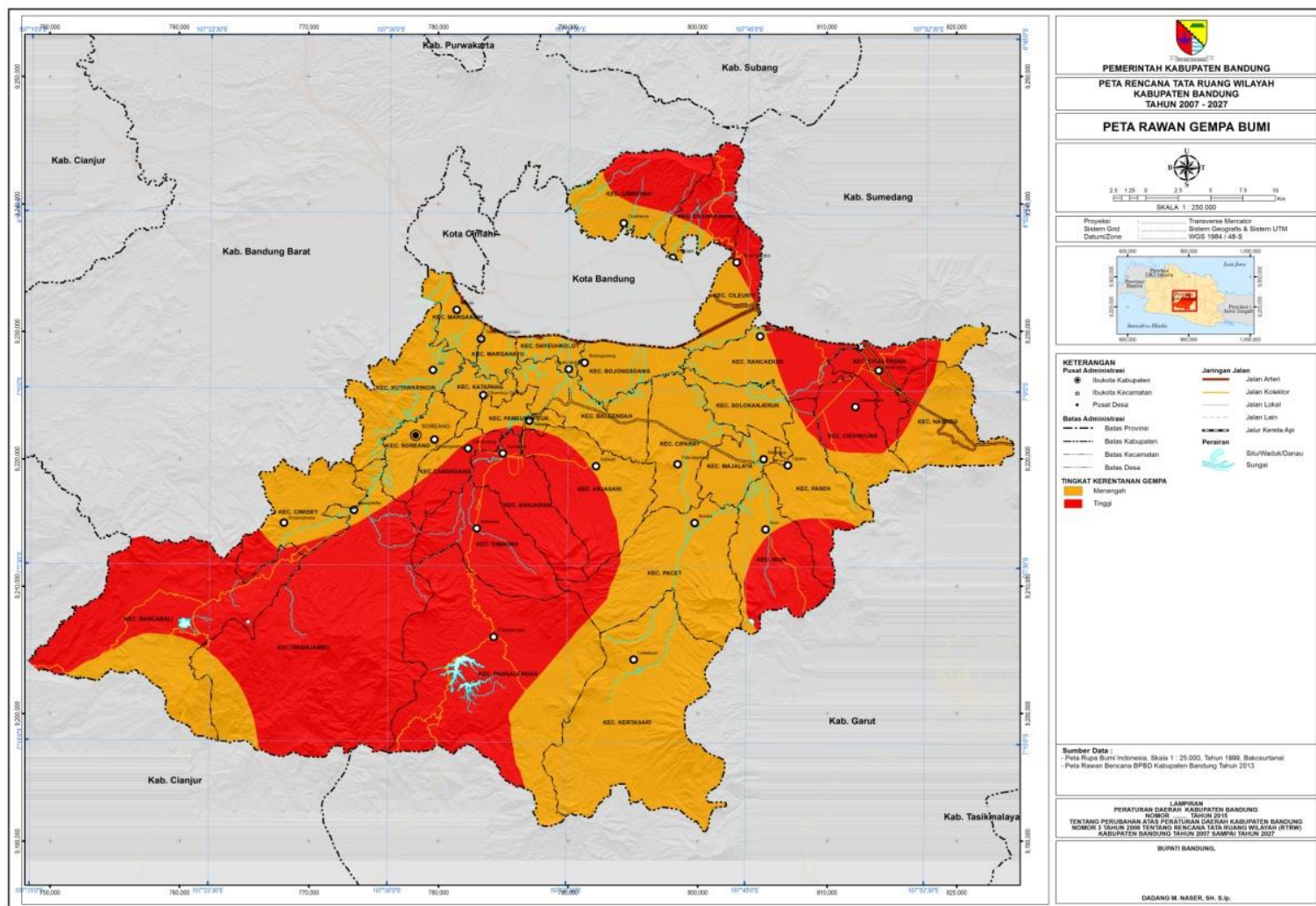
GAMBAR 2.8
PETA KAWASAN RAWAN BANJIR KABUPATEN BANDUNG

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA



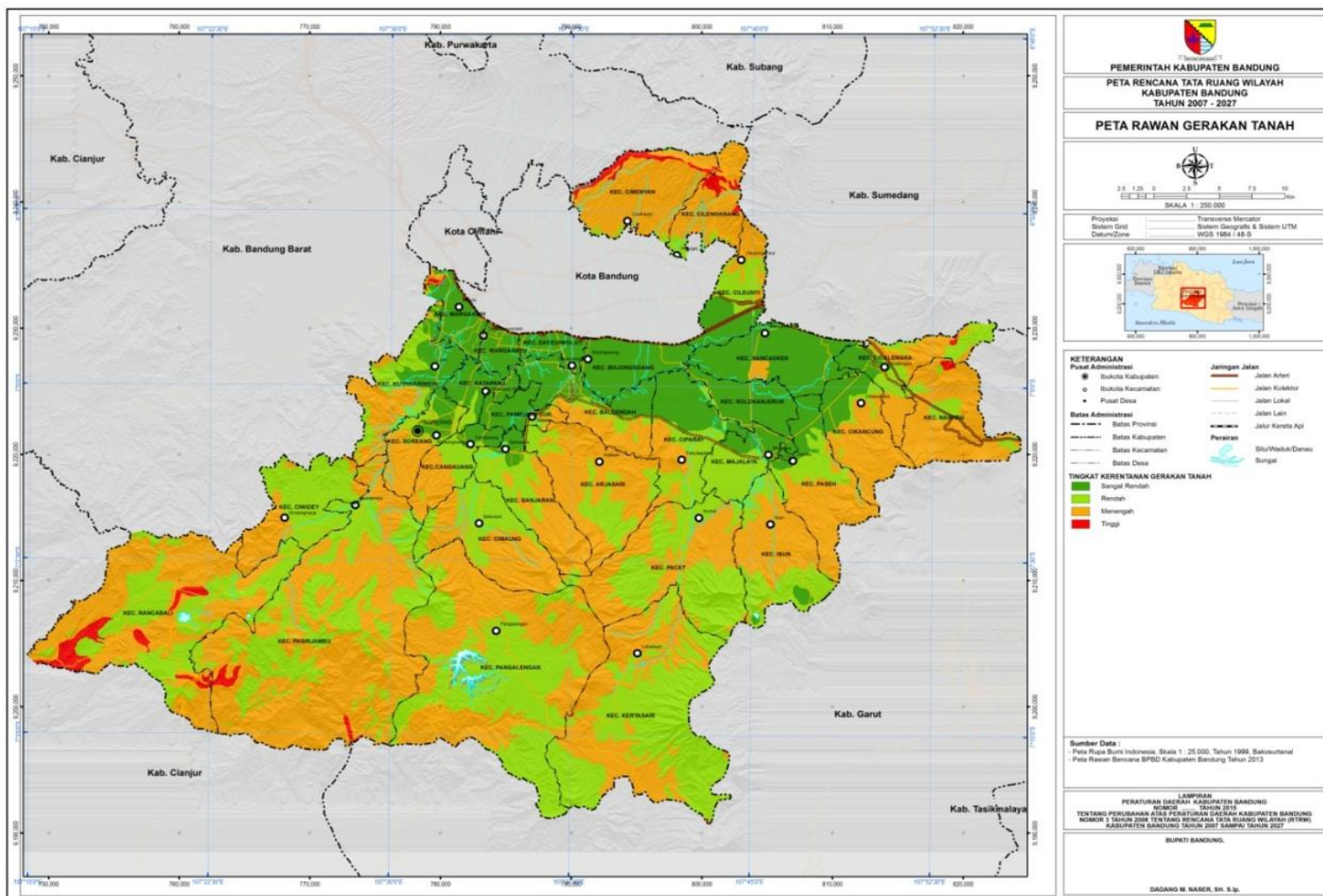
GAMBAR 2.9
PETA KAWASAN RISIKO GUNUNG BERAPI DI KABUPATEN BANDUNG

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA



GAMBAR 2.10
PETA RAWAN GEMPA BUMI DI KABUPATEN BANDUNG

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA

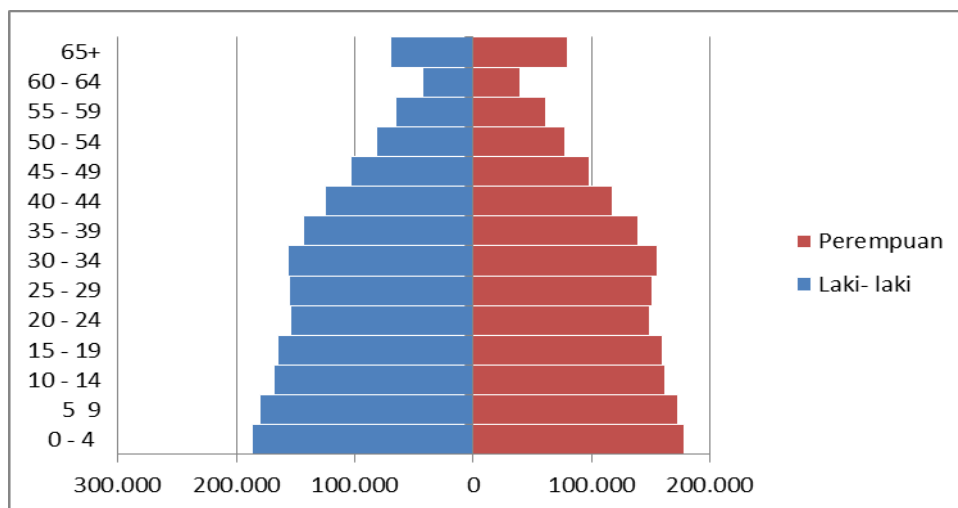


GAMBAR 2.11
PETA RAWAN GERAKAN TANAH DI KABUPATEN BANDUNG
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA

2.1.4. Demografi

Pada tahun 2015, populasi penduduk Kabupaten Bandung berjumlah 3.534.111 jiwa. Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.792.864 jiwa atau sekitar 50,73 %, sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.741.248 jiwa atau sekitar 49,27 %. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, populasi penduduk Kabupaten Bandung tahun 2015 meningkat 1,8 % dibandingkan tahun 2014.

Dari jumlah penduduk tersebut diatas, terdapat angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) sebesar 51,13 % pada tahun 2015, yang berarti setiap 100 penduduk produktif harus menanggung sekitar 51 orang penduduk tidak produktif. Angka ini menunjukkan peningkatan jumlah penduduk usia nonproduktif yang harus ditanggung dibandingkan tahun sebelumnya yang memiliki angka ketergantungan sebesar 48,59 %. Komposisi usia produktif menurut jenis kelamin pada tahun 2013 digambarkan dalam piramida penduduk berikut.

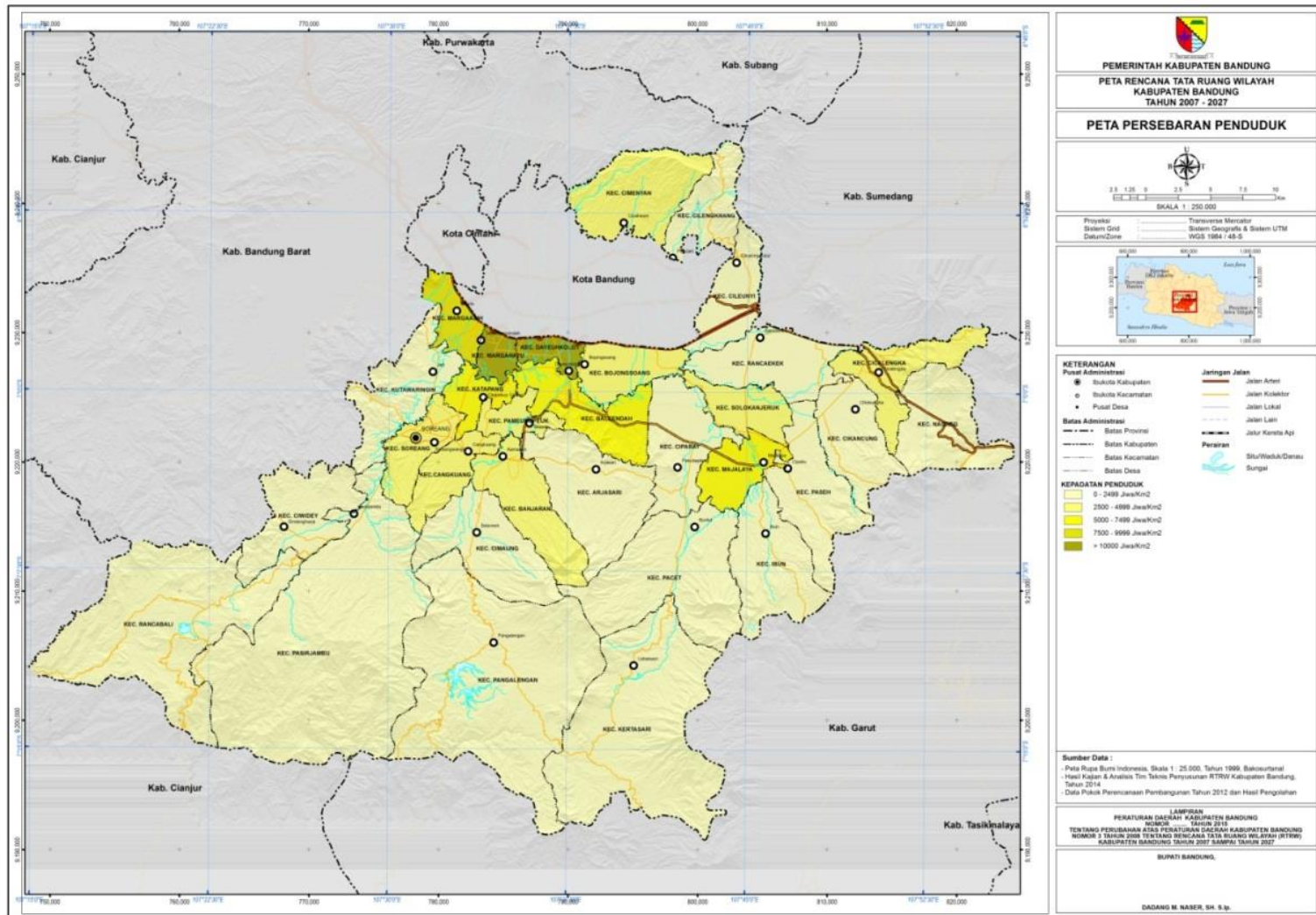


GAMBAR 2.12

PIRAMIDA PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015

Sumber: Angka Pembangunan Sosial Kabupaten Bandung 2015

Secara demografi, persebaran penduduk di Kabupaten Bandung cenderung terkonsentrasi di bagian utara dengan kepadatan penduduk tinggi dan menengah. Kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Bandung dibagi ke dalam 5 kategori, yaitu kepadatan penduduk 0-2499 jiwa/km², 2500-4999 jiwa/km², 5000-7499 jiwa/km², 7500-9999 jiwa/km², dan >10000 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Dayeuhkolot dengan kepadatan penduduk lebih dari 10.000 jiwa/km². Sementara sebagian besar kecamatan lainnya berada pada kategori kepadatan penduduk rendah dengan kepadatan penduduk 0-2499 jiwa/km². Peta persebaran penduduk Kabupaten Bandung dapat dilihat lebih rinci pada gambar 2.13.



GAMBAR 2.13
PETA PERSEBARAN PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG

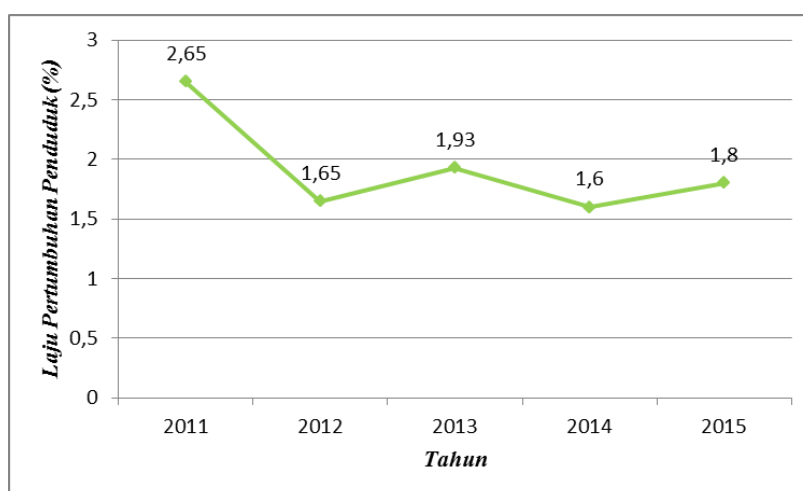
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA



Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bandung yang mencapai 176.238,67 Ha atau 1.762,39 km², kepadatan penduduk Kabupaten Bandung tahun 2015 yaitu sekitar 2.005 jiwa/Km². Dibandingkan dengan angka kepadatan penduduk lima tahun terakhir tampak terjadi peningkatan kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2011, kepadatan penduduk sekitar 1.872 jiwa/Km², dengan demikian dalam kurun lima tahun terakhir terjadi peningkatan angka kepadatan penduduk sekitar 7,1 %.



Peningkatan kepadatan penduduk secara langsung dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk. Tahun 2015 tercatat angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung yaitu 1,8 %. Jika ditinjau pertahun, meskipun terjadi fluktuasi pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, namun kecenderungan angka pertumbuhan penduduk masih menunjukkan trend positif.



GAMBAR 2.14

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KABUPATEN BANDUNG

Sumber: IPM Kab. Bandung 2013, APE, APS Kab. Bandung 2015, dan RPJMD Kab. Bandung 2010-2015



TABEL 2.4
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN

Tahun	Jenis Kelamin	Kelompok Umur (Tahun)			Jumlah	%	LPP (%)	Dependency Ratio (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
		Muda (0-14)	Produktif (15-64)	Tua (65+)					
2011	Laki-laki	515.226	1.100.846	66.136	1.682.208	50,98			
	Perempuan	489.499	1.053.590	74.691	1.617.780	49,02			
	Jumlah	1.004.725	2.154.436	140.827	3.299.988	100	2,64	53,17	1.872
	%	30,45	65,29	4,27					
2012	Laki-laki	510.482	1.122.776	70.277	1.703.535	50.84			
	Perempuan	488.140	1.080.000	79.373	1.647.513	49.16			
	Jumlah	998.622	2.202.776	149.650	3.351.048	100	1,55	52,13	1.901
	%	29.80	65.73	4, 47					
2013	Laki-laki	n/a	n/a	n/a	1.712.839	50,14			
	Perempuan	n/a	n/a	n/a	1.702.861	49,86			
	Jumlah	n/a	n/a	n/a	3.415.700	100	1,93	51,47	1.938
	%	n/a	n/a	n/a					
2014	Laki-laki	490.073	1.188.363	83.024	1.761.460	50,76			
	Perempuan	469.576	1.147.222	92.135	1.708.933	49,24			
	Jumlah	959.649	2.335.585	175.159	3.470.393	100	1,60	48,59	1.963
	%	27,65	67,30	5,05					
2015	Laki- Laki	534.003	1.189.512	69.349	1.792.864	50,73			
	Perempuan	512.389	1.148.918	79.941	1.741.248	49,27			
	Jumlah	1.046.392	2.338.430	149.290	3.534.111	100	1,8	51,13	2.005
	%	29,61	66,17	4,22					

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, DAPOKRENBANG Tahun 2012, dan Analisis Pembangunan Sosial Kabupaten Bandung 2014



2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

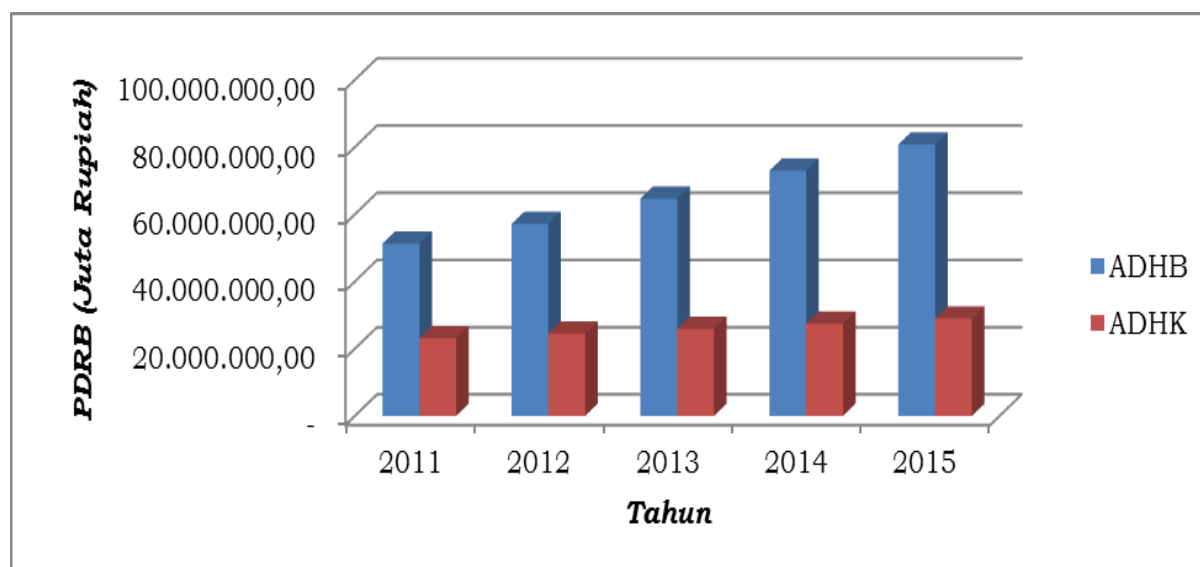
Penjelasan aspek kesejahteraan masyarakat mencakup gambaran dan analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung secara umum, yang dibagi secara spesifik kedalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Data PDRB merupakan data yang sangat penting dan krusial dalam menganalisis kondisi perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan PDRB yang bernilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor yang bergerak maju dan bersifat saling mempengaruhi (antara sektor satu dan lainnya). Data ini dapat menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah karena ditampilkan berdasarkan sektor (dan subsektor).

Selain itu, data PDRB juga dapat menunjukkan tingkat inflasi/deflasi yang terjadi di suatu daerah dengan membandingkan data PDRB berdasarkan harga konstan dan PDRB berdasarkan harga berlaku. PDRB perkapita penduduk juga dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah.



GAMBAR 2.15
PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN BANDUNG (JUTA RUPIAH)

Sumber: IPM Kab. Bandung 2013, APE, APS Kab. Bandung 2015, dan RPJMD Kab. Bandung 2010-2015



TABEL 2.5
NILAI DAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000

No	Sektor	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	Juta (Rp)	%
1	Pertanian	1.602.050,01	7,37	1.688.263,14	7,33	1.787.255,22	7,31	1.873.631,52	7,23	1.917.297,12	6,99	1.930.048,59	6,67
2	Pertambangan & Penggalian	282.922,47	1,30	291.397,20	1,27	286.309,40	1,17	274.199,65	1,06	267.532,18	0,98	273.631,52	0,95
3	Industri Pengolahan	13.173.587,93	60,61	13.857.488,88	60,18	14.605.911,06	59,75	15.340.747,17	59,23	16.115.189,76	58,74	16.811.418,81	58,10
4	Listrik, Gas & Air Bersih	396.026,30	1,82	428.521,96	1,86	482.230,40	1,97	521.716,11	2,01	450.910,38	1,64	476.322,25	1,65
5	Konstruksi	381.103,63	1,75	411.973,98	1,79	432.749,38	1,77	471.552,93	1,82	515.076,89	1,88	557.926,08	1,93
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	3.474.795,78	15,99	3.748.625,24	16,28	4.073.645,70	16,67	4.444.168,03	17,16	4.897.376,79	17,85	5.337.415,56	18,44
7	Pengangkutan & Komunikasi	892.448,05	4,11	960.418,42	4,17	1.036.304,54	4,24	1.103.080,04	4,26	1.192.305,82	4,35	1.302.939,43	4,50
8	Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	474.864,56	2,18	508.799,47	2,21	550.913,19	2,25	572.223,98	2,21	608.133,47	2,22	657.267,06	2,27
9	Jasa-Jasa	1.056.862,46	4,86	1.130.748,84	4,91	1.187.903,28	4,86	1.298.130,28	5,01	1.471.892,96	5,36	1.590.439,03	5,50
	PDRB ADHK	21.734.661,19	100	23.026.237,13	100	24.443.222,17	100	25.899.449,73	100	27.435.715,37	100	28.937.408,32	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Tahun 2016



TABEL 2.6
NILAI DAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015
ATAS DASAR HARGA BERLAKU

No	Sektor	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
1	Pertanian	3.471.661,92	7,53	3.978.936,25	7,76	4.518.784,28	7,92	5.171.118,06	8,00	5.672.739,51	7,78	6.096.809,16	7,55
2	Pertambangan & Penggalian	580.783,81	1,26	642.359,10	1,25	686.014,49	1,20	673.133,71	1,04	657.379,13	0,90	714.839,97	0,89
3	Industri Pengolahan	27.471.535,02	59,60	30.116.379,01	58,72	32.915.231,13	57,67	36.721.871,46	56,79	40.595.513,08	55,65	44.208.777,89	54,75
4	Listrik, Gas & Air Bersih	741.188,33	1,61	824.630,98	1,61	954.918,90	1,67	1.166.432,32	1,80	1.282.638,54	1,76	1.405.950,27	1,74
5	Konstruksi	764.990,68	1,66	852.508,61	1,66	947.236,94	1,66	1.143.674,37	1,77	1.294.611,80	1,77	1.447.356,56	1,79
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	7.796.200,55	16,91	8.920.233,69	17,39	10.436.027,24	18,29	12.123.022,26	18,75	14.326.868,98	19,64	16.615.938,52	20,58
7	Pengangkutan & Komunikasi	1.933.148,22	4,19	2.159.485,64	4,21	2.374.097,92	4,16	2.659.942,03	4,11	3.046.424,06	4,18	3.469.128,60	4,30
8	Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	898.354,49	1,95	990.504,14	1,93	1.123.606,62	1,97	1.217.604,86	1,88	1.337.369,83	1,83	1.471.507,11	1,82
9	Jasa-Jasa	2.434.375,72	5,28	2.806.725,22	5,47	3.115.489,15	5,46	3.783.648,37	5,85	4.731.802,73	6,49	5.322.478,89	6,59
	PDRB ADHB	46.092.238,74	100	51.291.762,64	100	57.071.406,67	100	64.660.447,44	100	72.945.347,59	100	80.752.786,97	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Tahun 2016



TABEL 2.7
PERKEMBANGAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010 - 2015

No.	Sektor	2011		2012		2013		2014		2015	
		Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	5,38	14,61	5,86	13,57	4,83	14,44	2,33	9,70	0,67	7,48
2	Pertambangan & Penggalian	3,00	10,60	-1,75	6,80	-4,23	-1,88	-2,43	-2,34	2,28	8,74
3	Industri Pengolahan	5,19	9,63	5,40	9,29	5,03	11,56	5,05	10,55	4,32	8,90
4	Listrik, Gas & Air Bersih	8,21	11,26	12,53	15,80	8,19	22,15	-13,57	9,96	5,64	9,61
5	Konstruksi	8,10	11,44	5,04	11,11	8,97	20,74	9,23	13,20	8,32	11,80
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	7,88	14,42	8,67	16,99	9,10	16,17	10,20	18,18	8,99	15,98
7	Pengangkutan & Komunikasi	7,62	11,71	7,90	9,94	6,44	12,04	8,09	14,53	9,28	13,88
8	Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	7,15	10,26	8,28	13,44	3,87	8,37	6,28	9,84	8,08	10,03
9	Jasa-Jasa	6,99	15,30	5,05	11,00	9,28	21,45	13,39	25,06	8,05	12,48
	PDRB	5,94	11,28	6,15	11,27	5,96	13,30	5,93	12,81	5,47	10,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Tahun 2016



TABEL 2.8
RATA – RATA PERTUMBUHAN KONTRIBUSI SEKTOR DAN PDRB ATAS DASAR
HARGA BERLAKU (Hb) dan HARGA KONSTAN (Hk) KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 - 2015

No.	Sektor	Pertumbuhan	
		Hk	Hb
		%	%
1	Pertanian	3,81	11,96
2	Pertambangan & Penggalian	-0,63	4,38
3	Industri Pengolahan	5,00	9,99
4	Listrik, Gas & Air Bersih	4,20	13,76
5	Konstruksi	7,93	13,66
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	8,97	16,35
7	Pengangkutan & Komunikasi	7,87	12,42
8	Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	6,73	10,39
9	Jasa-Jasa	8,55	17,06
	PDRB	5,89	11,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Tahun 2016

Kenaikan nilai PDRB Kabupaten Bandung yang telah dipaparkan pada Grafik 2.15 diatas secara tidak langsung ditentukan oleh adanya akumulasi input ekonomi dan perbaikan teknologi. Oleh karena itu beberapa upaya yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung kedepan antara lain dengan melakukan peningkatan pendapatan, peningkatan sektor riil yakni umkm, peningkatan iklim investasi, peningkatan pariwisata, khususnya berbasis kemasyarakatan.

Jika ditinjau persektor penyusun PDRB, pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, dalam kurun lima tahun terakhir tampak mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 8,55 persen pertahun. Diperkirakan, laju pertumbuhan sektor ini akan terus mengalami peningkatan seiring dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, perkembangan infrastruktur dan berkembangnya Kabupaten Bandung sebagai bagian dari Metropolitan Bandung Raya.

Meskipun sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran bukan merupakan sektor yang memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB, namun sektor ini merupakan sektor yang memiliki Laju Pertumbuhan paling tinggi, bahkan lebih tinggi dibanding Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung. Jika dilihat lebih dalam, laju pertumbuhan sektor perdagangan terutama didorong oleh laju pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran, yang terus meningkat dari tahun 2012 – 2014.

B. Laju Inflasi

Secara garis besar, laju inflasi di Kabupaten Bandung cenderung berfluktuasi, terutama dalam selang tahun 2011 sampai dengan 2013. Adanya fluktuasi ini diduga diakibatkan oleh adanya kenaikan harga bahan bakar minyak serta kenaikan harga komoditas makanan dan bahan makanan. Kendati demikian, mulai tahun 2013 laju inflasi PDRB Kabupaten Bandung semakin berkurang yang mana hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam perekonomian Kabupaten Bandung.

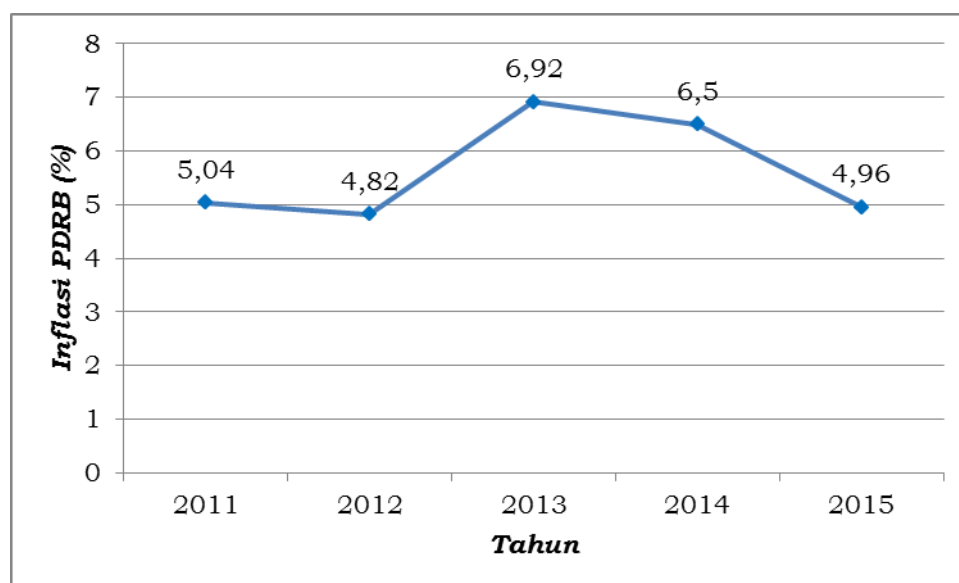


Ditinjau berdasarkan sektor penyumbang PDRB, dalam lima tahun terakhir rata-rata angka laju inflasi tertinggi terjadi pada sektor pertanian (Kecuali tahun 2012, terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran). Tingginya laju inflasi sektor pertanian merupakan dampak dari kenaikan harga beras seiring dengan semakin berkurangnya produksi padi.

TABEL 2.9
LAJU INFLASI PRODUK DOMESTIK BRUTO KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 - 2015

NO	SEKTOR	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian	8,76	7,28	9,06	7,30	6,77
2	Pertambangan & Penggalian	7,39	8,69	2,46	0,09	6,32
3	Industri Pengolahan	4,22	3,69	6,22	5,24	4,39
4	Listrik, Gas & Air Bersih	2,82	2,90	12,91	27,23	3,77
5	Konstruksi	3,09	5,78	10,80	3,63	3,21
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	6,06	7,66	6,48	7,24	6,42
7	Pengangkutan & Komunikasi	3,80	1,89	5,26	5,96	4,21
8	Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	2,90	4,77	4,33	3,35	1,80
9	Jasa-Jasa	7,76	5,66	11,13	10,30	4,10
	PDRB	5,04	4,82	6,92	6,50	4,96

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Tahun 2016



GAMBAR 2.16
LAJU INFLASI PDRB

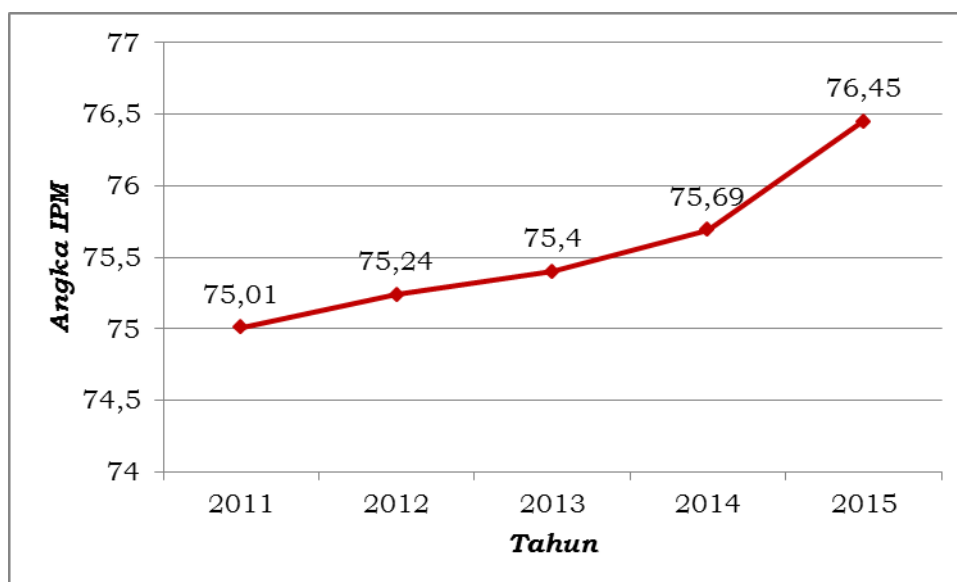
Sumber: BPS Kabupaten Bandung Tahun 2016

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Selain PDRB, untuk melihat kondisi pembangunan daerah dapat dianalisis melalui IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Dimana IPM ini dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk daerahnya. IPM ini meliputi tiga komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut adalah pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya

beli (*purchasing power parity*). Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat mencerminkan kondisi fisik manusia, sedangkan pendidikan dapat mencerminkan kondisi non fisik manusia.

Untuk mengetahui nilai IPM digunakan indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli sebagai acuan untuk mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Jika menggunakan perhitungan IPM dengan metode lama, nilai IPM Kabupaten Bandung mencapai angka 76,45, lebih tinggi 0,76 poin dari tahun 2014 yang mencapai 75,69. Ditinjau perkomponen penyusunnya, kenaikan nilai IPM metode lama Kabupaten Bandung terutama didukung oleh kenaikan nilai indeks pendidikan dan kesehatan. Khusus untuk indeks pendidikan, dalam kurun lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Hal ini salah satunya diduga diakibatkan adanya penduduk Kabupaten Bandung yang meneruskan pendidikannya di Kota Bandung. Kualitas pendidikan yang baik di Kota Bandung masih menjadi daya tarik bagi beberapa penduduk di Kabupaten Bandung untuk melanjutkan pendidikan di Kota Bandung. Sehingga peningkatan indeks pendidikan tercatat di Kota Bandung.



GAMBAR 2.17
PENCAPAIAN IPM KABUPATEN BANDUNG
DENGAN MENGGUNAKAN METODE LAMA

Sumber: IPM Kab. Bandung 2013, APE, APS Kab. Bandung 2015, dan RPJMD Kab. Bandung 2010-2015

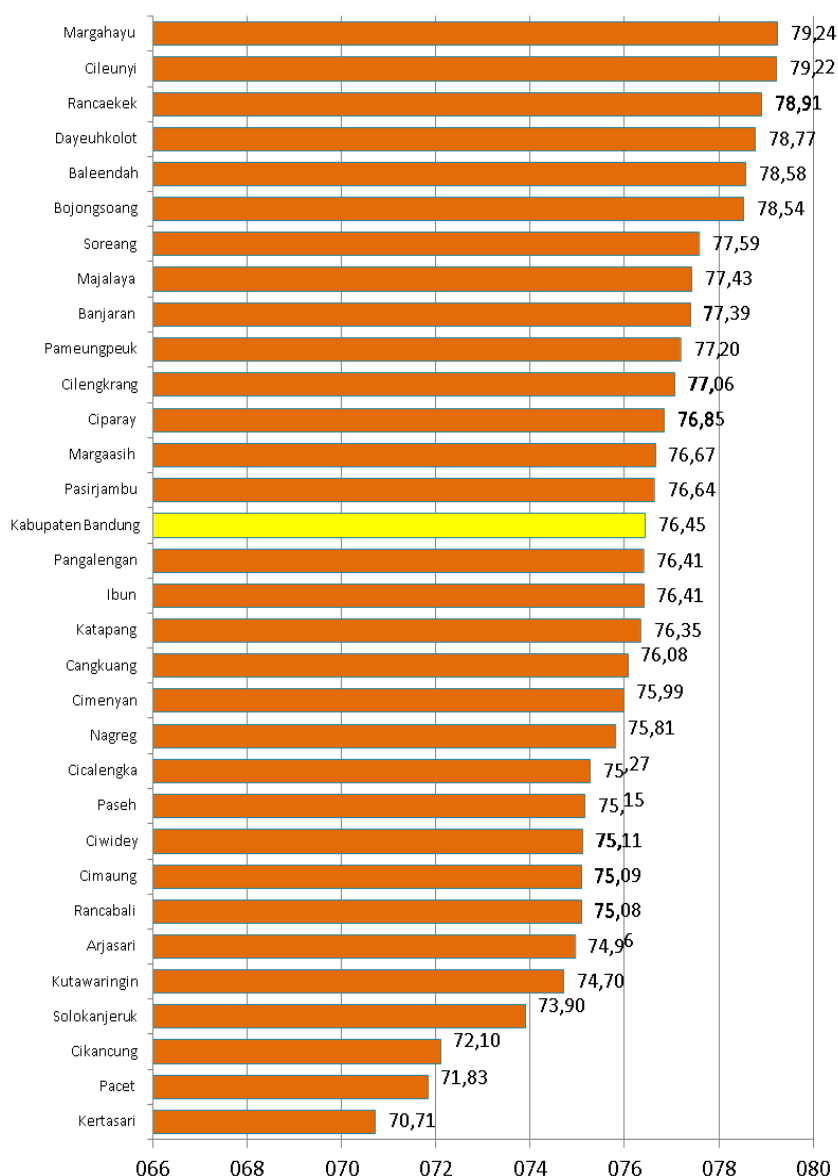
Ditinjau perkecamatan, masih terdapat tujuh belas kecamatan yang memiliki nilai IPM (metode lama) di bawah rata-rata IPM Kabupaten Bandung. Jika dipersentasekan, lebih dari lima puluh persen kecamatan di Kabupaten Bandung memiliki nilai IPM di bawah rata-rata. Rentang antara kecamatan dengan IPM tertinggi dengan kecamatan dengan IPM terendah cenderung tinggi, yang mana hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan wilayah, khususnya dalam pembangunan sosial di Kabupaten Bandung.

Pada tahun 2015 tiga kecamatan dengan nilai IPM terendah yaitu Kecamatan Kertasari, Pacet dan Cikancung. Adapun tiga kecamatan dengan nilai IPM tertinggi yaitu Kecamatan Margahayu, Cileunyi dan Rancaekek. Ditinjau berdasarkan aspek geografis, wilayah dengan IPM tinggi cenderung tersebar di wilayah perkotaan yang berbatasan



langsung dengan Kota Bandung, sedangkan wilayah dengan IPM rendah cenderung tersebar di wilayah perdesaan. Hal ini dapat dipahaminya, pada wilayah- wilayah perkotaan akses terhadap prasarana maupun sarana, baik itu sarana pendidikan, kesehatan maupun lapangan kerja cenderung lebih baik dibandingkan di perdesaan. Sehingga penduduk yang tinggal di area perkotaan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas kehidupannya.

Mengingat pembangunan dalam fokus kesejahteraan sosial ini berkorelasi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, maka intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk Kabupaten Bandung tidak terbatas melalui program- program sosial, tetapi juga perlu didukung peningkatan sarana dan prasarana terkait.

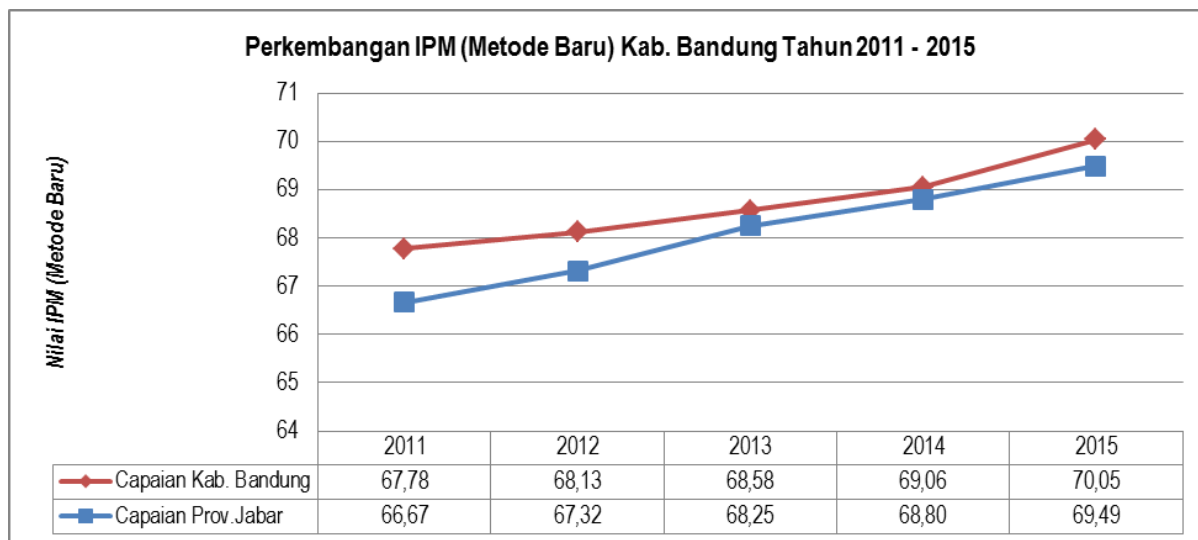


GAMBAR 2.18
SEBARAN NILAI IPM (METODE LAMA) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015

Sumber: APS Kabupaten Bandung, 2015



Adapun jika dihitung berdasarkan metode baru, nilai IPM Kabupaten Bandung pada tahun 2011 tercatat sebesar 67,78. Pada tahun 2015 nilai tersebut meningkat menjadi 70,05 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,85 %. Dengan demikian, baik menggunakan perhitungan IPM metode lama, maupun metode baru, nilai IPM Kabupaten Bandung dalam lima tahun terakhir meningkat secara signifikan. Dibandingkan terhadap perkembangan capaian IPM Provinsi Jawa Barat, angka capaian Kabupaten Bandung cenderung lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Jawa Barat. Informasi mengenai perkembangan IPM Kabupaten Bandung dengan menggunakan perhitungan metode baru disajikan pada Gambar 2.19.



GAMBAR 2.19
PERKEMBANGAN IPM (METODE BARU) KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 - 2015

Sumber: APS Kabupaten Bandung, 2015

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai pembangunan Kabupaten Bandung, berikut disajikan kondisi capaian indikator makro ekonomi dan sosial di Kabupaten Bandung tahun 2013-2014.

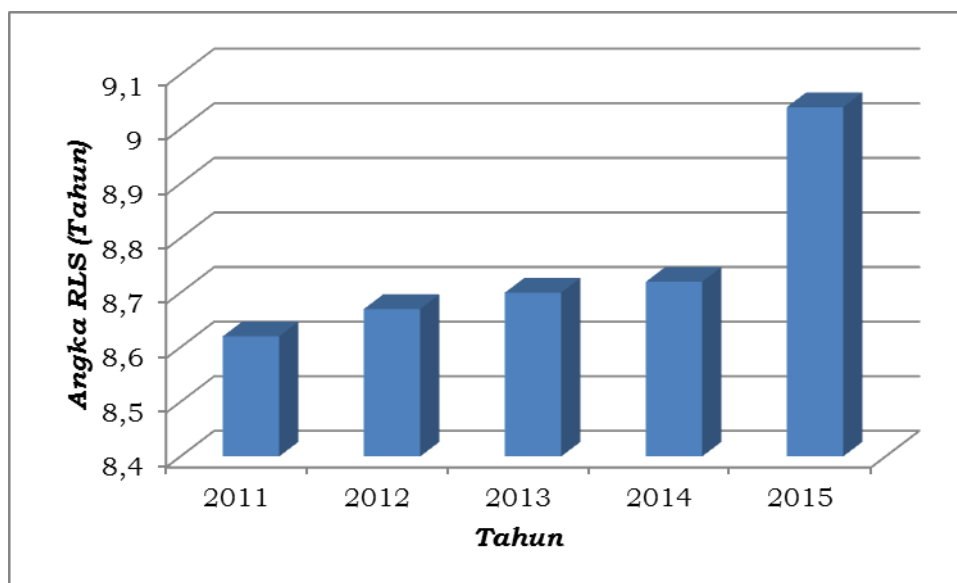
TABEL 2.10
INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN SOSIAL PEMBANGUNAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013-2015

No.	Indikator	Tahun		+/-
		2014	2015	
A.	Indikator Makro Sosial			
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.470.393	3.534.112	63.719,00
2	LPP (%)	1,60	1,8	0,20
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,65		
4	IPM (Metode Lama)	75,69	76,45	0,76
5	IPM (Metode Baru)	69,06	70,05	0,99
6	RLS (th)	8,72	9,04	0,32
7	AMH (%)	98,86	99,3	0,44



No.	Indikator	Tahun		+/-
		2014	2015	
8	AHH (th)	70,54	71,03	0,49
9	Indeks Pendidikan	85,28	86,29	1,01
10	Indeks Kesehatan	75,90	76,72	0,82
11	Angka Ketergantungan	58,59	51,13	-7,46
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,16		
13	Tingkat Kesempatan Kerja	91,52		
14	Tingkat Pengangguran	8,48		
B. Indikator Makro Ekonomi				
1	LPE (%)	5,92	5,47	-0,45
2	Inflasi PDRB (%)	6,50	4,96	-1,54
3	PDRB ADHB (juta rupiah)	72.945.347,60	80.752.787,97	7.807.440,37
4	PDRB ADHK (juta rupiah)	27.435.715,40	28.937.408,32	1.501.692,92
5	PDRB/KAP (ADHB)	21.019,36	22,84952711	-20.996,51
6	PDRB/KAP (ADHK)	7.905,65	8,188028087	-7.897,46
7	Daya Beli (ribuan rupiah)	645.110	647.090	1.980
8	Indeks Daya Beli	65,89	66,34	0,45

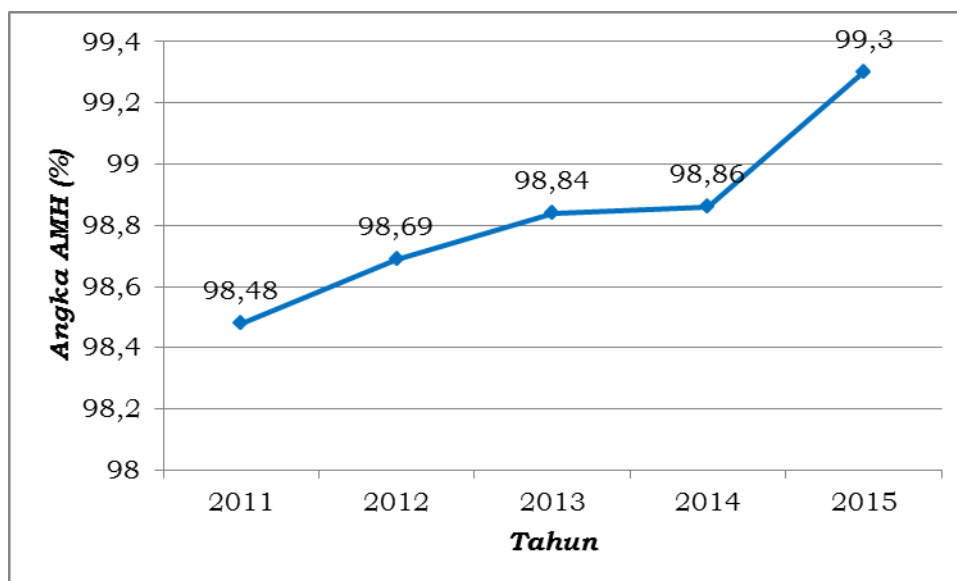
Sumber: BPS Kabupaten Bandung Tahun 2016



GAMBAR 2.20

RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI KABUPATEN BANDUNG

Sumber: IPM Kab. Bandung 2013, APE, APS Kab. Bandung 2015, dan RPJMD Kab. Bandung 2010-2015



GAMBAR 2.21

ANGKA MELEK HURUF DI KABUPATEN BANDUNG

Sumber: IPM Kab. Bandung 2013, APE, APS Kab. Bandung 2015, dan RPJMD Kab. Bandung 2010-2015

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Slogan *think globally, act locally* haruslah menjadi kebiasaan sehari-hari dan tidak hanya slogan belaka.



Sementara dewasa ini para pemuda cenderung melupakan nilai-nilai kesundaan yang menjadi jati diri warga Jawa Barat dan khususnya warga Kabupaten Bandung. Nilai-nilai kesundaan ini tidak hanya meliputi pemahaman terhadap nilai budaya dan kesenian Sunda serta penggunaan bahasa daerah Sunda.

Namun upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Bandung seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong-royong, serta penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Kebersamaan dan kemandirian merupakan salah satu nilai yang dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Sementara itu bidang olahraga dinilai perlu mendapat perhatian khusus juga. Kebiasaan berolahraga akan menghasilkan masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani, dimana selain menyehatkan tubuh kegiatan berolahraga juga dapat menyegarkan pikiran. Namun kenyataannya, anak muda masa kini cenderung tidak memprioritaskan olahraga.

Hal ini dapat menimbulkan masalah di masa yang akan datang dimana generasi muda yang akan menjadi ujung tombak pembangunan akan menjadi generasi yang lemah. Oleh



karenanya diperlukan upaya lebih dari pemerintah untuk memasyarakatkan kembali kebiasaan olahraga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum dapat dilihat dari dua fokus layanan yaitu layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Fokus layanan urusan wajib meliputi aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum, penataan ruang, dan perhubungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakannya secara memadai.

A. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor utama dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya untuk pembangunan daerah. Pelayanan pendidikan pemerintah daerah dinilai melalui ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memadai.

Indikator keberhasilan pelayanan pemerintah di bidang pendidikan meliputi:

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung perbandingan terhadap jumlah siswa, baik pada level SD, SLTP, maupun SMA/ Sederajat terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada masing- masing tingkat pendidikan. Untuk tingkat pendidikan SD/ Sederajat, digunakan rentang usia 7 – 12 tahun. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SLTP/ Sederajat, digunakan rentang usia 13 – 15 tahun. Adapun untuk tingkat pendidikan SMA/ Sederajat digunakan rentang usia 16 – 18 tahun.

Secara garis besar APS dikelompokkan ke dalam Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM menunjukkan rasio antara jumlah siswa dalam rentang usia pada jenjang pendidikan tertentu terhadap total jumlah penduduk dalam rentang usia tersebut. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan rasio antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu terhadap total jumlah penduduk dalam rentang usia untuk jenjang pendidikan tertentu. Sehingga berbeda dengan APM, dalam penghitungan APK, jumlah siswa yang dihitung merupakan jumlah total siswa tanpa memperhitungkan rentang usia sehingga besar kemungkinan APK memiliki nilai lebih besar dari 100 %.

Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Namun naiknya persentase jumlah murid tidak dapat langsung diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan sarana sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.



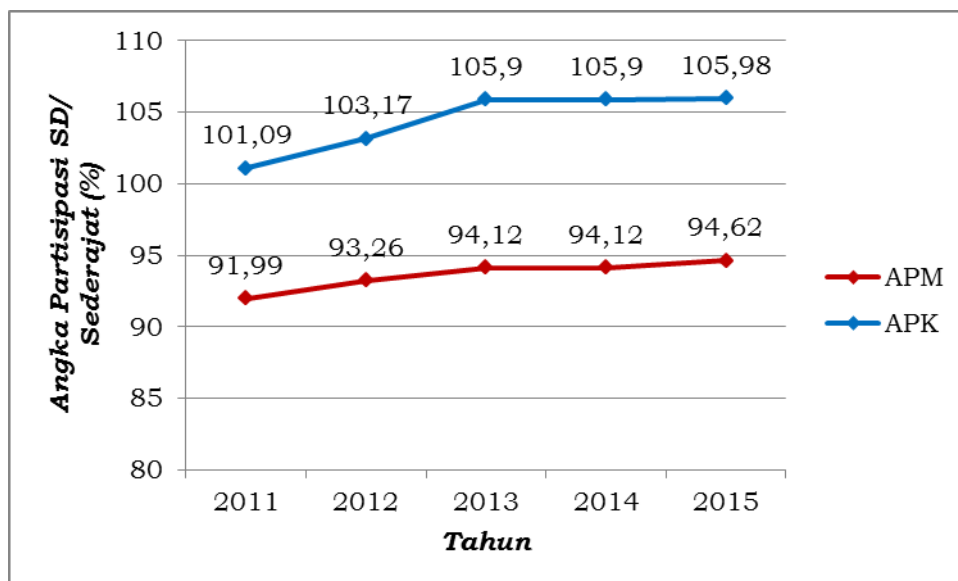
Secara garis besar Angka Partisipasi Sekolah tingkat SD/ Sederajat di Kabupaten Bandung sudah tergolong baik dengan nilai APM dan APK di atas 90 %. Adapun saat ini yang masih dihadapkan pada persoalan yaitu angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah, khususnya jenjang SMA/ Sederajat. Tahun 2015, nilai APM jenjang SMA/ Sederajat di Kabupaten Bandung baru berkisar 42,57 %, sedangkan nilai APK bernilai 62,72 %. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah jenjang SMA/ Sederajat dapat diakibatkan oleh rendahnya angka melanjutkan ke jenjang sekolah menengah, yang mana hal ini diduga diakibatkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.

Gambaran lengkap mengenai APS di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut.

TABEL 2.11
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010 – 2014

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI							
1.1	Jumlah murid usia 7 – 12 tahun	Orang	397.220	407.688	395.113	394.941	389.681	
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7 – 12 tahun	Orang	402.601	409.988	397.093	396.162	389.893	
1.3	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	Indeks	98,66	99,44	99,50	99,69	99,95	
2	SMP/ MTs							
2.1	Jumlah murid usia 13 – 15 tahun	Orang	124.500	141.700	160.133	167.954	177.374	
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13 – 15 tahun	Orang	190.535	194.100	168.281	174.344	182.833	
2.3	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	Indeks	65,34	73,00	95,16	96,33	97,01	
3	SMA/MA							
3.1	Jumlah murid usia 16 – 18 tahun	Orang	53.240	58.950	63.798	70.768	73.839	
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16 – 18 tahun	Orang	171.552	175.077	186.171	190.634	189.766	
3.3	Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA	Indeks	31,03	33,67	34,27	37,12	38,91	

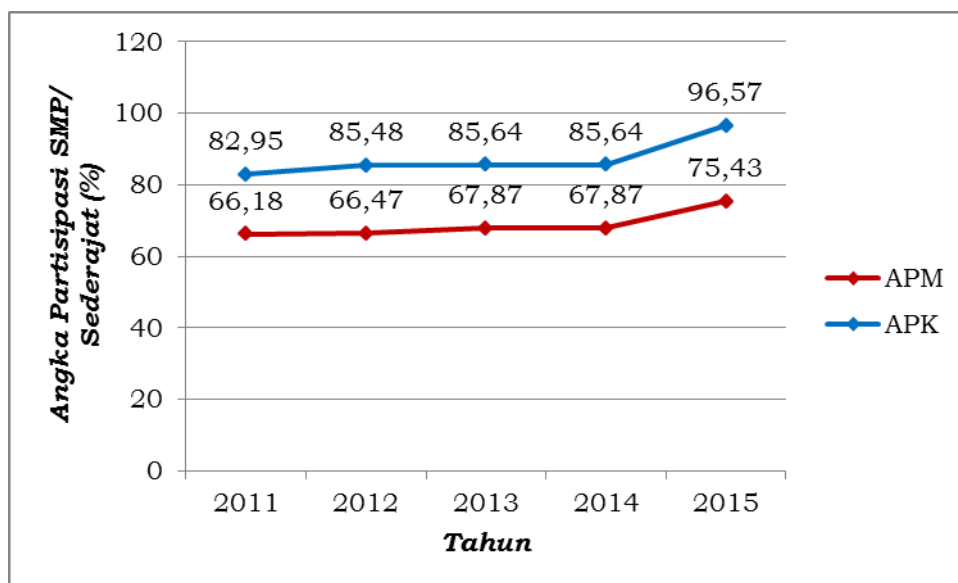
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, 2014



GAMBAR 2.22

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TINGKAT SD/SEDERAJAT

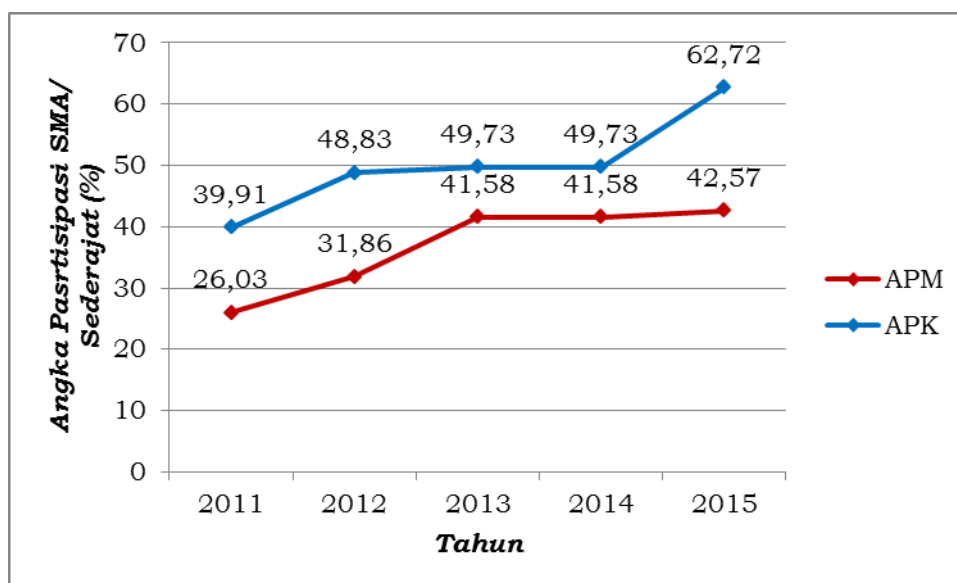
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung Tahun 2014



GAMBAR 2.23

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TINGKAT SMP/SEDERAJAT

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung Tahun 2014



GAMBAR 2.24

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TINGKAT SMA/SEDERAJAT

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung Tahun 2014

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah untuk jenjang sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Bandung periode tahun 2010-2015 menunjukkan tren yang meningkat. Namun demikian, tren peningkatan tersebut tidak berarti peningkatan tingkat partisipasi, tetapi dapat juga disebabkan berkurangnya jumlah anak usia sekolah tersebut, seperti yang ditunjukkan pada APS tingkat SD/MI dan SMA/MA yang mengalami penurunan jumlah anak usia sekolah.

2) Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Selama kurun waktu 2009-2014 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami kenaikan yang cukup baik. Pada tahun 2014 rasio ketersediaan sekolah mencapai 48,81 sekolah per 10.000 penduduk, meningkat dibanding tahun 2013 yang hanya mencapai 40,29 sekolah per 10.000 penduduk.

TABEL 2.12

RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH BERDASARKAN USIA SEKOLAH DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2014

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI						
1.1	Jumlah Sekolah	1.553	1.563	1.578	1.596	1.604	
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	402.601	409.988	397.093	396.162	328.653	
1.3	Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Kelompok Usia 7-12	38,57	38,12	39,74	40,29	48,81	
2	SMP/MTs						



No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.1	Jumlah Sekolah	411	443	456	476	478	
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	190.535	194.100	168.281	174.344	176.209	
2.3	Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Kelompok Usia 13-15	21,57	22,82	27,10	27,30	27,13	
3	SMA/MA						
3.1	Jumlah Sekolah	255	259	269	294	312	
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	171.552	175.077	186.171	190.634	186.876	
3.3	Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Kelompok Usia 16 - 18	14,86	14,79	14,45	15,42	16,70	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2014

3) Rasio Guru/ Murid

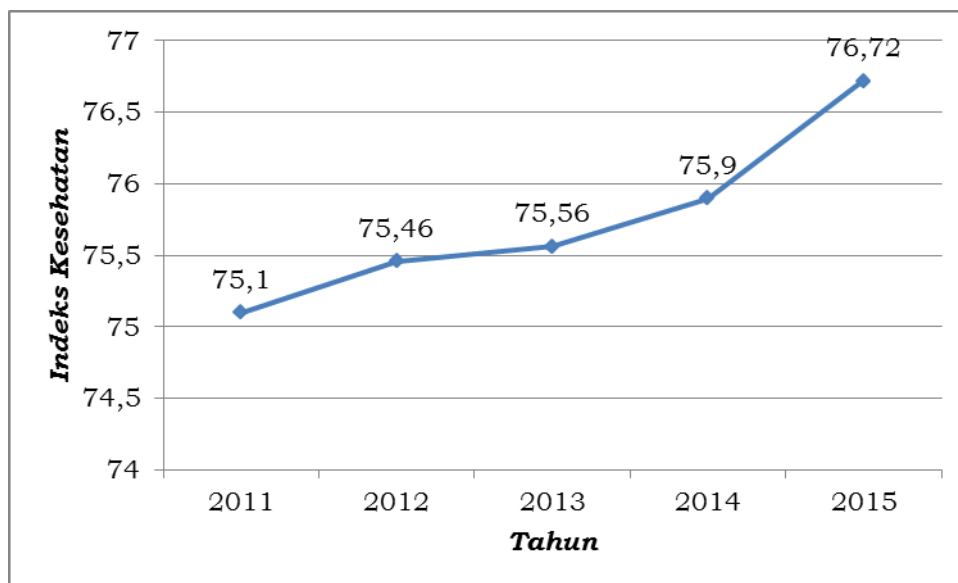
TABEL 2.13
JUMLAH GURU DAN MURID JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2014

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI						
1.1	Jumlah Guru	14.363	17.011	17.097	17.069	16.944	
1.2	Jumlah Murid	419.990	420.242	416.951	415.578	414.578	
1.3	Rasio Guru/Murid	341,98	407,99	410,05	410,92	408,70	
2	SMP/MTs						
2.1	Jumlah Guru	9694	10.671	10.988	11.205	11.266	
2.2	Jumlah Mrid	192.851	150.141	156.276	165.515	171.778	
2.3	Rasio Guru/Murid	502,64	710,73	703,12	676,98	655,85	
3	SMA/MA						
3.1	Jumlah Guru	6.370	7.514	7.736	8.212	8.783	
3.2	Jumlah Murid	92.712	80.637	83.648	88.828	95.288	
3.3	Rasio Guru/Murid	687,07	931,83	924,83	924,48	921,73	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2014

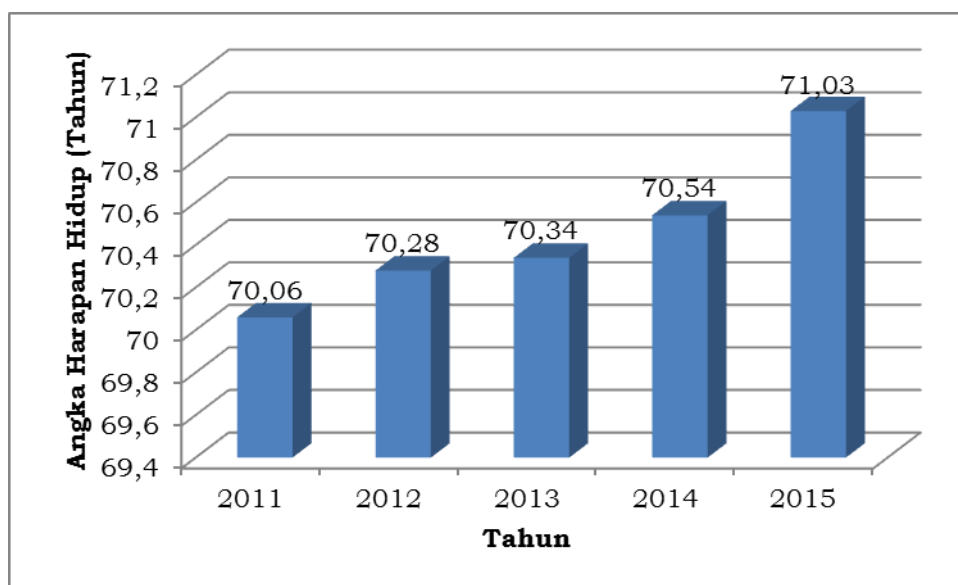
B. Kesehatan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan salah satunya dapat dilihat nilai Indeks Kesehatan dan Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk. Meninjau perkembangan lima tahun terakhir, nilai indeks kesehatan dan AHH di Kabupaten Bandung cenderung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2011, Indeks Kesehatan Kabupaten Bandung bernilai 75,1, dan pada tahun 2015 telah meningkat menjadi sebesar 76,72. Adapun untuk nilai AHH, tahun 2011 AHH Kabupaten Bandung bernilai 70,6 tahun, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 71,03 tahun.



GAMBAR 2.25
INDEKS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

Sumber: APS Kab. Bandung 2014



GAMBAR 2.26
ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG

Sumber: APS Kab. Bandung 2014

Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Bandung. Peningkatan kualitas tersebut sejalan dengan upaya yang senantiasa dilakukan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas SDM Kabupaten Bandung. Beberapa indikator keberhasilan pelayanan pemerintah di bidang kesehatan antara lain:

- 1) Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Per Satuan Penduduk.



Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.



Rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu per seribu penduduk tahun 2015 sebesar 1:13.041. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi pengurangan rasio jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Bandung dari rasio semula 1: 11.8.418 pada tahun 2011. Angka rasio tersebut mengindikasikan tidak seimbangnya penyediaan sarana puskesmas dengan laju peningkatan penduduk. Pada satu sisi jumlah penduduk yang harus dilayani mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan di sisi lain jumlah sarana kesehatan cenderung tetap/ tidak mengalami peningkatan.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2009-2015.

TABEL 2.15
RASIO PUSKESMAS, POLIKLINIK DAN PUSTU DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Puskesmas	61	61	61	61	62	62
2	Jumlah Poliklinik	309	254	24	148	148	131
3	Jumlah Pustu	85	77	69	86	85	78
Jumlah 1, 2, dan 3		455	392	154	295	295	271
4	Jumlah Penduduk	3.215.548	3.299.988	3.351.048	3.415.700	3.470.393	3.534.112
	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	1:7067	1:8418	1:21760	1:11578	1:11764	1: 13.041
5	Jumlah Kecamatan	31	31	31	31	31	31
	Rasio Puskesmas per Kecamatan	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Profil Kesehatan Tahun 2009-2010); Data Pokok Perencanaan Pembangunan tahun 2013-2014; SIPD 2015

Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya yaitu meningkatkan dan memberdayakan masyarakat, melaksanakan upaya kesehatan masyarakat, melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan memantau serta mendorong pembangunan berwawasan kesehatan. Untuk penguatan fungsi tersebut maka dilakukan upaya peningkatan sumberdaya manusia di puskesmas disamping pemenuhan tenaga medis seperti dokter, dokter gigi, perawat dan bidan diutamakan juga ketersediaan 5 jenis tenaga kesehatan lainnya yaitu tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian, dan tenaga analis kesehatan.

Pemenuhan standar tenaga kesehatan di puskesmas diarahkan untuk meningkatkan mutu system informasi kesehatan, mutu perencanaan di tingkat puskesmas, mutu

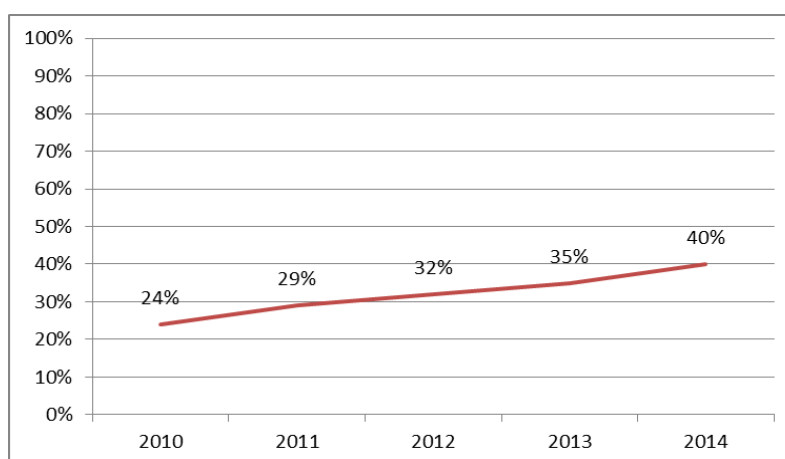


elayanan kesehatan dan kemampuan teknis untuk melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan kualitas kesehatan lingkungan. Jumlah puskesmas yang memenuhi standar tenaga kesehatan di Kabupaten Bandung pada tahun 2014 sebanyak 25 buah dari 62 puskesmas yang ada. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai puskesmas yang memenuhi standar tenaga kesehatan di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2009-2014.

TABEL 2.16
CAKUPAN PUSKESMAS YANG TELAH MEMENUHI STANDAR TENAGA KESEHATAN

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Puskesmas	61	61	61	61	62
2	Puskesmas memenuhi standar tenaga kesehatan	15	18	20	22	25
3	Prosentase	24%	29%	32%	35%	40%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2016



GAMBAR 2.27
CAKUPAN PUSKESMAS YANG TELAH MEMENUHI STANDAR TENAGA KESEHATAN

Sumber: Dinas Kesehatan, 2016

2) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Secara kuantitas, pada tahun 2015 terjadi penambahan satu unit rumah sakit swasta sehingga dibandingkan dengan jumlah penduduk total, rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk semakin membaik. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio/ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2009-2015.

TABEL 2.17
JUMLAH DAN RASIO RUMAH SAKIT PER JUMLAH PENDUDUK
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Rumah Sakit	3	4	4	3	3	3



No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Daerah						
2	Jumlah Rumah Sakit Propinsi	0	0	0	1	1	1
3	Jumlah Rumah Sakit Swasta	2	2	2	2	2	3
4	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/ POLRI	1	1	1	1	1	1
5	Jumlah seluruh Rumah Sakit	6	7	7	7	7	8
6	Jumlah Penduduk	3.215.548	3.290.437	3.351.048	3.415.700	3.470.393	3.534.112
7	Rasio	1:459.364	1:470.062	1:478.721	1:487.957	1:495.770	1: 441.764

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Profil Kesehatan Tahun 2009-2013), Dapok 2014; SIPD 2015

3) Jumlah Balita Gizi Baik

Peranan ibu sangat penting dalam mendukung upaya mengatasi masalah gizi, terutama pada asupan gizi keluarga, mulai dari penyiapan makanan, pemilihan bahan makanan, sampai menu makanan. Ibu yang memiliki status gizi baik akan melahirkan anak yang bergizi baik. Anak yang bergizi baik menjadi aset dan investasi bangsa masa depan.

Di Kabupaten Bandung telah banyak upaya dilakukan untuk mengatasi masalah gizi ini. Data menunjukkan prevalensi balita gizi buruk cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 persentase balita gizi buruk sebesar 0,03%. Berikut adalah gambaran secara lengkap kondisi balita gizi baik di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2009-2015.

TABEL 2.18

PERSENTASE BALITA GIZI BAIK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Balita Gizi Baik	243.166	257.538	263.494	241.303	251.119	289.776
2.	Jumlah Balita Gizi Buruk	148	159	99	145	97	98
3.	Jumlah Balita Seluruhnya (Usia 0 – 3 tahun)	273.806	277.032	287.768	269.201	285.427	289.874
4.	Persentase :						
	a) Gizi Baik	92,96	92,96	91,56	89,64	87,98	99,97
	b) Gizi Buruk	0,06	0,06	0,03	0,05	0,03	0,03

Sumber: Dinkes Kab. Bandung (Data Profil Kesehatan 2009-2013 dan Dapok 2014)

C. Pekerjaan Umum

Kondisi Kabupaten Bandung terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik.



Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.



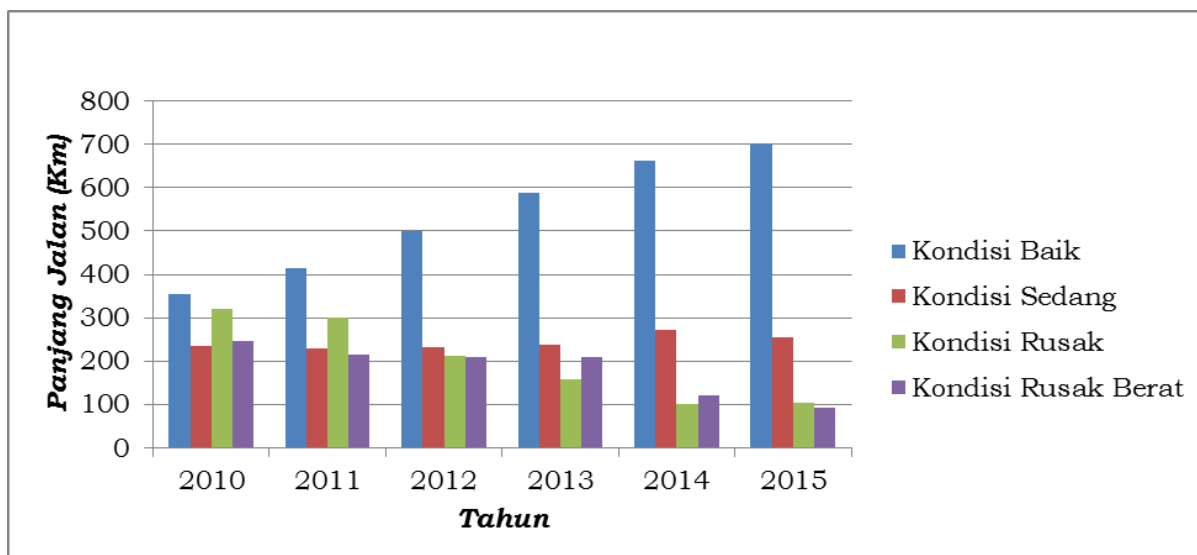
Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) akan menyebabkan sulitnya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya yang sering kita alami adalah banjir yang disebabkan tidak seimbangnya volume air dengan kapasitas dan fungsi sungai serta drainase. Hal ini juga yang terjadi pada kondisi jaringan transportasi dimana kapasitasnya tidak lagi mampu menampung pergerakan barang dan manusia secara ideal.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, rusak, sedang rusak, rusak, dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Bandung pada tahun 2015 mencapai 60,65 %. Sedangkan proporsi jalan mantap (kondisi baik dan sedang) mencapai 82,8 %. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai panjang jaringan jalan di Kabupaten Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2010-2015.

TABEL 2.19
PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN BERDASARKAN KONDISI
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015

No.	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kondisi Baik (Km)	355,57	413,28	500,78	587,41	661,16	700,66
2.	Kondisi Sedang (Km)	235,19	229,09	233,06	237,73	271,00	255,96
3.	Kondisi Rusak (Km)	319,00	299,70	213,46	158,72	101,66	105,44
4.	Kondisi Rusak Berat (Km)	245,58	213,81	208,05	208,05	121,52	93,29
5.	Jalan secara keseluruhan	1.155,34	1.155,89	1.155,34	1.155,34	1.155,34	1.155,34
6.	Proporsi Kondisi Baik (%)	30,78	35,75	43,34	50,84	57,23	60,65
7.	Proporsi Kondisi Sedang Rusak (%)	20,36	19,82	20,17	20,58	23,46	22,15
8.	Proporsi Kondisi Rusak (%)	27,61	25,93	18,48	13,74	8,80	9,13
9.	Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	21,26	18,50	18,01	18,01	10,52	8,07

Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2013, Data Pokok Perencanaan Pembangunan Tahun 2013-201 dan SIPD 2015



GAMBAR 2.28

PANJANG JARINGAN JALAN KABUPATEN BERDASARKAN KONDISI

Sumber: Dinas Bina Marga Tahun 2013 dan Data Pokok Perencanaan Pembangunan Tahun 2013-2014

2) Proporsi Jumlah Jembatan.

Proporsi kondisi jembatan baik di Kabupaten Bandung tahun 2010 sebesar 21,36 %. Dalam kurun lima tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah jembatan baik secara signifikan. Tahun 2015, proporsi jembatan baik ini telah meningkat menjadi 81,93 %. Peningkatan ini mengindikasikan terjadinya peningkatan aksesibilitas Kabupaten Bandung.

TABEL 2.20

PROPORSI JUMLAH JEMBATAN BERDASARKAN KONDISI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015

No.	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kondisi Baik	167	260	582	663	675	703
2.	Kondisi Rusak Ringan	429	364	60	141	155	127
3.	Kondisi Rusak	186	158	162	37	65	37
4.	Jembatan Kabupaten Secara Keseluruhan	782	782	804	804	858	858
5.	Proporsi Kondisi Baik	21,36	33,25	72,39	82,46	78,67	81,93
6.	Proporsi Kondisi Sedang Rusak (%)	54,86	46,55	7,46	17,54	18,07	14,80
7.	Proporsi Kondisi Rusak	23,79	20,20	20,15	4,60	7,58	4,31

Keterangan: *Jumlah jembatan berdasarkan hasil pendataan tahun berjalan

Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2013

3) Rasio Jaringan Irigasi.

Jaringan Irigasi merupakan satu kesatuan infrastruktur pendukung utama sektor pertanian khususnya untuk pertanian lahan basah. Jaringan irigasi di kabupaten Bandung terdiri atas jaringan irigasi teknis dan non teknis. Luas areal yang dilayani oleh jaringan



irigasi masih didominasi oleh irigasi non teknis yang mencapai 61,48% sedangkan irigasi teknis hanya 38,52%.

Kewenangan pengelolaan irigasi non teknis dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan luas areal 0-25 Ha dan Kabupaten dengan luas areal >25 Ha. Total luas irigasi non teknis mencapai 25.700,75 Ha terbagi atas kewenangan desa ±1.883,76 Ha dan kewenangan kabupaten ±23.816,99 Ha. Luas areal yang dilayani irigasi teknis ±14.150,65 Ha yang dikelola oleh Provinsi sebanyak 4 Daerah Irigasi (DI) Ciharang, Cirasea, Wanir dan Wangisagara dan Irigasi Lintas sebanyak 7 DI (Cangkuang, Depok, Ciyasana, Buahbatu, Cibeunying-Ciateul, Ciregol dan Leuwikuya) dengan total luasan ±11.039 Ha. Pengelolaan Irigasi teknis oleh Kabupaten meliputi 8 DI (Leuwikuray, Juntihilir, Kiaraeunyeuh, Baros, Cibeureum, Cigadog, Cibodas dan Sudiplak) dengan luas areal ±3.111,65 Ha.



Pada tahun 2015 kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Bandung telah mengalami perbaikan. Tercatat total panjang irigasi Kabupaten Bandung tahun 2015 yaitu 36.042,49 Km, dengan diantaranya 34.959,97 Km merupakan irigasi teknis dan 1.082,52 Km merupakan irigasi nonteknis. Dari total panjang irigasi tersebut, irigasi yang berada dalam kondisi baik mampu melingkupi wilayah irigasi sekitar 225 Km².

Secara detail kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 2.21 berikut.

TABEL 2.21
KONDISI JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2013

No	Kewenangan	Kondisi	2010 (Km)	2011 (Km)	2012 (Km)	2013 (Km)	2014 (Km)	2015 (Km)
1	Kabupaten Bandung (Teknis)	Baik	7.731	23.877	25.505	25.984,88		
		Rusak Ringan	8.929	8.321	6.874	6.586,07		
		Rusak Berat	19.518	3.980	3.799	3.607,05		
		Jumlah	36.178	36.178	36.178	36.178		
2	Kabupaten Bandung (Non Teknis)	Baik	401.690	715,69	791,60	797.428,42		
		Rusak Ringan	318.680	249.406	211.453	207.955,35		
		Rusak Berat	364.050	119.281	81.328	78.994,23		
		Jumlah	1.084,42	1.084,38	1.084,38	1.084,38		

Sumber: Dinas SDAPE dan Data Pokok Perencanaan Pembangunan Tahun 2013

4) Jaringan Drainase

Jaringan drainase di Kabupaten Bandung terkait erat dengan keberadaan Sungai Citarum dari hulu ke hilir beserta anak-anak sungainya. Sungai Citarum merupakan sungai lintas Kabupaten/Kota, yang berawal dari mata air yang terletak di Gunung Wayang (Kabupaten Bandung) yang mengalir sepanjang 269 km hingga bermuara di Laut Jawa.





Untuk skala nasional, wilayah Sungai Citarum merupakan bagian dari wilayah sungai Cidanau-Ciujung-Ciliwung-Cisadane-Citarum. Mengingat keberadaan Sungai Citarum yang sangat penting sebagai penyedia air baku ibukota, mempunyai dampak ekonomi serta secara regional menjadikannya sebagai wilayah sungai strategis nasional sehingga kewenangannya berada di pemerintah Pusat dan Provinsi.

Banjir atau genangan tahunan, 5 tahunan, dan 25 tahunan yang terjadi harus ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir, secara struktural maupun non struktural. Catatan banjir besar di Bandung dan sekitarnya akibat meluapnya Sungai Citarum terjadi pada tahun 1931, 1945, 1977, 1982, 1986, 1998, 2005, 2010, dan 2014. Namun demikian, saat ini hampir setiap tahun terjadi luapan Sungai Citarum.

Daerah banjir yang rutin terjadi adalah Kecamatan Majalaya, Kecamatan Bojongsong, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Banjaran dan Kecamatan Dayeuhkolot. Lokasi-lokasi genangan juga terjadi di Ciparay, Solokan Jeruk, Pameungpeuk, Cangkuang, Soreang, Katapang, Margahayu, Margaasih, Rancaekek, Cileunyi. Diharapkan pada tahun 2025, lokasi-lokasi genangan tersebut dapat diminimalisasi bahkan dihilangkan untuk dilokasi daerah-daerah tersebut. Berikut ini merupakan data drainase di Kabupaten Bandung tahun 2015.

TABEL 2.22
PANJANG DRAINASE DALAM KONDISI BAIK DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015

No.	Uraian	2015
1.	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (km)	521,60
2.	Panjang Drainase yang dipakai bangunan liar	391,20
3.	Panjang Total Drainase	
4.	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	

Sumber: SIPD 2015

D. Perumahan Rakyat

Kondisi daerah terkait dengan urusan perumahan rakyat salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Rasio Permukiman Layak Huni dan Rasio Rumah Layak Huni

Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut.

Pada tahun 2012 dan 2013, luas permukiman layak huni di Kabupaten Bandung mengalami kenaikan yang sangat tinggi dari tahun sebelumnya yakni tahun 2009-2011 dimana luas permukiman layak huni di Kabupaten Bandung pada tahun 2013 mencapai 13.008,50 Ha.

Sedangkan luas wilayah permukiman di Kabupaten Bandung sebesar 14.297,30 Ha dengan kata lain sebesar 88,22% luas wilayah pemukiman di Kabupaten Bandung didominasi oleh permukiman layak huni. Jumlah unit rumah layak huni di Kabupaten Bandung pada tahun 2013 mencapai 714.492 unit rumah dari jumlah rumah tangga yang



ada sebesar 865.623 (RT) yakni 85,88% rumah tangga di Kabupaten Bandung menempati rumah layak huni.

Sementara itu, pada tahun 2014 terjadi peningkatan luas permukiman layak huni menjadi seluas 14.909 Ha dari total luas wilayah permukiman sebesar 16.395 Ha. Hal ini berarti persentase luas permukiman layak huni terhadap total luas wilayah permukiman telah mencapai 90,94%. Tahun 2015, luas areal permukiman kumuh yang perlu ditata yaitu sekitar 148,5 Ha. Ditinjau perunit perumahan, pada tahun 2015, total rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung berjumlah 55.721 unit. Kondisi ini sudah cukup baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2) Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih

Pelayanan air bersih di Kabupaten Bandung dilakukan oleh PDAM, Dinas Permukiman, Tata Ruang dan Kebersihan (Dinas Pertasih) dan swadaya masyarakat. PDAM melayani penyediaan air bersih perkotaan sedangkan Dinas Pertasih melayani pembangunan sistem penyediaan air bersih perdesaan. Untuk melayani penyediaan air bersih perkotaan tersebut, PDAM memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan, mata air dan sumur dalam, dan sistem yang digunakan adalah melalui pemasangan pipa air secara gravitasi.

Bentuk penyediaan air bersih perdesaan selain melalui pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan melalui pemasangan pompa, pembangunan sumur dalam, sumur dangkal serta pembangunan terminal air. Sumber air yang digunakan berasal dari mata air.

Pengelolaan dan pemeliharaan air bersih perdesaan selanjutnya diserahkan pada desa masing-masing yang dikoordinir oleh LKMD atau KPPABD. Pelayanan penyediaan air bersih oleh PDAM dan Dispertasih belum menjangkau seluruh kota/desa/kelurahan/kecamatan di Kabupaten Bandung. Oleh karenanya diharapkan agar penyediaan air bersih ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Cakupan pelayanan air bersih yang dilakukan Dinas Pertasih Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015 dimana pada tahun 2010 jumlah jiwa yang mendapatkan akses air bersih hanya mencapai 320.269 jiwa, meningkat di tahun 2013 yang mencapai 402.795 jiwa.

Berikut adalah kondisi rumah tangga yang telah mendapatkan air bersih dalam kurun waktu tahun 2010-2015.

TABEL 2.23
JUMLAH PENDUDUK YANG MENDAPATKAN AKSES AIR BERSIH
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah jiwa yang terlayani sarana air bersih perdesaan (jiwa)	320.269	334.289	353.536	402.795		
2.	Jumlah jiwa yang terlayani sarana air bersih perkotaan (jiwa)	277.823	287.429	334.435	358.909		
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.215.548	3.299.988	3.351.048	3.401.984		
4.	Akses aman terhadap air bersih di kawasan	8,64	8,71	9,98	10,55		



No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	perkotaan (%)						
5.	Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan (%)	9,96	10,13	10,55	11,84	12,58	13,45

Sumber: PDAM dan Dispertasih Kabupaten Bandung Tahun 2014

Pada tahun 2015, cakupan akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan tercatat sebesar 13,45 %. Nilai ini tergolong masih rendah, namun demikian dalam kurun lima tahun terakhir terjadi trend peningkatan cakupan layanan air bersih perdesaan di Kabupaten Bandung.

3) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja).

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah mulai membaik. Hal ini terlihat dari terjadinya peningkatan akses aman terhadap sanitasi dalam kurun lima tahun terakhir. Pada tahun 2015, jumlah jiwa yang mengakses sarana sanitasi yang telah bersuspek aman antara lain sebanyak 1.888.276 jiwa atau sekitar 53,43 % dari total jumlah penduduk. Masih terdapatnya penduduk yang belum memiliki akses terhadap sarana sanitasi bersuspek aman diduga karena belum terintegrasinya sarana sanitasi penduduk dengan saluran pembuang akhir yang terstandar, baik itu berupa septic tank individual dan IPLT bagi pengolahan limbah sistem on-site maupun IPAL bagi pengolahan limbah sistem off-site.

Secara detail, gambaran persentase rumah tinggal berakses sanitasi di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2010-2015 disajikan pada Tabel 2.24.

TABEL 2.24
PERSENTASE RUMAH TINGGAL BERSANITASI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah jiwa yang mengakses sarana sanitasi yang bersuspect aman (jiwa)	1.642.400	1.702.800	1.746.300	1.790.375	1.849.372	1.888.276
2.	Jumlah penduduk (jiwa)	3.215.548	3.229.988	3.351.048	3.401.984	3.470.393	3.534.112
3.	Akses aman terhadap sanitasi (%)	51,08	51,60	52,11	52,63	53,29	53,43

Sumber: Dinas Kesehatan dan Dispertasih Kabupaten Bandung 2016



E. Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan penataan ruang salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Persentase Bangunan Ber-IMB Per Seluruh Bangunan.

Setiap orang/badan usaha di Kabupaten Bandung yang akan mendirikan/membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku wajib memiliki izin membuat bangunan (IMB). Hal ini dimaksudkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Bandung. dari tahun ke tahun persentase bangunan ber-IMB di Kabupaten Bandung semakin meningkat, terutama pada tahun 2014 terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

TABEL 2.25
RASIO BANGUNAN BER-IMB PER SATUAN BANGUNAN
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	3.514	4.754	21.045	74.588	70.632	
2.	Jumlah Bangunan	1.148.437	819.319	865.623	1.014.799	634.249	
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1/2*100)	0,30 %	0,58 %	2,43%	7,35%	11,14%	

Sumber: Dispertasih Kabupaten Bandung Tahun 2009-2014

2) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan bagian dari ruang terbuka (*open space*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung. Ketersediaan RTH dalam kota berdampak pada kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural) dan nilai estetika yang dimilikinya (objek dan lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kelangsungan kehidupan perkotaan, tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit adalah 30%, dimana 10% diantaranya adalah RTH private (RTH yang berada di lahan milik pribadi) dan 20% adalah RTH publik. Luas RTH di Kabupaten Bandung tahun 2013 mencapai 46,29 Ha atau 0,19% dari luas wilayah perkotaan seluas 24.150,49 Ha. Capaian ini masih jauh dari standar kebutuhan RTH yang seharusnya sebesar 52.871 Ha. Berikut ini adalah luasan RTH di Kabupaten Bandung tahun 2014.



TABEL 2.26
LUAS RUANG TERBUKA HIJAU PER KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014

No	Kecamatan	Luas Ruang Terbuka Hijau (m ²)
1	Ciwidey	11.136,00
2	Rancabali	-
3	Pasirjambu	-
4	Cimaung	-
5	Pangalengan	-
6	Kertasari	-
7	Pacet	-
8	Ibun	-
9	Paseh	-
10	Cikancung	-
11	Cicalengka	-
12	Nagreg	-
13	Rancaekek	-
14	Majalaya	-
15	Solokanjeruk	-
16	Ciparay	-
17	Baleendah	-
18	Arjasari	-
19	Banjaran	5.000,00
20	Cangkuang	481,00
21	Pameungpeuk	-
22	Katapang	373,00
23	Soreang	135.881,00
24	Kutawaringin	19.800,00
25	Margaasih	-
26	Margahayu	-
27	Dayeuhkolot	-
28	Bojongsoang	-
29	Cileunyi	-
30	Cilengkrang	-
31	Cimencyan	-
Kab. Bandung		172.671,00

Sumber: Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Kebersihan Tahun 2014

Sementara rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah dari tahun 2010 hingga 2013 ditampilkan pada tabel berikut ini.



TABEL 2.27
RASIO RUANG TERBUKA HIJAU PER SATUAN LUAS WILAYAH DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	27,327	28,287	24,150	28,980	41,055	41,055
2.	Luas wilayah (Perkotaan)	24.150,49	24.150,49	24.150,49	24.150,49	24.150,49	24.150,49
	Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah	0,113	0,119	0,10	0,12	0,17	0,17

Sumber: Dispersasi Kabupaten Bandung Tahun 2013; Hasil Evaluasi RPJMD 2010 - 2015

F. Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan merupakan bagian dari siklus kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*). Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bandung. Selanjutnya membuat strategi untuk mencapai tujuan, maka disusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 2.28
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015

No	Indikator/Data	2012		2013		2014		2015	
		Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak		
1	Ketersediaan Dokumen RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	√		√		√		√	
2	Ketersediaan Dokumen RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	√		√		√		√	
3	Ketersediaan Dokumen RKPDP yang Telah Ditetapkan Dengan Perbup	√		√		√		√	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014

TABEL 2.29
PENJABARAN PROGRAM RPJMD KE DALAM RKPDP DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015

Tahun	Jumlah Program RKPDP Tahun Berkenaan	Jumlah Program RPJMD yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan	Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPDP (%)
2012	156	150	104,00
2013	157	150	104,67
2014	160	156	102,56
2015			

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014



G. Perhubungan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perhubungan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

1) Rasio Izin Trayek.

Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten Bandung wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2015 sebanyak 2.401 izin. Jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2014). Data lengkap tentang rasio izin trayek dapat dilihat pada tabel berikut.



TABEL 2.30
RASIO IZIN TRAYEK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Izin Trayek Perkotaan	2.141	2.141	421	468	2.672	2.174
2	Izin Trayek Perdesaan	260	260	0	0	0	227
3	Jumlah Izin Trayek	2.401	2.401	421	468	2.672	2.401
4	Jumlah Penduduk	3.215.548	3.290.437	3.351.048	3.415.700	3.290.437	3.534.112
5	Rasio Izin Trayek	1:1.339	1:1.370	1:7.960	1:7.299	1:1.231	1: 1.472

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2009-2014; SIPD 2015

2) Jumlah Uji Kir Angkutan Umum.

Seluruh angkutan umum yang diimpor di Kabupaten Bandung baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Data mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan uji kir di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2009-2015 ditampilkan pada tabel berikut.



TABEL 2.31
JUMLAH UJI KIR ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015

No	Angkutan Umum	2010			2011			2012			2013			2014			2015		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
1.	Mobil penumpang umum	8.972	8.176	91,13	13.468	13.326	98,95	15.810	11.572	73,19	38.111	29.054	76,24	10.238	7.992	78,06	2.401	1.198	49,89
2.	Mobil bus	452	441	97,57	1.357	3.736	275,31	2.815	3.085	109,59	1.033	1.008	97,58	942	744	78,98	-	62	-
3.	Mobil barang	25.264	23.974	94,89	21.017	17.498	83,26	22.439	16.975	75,65	11.448	10.705	93,51	32.769	32.095	97,94	22.503	261	1,16
4.	Kereta gandengan	16	0	-	-	12	N/A	225	2	0,89	18	13	72,22	16	2	12,50	174	-	
5.	Kereta tempelan	52	52	100	-	13	N/A	225	1	0,44	22	13	59,09	35	23	65,71	1.312	-	
Jumlah		34.756	32.643	93,92	35.842	34.585	96,49	41.514	31.635	76,20	50.632	40.793	80,57	44.000	40.856	92,85	26.390	-	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2009-2014; SIPD 2015



3) Persentase Jumlah Angkutan Darat Per Penumpang.

Mengacu pada data pokok perencanaan tahun 2014, jumlah angkutan darat yang tersedia di wilayah Kabupaten Bandung yaitu sekitar 2.672 unit. Sedangkan jumlah total penumpang angkutan darat di tahun yang sama yaitu sebanyak 193.807 jiwa. Dengan demikian, satu unit angkutan umum melayani sekitar 1, 38 % penumpang angkutan darat.

4) Volume Capacity Ratio

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pelayanan jaringan jalan eksisting yaitu Volume Capacity Ratio (VCR) dan Level of Service (LOS). Berdasarkan hasil evaluasi, dalam kurun lima tahun terakhir (2011 – 2015) nilai VCR di Kabupaten Bandung secara rata- rata keseluruhan cenderung mengalami peningkatan, yang mana hal ini menunjukkan adanya perbaikan/ peningkatan kapasitas jaringan jalan di Kabupaten Bandung. Secara detail, perkembangan nilai VCR di Kabupaten Bandung disajikan pada Tabe 2.32.

TABEL 2.32
PERKEMBANGAN VCR DI KABUPATEN BANDUNG

No	Tahun	Nilai VCR
1	2011	0,84
2	2012	0,84
3	2013	0,35
4	2014	0,28
5	2015	0,28

Sumber: Hasil Evaluasi RPJMD 2011- 2015 Bidang Statistik dan Evaluasi Bappeda, 2016

H. Lingkungan Hidup

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Status Pnaatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Industri.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disebabkan karena pengelolaan lingkungan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Berbagai peraturan dan perundangan dibidang lingkungan hidup mensyaratkan ketentuan teknis dan administrasi yang harus ditaati oleh seluruh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.

Status Pnaatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel berikut.





TABEL 2.33
STATUS PENAATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA
KEGIATAN INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengendalian Pencemaran Air						
	- Jumlah industri yang dipantau (menghasilkan air limbah)	144	152	163	209		
	- Industri yang melakukan pengujian kualitas air limbah dan melaporkan secara rutin	72,32% (pengujian) 70,44% (pelaporan) 41,07% (rutin)	66% (pengujian) 60% (pelaporan)	60%	60% (pengujian) 58% (pelaporan)		
	- Penaatan Pengendalian Pencemaran Air	42%	52%	57%	55 %		
2	Pengendalian Pencemaran Udara						
	- Jumlah industri yang dipantau (menimbulkan emisi)	170	189	189	189		
	- Industri yang melakukan pengujian kualitas udara emisi cerobong limbah dan melaporkan secara rutin	50%	61%	80%	186(98%)		
	- Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara	46%	69%	77%	85%		
3	Pengawasan Pengelolaan Limbah B3						
	- Jumlah industri yang dipantau (menimbulkan limbah B3)	156	175	174	195		
	- Jumlah industri yang melakukan pengelolaan dan pelaporan pengelolaan limbah B3	38%	43%	61%	54%		



No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	- Pnaatan Pengelolaan Limbah B3	38%	42%	50%	44%		

Sumber: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

2) Kualitas Air Sungai dan Kualitas Udara.

Pengujian terhadap kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan setiap tahun oleh BPLH dari tahun 2001. Sejak tahun 2009, pengujian kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan oleh UPT Laboratorium Lingkungan BPLH. Evaluasi terhadap hasil pengujian ini dilakukan untuk menentukan arah kebijakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan prioritas penanganannya. Pengujian kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan pada titik-titik prioritas yang dievaluasi setiap tahun. Hasil pengujian kualitas air sungai dianalisis menggunakan metode Storet untuk menentukan status mutunya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2.34
PENGUJIAN AIR DAN UDARA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2013

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pengujian Kualitas Air Sungai						
Lokasi Pengujian	75 lokasi, 3x pengujian	70 lokasi, 3x pengujian	70 lokasi, 3x pengujian	75 lokasi, 3 x pengujian		
Status Mutu Air	99 % cemar berat;	91% cemar berat	93% cemar berat	100% cemar berat		
	1% cemar sedang	3% cemar sedang	7% cemar sedang	-		
		1% cemar ringan		-		
Skor Storet Terburuk	S. Cipadaulun setelah Cikacembang (-142), S. Cibaligo Hilir (-133)	S. Baligo Hilir (-97), S. Citarik Hilir (-95) S. Cpadaulun setelah cikembang (-94)	S. Cisuminta Hilir (-123) S. Cibaligo (-111), S. Cikacembang hilir (-110)	S. Cipadaulun (-131), S. Cibaligo Hilir (-126) ,S. Cisuminta hilir (-123), S. Cicurugdogdog (-117), S. Cipadaulun hilir (-115), S. Cikacembang hilir (-109)		
Parameter Kunci dengan Kualitas Terburuk						
- BOD				486 mg/L		
- COD	224 mg/L	366	508 mg/L	415 mg/L		



Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		mg/L				
	492 mg/L	809 mg/L	640 mg/L	575 mg/L		
Pengujian Kualitas Udara Ambien						
Lokasi Pengujian	4 lokasi; 10 titik	4 lokasi; 10 titik	4 lokasi; 10 titik	4 lokasi; 10 titik		
Parameter Tidak Memenuhi Baku Mutu	- Kebisingan 79,04 dB	Kebisingan 70,53dB	- Kebisingan 85,59 dB	Kebisingan 72,23 dB		
	- TSP (debu) 395, 882, 972, 1.739, dan 2.139, µg/m ³		- TSP (debu) 636 µg/m ³ , dan 318 µg/m ³	- TSP (debu) 309 µg/m ³ , dan 282 µg/m ³		

Sumber: BPLH Kabupaten Bandung Tahun 2013

Dari pengujian yang dilakukan setiap tahun diperoleh hasil berdasarkan perhitungan menggunakan metode Storet dengan baku mutu air sungai kelas II, 96-99% berstatus mutu "cemar berat" dan hanya 1-4% berstatus "cemar sedang". Adapun parameter yang dominan melampaui baku mutu rata-rata adalah fecal coliform, DO, COD, BOD, TSS, Nitrit, dan beberapa logam berat, yaitu Cu, Zn, dan Cr6+.

Status "cemar berat" ini bahkan terjadi juga pada sungai-sungai di bagian hulu dengan parameter yang umumnya melampaui baku mutu yaitu fecal coliform. Fecal coliform pada hulu Sungai Citarum umumnya ditemukan di wilayah dimana air limbah dominan berasal dari penduduk dan atau peternakan.

Beberapa lokasi dengan status mutu yang buruk menampung air limbah yang berasal dari kabupaten/kota yang berbatasan wilayah administrasi, seperti S. Cikijing (Kabupaten Sumedang) dan S. Cibaligo Hilir (Kota Cimahi).

Dengan demikian, maka selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung juga diperlukan koordinasi dengan SKPD yang menangani sektor usaha/kegiatan terkait, pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah provinsi, dan pemerintah dalam pengendalian pencemaran air khususnya, dan pengendalian pencemaran lingkungan umumnya.

3) Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa.

Kerusakan hutan dan lahan telah memberikan dampak yang cukup luas, melalui kemerosotan keanekaragaman hayati, banjir, longsor, kekeringan, penurunan kualitas tanah dan air hingga perubahan iklim ditingkat global yang saat ini kita hadapi.

Tantangan bagi kita semua untuk mengendalikan kerusakan hutan dan lahan tersebut melalui upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Tanah sebagai salah satu sumber daya alam, wilayah hidup, media lingkungan, dan faktor produksi termasuk produksi biomassa yang mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestariannya.



Di sisi lain kegiatan produksi biomasa yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomasa, sehingga dapat menurunkan mutu dan fungsinya, pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidupnya lainnya.

Kerusakan tanah untuk produksi biomassa dapat disebabkan oleh sifat alami tanah, dapat pula disebabkan oleh kegiatan manusia yang menyebabkan tanah tersebut terganggu/rusak hingga tidak mampu lagi berfungsi sebagai media untuk produksi biomasa secara normal. Salah satu jenis pelayanan minimal bidang lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota adalah Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa.

TABEL 2.35
PERSENTASE PENCAPAIAN SPM PELAYANAN INFORMASI STATUS KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA (% PI-SKT)

Tahun	2010	2011	2012	2013
Persentase Pencapaian SPM	0	60	80	100

Sumber: BPLH Kab. Bandung Tahun 2013

4) Persentase Penanganan Sampah.

Salah satu masalah persampahan di Kabupaten Bandung yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut.

Kabupaten Bandung memiliki 1 (satu) buah TPSA yaitu TPSA Babakan yang terletak di Desa Babakan, Kecamatan Ciparay. Jumlah total timbulan sampah yang dihasilkan adalah sebanyak 6.763 m³ per hari. Dari jumlah tersebut, yang tertangani/terangkut ke TPSA hanya sebesar 2.112 m³ per hari (31,23%). Dengan demikian masih tersisa sampah sebanyak 68,77% yang belum terangkut/terbuang ke TPSA. Berikut adalah kondisi persampahan di Kabupaten Bandung secara lengkap dalam kurun waktu tahun 2009-2014.

TABEL 2.36
PERSENTASE VOLUME SAMPAH YANG TERTANGANI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah volume sampah yang tertangani (m ³)	572	612	947	1.056		
2	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m ³)	6.656	6.828	6.936	6.936		
3	Persentase	8,59	8,96	13,65	15,22		

Sumber: Dispertasih Kabupaten Bandung Tahun 2013-2014

5) Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) Per Satuan Penduduk.

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kabupaten Bandung pada tahun 2014 sebanyak 48 buah (berlokasi di pasar dan pabrik). Daya tampung TPSS tersebut



sebesar 76,80 ton. Dengan kondisi ini dapat diketahui bahwa sampah yang dihasilkan oleh 1.000 orang jumlah penduduk Kabupaten Bandung hanya dapat ditampung pada 0,022ton.

TABEL 2.37
RASIO TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERHADAP JUMLAH PENDUDUK
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2009-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah TPSS (unit) *)	23	42	42	45	48	
2	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³)	138m ³	252m ³	252m ³	270m ³	76,80 ton	
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.215.548	3.299.988	3.351.048	3.401.984	3.490.691	
4	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0.02	0.036	0,036	0,039	0,022	

*) Lokasi TPS ada di pasar dan pabrik

Sumber: Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2013-2014

I. Pertanahan

Persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. Semakin besar prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah.

TABEL 2.38
PERSENTASE LUAS LAHAN BERSERTIFIKAT TAHUN 2012-2013

Tahun	Jumlah Luas Lahan Bersertifikat	Luas Wilayah Kabupaten Bandung (Ha)	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)
2012	40.758	176.239	23,13
2013	42.751	176.239	24,26
2014		176.239	
2015		176.239	

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung

J. Kependudukan dan Catatan Sipil

1) Persentase Penduduk yang Memiliki Administrasi Kependudukan.

Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil, dapat dihitung berdasarkan kepemilikan KTP, KK, Akte lahir dan Akte Nikah.

TABEL 2.39
RASIO PENDUDUK BER-KTP PER SATUAN PENDUDUK TAHUN 2012-2015

Tahun	Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun yang Ber-KTP	Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun Atau Telah Menikah	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk
2012	2.348.092	3.156.448	74,39
2013	1.975.553	2.014.804	98,05
2014	2.012.105 (e-KTP)	2.707.121	74,33
2015	1.995.516	2.301.817	86,69

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung 2014



TABEL 2.40
RASIO PENDUDUK YANG MEMILIKI KK DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012-2014

Tahun	Jumlah Penduduk yang Memiliki KK (SIAK)	Jumlah Penduduk Wajib Memiliki KK (SIAK)	Rasio Penduduk Ber-KK Per Satuan Keluarga
2012	294.685	1.169.794	25,19
2013	406.579	1.208.376	33,65
2014	583.289	1.288.438	45,27
2015	840.454	1.636.878	51,34

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung 2014

TABEL 2.41
RASIO BAYI BERAKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012-2014

Tahun	Jumlah Bayi Lahir Berakta Kelahiran	Jumlah Keseluruhan Bayi yang Lahir	Rasio Bayi Berakta Kelahiran
2012	29.650	59.119	50,15
2013	44.738	57.378	77,97
2014	9.855	66.121	14,90
2015			

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung 2014

TABEL 2.42
RASIO PASANGAN BERAKTA NIKAH DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012-2014

Tahun	Jumlah Pasangan Berakta Nikah	Jumlah Keseluruhan Pasangan Nikah	Rasio Pasangan Berakta Nikah
2012	5.584	5.921	94,31
2013	5.820	6.962	83,60
2014	6.022	6.962	86,50
2015			

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung

K. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya bagi perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

1) Partisipasi perempuan di lembaga swasta.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



TABEL 2.43
PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA SWASTA
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta	701.392	603.912	706.412	707.132		
2	Jumlah pekerja perempuan	908.102	911.907	1.073.746	1.074.841		
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	51	51	52	52		

Sumber: BKBPP

L. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1) Rasio akseptor KB.

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

TABEL 2.44
RASIO AKSEPTOR KB DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2014

Tahun	Jumlah Akseptor KB	Jumlah Pasangan Usia Subur	Rasio Akseptor KB
2012	517.007	638.141	81,02
2013	539.345	658.143	81,95
2014	550.087	669.469	82,17
2015	555.205	679.239	81,73

Sumber: Badan KB dan PP Kabupaten Bandung

M. Sosial

1) Penanganan PMKS Fakir Miskin.

Pada tahun 2014, pemerintah semakin serius dalam menangani masalah kesejahteraan sosial fakir miskin. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah PMKS fakir miskin yang ditangani terhadap total PMKS fakir miskin yang ada, yaitu sebesar 18,66%. Hal ini menunjukkan perubahan yang signifikan dari dua tahun sebelumnya, dimana persentase penanganan PMKS fakir miskin hanya mencapai 0,35% pada tahun 2012 dan 0,57% pada tahun 2013.

TABEL 2.45
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKIRMISKIN
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2014

Tahun	Jumlah PMKS FM yang Tertangani	Jumlah PMKS FM yang Ada	Penanganan PMKS FM (%)
2012	830	238.224	0,35
2013	643	113.740	0,57
2014	39.792	213.293	18,66
2015		1.105	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung

2) Penanganan PMKS Anak Terlantar.

Pemerintah juga semakin serius dalam menangani masalah kesejahteraan sosial anak terlantar di Kabupaten Bandung. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah PMKS anak terlantar yang ditangani terhadap total PMKS anak terlantar yang ada, yaitu sebesar 7,43%. Hal ini menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dari dua tahun sebelumnya, dimana persentase penanganan PMKS anak terlantar hanya mencapai 3,68% pada tahun 2012 dan 1,05% pada tahun 2013.

TABEL 2.46
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
TERLANTAR DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2014

Tahun	Jumlah PMKS Anak Terlantar yang Tertangani	Jumlah PMKS Anak Terlantar yang Ada	Penanganan PMKS Anak Terlantar (%)
2012	610	16.577	3,68
2013	238	22.592	1,05
2014	985	13.260	7,43
2015			

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung

3) Jumlah Sarana Sosial.

Meninjau trend ketersediaan sarana sosial di Kabupaten Bandung tampak terjadi penambahan dan pengurangan jumlah unit sarana sosial. Untuk unit panti asuhan, dari semula tahun 2012 tersedia 61 unit panti asuhan, pada tahun 2015 berkurang menjadi sekitar 45 unit. Demikian halnya dengan panti jompo, meskipun sempat terjadi peningkatan ketersediaan unit panti jompo di tahun 2012, namun pada tahun 2015 unit ketersediaan kembali berkurang menjadi hanya 1 unit panti. Berbeda dengan panti asuhan dan panti jompo, untuk sarana rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA terjadi peningkatan sebanyak 2 unit sarana. Hal ini diduga dipicu seiring makin banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Bandung.

Informasi detail mengenai ketersediaan sarana sosial di Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 2.47

TABEL 2.47**JUMLAH SARANA SOSIAL DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2014**

Tahun	Panti Asuhan	Panti Jompo	Panti Rehabilitasi
2012	61	1	0
2013	61	1	0
2014	51	2	0
2015	45	1	2

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung

N. Ketenagakerjaan

1) Angkatan Kerja.

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja terhadap usia angkatan kerja (15 tahun ke atas).

Berdasarkan hasil Sakernas 2014, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 1.628.076 jiwa. Sementara jumlah penduduk usia kerja yang tercatat sebanyak 2.460.982 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa TPAK di Kabupaten Bandung pada tahun 2014 sebesar 66,16%.



2) Pengangguran.

Indikator lainnya yang dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah penduduk yang bekerja. Berdasarkan data Sakernas tahun 2014, jumlah pengangguran di Kabupaten Bandung sebanyak 138.045 jiwa. Sementara jumlah penduduk bekerja sebanyak 1.628.076 jiwa. Dengan demikian, tingkat pengangguran di Kabupaten Bandung sebesar 8,48%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Bandung masih tergolong tinggi.

TABEL 2.48**TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013-2014**

Tahun	Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2013	124.555	1.226.670	10,15
2014	138.045	1.628.076	8,48
2015			4,03

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN dalam menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap PMA/PMDN semakin besar pula jumlah tenaga kerja suatu daerah yang dapat terserap pada perusahaan tersebut.



Pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang terserap pada 2.468 PMA/PMDN berjumlah sebanyak 52.868 orang. Capaian ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya dimana jumlah tenaga kerja yang diserap pada perusahaan PMA/PMDN mengalami penurunan disebabkan penurunan jumlah PMA/PMDN yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun tersebut. Jumlah PMA/PMDN pada tahun 2013 di Kabupaten Bandung hanya mencapai 2.468 perusahaan berbeda jauh dengan tahun 2008-2013 yang mencapai lebih dari 500 PMA/PMDN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 2.49
RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010-2014

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	65.861	52.868	15.955	
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	311	2.468	545	
3	Rasio daya serap tenaga kerja	211	21	29	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2008-2014

O. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan koperasi dan usaha kecil menengah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

1) Persentase Koperasi Aktif.

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, penurunan kemiskinan, dan perluasan lapangan pekerjaan. Jumlah koperasi pada kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan begitu juga dengan koperasi aktif pada tahun 2014 jumlah koperasi aktif sebanyak 888 koperasi. Meskipun demikian, ditinjau dari produktivitas koperasi, kinerja koperasi di Kabupaten Bandung masih tergolong rendah. Dari total koperasi yang telah terbangun, rata-rata hanya sekitar 50 % koperasi yang berstatus koperasi aktif. Meninjau potensi koperasi terbangun, maka perlu upaya mendorong kinerja koperasi, serta menghidupkan kembali koperasi yang sudah tidak aktif.

TABEL 2.50
PERSENTASE KOPERASI AKTIF DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah koperasi aktif	782	820	820	870	888	942
2	Jumlah koperasi	1524	1.555	1.560	1.593	1.610	1664
3	Persentase koperasi aktif	51,31	52,75	52,56	54,61	55,16	56,61

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2013

2) Jumlah UKM Non BPR/LKMUKM.

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Keberadaan UMKM dan koperasi merupakan potensi yang dapat dikembangkan dan perlu didorong agar memiliki peningkatan kapasitas. Dalam kurun lima tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah koperasi dan pelaku UMKM. Informasi detail mengenai jumlah pelaku UMKM dan jumlah koperasi di Kabupaten Bandung.



TABEL 2.51
JUMLAH PELAKU UKM DAN KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pelaku UKM	5.614	5.584	7.894	16.002	9.001	9.003
2	Koperasi	1.531	1.561	1.593	1.593	1.610	1.664

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2013

3) Jumlah Omzet

Jumlah omzet menunjukkan tingkat keberhasilan suatu badan usaha. Omzet koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2014. Hal ini berarti bahwa kegiatan ekonomi masyarakat kecil menengah semakin berkembang tiap tahunnya.

TABEL 2.52
JUMLAH OMZET KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
TAHUN 2010-2014

No	Kegiatan	Omzet					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Koperasi (Rp Miliar)	0,596	0,644	0,663			
2	UMKM (Rp Triliun)	3,021	3,070	3,084	3.089	3,095	

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2013

P. Penanaman Modal

Data realisasi investasi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, baik dalam nilai investasi maupun jumlah proyeknya, walaupun jumlah proyek yang ada tidak sebanding dengan nilai investasinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2.53
JUMLAH INVESTASI PMDN/PMA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2014

Tahun	Persetujuan		Penyerapan Tenaga Kerja	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Indonesia	Asing
2010	6	386.120.983.016,00	6.270	12
2011	18	462.234.306.778,00	10.188	41
2012	76	3.692.192.487.389,00	45.125	114
2013	29	2.716.672.903.833,00	32.936	62
2014	545	1.072.182.313.995,00	11.445	4.510
2015				

Sumber: BPMP Kabupaten Bandung Tahun 2013



Berdasarkan data diatas bahwa realisasi investasi mengalami penurunan sejak tahun 2012. Realisasi investasi pada tahun 2013 hanya terdiri dari 5 bidang usaha dari 24 keseluruhan bidang usaha. Masih terdapat bidang usaha sektor primer yang masih belum mendapat perhatian dan minat investor terutama bidang kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Sektor primer baru terisi 4% dari total nilai investasi, sedangkan sektor tersier hanya terisi 3%. Sektor tersier yang belum mendapat perhatian investor diantaranya bidang listrik, gas, dan air, hotel dan restoran, perumahan, kawasan industri, perkantoran dan jasa lainnya. Sementara itu, pada tahun 2014 nilai realisasi investasi sebesar Rp1.072.182.313.995,00 dengan jumlah proyek sebanyak 545.

Q. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan cerminan jati diri masyarakat pada suatu daerah. Pelestarian budaya diupayakan melalui pemeliharaan benda-benda, situs, dan kawasan cagar budaya, serta penyelenggaraan seni dan budaya daerah.



Berikut ini merupakan data mengenai benda-benda cagar budaya yang dilestarikan serta data perkembangan kesenian di Kabupaten Bandung dalam kurun tahun 2012 - 2015.

TABEL 2.54
BENDA, SITUS, DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN
TAHUN 2012-2015

Tahun	Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Total Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dimiliki Daerah	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)
2012	11	50	22
2013	108	108	100
2014	100	100	100
2015	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

TABEL 2.55
PERKEMBANGAN KESENIAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014-2015

No.	Indikator	Jumlah 2014	Jumlah 2015
1	Jumlah Grup Kesenian Per 10000 Penduduk	Terdata	684
		Terdaftar	139
2	Jumlah Gedung Kesenian Per 10000 Penduduk	3	2
3	Jumlah Sanggar Seni	623	
4	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	74	74

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

R. Kepemudaan dan Olahraga

1) Jumlah Organisasi Pemuda.

Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda



dalam pembangunan daerah. Di Kabupaten Bandung terdapat 59 organisasi pemuda berdasarkan data tahun 2015 dengan total kegiatan kepemudaan sebanyak 29 kegiatan.

2) Jumlah Organisasi Olahraga.

Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang dibidang olahraga. Pengembangan kegiatan olahraga di Kabupaten Bandung selain dimotori oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga juga dimotori oleh masyarakat umum yang diwadahi dalam klub dan organisasi olah raga. Tahun 2015, tercatat terdapat sebanyak 100 klub olah raga dan 90 organisasi olah raga.

S. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1) Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk.

Polisi Pamong Praja adalah aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparat pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah.

TABEL 2.56
RASIO JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012-2014

Uraian	2012	2013	2014	2015
Jumlah polisi pamong praja	80	80	300	
Jumlah penduduk	3.351.048	3.415.700	3.404.549	
Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	0,24	0,23	0,88	

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bandung

2) Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk.

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas.

TABEL 2.57
RASIO JUMLAH LINMAS PER 10.000 PENDUDUK TAHUN 2012-2014

Uraian	2012	2013	2014	2015
Jumlah Linmas	11.380	5.600	5.600	5.600
Jumlah penduduk	3.351.048	3.415.700	3.404.549	3.534.112
Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	33,96	16,39	16,45	15,84

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bandung

Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan



demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

T. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, diantaranya:

1) Persentase Penyelesaian Penegakan Perda.

Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kabupaten Bandung telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**TABEL 2.58
PERSENTASE PENYELESAIAN PENEGAKAN HUKUM
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2014**

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penegakan Perda						
a.	Jumlah Pelanggaran Perda	22	35	40	64	19	
b.	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	22	35	40	64	19	
c.	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda (%)	100	100	100	100	100	
2.	Penegakan K3						
a.	Jumlah Pelanggaran K3	10	8	11	14	232	
b.	Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	10	8	11	14	187	

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bandung, 2014

2) Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolok ukur dalam menilai tingkat kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah. Di samping itu, data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

TABEL 2.59
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013

Bidang Pelayanan	Nilai IKM Konversi 2013	Mutu Pelayanan	Kinerja Bidang Pelayanan	Nilai IKM Konversi 2012
Kesehatan	74,48	B	Baik	73,53
Ekonomi	72,81	B	Baik	74,33
Administrasi Penduduk	73,79	B	Baik	70,85
Ketenagakerjaan	75,56	B	Baik	71,93
Sanitasi	75,21	B	Baik	73,64
Kebersihan	74,08	B	Baik	75,22
Pendidikan	72,47	B	Baik	70,56
Rata-rata IKM Kabupaten Bandung	74,06	B	Baik	72,87

Sumber: Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2013

U. Ketahanan Pangan

Perwujudan ketahanan pangan dapat diindikasikan dengan:

1) Ketersediaan Pangan.

Terpenuhinya kebutuhan penyediaan pangan penduduk di wilayah yaitu berdasarkan jumlah ketersediaan energi dan zat gizi per-orang per hari. Berdasarkan SPM Ketahanan Pangan, kebutuhan energi harian rata-rata penduduk Indonesia adalah 2.200 kkal, kebutuhan protein sebesar 57 gram, dengan jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 100. Realisasi dan target capaian skor PPH Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut.

TABEL 2.60
REALISASI DAN TARGET CAPAIAN SKOR PPH KETERSEDIAAN PANGAN TAHUN 2011-2014

No	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	23,8
2	Umbi-umbian	1,1	0,8	1,1	1,1	2,5
3	Pangan hewani	19,3	13,3	17,6	19,2	17,1
4	Minyak dan lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	2,7
5	Buah/Biji berminyak	0,3	0,2	0,3	0,4	0,1
6	Kacang-kacangan	5,6	4,3	5,6	5,6	5,3
7	Gula	1,6	1,7	1,9	1,8	0,0
8	Sayur dan buah	19,5	16,9	17,8	19,7	30,0
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total PPH		77,4	67,2	74,3	77,7	81,6

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2014



2) Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan.

Berdasarkan data Neraca Bahan Makanan (NBM), pada tahun 2014 jumlah ketersediaan pangan di Kabupaten Bandung sudah mencukupi kebutuhan pangan. Hal ini ditandai dengan Angka Ketersediaan Energi (AKE) dan dan Angka Ketersediaan Protein (AKP) yang melebihi angka kecukupan gizi ketersediaan pangan (ketersediaan energi sebesar 106,3% AKE dan ketersediaan protein 158,6% AKP), walaupun keberagamannya masih belum ideal ditandai dengan skor PPH tahun 2014 sebesar 86,60. Dari data tersebut, rata-rata penduduk Kabupaten Bandung mengkonsumsi bahan makanan energi yang melebihi standar kecukupan gizi, namun konsumsi terhadap bahan makanan yang berprotein masih kurang.

TABEL 2.61
REALISASI DAN TARGET CAPAIAN SKOR PPH KONSUMSI PANGAN
TAHUN 2011-2014

No	Kelompok Pangan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Konsumsi Energi (%AKE)	122,5	116,1	109,7	106,3	
2	Konsumsi Protein (%AKP)	164,1	151,9	141,2	158,6	
Total PPH		96,8	97,6	98,7	86,60	

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2013

V. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang sehat sejahtera, maju dan mandiri. Jumlah PKK di Kabupaten Bandung tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014. Informasi detail mengenai kelompok binaan PKK di Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 2.62.

TABEL 2.62
KELOMPOK BINAAN PKK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah PKK	55.633	73.436	4.158	64.591	66.748	65.800
	Jumlah PKK Aktif	55.633	73.436	4.158	64.591	66.748	65.800
	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100	100
2.	Jumlah Kelompok Binaan PKK	4.960	4.960	1.014	58.631	1.161	
3.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	0,089	6,75	0,24	0,60	0,02	

Sumber: BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2009-2014

2) Jumlah LSM yang aktif.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagai wujud partisipasi dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun lima tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah



LSM, baik jumlah LSM terdaftar maupun jumlah LSM aktif. Tahun 2015, sekitar 92 LSM terdaftar di Kabupaten Bandung memiliki status aktif.

TABEL 2.63
JUMLAH LSM AKTIF DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah LSM terdaftar	215	264	271	271	n/a	286
2.	Jumlah LSM tidak aktif	112	57	8	42	n/a	22
3.	Jumlah LSM aktif (1-2)	103	207	263	229	38	264

Sumber: Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014

W. Statistik

Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Berikut adalah ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2010-2014.

TABEL 2.64
KETERSEDIAAN DOKUMEN STATISTIK DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010-2014

No	Uraian	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1.	PDRB	√		√		√		√			√	√	
2.	IPM	√		√		√		√			√	√	
3.	Suseda	√		√			√		√		√		√
4.	KBDA	√		√		√			√		√		√
5.	Indeks Gini Ratio		√		√		√		√		√		√
6.	Input Output		√		√		√		√		√		√
7.	IKM	√		√		√		√	√		√		√
8.	IHK		√	√			√		√		√		√
9.	Data Pokok					√		√		√		√	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 20110 - 2015

X. Kearsipan

Kegiatan kearsipan yang dilakukan oleh SKPD telah diterapkan secara baku seperti yang tampak pada tabel berikut.



TABEL 2.65
JUMLAH SKPD YANG TELAH MENERAPKAN ARSIP SECARA BAKU
TAHUN 2012-2014

No.	Indikator/Data	2012	2013	2014	2015
1	Badan	9	9	9	9
2	Dinas	14	14	14	14
3	Bagian	10	10	10	10
4	RSUD	3	3	3	3
5	Lembaga Teknis Daerah	4	4	4	4
6	Kecamatan	31	31	31	31
7	Kelurahan	9	9	9	9
8	Desa	60	60	60	60
Total		140	140	140	140

Sumber: Badan Perpustakaan, Arsip, dan Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten Bandung Tahun 2015

Namun demikian, jumlah arsiparis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung masih sedikit, padahal arsip merupakan dokumen tertulis yang harus dikelola dengan professional. Jumlah tenaga arsiparis di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 2.66
JUMLAH ARSIPARIS DI LINGKUNGAN PEMKAB BANDUNG TAHUN 2012-2015

No.	Indikator/Data	2012	2013	2014	2015
1	Arsiparis Penyelia	3	3	3	
2	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	2	2	2	
3	Arsiparis Pelaksana	13	13	13	
Total		18	18	18	

Sumber: Badan Perpustakaan, Arsip, dan Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten Bandung Tahun 2014

Y. Komunikasi dan Informatika

1) Jumlah jaringan komunikasi.

Pada tahun 2014, jumlah SKPD yang telah memiliki akses internet di Kabupaten Bandung sebanyak 72 SKPD, jumlah sistem informasi sebanyak 38 unit, dan jumlah titik hotspot sebanyak 5 titik. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah sarana/prasarana komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2010-2015.

TABEL 2.67
JUMLAH KETERSEDIAAN SARANA/PRASARANA (TEKNOLOGI) KOMUNIKASI DAN
INFORMASI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015

No.	Surat Kabar	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah SKPD yang memiliki akses	100	28	28	72	72	



No.	Surat Kabar	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	internet						
2	Jumlah sistem informasi yang ada	38	38	38	38	38	
3.	Jumlah titik hotspot yang difasilitasi pemda	5	5	5	5	5	

Sumber: Badan Perpustakaan, Arsip, dan Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten Bandung Tahun 2014

Z. Perpustakaan

1) Jumlah perpustakaan

Jumlah perpustakaan pada tahun 2014 masih sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan cakupan pelayanan perpustakaan masih memadai.

TABEL 2.68
JUMLAH PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015

No	Jenis Perpustakaan	2012	2013	2014	2015
1	Perpustakaan Desa/Kelurahan	276	276	276	
2	Perpustakaan SD	33	33	33	
3	Perpustakaan SMP	37	37	37	
4	Perpustakaan SMA/SMK	15	15	15	
5	Perpustakaan SKPD	8	8	8	
6	Perpustakaan PONTREN	17	17	17	
7	Perpustakaan Masyarakat (TBM, RUPIN, dsb)	15	24	24	
Total		401	410	410	

Sumber: Badan Perpustakaan, Arsip, dan Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten Bandung

2) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun.

Jumlah kunjungan ke perpustakaan menunjukkan tingkat minat baca masyarakat suatu daerah, seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

TABEL 2.69
JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Kunjungan ke perpustakaan	10.951	24.684	25.345	34672
2	Populasi yang Harus Dilayani	39.157	40.000	40.000	40.000

Sumber: Badan Perpustakaan, Arsip, dan Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten Bandung



2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian dan Peternakan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

- 1) Indikator Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura.



TABEL 2.70
INDIKATOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011-2013

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah pencapaian produktivitas komoditas: • Padi (kw/Ha)	61,2	63,66	64,33	62,87	64,77
2	Luas areal pengembangan hortikultura unggulan (Ha) • Alpukat • Strawberry • Jeruk • Jambu biji • Krisan • Sedap malam • Mawar	9 2 2 2 1.000 1.000 0	18 3 3 3 4.000 2.000 0	27 4 4 4 7.000 3.000 500		
3	Jumlah pencapaian indeks pertanaman (IP)	1,98	2,01	2,10		
4	Jumlah rata-rata pencapaian produktivitas hortikultura • Sayuran (kw/Ha) • Buah-buahan (kw/Ha) • Tanaman Hias (tangkai/Ha) • Tanaman Obat (tangkai/Ha)	196,96 50,70 13,25 2,89	198,13 98,00 13,53 3,07	204,07 100,00 16,81 3,13		
5	Jumlah kelompok yang terbina melalui penyuluh (kelompok)	1.590	1.680	1.888		
6	Jumlah Penyuluh pertanian/perkebunan lapangan yang mendapatkan pelatihan (orang)	200	379	192		

Sumber: Distanbunhut, 2013

- 2) Indikator Peternakan.

Dalam kurun lima tahun terakhir, terjadi trend peningkatan dalam persentase penanggulangan ternak prioritas. Tahun 2015 tercatat persentase jumlah penyakit hewan prioritas yang tertanggulangi sebesar 32 %. Hal ini diikuti dengan peningkatan pencapaian status kesehatan hewan





sebesar 67,40 % di tahun yang sama.

TABEL 2.71
INDIKATOR PETERNAKAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatnya jumlah penyakit hewan prioritas yang tertanggulangi (%)	16,00	20,00	24,00	28,00	32,00
2	Meningkatnya status kesehatan hewan (%)	60,00	62,50	63,75	67,40	67,40
3	Meningkatnya kapasitas pelaku usaha pembudidaya ternak yang mendorong peningkatan produksi hasil peternakan (%)	26,97	45,69	68,16	116,11	131,34
4	Peningkatan pelaku usaha pengolahan hasil ternak yang bersertifikat (unit usaha)	33	40	48	66	200
5	Meningkatnya pemanfaatan teknologi peternakan (orang)	141	167	147	88	587
6	Meningkatnya sarana dan prasarana pemotongan ternak di RPH (%)	61,72	63,54	63,95	69,5	79

Sumber: Disnakan, 2013; Hasil Evaluasi RPJMD 2010 - 2015

B. Kehutanan

1) Indikator Kehutanan.



Praktek *illegal logging* dan *illegal trading*, perambahan hutan, kebakaran hutan, pembukaan hutan untuk keperluan di luar sektor kehutanan, pengelolaan hutan yang belum menerapkan azas kelestarian merupakan faktor utama penyebab kerusakan hutan. Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Sabilulungan merupakan salah satu upaya percepatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang diarahkan untuk penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor dan kekeringan secara terpadu

dengan peran semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pengusaha dan lain-lain) melalui mobilisasi sumber daya.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai pencapaian indikator Kehutanan di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2011-2013.

TABEL 2.72
INDIKATOR KEHUTANAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011-2014

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah luas lahan kritis yang tertanami (Ha)	6.155,68	13.538,66	4.415,00	32.057,80	24.542,5



No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
2	Persentase luas lahan kritis yang tertanami (%)	10,28	32,86	63,72	66,37	66,37
3	Jumlah kelompok agroforestry	30	35	40	45	
4	Jumlah kelompok tani berbasis Aneka Usaha Kehutanan	30	35	40	45	

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Tahun 2013; Hasil Evaluasi RPJMD 2010 - 2015

C. Energi dan Sumber Daya Mineral

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan energi dan sumber daya mineral yaitu sebagai berikut.

1) Energi

Potensi energi di Kabupaten Bandung terdiri dari panas bumi (geothermal), mikrohidro, biogas (limbah ternak), bahan bakar nabati (limbah organik) dan tenaga surya (PLTS).

a) Panas Bumi

Terdapat 5 wilayah pengembangan yaitu wilayah Kamojang, Wayang Windu, Patuha, Cibuni, dan Darajat. Perolehan DBH panas bumi Kabupaten Bandung Tahun 2013 sebesar Rp.51.718.860.646, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp.105.298.055.081,55, dan tahun 2011 sebesar Rp.53.860.362.127,00.

b) Ketenagalistrikan

Pada tahun 2015, jumlah rumah tangga di Kabupaten Bandung yang menggunakan listrik PLN sebanyak 732.815 KK atau sekitar 83,02 % dari total jumlah KK. Pemenuhan listrik penduduk Kabupaten Bandung, disamping dipenuhi oleh listrik PLN juga dipenuhi oleh tenaga mikro hidro. Tahun 2014 tercatat jumlah pengguna energi mikro hidro di Kabupaten Bandung sebanyak 34 KK (Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu) dan pengguna energi surya sebanyak 150 KK masing-masing sebanyak 50 KK yang terletak di Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg, Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan, dan Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu.

c) Minyak dan Gas Bumi

Minyak dan gas bumi di Kabupaten Bandung umumnya bergerak di kegiatan hilir yaitu SPBU sebanyak 50 unit usaha dan agen LPG sebanyak 52 agen..

2) Sumber Daya Mineral

a) Pertambangan

Keberadaan sumber daya mineral di Kabupaten Bandung berupa andesit, tanah urug, dan emas yang tersebar di Kecamatan Margaasih, Baleendah, Nagreg, Kutawaringin, Pameungpeuk, dan Banjaran dengan jumlah perusahaan yang melaksanakan produksi sebanyak 22 perusahaan dengan luas lahan 119,17 Ha. Dari jumlah tersebut, hanya 15 perusahaan yang aktif.



Potensi bahan galian yang ada di Kabupaten Bandung selain andesit dan tanah urug juga terdapat potensi emas yang sebagian besar berada di Kecamatan Kutawaringin. Kondisi pengelolaan potensi ini adalah masih dilakukan dengan pertambangan rakyat.

Pengelolaan oleh perusahaan bahan galian di Kabupaten Bandung dilakukan dengan mengedepankan konservasi dan penggalian potensi untuk peningkatan PAD. Untuk pengendalian dan pembinaan dilakukan dengan perijinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Pada tahun 2014 jumlah luasan pertambangan berijin sebesar 91,56%.

b) Sumber Daya Air Tanah

Kabupaten Bandung sebagai bagian dari cekungan air tanah Bandung-Soreang mengikuti prinsip pengelolaan *'one basin one management'*. Menurut hasil penelitian dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral disebutkan bahwa potensi jumlah air tanah yang terkandung dalam cekungan air tanah Bandung-Soreang adalah 368,5 juta m³/tahun. Dari jumlah total tersebut diperkirakan kebutuhan air di wilayah cekungan Bandung-Soreang yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut adalah sebesar 312,75 juta m³.

TABEL 2.73
INDIKATOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2011-2014

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio elektrifikasi Rumah Tangga Miskin	8,93	14,15	20,34	38,55	40,48
2	Prosentase luasan pertambangan berijin (%)	88,74	89,77	90,65	91,56	92,48
3	Rata-rata pemakaian air tanah per sumur setiap bulan (m ³ /sumur)	17.016,3 7	16.954,9 7	16.885,1 7	17.845, 21	17.206
4	Prosentasi ketersediaan peta zonasi kerentanan gerakan tanah	50,00	62,50	75,00	100	71

Sumber: Dinas SDAPE, 2014; Hasil Evaluasi RPJMD 2010 - 2015

D. Pariwisata

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Bandung mempunyai cukup banyak potensi dimana sebagian besar merupakan wisata alam dan agro. Capaian indikator pada urusan pariwisata adalah sebagai berikut.

TABEL 2.74
INDIKATOR CAPAIAN PARIWISATA DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kunjungan wisata (orang)	5.124.142	5.645.569	6.234.555	6.608.628	7.685.376
2	Jumlah daya tarik wisata (lokasi)	40	45	50	55	64
3	Jumlah mitra kerja pariwisata (orang)	1.124	1.224	1.312	1.442	520

Sumber: Dispopar Kabupaten Bandung, 2014



E. Kelautan dan Perikanan

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai indikator perikanan di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2011-2015.

TABEL 2.75
INDIKATOR PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatnya kapasitas kelompok/UPR pembenihan dan pembudidayaan ikan/pokdakan (kelompok)	72	126	186	294	726
2	Meningkatnya pelaku usaha budidaya perikanan bersertifikat CBIB (orang)	17	34	49	79	199
3	Meningkatnya masyarakat yang aktif mengawasi lingkungan kawasan budidaya (pokmaswas)	0	3	3	9	9
4	Terjaganya kelestarian ikan diperairan umum (lokasi)	11	18	27	40	144
5	Peningkatan pelaku usaha pengolahan ikan bersertifikat (unit usaha)	23	35	50	84	84
6	Jumlah SDM pengembang sistem penyuluhan perikanan (orang)	12	197	10	n/a	47

Sumber: Disnakan Kabupaten Bandung, 2014; Hasil Evaluasi RPJMD 2010 - 2015

F. Perdagangan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perdagangan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

TABEL 2.76
INDIKATOR CAPAIAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penyelesaian kasus dalam fasilitasi advokasi perlindungan konsumen	0	10	35	20	17
2	Jumlah nilai ekspor barang dan jasa (US \$)	511.338.087,31	833.686.178,32	821.019.618,92	777.105.000.000	508.950.000.000
3	Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata	2	5	7	2	3

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Bandung, 2013; Hasil Evaluasi RPJMD 2010 - 2015

Jumlah nilai ekspor barang dan jasa (US\$) mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar US\$821.019.618,92 menjadi US\$ 777.105.000.000 pada tahun 2014 dan menjadi US\$ 508.950.000 pada tahun 2015.



G. Perindustrian

Kecenderungan membaiknya perekonomian nasional dan regional merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Sektor industri di Kabupaten Bandung mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Bandung, terutama industri olahan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perindustrian dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

TABEL 2.77
PERTUMBUHAN INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015

Tahun	Industri Kecil		Industri Menengah	Industri Besar	Total
	Non Formal	Formal			
2012	4.070	7	3	14	4.094
2013	3.927	140	270	302	4.639
2014	4.085	424	37	44	4.590
2015			207	117	

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, 2014

Dari tabel di atas, pada industri kecil jumlah pelaku usaha non formal mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 3.927 unit menjadi 4.085 unit pada tahun 2014, sedangkan jumlah industri kecil formal mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 140 unit menjadi 424 unit pada tahun 2014.

H. Transmigrasi

Sejak tahun 2013 tidak terjadi transmigrasi di Kabupaten Bandung. Transmigrasi hanya terjadi pada tahun 2012 yang bersifat transmigrasi umum dengan jumlah transmigran sebanyak 136 jiwa.

TABEL 2.78
JUMLAH TRANSMIGRASI MENURUT JENIS TAHUN 2012-2014

Jenis Transmigrasi		2012	2013	2014
Transmigran Swakarsa	Jumlah KK	0	0	0
	Jumlah Jiwa	0	0	0
Transmigran Umum	Jumlah KK	40	n/a	0
	Jumlah Jiwa	136	n/a	0
Transmigran Bedol Desa	Jumlah KK	0	n/a	n/a
	Jumlah Jiwa	0	n/a	n/a

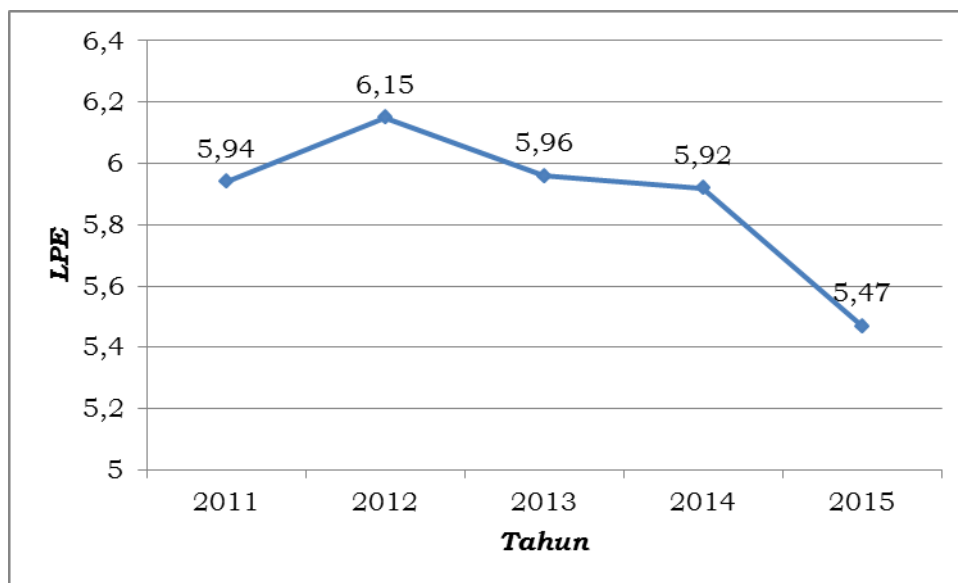
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah didefinisikan oleh *Centre for Regional and Urban Studies (CURDS)*, Inggris sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Daya saing daerah menilai kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasanya.



Daya saing daerah menjadi salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan, dan unggulan dari daerah itu sendiri. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk melihat tingkat daya saing daerah diantaranya dapat dilihat melalui indikator makro ekonomi seperti LPE dan PDRB per kapita.

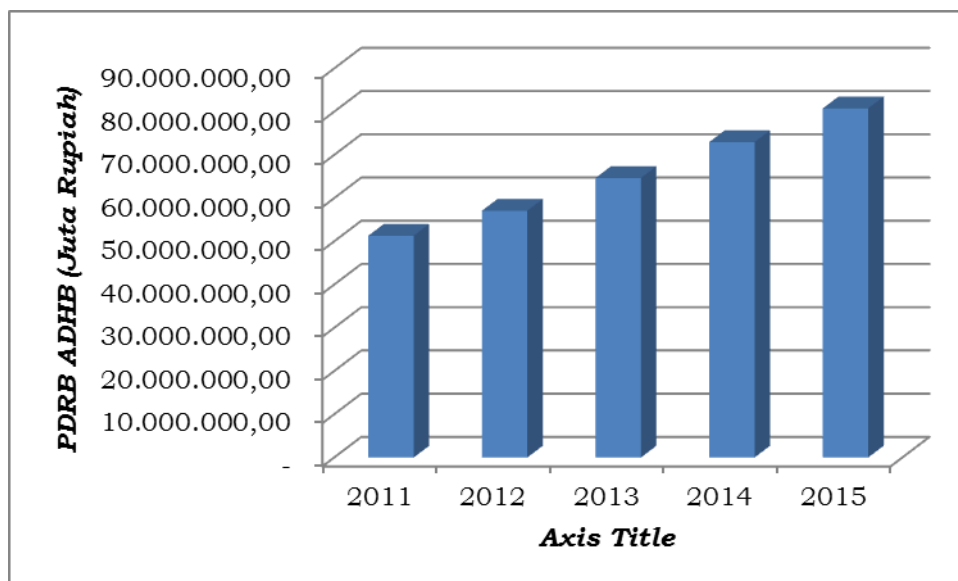


GAMBAR 2.29
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BANDUNG

Sumber: APE Kab. Bandung 2015

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung yang dinilai dari Kinerja PDRB sebagaimana telah dipaparkan pada subbab 2.2.1 menunjukkan terjadi kenaikan nilai PDRB, baik nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan, maupun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Kendati demikian trend LPE Kabupaten Bandung sebagaimana ditampilkan pada Grafik 2.29 di atas menunjukkan terjadinya perlambatan nilai LPE. Terjadinya perlambatan nilai LPE Kabupaten Bandung dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal. Faktor internal yang berpengaruh antara lain karena adanya perlambatan sektor pertanian dari semula mampu tumbuh 2,24 perse di tahun 2014 menjadi hanya tumbuh sebesar 0,67 persen di tahun 2015. Selain dipicu oleh adanya perlambatan di sektor pertanian, perlambatan LPE Kabupaten Bandung juga dipicu oleh adanya perlambatan sektor industri pengolahan yang semula tumbuh dengan laju pertumbuhan 5,05 persen di tahun 2014 menurun menjadi sebesar 4,32 persen di tahun 2015.

Adapun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Bandung antara lain adanya pengaruh global akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada penurunan permintaan produk ekspor sehingga permintaan produk ekspor Kabupaten Bandung mengalami penurunan.

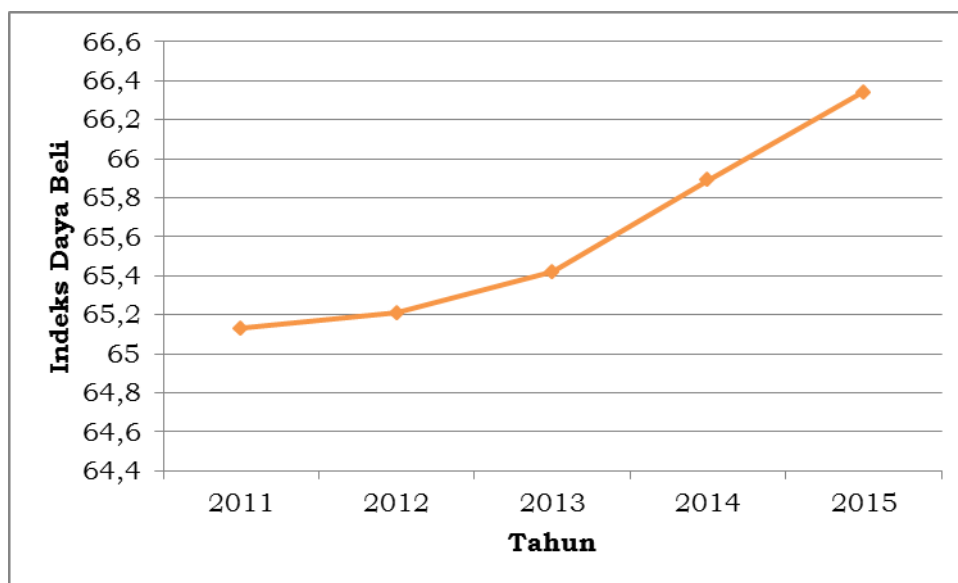


GAMBAR 2.30
PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU (RUPIAH)

Sumber: APE Kab. Bandung 2014

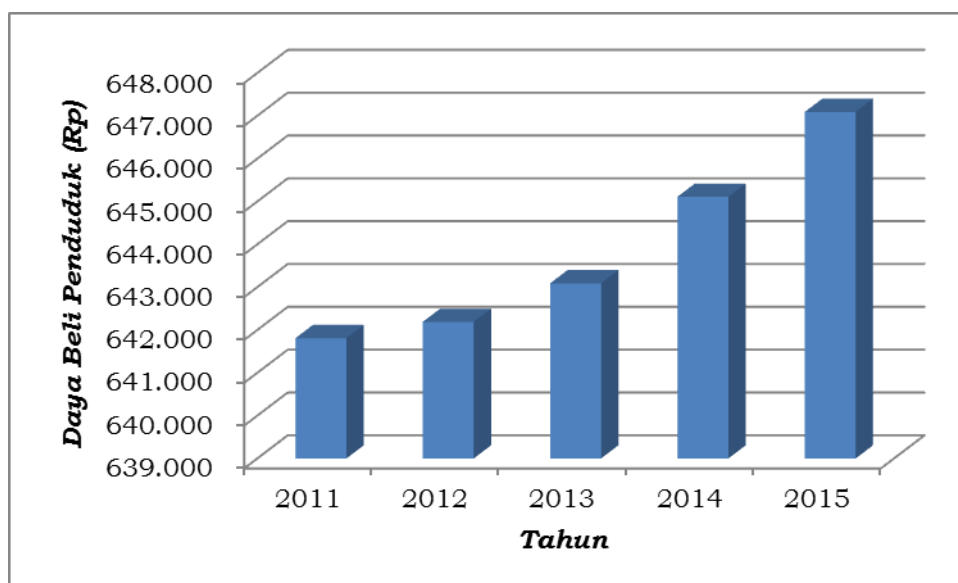
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, yaitu sebagai berikut.



GAMBAR 2.31
INDEKS DAYA BELI MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG

Sumber: IPM Kab. Bandung 2013, APE, APS Kab. Bandung 2014



GAMBAR 2.32

PURCHASING POWER PARITY KABUPATEN BANDUNG DALAM RIBU RUPIAH

Sumber: IPM Kab. Bandung 2013, APE, APS Kab. Bandung 2014

- a. Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan/Angka Konsumsi Rata-rata RT Per Kapita Sebulan (Pangan dan Non Pangan)

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Pada tahun 2013 pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan di Kabupaten Bandung mencapai Rp.1.291.800 yang terdiri dari bahan pangan sebesar Rp.442.500 dan non pangan sebesar Rp.849.300. Angka ini pada tiap tahunnya terus meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 2.79

**ANGKA KONSUMSI RATA-RATA RT PER KAPITA SEBULAN
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2013**

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan (pangan)	290.000	339.000	398.000	442.500		
2.	Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan (non pangan)	798.000	800.000	825.800	849.300		
3.	Jumlah pengeluaran per kapita sebulan (pangan+non pangan)	1.088.000	1.189.000	1.223.800	1.291.800		

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan



b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga.

Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani.

TABEL 2.80
NILAI TUKAR PETANI (NTP) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2013

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Indeks Diterima Petani	129,77	144,18	156,01	113,23		
2	Indeks Dibayar Petani	130,67	137,42	143,20	108,84		
3	Nilai Tukar Petani	99,28	104,90	108,93	104,04		

Sumber: BPS Jawa Barat

c. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas total daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Berikut produktivitas per sektor di Kabupaten Bandung Tahun 2014.



TABEL 2.81
PRODUKTIVITAS PER SEKTOR DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015

No	Sektor	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	Juta (Rp)	%
	PDRB (adhb)	46.092.238,74	100	51.291.762,65	100	57.071.406,68	100	64.660.447,43	100	72.945.347,59	100	80.752.786,97	100
1.1	Pertanian	3.471.661,92	7,53	3.978.936,25	7,76	4.518.784,28	7,92	5.172.325,03	8,04	5.675.148,04	7,70	6.096.809,16	7,55
1.2	Pertambangan & Penggalian	580.783,81	1,26	690.284,85	1,25	686.014,49	1,20	673.133,71	1,05	656.508,13	0,90	714.839,97	0,89
1.3	Industri	27.471.535,02	59,60	30.116.379,01	58,72	32.915.231,13	57,67	36.721.871,46	57,08	40.594.085,93	55,65	44.208.777,89	54,75
1.4	Listrik, Gas & Air	741.188,33	1,61	824.630,98	1,61	954.918,90	1,67	1.166.432,32	1,81	1.283.838,12	1,76	1.405.950,27	1,74
1.5	Konstruksi	764.990,68	1,66	852.508,61	1,66	947.236,94	1,66	1.143.674,37	1,78	1.291.132,65	1,77	1.447.356,56	1,79
1.6	Perdagangan, Hotel &	7.796.200,55	16,91	8.920.233,69	17,39	10.436.027,24	18,29	11.795.595,18	18,33	14.326.466,27	19,64	16.615.938,52	20,58
1.7	Pengangkutan & Komunikasi	1.933.148,22	4,19	2.192.001,83	4,21	2.374.097,92	4,16	2.659.942,03	4,19	3.049.115,53	4,18	3.469.128,60	4,30
1.8	Keuangan, sewa, & Jasa Perumahan	898.354,49	1,95	975.702,84	1,93	1.123.606,62	1,97	1.217.604,86	1,89	1.334.899,86	1,83	1.471.507,11	1,82
1.9	Jasa-jasa	2.434.375,72	5,28	2.730.251,40	5,47	3.115.489,15	5,46	3.783.648,37	5,88	4.734.153,06	6,49	5.322.478,89	6,59
	Jumlah Angkatan	1.353.354		1.457.184		1.286.687		1.226.670		1.204.102		1.628.076	

Sumber: PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2014; SIPD 2015

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan. Namun demikian pembahasan berikut ini hanya meliputi infrastruktur yang memiliki peranan vital di Kabupaten Bandung.

a. Aksesibilitas Daerah

1) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan.

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/ akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut.



TABEL 2.82
RASIO PANJANG JALAN PER JUMLAH KENDARAAN DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010-2013

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Panjang Jalan	1.155,36	1.155,90	n/a	1.155,35	1.155,34	1.155,54
2.	Jumlah Kendaraan						
	- Roda 4	120.719,00	54.852	n/a	n/a		
	- Roda 2	853.212,00	272.520	n/a	n/a		
	Jumlah	973.931,00	327.372	n/a	n/a		
3.	Rasio	1:843	1:283,2	n/a	n/a		

Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung



b. Ketersediaan Air Bersih

1) Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih.

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sementara air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, dan air sumur dalam.

TABEL 2.83
PERSENTASE JUMLAH RUMAH TANGGA (RT) YANG MENGGUNAKAN AIR BERSIH
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015

No.	Sumber Air Bersih	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Ledeng (Perpipaan)	69.227	146.086	151.049	n/a	78.168	
2.	Sumur Lindung	291.409	82.826	165.751	n/a	582.167	
3.	Sumur Tidak Terlindung	36.709	15.354	18.344	n/a	n/a	
4.	Mata Air Terlindung	109.037	116.271	143.129	n/a	245.729	
5.	Mata Air Tidak Terlindung	26.014	17.579	19.077	n/a	n/a	
6.	Sungai	-	-	-	n/a	7.728	
7.	Air Hujan	-	-	-	n/a	n/a	
8.	Air Kemasan	190.492	137.189	50.102	n/a	n/a	
9.	Pompa	103.019	133.333	110.348	n/a	n/a	
10.	Air lainnya	6.081	204.463	245.244	n/a	26.723	
11.	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	831.988	615.705	620.379	n/a	940.515	
12.	Jumlah Rumah Tangga	831.988	853.101	865.623	n/a	940.551	
13.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	100	72,17	71,67	n/a	100	

Sumber: BPS Kabupaten Bandung

c. Fasilitas Listrik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Pada tahun 2014 jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik sebanyak 731.428 rumah tangga. Adapun pada tahun 2015, rumah tangga pengguna listrik meningkat menjadi 882.739 rumah tangga. Gambaran secara lengkap mengenai persentase jumlah rumah tangga di Kabupaten Bandung yang telah menggunakan listrik dalam kurun lima tahun terakhir ditampilkan pada Tabel 2.84.



TABEL 2.84
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN LISTRIK
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Rumah Tangga	785.723	850.768	874.664	882.739	882.739
2	Jumlah Pelanggan PLN	479.089	554.946	601.564	731.428	732.815
3	Rasio Elektrifikasi (%)	60,97	65,23	68,78	82,86	83,02

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Kemudahan Perijinan

Pembentukan daya saing investasi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan, kemudahan dalam memperoleh perijinan dan berapa lama proses dilakukan, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 2.85
LAMA PROSES PERIZINAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2013

No	Uraian	Lama mengurus (hari kerja)		Jumlah persyaratan (dokumen)		Biaya resmi (rata-rata maks Rupiah)	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013
1.	SIUP	14	7	4	9	Gratis	Gratis
2.	SITU	14		4		Gratis	
3.	TDP	14	14	4	11	Gratis	Gratis
4.	IUI	14	14	5	9	Gratis	Gratis
5.	TDI	14	14	4	8	Gratis	Gratis
6.	IMB	14		6		250-7500/m2	
7.	HO:	14		6		150-750/m2	
	Kawasan Peruntukan Industri, Jasa, dan Perdagangan		14		14		175/m2
	Kawasan Wisata		14		14		350/m2
	Kawasan Pertanian		14		14		525/m2
	Kawasan Permukiman		14		14		700/m2
8.	IPT	14		3		Gratis	
9.	Reklame	14		2		Gratis	
10.	IPLC	14		3		Gratis	
11.	Jasa Konstruksi	14		4		Gratis	

Sumber: BPMP Kabupaten Bandung dan Data Pokok Perencanaan Pembangunan



b. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah)

Jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun 2013 sebesar Rp287.766.327.300. Penerimaan pajak terbesar berasal dari sektor perdagangan dan jasa, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame.

TABEL 2.86
JUMLAH REALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2013 (JUTA RUPIAH)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Pajak Daerah	59.385.578.062	137.799.240.880	186.141.858.448	287.766.327.300		263.382.157.260
	Pajak Hotel	1.122.094.256	1.382.279.874	2.311.227.053	2.400.777.599		726.345.889
	Pajak Restoran	3.541.972.662	4.871.316.085	6.894.597.594	7.823.365.492		2.105.208.744
	Pajak Hiburan	2.063.299.025	955.618.520	706.313.905	1.142.433.048		318.669.430
	Pajak Reklame	2.022.621.402	2.547.378.797	2.712.275.886	2.770.273.862		610.577.772
	Pajak Penerangan Jalan	50.234.236.814	64.705.088.990	83.975.194.771	96.023.473.031		34.275.516.801
	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C	108.188.999	142.701.367	192.014.591	222.557.970		59.529.750
	Pajak Parkir	293.164.904	597.392.330	453.376.485	381.466.950		115.191.540
2.	Retribusi	60.370.841.839	3.011.256.483	41.045.068.255	49.547.220.662		22.945.707.326
	Jumlah Retribusi Jasa Umum	50.640.948.750	23.171.379.397	28.858.845.421	35.746.478.813		4.395.000.000
	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	2.451.180.000	1.866.534.430	2.813.859.600	4.077.403.500		17.181
	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	8.022.691.887	7.753.466.857	7.845.721.588	9.723.338.349		2.341.764.941

Sumber: DPPK Kabupaten Bandung dan Data Pokok Perencanaan Pembangunan

2.4.4. Status Desa (Persentase Desa Berstatus Swasembada)

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi perdesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Berdasarkan statusnya, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang).



TABEL 2.87
PERSENTASE DESA BERSTATUS SWASEMBADA TERHADAP TOTAL DESA
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya	97	176	176	186		
2.	Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya	104	6	6	4		
3.	Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada	0	0	0	0		
4.	Jumlah Desa/Kelurahan (1) + (2) + (3)	201	182	182	182		
5.	Persentase Desa berstatus swasembada dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4)	0%	0%	0%	0%		

Sumber: BPMPD Kabupaten Bandung

2.4.5 Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Kualitas SDM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja dimana sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

TABEL 2.88
RASIO LULUSAN S1, S2, DAN S3 DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2014

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah lulusan S1	n/a	n/a	n/a	87.227
2	Jumlah lulusan S2	n/a	n/a	n/a	5.880
3	Jumlah lulusan S3	n/a	n/a	n/a	859
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	72.899	n/a	1.471	93.966
5	Jumlah penduduk	3.351.048	n/a	3.470.393	3.534.112
6	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	217,54	n/a	4,24	37,61

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung

2.4.6 Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2010-2014.



TABEL 2.89
RASIO KETERGANTUNGAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio ketergantungan	54.10	53,17	52,13	51,47	48,59	51,13

Sumber: APS Kabupaten Bandung 2015

A photograph of the Bupati Office in Bandung, featuring a large, modern building with a prominent triangular roof structure, surrounded by palm trees and a wide staircase leading up to the entrance. The text 'KANTOR BUPATI BANDUNG' is visible on a sign in front of the building.

BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila rencana penyelenggaraan program pembangunan daerah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah (*money follow programs*). Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah dengan berpedoman pada asas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahunnya dalam peraturan daerah.

Untuk memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung tahun 2016 – 2021, pada bagian ini akan dipaparkan hasil analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah serta rencana kerangka pendanaan pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan analisis pengelolaan keuangan daerah merupakan analisis terhadap potensi, kapasitas dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bandung dalam mendanai pembangunan. Untuk memperoleh gambaran mengenai pola/ trend pengelolaan keuangan, digunakan analisis timeseries terhadap data lima tahun terakhir. Adapun yang dimaksud dengan analisis rencana kerangka pendanaan pembangunan yaitu prakiraan kemampuan pendanaan daerah berdasarkan hasil proyeksi gambaran pengelolaan keuangan daerah lima tahun terakhir.

3.1. Kinerja Keuangan Lima Tahun Terakhir

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 13 tahun 2006, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi komponen pendapatan, belanja serta pembiayaan. Untuk wilayah Kabupaten Bandung, pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. Secara detail, kinerja pelaksanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah di Kabupaten Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut.



A. Pendapatan Daerah

Mengacu pada Perda Kabupaten Bandung No 8 Tahun 2001, yang dimaksud dengan pendapatan daerah antara lain meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:
 - a) Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan pajak daerah di Kabupaten Bandung meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - b) Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Bandung meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan.
 - c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pendapatan ini meliputi bagian atas laba penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jabar dan Banten.
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Pendapatan ini meliputi penerimaan jasa giro dan bunga deposito, penjualan hasil pertanian, penjualan hasil peternakan, dan lainnya.
- 2) Pendapatan Transfer, meliputi:
 - a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
 - i. Dana Bagi Hasil Pajak
 - ii. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
 - iii. Dana Alokasi Umum
 - iv. Dana Alokasi Khusus
 - b) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
 - i. Dana Penyesuaian
 - c) Transfer Pemerintah Provinsi
 - i. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
- 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah, meliputi:
 - a) Pendapatan Hibah
 - b) Pendapatan Lainnya

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2011 – 2015 ditampilkan pada Tabel 3.1.



TABEL 3.1

RATA- RATA PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011 - 2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN DAERAH	2.453.398.748.635,70	2.902.414.601.182,00	3.368.043.981.175,50	4.038.777.825.787,08	4.476.751.164.755,60	16,28
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	291.062.396.559,70	366.316.690.578,00	507.243.684.130,50	702.045.372.759,08	784.149.788.135,60	28,61
1.1.1.	Pajak daerah	137.799.240.880,00	186.141.858.448,00	287.766.327.300,00	298.589.031.519,00	340.007.248.935,00	26,83
1.1.2.	Retribusi daerah	32.791.380.684,00	41.045.068.255,00	49.547.220.662,00	30.590.439.477,00	31.267.911.502,00	2,46
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	43.117.989.633,00	45.168.813.789,00	50.139.506.724,00	56.527.342.258,00	53.451.614.657,00	5,77
1.1.4.	Lain-lain PAD sah	77.353.785.362,70	93.960.950.086,00	119.790.629.444,50	316.338.559.505,08	359.423.013.041,60	56,66
1.2.	Dana Perimbangan	2.097.305.995.076,00	2.432.896.865.494,00	2.724.549.456.516,00	3.092.824.175.044,00	3.412.982.695.746,00	12,96
1.2.1.	Transfer pemerintah pusat - dana perimbangan	1.511.351.819.966,00	1.954.099.527.667,00	2.104.760.856.008,00	2.261.962.786.050,00	2.310.509.110.606,00	11,65
1.2.1.1.	Dana bagi hasil pajak	123.223.997.650,00	143.431.554.029,00	84.447.979.092,00	101.357.375.100,00	86.988.871.253,00	(4,72)
1.2.1.2.	Dana bagi hasil bukan pajak (SDA)	85.384.881.316,00	124.927.690.638,00	131.155.157.916,00	105.461.590.950,00	120.744.114.353,00	11,55
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum	1.202.706.641.000,00	1.518.230.253.000,00	1.730.063.709.000,00	1.897.769.300.000,00	1.957.538.845.000,00	13,26
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	100.036.300.000,00	167.510.030.000,00	159.094.010.000,00	157.374.520.000,00	145.237.280.000,00	13,41
1.2.2.	Transfer pemerintah pusat - lainnya	445.459.218.440,00	318.054.232.000,00	428.493.318.000,00	523.804.154.000,00	734.583.731.000,00	17,15
1.2.2.1.	Dana penyesuaian	445.459.218.440,00	318.054.232.000,00	428.493.318.000,00	523.804.154.000,00	734.583.731.000,00	17,15
1.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	140.494.956.670,00	160.743.105.827,00	191.295.282.508,00	307.057.234.994,00	367.889.854.140	28,44
1.2.3.1.	Pendapatan bagi hasil pajak/ Lainnya	140.494.956.670,00	160.743.105.827,00	191.295.282.508,00	307.057.234.994,00	367.889.854.140	28,44
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	65.030.357.000,00	103.201.045.110,00	136.250.840.529,00	243.908.277.984,00	279.618.680.874,00	46,09
1.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	1.490.141.040,00	1.301.402.183,00	1.192.458.160,00	(10,52)
1.3.2.	Pendapatan Lainnya	65.030.357.000,00	103.201.045.110,00	134.760.699.489,00	242.606.875.801,00	278.426.222.714,00	46,02

Sumber: Bappeda dan DPPK, 2016



Kinerja pelaksanaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, pada periode 2011-2015 dapat diringkas sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah dalam kurun lima tahun terakhir tercatat tumbuh dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 28,61%. Peningkatan PAD terbesar terjadi dalam rentang tahun 2013 - 2014 dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 38,43 % per tahun. Peningkatan pada tahun 2013 diakibatkan adanya peningkatan yang signifikan dalam penerimaan pajak daerah. Sedangkan peningkatan pada tahun 2014 lebih diakibatkan adanya kenaikan signifikan dari pos Lain-lain PAD yang Sah akibat masuknya pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ke pos ini. Adanya peningkatan pendapatan asli daerah ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bandung telah berkembang cukup baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Bandung secara keseluruhan.
- Pendapatan Transfer/ Dana Perimbangan dalam kurun lima tahun terakhir tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,96 % setiap tahunnya. Ditinjau berdasarkan besar pendapatan, nilai dana perimbangan di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pendapatan dana perimbangan terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp 3.412.982.695.746,00. Ditinjau berdasarkan angka pertumbuhan, pertumbuhan dana perimbangan terbesar terjadi tahun 2014 dengan angka pertumbuhan sebesar 13,52 %. Meninjau rata-rata pertumbuhan dana perimbangan secara keseluruhan, tampak bahwa nilai rata-rata pertumbuhan dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan angka pertumbuhan positif, yang mana hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan oleh aparat pemerintah Kabupaten Bandung telah berjalan cukup baik.
- Pertumbuhan rata-rata Lain-lain Pendapatan yang Sah yaitu sebesar 46,09 %. Penerimaan terbesar dari pos ini terjadi pada tahun 2015 yang disebabkan kenaikan baik pada pos pendapatan hibah dan pendapatan lainnya.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung, belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti misalnya belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun yang dimaksud dengan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti misalnya belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Ditinjau perkomponen penyusunnya, sekitar 60 % belanja Kabupaten Bandung digunakan untuk belanja tidak langsung. Sedangkan proporsi belanja langsung yaitu sekitar 40 %. Secara detail, Belanja Kabupaten Bandung tahun 2011 – 2015 ditampilkan pada Tabel 3.2.



TABEL 3.2

RATA- RATA PERTUMBUHAN REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011 - 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata- Rata Pertumbuhan (%)
1	Belanja Daerah	2.461.282.122.370	2.851.978.727.413,00	3.242.165.132.570,00	3.823.064.504.314,00	4.607.334.886.118	17,00
1.1	Belanja Tidak Langsung	1.640.115.443.895,00	1.736.329.871.127,00	1.938.719.940.170,00	2.196885.719.863,00	2.546.255.642.757	11,69
1.1.1	Belanja Pegawai	1.425.619.588.006,00	1.511.662.036.637,00	1.675.145.253.728,00	1.864.492.136.306,00	1.982.292.982.263	8,62
1.1.2	Belanja Hibah	77.848.070.250,00	41.734.739.950,00	45.795.244.500,00	100.173.730.800,00	169.528.017.394	37,83
1.1.3	Belanja Bantuan Sosial	12.063.758.000,00	1.855.669.700,00	3.193.750.000,00	9.951.500.000,00	14.098.500.000	60,19
1.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	31.856.358.773,00	61.050.186.000,00	79.808.834.300,00	77.609.872.900,00	248.191.375.600	84,85
1.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	89.436.367.366,00	114.480.114.940,00	132.970.226.420,00	143.374.965.000,00	129.324.752.500	10,54
1.1.6	Belanja Tidak Terduga	3.291.301.500,00	5.137.123.900,00	1.806.631.222,00	1.283.514.857,00	2.820.015.000	20,50
1.2	Belanja Langsung	821.166.678.475,00	1.115648.856.286,00	1.303.445.192.400,50	1.626.178.784.451,00	2.061.079.243.361	26,05
1.2.1	Belanja Pegawai	72.313.780.054,00	130.434.550.552,00	160.091.690.247,00	213.305.481.562,00	52.412.198.523	15,23
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	576.382.362.363,00	493.931.103.551,00	694.275.377.489,50	939.501.476.184,00	1.300.202.518.141	24,99
1.2.3	Belanja Modal	172.470.535.785,00	491.283.202.183,00	449.078.124.664,00	473.371.826.705,00	708.464.526.697	57,83

Sumber: Bappeda dan DPPK, 2016



Kinerja pelaksanaan Belanja Daerah Kabupaten Bandung, pada periode 2011-2015 dapat diringkas sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Tidak Langsung setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,00 % per tahun. Ditinjau per komponen, pada tahun 2015 sekitar 77,85 % komposisi belanja tidak langsung Kabupaten Bandung digunakan untuk belanja pegawai. Belanja pegawai ini menjadi komponen terbesar pertama dalam belanja tidak langsung Kabupaten Bandung. Sedangkan komponen terbesar kedua dalam belanja tidak langsung digunakan untuk belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, dengan persentase sebesar 9,75 %.
- Belanja Langsung dalam kurun lima tahun terakhir tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 30,04 % per tahun. Pada tahun 2015, kontributor terbesar terhadap belanja langsung Kabupaten Bandung yaitu belanja barang dan jasa, dengan persentase sebesar 62,75 %.

Ditinjau berdasarkan realisasinya, anggaran belanja daerah belum seluruhnya terserap. Dalam kurun tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 tampak terjadi penurunan persentase penyerapan belanja daerah. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya kinerja implementasi perencanaan di Kabupaten Bandung. Dengan demikian, untuk pembangunan kedepan perlu didorong adanya peningkatan efisiensi implementasi perencanaan. Informasi detail mengenai perbandingan target dan realisasi belanja daerah di Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.3.

TABEL 3.3

TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2011	2.655.561.941.414,00	2.461.282.122.370,00	92,68	(194.279.819.044,00)
2012	3.063.111.044.168,65	2.851.978.727.413,00	93,11	(211.132.316.755,65)
2013	3.556.435.069.635,98	3.242.165.132.570,50	91,16	(314.269.937.065,48)
2014	4.340.959.468.801,78	3.823.064.504.314,00	88,07	(517.894.964.487,78)
2015	5.142.388.330.904,74	4.607.334.886.117,81	89,60	(535.053.444.786,93)

Sumber: LKPJ Kabupaten Bandung Tahun 2011 - 2015

Salah satu yang menjadi komponen dalam belanja daerah yaitu belanja pegawai. Ideal, semakin tinggi penyerapan belanja pegawai menunjukkan optimalnya ketersediaan aparatur pemerintah untuk melaksanakan belanja program. Untuk mengetahui kondisi keterserapan belanja pegawai di Kabupaten Bandung, pada Tabel 3.4 berikut disajikan target dan realisasi belanja pegawai di Kabupaten Bandung tahun 2011 – 2015.



TABEL 3.4
TARGET DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI KABUPATEN BANDUNG

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2011	1.464.872.538.105,00	1.425.619.588.006,00	97,32	(39.252.950.099,00)
2012	1.597.946.955.673,65	1.511.662.036.637,00	94,60	(86.284.919.036,65)
2013	1.876.339.109.506,48	1.675.145.253.728,00	89,28	(201.193.855.778,48)
2014	2.074.563.228.250,35	1.864.492.136.306,00	89,87	(210.071.091.944,35)
2015	2.228.852.612.988,65	1.982.292.982.263,00	88,94	(-246.559.630.725,65)

Sumber: LKPJ Kabupaten Bandung Tahun 2011 - 2015

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa dalam kurun lima tahun terakhir terjadi penurunan penyerapan belanja pegawai, khususnya untuk belanja pegawai yang masuk ke dalam kategori belanja tidak langsung. Penurunan dapat diakibatkan oleh berbagai sebab diantaranya akibat adanya pegawai yang memasuki masa pensiun, adanya pegawai yang meninggal dunia pada tahun berjalan atau akibat ketidaktepatan dalam menyusun prediksi alokasi anggaran belanja pegawai.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah akan meliputi seluruh transaksi keuanganan daerah yang berfungsi untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah atau biasa disebut dengan defisit anggaran.

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap pembiayaan daerah Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir, tampak bahwa penerimaan pembiayaan setiap selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Khusus aspek penerimaan pembiayaan, sebagian besar penerimaan pembiayaan Kabupaten Bandung didominasi oleh Sisa lebih Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), yang merupakan selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan selanjutnya. Ditinjau dalam hal perkembangannya, SiLPA Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan, dengan demikian maka untuk mendorong perencanaan pembangunan kedepan perlu dilakukan efisiensi pembiayaan daerah, mengoptimalkan belanja daerah sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Dalam aspek Pengeluaran pembiayaan, sebagian besar didominasi oleh pembentukan dana cadangan, yaitu dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana realatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Gambaran detail mengenai pembiayaan daerah Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 3.5.



TABEL 3.5

RATA- RATA PERTUMBUHAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011 - 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015 (APBD Perubahan)	Rata- Rata Pertumbuhan (%)
1.	Penerimaan Daerah	304.373.460.654,06	289.538.157.773,76	308.272.511.842,76	426.666.150.586,76	671.962.101.523,84	24,37
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)	258.190.830.139,06	288.707.585.817,76	308.234.711.842,76	417.841.242.686,76	611.926.101.523,84	25,15
1.2	Pencairan Dana Cadangan	38.682.630.515,00	-	-	8.823.407.900.000,00	60.000.000.000,00	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.500.000.000,00	830.571.956,00	37.800.000,00	1.500.000.000,00	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
2	Pengeluaran Daerah	8.843.407.900,00	32.000.000.000,00	18.365.313.000,00	30.425.138.130,00	15.500.000.000,00	58,96
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	8.823.407.900,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	17,50
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000,00	16.500.000.000,00	1.630.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-
2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	500.000.000,00	1.735.313.000,00	5.425.138.130,00	500.000.000,00	122,97
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pembiayaan Netto		295.530.052.754,06	257.538.157.773,76	289.907.198.842,76	396.241.012.456,76	656.426.101.523,84	25,51
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		287.664.144.919,76	307.974.031.542,76	415.786.047.447,76	611.926.101.523,84	525.901.280.373,63	18,80

Sumber: Bappeda dan DPPK, 2016



3.1.2. Neraca Daerah

Neraca keuangan daerah merupakan salah satu pelaporan keuangan daerah yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan keuangan daerah. Neraca ini dapat menunjukkan kinerja keuangan daerah sehingga dapat menjadi salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan daerah. Berikut ini merupakan neraca keuangan Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir.

Pertumbuhan neraca daerah pada tahun 2011-2015 secara garis besar dapat dirangkum sebagai berikut:

- Selama kurun lima tahun terakhir, jumlah aset pemerintah Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,30 % per tahun. Ditinjau per komponen penyusunnya, aset pemerintah meliputi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Nilai aset daerah terbesar tercatat pada tahun 2014 yang disebabkan terjadi kenaikan nilai yang signifikan pada Aset Lainnya. Kenaikan Aset Lainnya ini disebabkan adanya kemitraan dengan pihak ketiga, yaitu berupa aset yang dimanfaatkan berbentuk tanah yang operasionalnya tidak digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tetapi dimanfaatkan oleh pihak ketiga berdasarkan Surat Perjanjian.
- Rata-rata pertumbuhan Kewajiban dan Ekuitas Dana tercatat sebesar 6,26%. Jumlah kewajiban dan ekuitas dana terbesar terjadi pada tahun 2014, dimana terjadi kenaikan pada beberapa pos yaitu Ekuitas Dana Investasi, (Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)) dan Ekuitas Dana Lancar (SiLPA yang besar akibat penyerapan anggaran tahun sebelumnya yang kurang optimal, Cadangan untuk Piutang, dan Pendapatan yang Ditangguhkan).

Informasi detail mengenai rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kabupaten Bandung tahun anggaran 2011 – 2016 ditampilkan pada Tabel 3.6.



TABEL 3.6
RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	362.781.420.909,04	387.521.718.829,57	485.638.640.812,87	894.498.667.656,95	785.403.828.248,09	26,03
1.1.1.	Kas	289.002.760.406,83	310.559.810.358,87	416.340.114.817,36	612.320.476.394,84	529.594.159.555,63	218,77
1.1.2.	Piutang	43.032.060.864,50	36.735.587.165,00	26.045.088.854,54	226.286.921.830,94	208.435.690.095,75	179,30
1.1.3.	Piutang Lainnya	0,00	5.992.821.019,50	7.188.653.785,00	13.267.549.977,50	878.986.392,95	3,71
1.1.4.	Persediaan	30.398.685.054,38	33.785.993.984,83	35.630.200.022,64	42.623.719.453,67	46.180.280.395,80	11,14
1.1.5.	Biaya Dibayar Dimuka	347.914.583,33	447.506.301,37	434.583.333,33	0,00	314.711.807,96	12,87
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	235.383.100.507,16	253.335.811.403,22	256.210.095.010,65	268.713.792.401,12	269.539.755.582,92	3,49
1.2.1.	Investasi Non Permanen	1.329.060.102,00	4.392.500.000,00	4.389.700.000,00	4.388.200.000,00	4.369.699.625,00	57,49
1.2.2.	Investasi Permanen	234.054.040.405,16	248.943.311.403,22	251.820.395.010,65	264.325.592.401,12	265.170.055.957,92	3,20
1.3.	ASET TETAP	5.444.647.444.187,00	6.005.517.210.614,07	6.749.067.731.519,00	7.379.997.428.785,98	6.502.011.061.760,63	5,03
1.3.1.	Tanah	2.477.330.846.110,00	2.493.411.319.733,00	2.514.485.808.599,00	2.480.777.114.182,00	2.523.145.309.140,00	0,47
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	340.078.673.985,00	451.583.825.333,92	613.237.794.442,00	581.426.044.487,78	725.144.109.850,00	22,03
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	1.103.823.960.914,00	1.343.272.674.120,15	1.541.291.886.570,00	1.759.398.908.136,13	2.041.381.623.487,00	16,65
1.3.4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.487.400.859.032,00	1.658.716.692.054,00	2.012.236.459.457,00	2.448.848.181.003,51	3.114.693.187.302,00	20,43
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	20.922.743.892,00	28.942.227.757,00	51.046.068.586,00	70.079.288.094,56	91.815.414.426,00	45,75
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	15.090.360.254,00	29.590.471.616,00	16.769.713.865,00	39.467.892.882,00	47.279.771.078,00	51,98
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan					(2.041.448.353.522,37)	
1.4.	DANA CADANGAN	8.823.407.900,00	24.449.273.420,00	40.967.098.322,00	48.505.290.583,00	0,00	87,69
1.4.1.	Dana Cadangan	8.823.407.900,00	24.449.273.420,00	40.967.098.322,00	48.505.290.583,00	0,00	87,69



No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.5.	ASET LAINNYA	6.609.033.459,53	16.553.228.449,53	16.758.877.555,53	274.627.042.860,53	286.462.417.205,23	423,68
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	195.579.348,00	195.579.348,00	195.579.348,00	195.579.348,00	215.113.745,00	2,50
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	69.180.753,53	69.180.753,53	69.180.753,53	2.016.900.490,53		938,47
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga					240.784.811.475,00	-
1.5.4.	Aset Tidak Berwujud	556.251.000,00	10.317.874.990,00	8.837.857.745,00	13.119.246.820,00	14.910.125.700,00	450,66
1.5.5.	Amortisasi Aset Tidak Berwujud					(3.826.433.495,00)	-
1.5.6.	Aset Lain-lain	5.788.022.358,00	5.970.593.358,00	7.656.259.709,00	259.295.316.202,00	34.378.799.780,00	807,84
	JUMLAH ASET	6.058.244.406.962,73	6.687.377.242.716,39	7.548.642.443.220,05	8.866.342.222.287,58	7.843.417.062.796,87	7,30
2.	KEWAJIBAN						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	934.168.471,07	6.167.011.682,62	9.902.963.747,60	5.114.179.382,15	25.978.607.061,10	245,09
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	220.867.134,07	320.774.779,11	418.641.683,60	41.515.837,00	10.169.620,00	-22,46
2.1.2.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
2.1.3.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	200.397.718,51	0,00	684.972.500,15	982.082.973,70	43,38
2.1.4.	Utang Beban					22.355.120.047,4	-
2.1.5.	Utang Jangka Pendek Lainnya	213.301.337,00	5.145.839.185,00	8.984.322.064,00	3.887.691.045,00	2.131.234.420,00	571,29
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	3.637.276.621,00	3.137.276.621,00	2.637.276.621,00	2.079.384.471,00	1.578.530.971,00	-18,73
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	3.637.276.621,00	3.137.276.621,00	2.637.276.621,00	2.079.384.471,00	1.578.530.971,00	-18,73



No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan (%)
JUMLAH KEWAJIBAN		4.571.445.092,07	9.304.288.303,62	12.540.240.368,60	7.193.563.853,15	27.557.138.032,10	94,69
3.	EKUITAS DANA						
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	361.847.252.437,97	381.354.707.146,95	475.735.677.065,27	889.384.488.274,80	0,00	39,03
3.1.1.	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA)	288.707.585.817,76	309.929.497.577,76	415.786.047.447,76	611.954.333.929,84	0,00	29,56
3.1.2.	Cadangan untuk Piutang	43.379.975.447,83	43.175.914.485,87	33.668.325.972,87	239.554.471.808,44	0,00	196,34
3.1.3.	Cadangan untuk Persediaan	30.398.685.054,38	33.785.993.984,83	35.630.200.022,64	42.623.719.453,67	0,00	12,08
3.1.4.	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-705.783.169,00	-5.724.182.080,51	-9.352.629.058,00	-5.047.315.662,15	0,00	242,80
3.1.5.	Pendapatan yang Ditanggguhkan	66.789.287,00	187.483.179,00	3.732.680,00	299.278.745,00	0,00	2666,83
						0,00	
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	5.683.002.301.532,69	6.272.268.973.845,82	7.019.399.427.464,18	7.921.258.879.576,63	0,00	11,71
3.2.1.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	235.383.100.507,16	253.335.811.403,22	256.210.095.010,65	268.713.792.401,12	0,00	4,55
3.2.2.	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	5.444.647.444.187,00	6.005.517.210.614,07	6.749.067.731.519,00	7.379.997.428.785,98	0,00	10,68
3.2.3.	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	6.609.033.459,53	16.553.228.449,53	16.758.877.555,53	274.627.042.860,53	0,00	563,47
3.2.4.	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-3.637.276.621,00	-3.137.276.621,00	-2.637.276.621,00	-2.079.384.471,00	0,00	-16,95



No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3.3.	EKUITAS DANA CADANGAN	8.823.407.900,00	24.449.273.420,00	40.967.098.322,00	48.505.290.583,00	0,00	87,69
3.3.1.	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	8.823.407.900,00	24.449.273.420,00	40.967.098.322,00	48.505.290.583,00	0,00	87,69
	JUMLAH EKUITAS DANA	6.053.672.961.870,66	6.678.072.954.412,77	7.536.102.202.851,45	8.859.148.658.434,43	7.815.859.924.764,77	7,24
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	6.058.244.406.962,73	6.687.377.242.716,39	7.548.642.443.220,05	8.866.342.222.287,58	7.843.417.062.796,87	6,26

Sumber: Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011-2014 dan Hasil Analisis Bappeda 2015



Untuk mengidentifikasi kualitas pengelolaan keuangan daerah, dilakukan analisis rasio keuangan. Hasil analisis rasio akan menjadi dasar pertimbangan dan membantu para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan atau pertimbangan dalam pencapaian pembangunan daerah dan prospeknya di masa datang. Selain dari pada itu, hasil analisis rasio akan berfungsi untuk menilai risiko dan peluang pada masa yang akan datang. Analisis rasio yang dapat dilakukan terhadap APBD ini yaitu rasio atas neraca dan rasio atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Hasil analisis rasio keuangan Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 disajikan pada Tabel 3.7.

TABEL 3.7
ANALISIS RASIO KEUANGAN TAHUN 2011-2015 KABUPATEN BANDUNG

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
I	Rasio atas Neraca					
1.	Rasio lancar (<i>current ratio</i>); {Aset Lancar/Kewajiban Lancar}	38.834,69	6.283,78	4.903,97	17.490,56	3.023,27
	Rasio cash (<i>cash ratio</i>); {Kas+Surat Berharga/Kewajiban Lancar}	30.936,90	5.035,82	4.204,20	11.973,00	2.038,58
3.	Rasio quick (<i>quick ratio</i>); {Kas+Surat Berharga+ Piutang /Kewajiban Lancar}	35.543,36	5.631,50	4.467,20	16.397,69	2.840,91
	II	Rasio atas LRA				
4.	Rasio Kemandirian; {PAD / Total Pendapatan}	11,86	12,62	15,06	17,38	14,99
	Rasio Efektivitas PAD; {Realisasi Penerimaan PAD / Target Penerimaan PAD}	120,82	114,85	117,93	120,26	116,59
6.	Rasio Keserasian (Belanja Tidak Langsung terhadap Total APBD); {Belanja Tidak Langsung / Total APBD}	66,64	60,88	59,80	57,46	55,27
	Rasio Keserasian (Belanja Langsung terhadap Total APBD); {Belanja Langsung /Total APBD}	33,36	39,12	40,20	42,54	44,73

Sumber: APBD 2011-2015 dan Hasil Analisis Bappeda, 2015



Melalui tabel diatas dapat diambil beberapa kesimpulan terkait pengelolaan keuangan di Kabupaten Bandung yang didasarkan atas analisis rasio yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut.

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*);
Rasio lancar merupakan perbandingan jumlah aset lancar dengan kewajiban lancar pada tanggal tertentu pelaporan neraca. Rasio lancar Kabupaten Bandung periode tahun 2011 sampai 2015 menunjukkan rasio yang positif (lancar), artinya bahwa setiap Rp.1 kewajiban lancar kabupaten dijamin oleh aset lancar minimal Rp. 302.327,00 pada tahun 2015.
2. Rasio Kas (*Cash Ratio*);
Rasio kas merupakan perbandingan jumlah kas dan surat berharga dengan kewajiban lancar pada tanggal tertentu pelaporan neraca. Rasio kas Kabupaten Bandung periode tahun 2011 sampai 2015 menunjukkan rasio yang sehat (lancar), artinya bahwa setiap Rp.1 kewajiban lancar kabupaten dijamin oleh kas minimal Rp. 203.858,00 pada tahun 2015.
3. Rasio Quick (*Quick Ratio*);
Rasio kas merupakan perbandingan jumlah kas, surat berharga dan piutang dengan kewajiban lancar pada tanggal tertentu pelaporan neraca. Rasio *quick* Kabupaten Bandung periode tahun 2011 sampai 2015 menunjukkan rasio yang sehat (lancar), artinya bahwa setiap Rp.1 kewajiban lancar kabupaten dijamin oleh kas, surat berharga, dan piutang minimal Rp. 284.091,00 pada tahun 2015.
4. Rasio Kemandirian;
Rasio kemandirian merupakan rasio yang menggambarkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung (otonomi fiskal) dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin kecil ketergantungan pemerintah Kabupaten Bandung terhadap bantuan pihak luar (pemerintah pusat dan provinsi).
Rasio kemandirian Kabupaten Bandung selama periode tahun 2011 sampai dengan 2015 rata-rata sebesar 14,38 %. Rasio kemandirian tertinggi diperoleh pada tahun 2014, yaitu sebesar 17,38%, artinya bahwa dari total pendapatan daerah yang diperoleh Kabupaten Bandung tahun 2014 kontribusi PAD-nya sebesar 17,38%.
5. Rasio Efektivitas PAD;
Rasio efektivitas PAD merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
Rasio efektivitas PAD Kabupaten Bandung selama periode tahun 2011 sampai dengan 2015 rata-rata sebesar 118,09 %. Upaya pencapaian target PAD bisa dikatakan efektif jika rasionya mencapai minimal 100 %. Selama periode tahun 2011 hingga 2015 Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan upaya-upaya yang efektif dalam mencapai target perolehan PAD. Rasio efektivitas PAD tertinggi diperoleh pada tahun 2011, yaitu sebesar 120,82%.



6. Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja APBD;
Rasio keserasian ini merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja tidak langsung dibandingkan dengan total belanja APBD secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung berarti persentase belanja langsung (kegiatan, pelayanan dan investasi) untuk masyarakat cenderung semakin kecil.
Rasio keserasian belanja tidak langsung Kabupaten Bandung selama periode 2011 hingga 2015 rata-rata mencapai 60,01 % dari total belanja APBD. Rasio terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 55,27 %, sedangkan rasio tertinggi terjadi tahun 2011 yaitu sebesar 66,64 %.
7. Rasio Keserasian Belanja Langsung terhadap Total Belanja APBD;
Rasio keserasian ini merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung dibandingkan dengan total belanja APBD secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja langsung berarti persentase belanja langsung (kegiatan, pelayanan dan investasi) untuk masyarakat cenderung semakin tinggi.
Rasio keserasian belanja langsung Kabupaten Bandung selama periode 2011 hingga 2015 rata-rata mencapai 39,99 % dari total belanja APBD. Rasio terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 33,36 %, sedangkan rasio tertinggi terjadi tahun 2015 yaitu sebesar 44,73 %.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Lima Tahun Terakhir

Kebijakan pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2011-2015 meliputi kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan daerah, kebijakan penerimaan pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan, serta arah kebijakan dana masyarakat dan mitra.

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2011-2015, memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
- 2) Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
- 3) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, tetapi ada beberapa pendapatan yang tidak bias diukur karena harus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat salah satunya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).



Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2011-2015 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan kebijakan PAD dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi:
 - a) Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - b) Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap perekonomian. Melakukan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah lainnya;
 - c) Penataan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
 - d) Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - e) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Perangkat Daerah Penghasil;
 - f) Meningkatkan kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga keuangan lainnya dalam rangka peningkatan PAD;
 - g) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - h) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
2. Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari dana perimbangan adalah sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan akurasi data SDA sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
 - b) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan dana perimbangan.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi yang lebih tinggi dan instansi terkait lainnya.



B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2011- 2015 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2011-2015 diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan realisasi IPM Tahun 2009 yang baru mencapai sebesar 73,39 sehingga diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2011-2015 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Bandung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 2) Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
- 3) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bandung;
- 4) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- 5) Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR DIKDAS 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- 7) Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan,



- perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;
- 8) Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga di bawah 10% diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
 - 9) Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
 - 10) Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 35%, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
 - 11) Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
 - 12) Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*);
 - 13) Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - c) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
 - d) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - f) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan



sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

- g) Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal desa dalam melaksanakan otonomi daerah;
- h) Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari daerah kepada pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung.

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

D. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2011-2015 adalah:

- 1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
- 2) Jika terjadi defisit anggaran akan diupayakan dengan pemanfaatan pinjaman melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.

E. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2011-2015 adalah:



- 1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD, dan dana LUEP.
- 2) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
- 3) Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

F. Arah Kebijakan Dana Masyarakat dan Mitra

Arah kebijakan tahun 2011-2015 untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Kabupaten Bandung. Pengembangan tersebut diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar di Kabupaten Bandung. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

- 1) Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Bandung;
- 2) Kerjasama investasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan pihak swasta atau dengan pihak *government*/pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
- 3) Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal.
- 4) Penyelenggaraan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan.
- 5) Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
- 6) Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian, industri pengolahan, dan industri manufaktur.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Untuk mengidentifikasi tingkat efektifitas penggunaan anggaran daerah, pada bagian ini akan dipaparkan hasil analisis terhadap perbandingan atau proporsi penggunaan anggaran. Penilaian proporsi dilakukan terhadap dua aspek yaitu proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja, dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

1) Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja, teridentifikasi bahwa hampir seluruh komponen belanja daerah belum terserap secara optimal. Informasi detail mengenai proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja di Kabupaten Bandung dalam kurun lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.8.



TABEL 3.8
PROPORSI REALISASI BELANJA TERHADAP ANGGARAN BELANJA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011 - 2015

No	Uraian	2011			2012			2013			2014			2015			Rata-Rata (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
A	Belanja Tidak Langsung	1.698.733.265.733,00	1.640.115.443.895	96,55	1.855.126.650.283,65	1.736.329.871.127	93,60	2.167.357.178.307,26	1.938.719.940.170	89,45	2.433.290.691.135,78	2.196.885.719.863	90,28	2.821.656.195.357,51	2.546.255.642.757,00	90,24	92,02
1	Belanja Pegawai	1.464.872.538.105,00	1.425.619.588.006	97,32	1.597.946.955.673,65	1.511.662.036.637	94,60	1.876.339.109.506,48	1.675.145.253.728	89,28	2.074.563.228.250,35	1.864.492.136.306	89,87	2.228.852.612.988,65	1.982.292.982.263,00	88,94	92,00
2	Belanja Hibah	78.403.011.500,00	77.848.070.250	99,29	45.150.945.868,00	41.734.739.950	92,43	50.918.941.500,00	45.795.244.500	89,94	107.530.617.500,00	100.173.730.800	93,16	177.044.015.725,00	169.528.017.394,00	95,75	94,12
3	Belanja Bantuan Sosial	16.967.431.382,00	12.063.758.000	71,10	7.409.833.382,00	1.855.669.700	25,04	11.569.497.064,00	3.193.750.000	27,60	13.850.000.000,00	9.951.500.000	71,85	17.717.250.000,00	14.098.500.000,00	79,57	55,03
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	31.861.519.006,00	31.856.358.773	99,98	62.048.680.093,60	61.050.186.000	98,39	79.858.117.825,77	79.808.834.300	99,94	83.045.166.756,27	77.609.872.900	93,46	254.559.303.682,23	248.191.375.600,00	97,50	97,85
5	Belanja Bantuan Keuangan	92.149.289.740,00	89.436.367.366	97,06	120.144.536.010,00	114.480.114.940	95,29	135.218.245.920,00	132.970.226.420	98,34	144.357.939.099,00	143.374.965.000	99,32	133.270.795.649,63	129.324.752.500,00	97,04	97,41
6	Belanja Tidak Terduga	14.479.476.000,00	3.291.301.500	22,73	22.425.699.256,40	5.137.123.900	22,91	13.453.266.491,01	1.806.631.222	13,43	9.943.739.530,16	1.283.514.857	12,91	10.212.217.312,00	2.820.015.000,00	27,61	19,92
B	Belanja Langsung	956.828.675.681,00	821.166.678.475	85,82	1.207.984.393.885,00	1.115.648.856.286	92,36	1.389.077.891.328,72	1.303.445.192.401	93,84	1.907.668.777.666,00	1.626.178.784.451	85,24	2.320.732.135.547,23	2.061.079.243.360,81	88,81	89,21
1	Belanja Pegawai	74.549.065.554,00	72.313.780.054	97,00	104.811.661.970,00	130.434.550.552	124,45	157.617.214.516,00	160.091.690.247	101,57	201.672.646.168,00	213.305.481.562	105,77	58.002.194.458,00	52.412.198.523,00	90,36	103,83
2	Belanja Barang dan Jasa	596.443.419.200,00	576.382.362.363	96,64	512.732.044.950,00	493.931.103.551	96,33	723.239.437.752,66	694.275.377.490	96,00	1.062.274.310.541,00	939.501.476.184	88,44	1.456.202.990.578,27	1.300.202.518.140,81	89,29	93,34
3	Belanja Modal	285.836.190.927,00	172.470.535.785	60,34	564.591.683.234,00	491.283.202.183	87,02	508.221.239.060,06	449.078.124.664	88,36	643.721.820.957,00	473.371.826.705	73,54	806.526.950.510,96	708.464.526.697,00	87,84	79,42
	TOTAL	2.655.561.941.414,00	2.461.282.122.370	92,68	3.063.111.044.168,65	2.851.978.727.413	93,11	3.556.435.069.635,98	3.242.165.132.570	91,16	4.340.959.468.801,78	3.823.064.504.314	88,07	5.142.388.330.904,74	4.607.334.886.117,81	89,60	90,92

Sumber: Hasil Analisis, 2016



Dalam aspek belanja tidak langsung, dalam kurun lima tahun terakhir rata-rata realisasi penyerapan anggaran baru mencapai 92,02 %. Jika ditinjau per komponen, belanja bantuan sosial memiliki rata-rata penyerapan anggaran terendah dengan persentase serapan sebesar 55,03 %. Angka tersebut mengindikasikan masih banyaknya anggaran yang belum tersalurkan untuk kegiatan bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial terkait dengan pengajuan bantuan sosial secara langsung oleh individu/ kelompok masyarakat/ lembaga melalui proposal kegiatan pada tahun n-1. Belum optimalnya penyerapan anggaran belanja bantuan sosial, kemungkinan besar diakibatkan masih rendahnya animo masyarakat untuk mengajukan bantuan sosial kepada pemerintah daerah.

Komponen pada belanja tidak langsung yang memiliki persentase penyerapan anggaran tertinggi yaitu komponen belanja bagi hasil kepada pemerintah desa. Dalam kurun lima tahun terakhir, rata-rata persentase serapan yaitu sebesar 97,85 %. Tingginya angka serapan menunjukkan efektifnya pengalokasian anggaran dalam meningkatkan pembangunan perdesaan.

Dalam aspek langsung, rata-rata anggaran yang terrealisasi baru sekitar 89,21 %. Komponen belanja langsung yang persentase penyerapannya terendah yaitu komponen belanja modal dengan rata-rata penyerapan anggaran sebesar 79,42 %. Sedangkan komponenn belanja langsung yang persentase penyerapannya paling tinggi yaitu komponen belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program/ kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah. Rata-rata persentase penyerapan belanja pegawai pada komponen belanja langsung selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu sebesar 103,83 %.

2) Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Implementasi rencana pembangunan terkait erat dengan ketersediaan sumber daya aparatur. Salah satu indikator efektivitas pembangunan dapat ditinjau dari tingkat keterserapan anggaran belanja bagi pemenuhan kebutuhan aparatur. Secara detail, informasi proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bandung dalam kurun waktu tahun 2011-2015 yaitu:

TABEL 3.9
ANALISIS PROPORSI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011 - 2015

No	Tahun Anggaran	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran {Belanja + Pembiayaan Pengeluaran} (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2011	1.497.933.368.060	2.470.125.530.270,00	60,64
2	2012	1.642.096.587.189	2.883.978.727.413,00	56,94
3	2013	1.835.236.943.975	3.260.530.445.570,00	56,29
4	2014	2.077.797.617.868	3.853.489.642.444,00	53,92
5	2015	2.034.705.180.786	4.622.834.886.117,81	44,01

Sumber: Hasil Analisis, 2016



Dalam kurun lima tahun terakhir tampak terjadi peningkatan jumlah total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Kendati demikian, jika dibandingkan terhadap total pengeluaran, proporsi total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Secara garis besar, gambaran proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Belanja terbesar untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp 2.077.797.617.868,00
- 2) Belanja terbesar untuk belanja dan pembiayaan pengeluaran terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.622.834.886.117,81.
- 3) Persentase belanja antara pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran terbesar terjadi pada tahun 2011 sebesar 60,64 %.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis terhadap pembiayaan daerah akan menghasilkan keputusan mengenai besarnya surplus yang perlu disalurkan atau defisit yang harus ditutup. Penentuan keputusan tersebut ditentukan dengan membandingkan antara total pendapatan dan belanja daerah. Sebagai informasi awal, rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2016 disajikan pada Tabel 3.10.

TABEL 3.10
REKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 - 2015

No	Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja
1	2011	2.453.398.748.635,70	2.461.282.122.370,00
2	2012	2.902.414.601.182,00	2.851.978.727.413,00
3	2013	3.368.043.981.175,50	3.242.165.132.570,00
4	2014	4.038.777.825.787,08	3.823.064.504.314,00
5	2015	4.476.751.164.755,60	4.607.334.886.117,81

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Pada tabel rekapitulasi di atas, tampak bahwa antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, nilai realisasi belanja Kabupaten Bandung lebih besar dibandingkan nilai realisasi pendapatan. Sedangkan untuk tahun 2011 dan tahun 2015, realisasi belanja Kabupaten Bandung bernilai lebih besar dibandingkan nilai realisasi pendapatan. Secara lengkap penjelasan analisis pembiayaan daerah pada tahun 2011-2015 disajikan dalam tabel 3.11 berikut.



TABEL 3.11
DEFISIT RIIL ANGGARAN KABUPATEN BANDUNG

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan	2.453.398.748.635,70	2.902.414.601.182,00	3.368.043.981.175,50	4.038.777.825.787,08	4.476.751.164.755,60
Dikurangi:						
2	Realisasi Belanja	2.461.282.122.370,00	2.851.978.727.413,00	3.242.165.132.570,00	3.823.064.504.314,00	4.607.334.886.117,81
3	Pengeluaran Pembiayaan	8.843.407.900,00	32.000.000.000,00	18.365.313.000,00	30.425.138.130,00	15.500.000.000,00
Defisit Riil		-16.726.781.634,30	18.435.873.769,00	107.513.535.605,50	185.288.183.343,08	-146.083.721.362,21

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2011-2015 dan Analisis Bappeda, 2015

TABEL 3.12
KOMPOSISI PENUTUP DEFISIT RIIL ANGGARAN KABUPATEN BANDUNG

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)	258.190.830.139,06	288.707.585.817,76	308.234.711.842,76	417.841.242.686,76	611.926.101.523,84
2	Pencairan Dana Cadangan	38.682.630.515,00	0,00	0,00	8.823.407.900.000,00	60.000.000.000,00
3	Hasil Penjualan Kelayakan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	7.500.000.000,00	830.571.956,00	37.800.000,00	1.500.000.000,00	0,00



No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Daerah					
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		304.373.460.654,06	289.538.157.773,76	308.272.511.842,76	426.666.150.586,76	671.962.101.523,84

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kabupaten Bandung Tahun 2011 - 2015

TABEL 3.13
REALISASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN KABUPATEN BANDUNG

No	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	258.190.830.139,06	100 %	288.707.585.817,76	100 %	308.234.711.842,76	100 %	417.841.242.686,76	100 %	611.926.101.523,84	100 %
a.	Pelampauan penerimaan PAD										
b.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan										
c.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah										
d.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya										
e.	Kewajiban kepada pihak										



No	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
	ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan										
	Kegiatan lanjutan										

Sumber: Hasil Analisis, 2016



3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan tahun 2016-2021 perlu dilakukan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah. Analisis ini akan terbagi menjadi analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat meliputi pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Sementara itu belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Ditinjau berdasarkan komponen penyusunnya, pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat berada dalam komponen belanja langsung, maupun belanja tidak langsung. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap data pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Bandung lima tahun terakhir, dapat diketahui bahwa pertumbuhan rata-rata Belanja Tidak Langsung yang sifatnya wajib dan mengikat dalam kurun lima tahun terakhir mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,86 %. Pengeluaran ini didominasi oleh belanja pegawai, yang antara lain meliputi belanja gaji dan tunjangan serta belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH. Adapun untuk komponen belanja langsung, dalam kurun lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan belanja langsung yang bersifat wajib mengikat yaitu sebesar 43,85 %. Komponen belanja ini didominasi oleh belanja pegawai (berupa honorarium kegiatan khusus dan beasiswa pendidikan PNS) serta belanja modal (berupa belanja jasa kantor, belanja sewa gedung kantor, dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor).

Secara keseluruhan, pengeluaran wajib dan mengikat pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 48,89 %. Informasi detail mengenai pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 3.14.



TABEL 3.14
PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA KABUPATEN BANDUNG

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan (%) Sd 2015
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.547.387.775.029,00	1.616.302.632.287,00	1.803.943.082.528,00	2.052.227.240.006,00	2.414.110.875.257,00	11,86
2.1.1	Belanja Pegawai	1.425.619.588.006,00	1.511.662.036.637,00	1.675.145.253.728,00	1.864.492.136.306,00	1.982.292.982.263	8,62
2.1.2	Belanja Hibah	77.848.070.250,00	41.734.739.950,00	45.795.244.500,00	100.173.730.800,00	169.528.017.394	37,83
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	12.063.758.000,00	1.855.669.700,00	3.193.750.000,00	9.951.500.000,00	14.098.500.000	60,19
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	31.856.358.773,00	61.050.186.000,00	79.808.834.300,00	77.609.872.900,00	248.191.375.600	84,85
2.2	BELANJA LANGSUNG	244.784.315.839,00	621.357.752.735,00	609.169.814.911,00	686.677.308.267,00	760.876.725.220,00	43,85
2.2.1	Belanja Pegawai	72.313.780.054,00	130.074.550.552,00	160.091.690.247,00	213.305.481.562,00	52.412.198.523	15,19
2.2.2	Belanja Modal	172.470.535.785,00	491.283.202.183,00	449.078.124.664,00	473.371.826.705,00	708.464.526.697	57,83
Jumlah (2.1+2.2)		1.792.172.090.868,00	2.237.660.385.022,00	2.413.112.897.439,00	2.738.904.548.273,00	3.174.987.600.477,00	48,89

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015.



3.3.2. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Untuk mengidentifikasi gambaran kemampuan keuangan Kabupaten Bandung dalam lima tahun kedepan, dilakukan proyeksi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Proyeksi disusun dengan menarik tren perkembangan anggaran pendapatan dan belanja daerah selama lima tahun terakhir, tahun 2011 hingga 2015. Di dalam analisis proyeksi, tingkat pertumbuhan dari data keuangan daerah lima tahun terakhir diidentifikasi. Hasil identifikasi terhadap tren pertumbuhan tersebut digunakan sebagai basis untuk menarik perkiraan nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bandung lima tahun kedepan.

Di dalam penyusunan proyeksi ini, mengeluarkan asumsi terjadinya gejolak perkonomian ekstrim seperti misalnya krisis ekonomi. Dengan demikian, hasil proyeksi tidak terlalu berfluktuasi. Informasi detail mengenai hasil proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bandung tahun 2016 – 2020 disajikan pada Tabel 3.10.

Berdasarkan hasil proyeksi terhadap potensi pendapatan daerah, tampak terjadi peningkatan pendapatan. Tahun 2016, diprediksi total pendapatan daerah Kabupaten Bandung bernilai Rp 3,152,260,232,749.90. Pada tahun 2020, diprediksi nilai tersebut meningkat menjadi sekitar Rp 3,686,225,393,815.08. Dari segi belanja, tahun 2016 diprediksi total belanja Kabupaten Bandung bernilai Rp 3,250,315,477,162.24. Dibandingkan dengan total potensi pendapatan daerah, maka diperkirakan terjadi defisit sebesar Rp 98,055,244,412.34. Pada tahun anggaran 2017 – 2020 angka defisit diusahakan untuk ditekan melalui peningkatan potensi pendapatan serta efektif dan efisien di dalam belanja. Dengan demikian, di akhir tahun perencanaan (tahun 2020) diharapkan terjadi surplus anggaran. Jika mengikuti skema proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah ini, diperkirakan pada tahun 2020 terjadi surplus anggaran sebesar Rp 15,000,000,000.00.



TABEL 3.15
PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	PENDAPATAN DAERAH					
1.1	Pendapatan Asli Daerah	637,636,468,883.90	734,764,265,194.90	760,379,468,701.00	781,384,473,541.00	806,518,725,841.00
1.1.1	Pajak Daerah	285,125,000,000.00	316,775,000,000.00	324,450,000,000.00	332,805,000,000.00	341,380,000,000.00
1.1.2	Retribusi Daerah	30,210,907,705.90	27,164,282,705.90	31,260,496,115.00	29,761,047,735.00	30,815,255,589.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	57,990,050,378.00	57,890,050,778.00	64,409,353,128.00	69,630,248,272.00	76,150,417,892.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	264,310,510,800.00	332,934,931,711.00	340,259,619,458.00	349,188,177,534.00	358,173,052,360.00
1.2	Dana Perimbangan	2,167,294,681,000.00	2,317,401,089,000.00	2,343,232,462,585.49	2,428,038,342,401.26	2,478,823,242,074.08
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	209,755,836,000.00	220,723,988,000.00	232,420,715,581.49	240,668,464,575.00	253,625,450,477.47
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,957,538,845,000.00	2,096,677,101,000.00	2,110,811,747,004.00	2,187,369,877,826.26	2,225,197,791,596.61
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	347,329,082,866.00	378,091,418,001.00	387,112,418,000.00	396,232,411,225.00	400,883,425,900.00
1.3.1	Hibah	0	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat					
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	347,329,082,866.00	378,091,418,001.00	387,112,418,000.00	396,232,411,225.00	400,883,425,900.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus		-	-	-	-



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	-
1.3.7	Dana Desa	0.00	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	3,152,260,232,749.90	3,430,256,772,195.90	3,490,724,349,286.49	3,605,655,227,167.26	3,686,225,393,815.08
2	BELANJA DAERAH					
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,969,369,894,681.24	2,107,409,193,813.11	2,103,649,087,608.70	2,117,815,230,752.28	2,146,651,360,155.45
2.1.1	Belanja Pegawai	1,708,746,148,160.65	1,808,754,791,738.65	1,818,754,791,738.65	1,823,754,791,738.65	1,846,549,510,389.14
2.1.2	Belanja Bunga		-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	248,263,058,870.59	266,134,037,170.59	269,894,295,870.05	279,060,439,013.63	285,101,849,766.31
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	2,360,687,650.00	13,500,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000.00	19,020,364,903.87	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
2.2	Belanja Langsung	1,280,945,582,481.00	1,412,322,314,422.00	1,489,099,682,742.83	1,503,592,547,986.63	1,524,574,033,659.63
2.2.1	Belanja Langsung Setiap SKPD	155,921,797,143.00	170,337,745,748.00	204,180,894,589.01	169,724,321,426.68	174,816,051,068.98



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2.2.2	Belanja Langsung Program	1,125,023,785,338.00	1,241,984,568,674.00	1,284,918,788,153.82	1,333,868,226,559.95	1,349,757,982,590.65
	Jumlah Belanja	3,250,315,477,162.24	3,519,731,508,235.11	3,592,748,770,351.53	3,621,407,778,738.90	3,671,225,393,815.08
	Surplus / (Defisit)	- 98,055,244,412.34	- 89,474,736,039.21	- 102,024,421,065.04	- 15,752,551,571.64	15,000,000,000.00
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	98,055,244,412.34	121,474,736,039.21	117,024,421,065.04	30,752,551,571.64	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	98,055,244,412.34	121,474,736,039.21	117,024,421,065.04	30,752,551,571.64	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	17,000,000,000.00	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	32,000,000,000.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
	Pembiayaan netto	98,055,244,412.34	89,474,736,039.21	102,024,421,065.04	15,752,551,571.64	- 15,000,000,000.00
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	- 0.00	0.00	-	0.00	-

Sumber: Bappeda dan DPPK, 2016

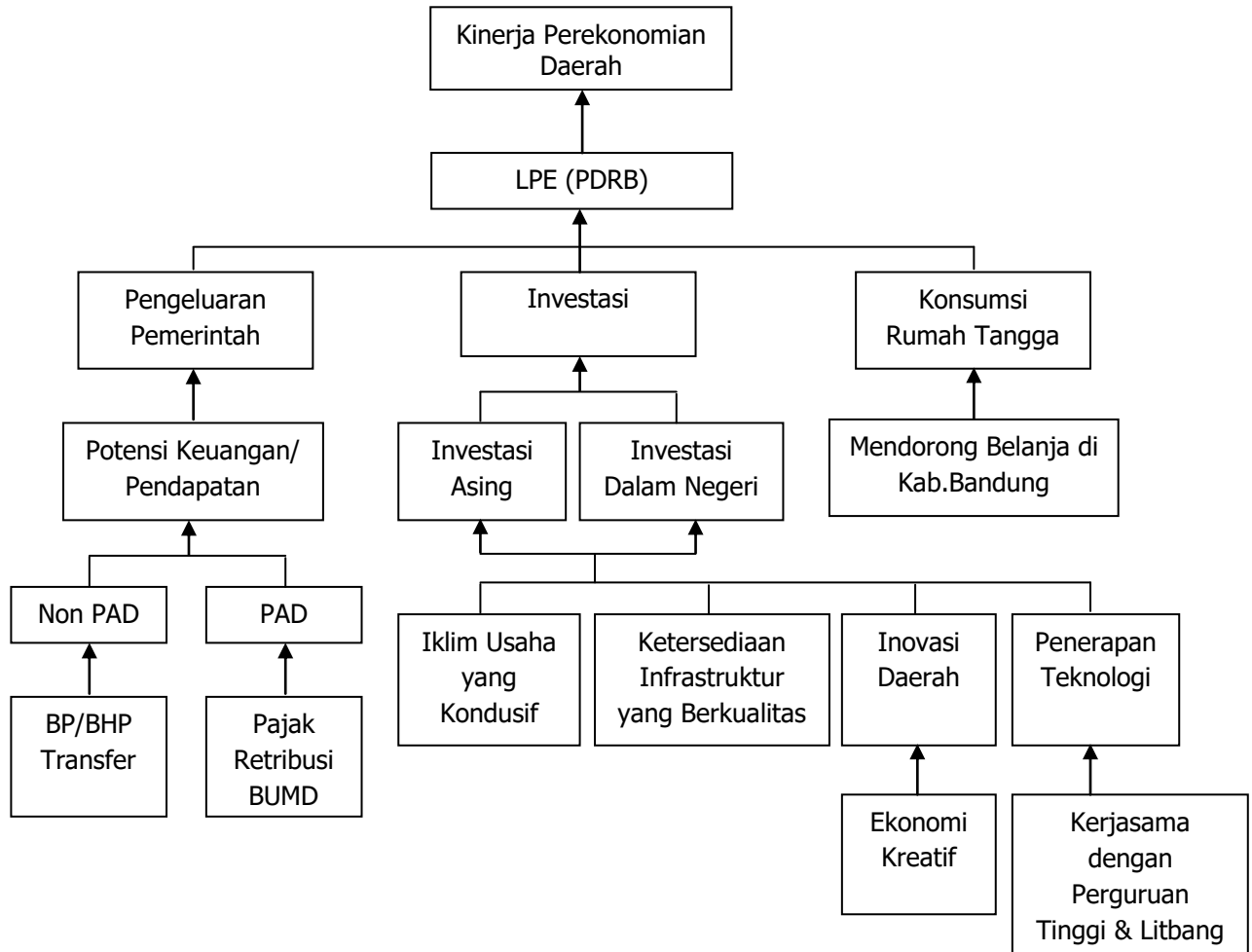


3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 akan difokuskan pada peningkatan LPE yaitu dengan menggenjot PDRB. Peningkatan PDRB ini akan diupayakan melalui berbagai aspek, yaitu:

- 1) Pengeluaran pemerintah, yang bersumber dari potensi keuangan/pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Bandung akan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui berbagai cara berikut.
 - a) Optimalisasi PAD terutama dengan mendorong penerimaan pada pos terkait bidang jasa, yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran.
 - b) Peningkatan transparansi objek pajak.
 - c) Pendataan ulang wajib pajak secara akurat dan aktual.
 - d) Memisahkan Perangkat Daerah yang mengupayakan pendapatan daerah dengan yang mengelola keuangan daerah.
 - e) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk mengoptimalkan pendapatan transfer.
 - f) Mengaktualisasi data kekayaan alam untuk penghitungan dana bagi hasil yang lebih akurat.
 - g) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
 - h) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.Selain optimalisasi pendapatan, terdapat pula kebijakan belanja sebagai berikut.
 - a) Peningkatan efisiensi belanja dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik.
 - b) Menekan belanja pegawai dengan tidak menambah jumlah aparatur pemerintah di Kabupaten Bandung.Sedangkan pada pembiayaan daerah perlu dilakukan peninjauan secara terukur sehingga dapat terwujud penganggaran yang seimbang.
- 2) Investasi, yang bersumber dari investasi asing dan investasi dalam negeri. Peningkatan investasi ini dilakukan melalui upaya berikut:
 - a) Penciptaan iklim usaha yang kondusif, yaitu dengan mempermudah perijinan dan memberlakukan sistem insentif bagi usaha yang sejalan dengan rencana pemerintah dan sistem disinsentif bagi usaha yang bertentangan dengan arahan pemerintah/mencemari lingkungan.
 - b) Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, diantaranya dengan membangun infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas di Kabupaten Bandung, infrastruktur air limbah, dll. Ketersediaan infrastruktur yang dapat diandalkan efektif dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung.
 - c) Pengembangan inovasi daerah, terutama dengan mengembangkan perekonomian kreatif di Kabupaten Bandung.
 - d) Penerapan teknologi dengan cara meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.
- 3) Konsumsi rumah tangga, yaitu dengan cara mendorong pembelanjaan di Kabupaten Bandung. Untuk meningkatkan konsumsi di Kabupaten Bandung dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas jalur penghubung Kabupaten

Bandung dengan daerah lain, khususnya Kota Bandung, serta dengan menerapkan *regional branding* atas produk dan citra Kabupaten Bandung. Selain itu juga dengan meningkatkan daya beli masyarakat lokal Kabupaten Bandung sehingga tingkat konsumsi lokal semakin baik.



GAMBAR 3.1

ANALISIS KEBIJAKAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BANDUNG

Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA Kabupaten Bandung, 2016

Berdasarkan hasil proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021, diperoleh rencana pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.16. Pengeluaran wajib dan mengikat ini akan menjadi Rencana Anggaran untuk Prioritas I yang sifatnya penting bagi pemenuhan kepentingan publik serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.



TABEL 3.16

PROYEKSI PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.957.009.207.031,24	2.074.888.828.909,24	2.088.649.087.608,70	2.102.815.230.752,28	2.131.651.360.155,45
2.1.1	Belanja Pegawai	1.708.746.148.160,65	1.808.754.791.738,65	1.818.754.791.738,65	1.823.754.791.738,65	1.846.549.510.389,14
2.1.2	Belanja Hibah	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	248.263.058.870,59	266.134.037.170,59	269.894.295.870,05	279.060.439.013,63	285.101.849.766,31
2.2	BELANJA LANGSUNG	617.820.516.146,00	708.966.418.424,00	696.027.683.682,01	676.379.067.053,68	696.726.087.289,98
2.2.1	Belanja Langsung Perangkat Daerah	155.921.797.143,00	170.337.745.748,00	204.180.894.589,01	169.724.321.426,68	174.816.051.068,98
2.2.2	Belanja Urusan Pendidikan (20 %)	113.262.300.000,00	132.802.688.858,00	121.978.412.173,00	125.690.317.399,00	129.516.675.146,00
2.2.3	Belanja Urusan Kesehatan (10 %)	348.636.419.003,00	405.825.983.818,00	369.868.376.920,00	380.964.428.228,00	392.393.361.075,00
Jumlah (2.1+2.2)		2.574.829.723.177,24	2.783.855.247.333,24	2.784.676.771.290,71	2.779.194.297.805,96	2.828.377.447.445,43



Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Bandung tersebar dalam pos belanja langsung dan tidak langsung. Dalam pos belanja langsung, pengeluaran wajib dan mengikat merupakan representasi dari total belanja pegawai (berupa honorarium kegiatan khusus dan beasiswa pendidikan PNS) serta belanja modal (berupa belanja jasa kantor, belanja sewa gedung kantor, dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor), yang dalam hal ini diklasifikasikan ke dalam Belanja Langsung Perangkat Daerah. Selain dari pada itu, pos belanja langsung yang bersifat wajib dan mengikat juga meliputi seluruh belanja program untuk urusan pendidikan dan kesehatan, sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa kedua urusan ini merupakan komponen dasar utama dan memegang peran penting bagi peningkatan kualitas masyarakat.

Berdasarkan hasil proyeksi, dapat diamati bahwa dalam kurun lima tahun kedepan terjadi peningkatan total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Bandung, kecuali pada tahun 2018, yang mana pada tahun ini terjadi penurunan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat. Penurunan ini lebih karena diakibatkan oleh penetapan data belanja program tahun 2016 sebagai basis data proyeksi tahun 2018 sampai tahun 2020. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 telah ditetapkan sebelum RPJMD Kabupaten Bandung ini ditetapkan, maka sebagai implikasinya anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 perlu di akomodir dalam RPJMD 2016 – 2021. Adapun untuk tahun 2017, penentuan anggaran belanja tidak dilakukan melalui metode proyeksi. Nilai anggaran yang dicantumkan merupakan anggaran yang diajukan oleh Perangkat Daerah, sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017. Mengingat pada saat penyusunan RPJMD ini anggaran tahun 2017 masih berfluktuasi (belum ditetapkan), maka sebagai basis data proyeksi tahun 2018 – 2020 digunakan data tahun 2016 sebagai basis data.

Nilai prakiraan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Bandung tahun 2016 – 2020 diatas akan menjadi dasar bagi penentuan kapasitas riil kemampuan daerah. Kapasitas riil daerah yaitu suatu ukuran yang menunjukkan total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Berdasarkan hasil perhitungan, teridentifikasi bahwa untuk tahun 2016 – 2021 terjadi peningkatan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Tahun 2016, kapasitas riil kemampuan Kabupaten Bandung untuk mendanai prioritas II dan III pembangunan adalah sebesar Rp 675.485.753.985,00. Tahun 2020, kemampuan pendanaan diprediksi meningkat menjadi sebesar Rp 857.847.946.369,65. Informasi detail mengenai kapasitas riil kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2016 - 2021, disajikan pada Tabel 3.17.

Besaran kapasitas riil kemampuan daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk mendanai pembangunan diluar pengeluaran wajib dan mengikat. Dengan kata lain, kapasitas riil kemampuan daerah menunjukkan ketersediaan anggaran untuk pendanaan prioritas II dan prioritas III. Prioritas II merupakan prioritas di tingkat Perangkat Daerah (PD) yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Dalam hal ini, rencana anggaran prioritas II meliputi seluruh belanja langsung urusan setelah dikurangi anggaran untuk urusan pendidikan dan kesehatan. Total rencana alokasi anggaran prioritas II tahun 2016 yaitu sebesar Rp 663.125.066.335,00. Dalam kurun tahun 2016 – 2020 terjadi peningkatan alokasi anggaran prioritas II. Tahun 2015, anggaran prioritas II sebesar Rp 827.847.946.369,65. Sisa pengurangan kapasitas riil keuangan daerah dengan rencana alokasi prioritas II menjadi alokasi bagi Prioritas III yang antara lain meliputi belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga serta pengeluaran pembiayaan. Informasi detail mengenai rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditampilkan pada Tabel 3.18.



TABEL 3.17

KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2021

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Pendapatan	3.152.260.232.749,90	3.430.256.772.195,90	3.490.724.349.286,49	3.605.655.227.167,26	3.686.225.393.815,08
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	98.055.244.412,34	121.474.736.039,21	117.024.421.065,04	30.752.551.571,64	-
Total penerimaan						
Dikurangi:						
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	2.574.829.723.177,24	2.783.855.247.333,24	2.784.676.771.290,71	2.779.194.297.805,96	2.828.377.447.445,43
Kapasitas riil kemampuan keuangan		675.485.753.985,00	767.876.260.901,87	823.071.999.060,82	857.213.480.932,95	857.847.946.369,65

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2016



TABEL 3.18
RENCANA PENGGUNAAN KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
I	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I					
I.a	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	2.574.829.723.177,24	2.783.855.247.333,24	2.784.676.771.290,71	2.779.194.297.805,96	2.828.377.447.445,43
	Total Prioritas I	2.574.829.723.177,24	2.783.855.247.333,24	2.784.676.771.290,71	2.779.194.297.805,96	2.828.377.447.445,43
II	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II					
II.a	Belanja Langsung Program	1.125.023.785.338,00	1.241.984.568.674,00	1.284.918.788.153,82	1.333.868.226.559,95	1.349.757.982.590,65
	Dikurangi:					
II.b	Belanja Langsung Urusan Pendidikan dan Kesehatan	461.898.719.003,00	538.628.672.676,00	491.846.789.093,00	506.654.745.627,00	521.910.036.221,00
	Total Prioritas II	663.125.066.335,00	703.355.895.998,00	793.071.999.060,82	827.213.480.932,95	827.847.946.369,65
III	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III					
III.a	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	675.485.753.985,00	767.876.260.901,87	823.071.999.060,82	857.213.480.932,95	857.847.946.369,65
	Dikurangi					
III.b	Rencana Alokasi Prioritas II	663.125.066.335,00	703.355.895.998,00	793.071.999.060,82	827.213.480.932,95	827.847.946.369,65
	Total Prioritas III (III.a-III.b)	12.360.687.650,00	64.520.364.903,87	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2016



BAB 4

ANALISIS ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah yang disajikan dalam bab ini merupakan hasil evaluasi terhadap rencana program pada periode sebelumnya, hasil kajian literatur dan master plan bidang-bidang, hasil evaluasi terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan juga hasil wawancara bidang terkait permasalahan riil yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil penelaahan, permasalahan pembangunan daerah umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu sebagai upaya untuk mengetahui alternatif strategi yang harus dilakukan di masa mendatang untuk mengantisipasi atau mengatasi potensi permasalahan yang ada. Identifikasi permasalahan pembangunan ini diuraikan berdasarkan urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya.

Secara rinci, permasalahan pembangunan sektoral di Kabupaten Bandung dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Pendidikan

Permasalahan utama dalam sektor pendidikan di Kabupaten Bandung yaitu masih rendahnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat. Diurutkan berdasarkan faktor penyebabnya, diagram permasalahan pendidikan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang diakibatkan, diantaranya:
 - a) Masih belum meratanya pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun.
 - b) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pendidikan kesetaraan (Kejar Paket A, B, C).
 - c) Masih tingginya angka tidak melanjutkan sekolah.

Berdasarkan data statistik pendidikan tahun 2014/2015, angka tidak melanjutkan sekolah SD/ sederajat ke SMP/ sederajat sebesar 6,11%. Besarnya angka tidak melanjutkan sekolah ini disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan sarana sekolah. Menurut hasil perhitungan, diperlukan penambahan jumlah rombongan belajar sebanyak 783 (asumsi ideal: jumlah siswa dalam 1 rombongan belajar sebanyak 36 orang) guna mengakomodasi kebutuhan pendidikan yang belum terlayani.

Sementara angka tidak melanjutkan sekolah SMP/ sederajat ke SMA/ sederajat sebesar 21,67%. Berbeda dengan motif tidak melanjutkan sekolah SD/ Sederajat ke SMP/ sederajat, besarnya angka tidak melanjutkan sekolah SMP/ sederajat tidak hanya dipicu oleh kurangnya ketersediaan prasarana sekolah, tetapi juga turut dipengaruhi oleh masih kurangnya kesadaran untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan data statistik pendidikan 2014/2015, tingkat kesadaran siswa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SMA/ sederajat baru mencapai 82,64%. Adapun untuk faktor ketersediaan sarana, sekitar 5,22 % siswa yang belum terlayani oleh sarana sekolah SMA/ sederajat yang memadai.

TABEL 4.1
ANGKA TIDAK MELANJUTKAN SEKOLAH DI KABUPATEN BANDUNG

Jenjang Pendidikan	Lulusan (orang)	Pendaftar (orang)	Jumlah Melanjutkan Sekolah (orang)	Angka Tidak Melanjutkan Sekolah	
				Jumlah (orang)	%
SD/ sederajat ke SMP/ sederajat	64.601	68.952	60.653	3.948	6,11
SMP/ sederajat ke SMA/ sederajat	46.031	38.039	36.055	9.976	21,67

Sumber: Data Statistik Pendidikan Tahun 2014/2015

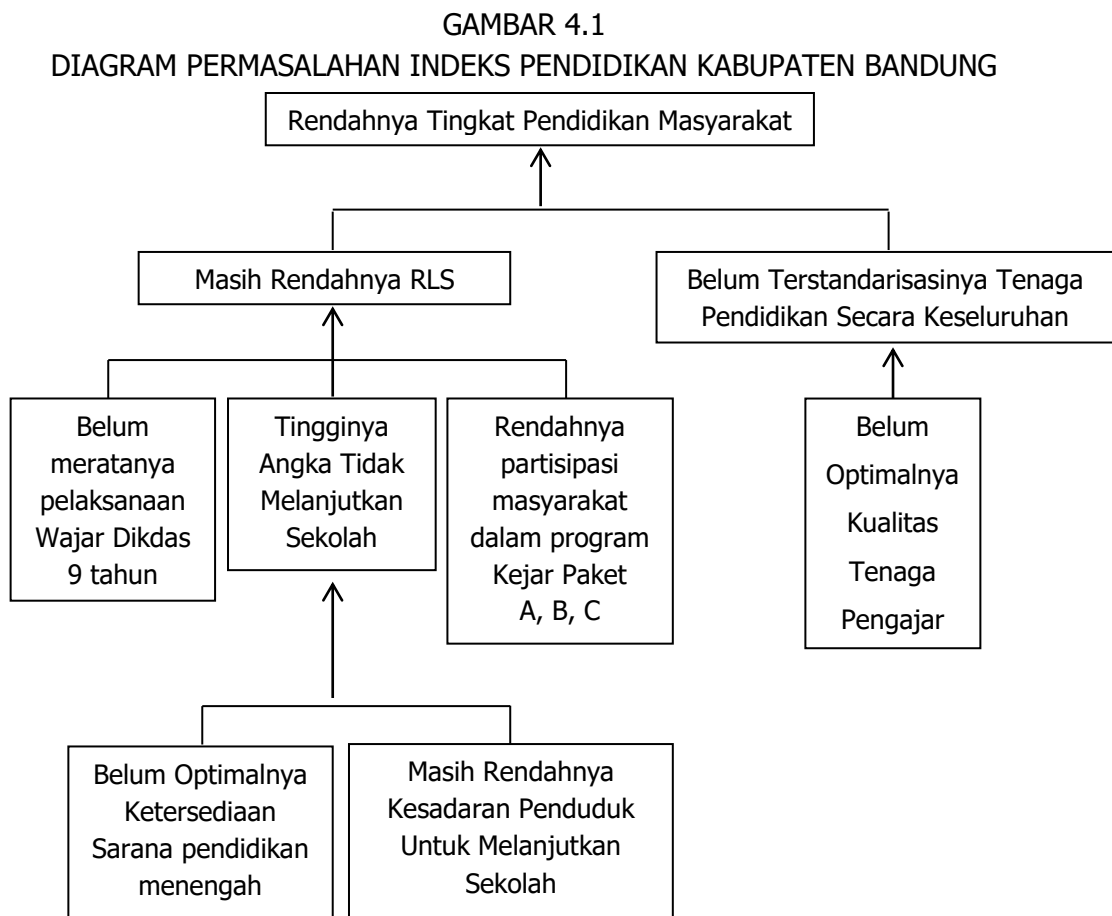
TABEL 4.2
PENYEBAB SISWA TIDAK MELANJUTKAN SEKOLAH DI KABUPATEN BANDUNG

Jenjang Pendidikan	Kurangnya Ketersediaan Sekolah			Kurangnya Kesadaran	
	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa	Persentase Siswa Belum Terlayani	Jumlah Siswa	%
SD/ sederajat ke SMP/ sederajat	231	8.299	12,04	0	0
SMP/ sederajat ke SMA/ sederajat	50	1.984	5,22	7.722	17,36

Sumber: Data Statistik Pendidikan Tahun 2014/2015

- Belum tercapainya target Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMA tahun 2014.
- Sarana dan prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi standar. Jumlah kelas tambahan untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat yang perlu disediakan sebanyak 231 kelas. Sementara jumlah kelas tambahan untuk jenjang pendidikan SMA/ sederajat yang perlu disediakan sebanyak 50 kelas (dengan asumsi 1 rombongan belajar terdiri dari 40 siswa).
- Tenaga kependidikan belum terstandardisasi.

Sebagai ilustrasi, permasalahan pembangunan sektor pendidikan ditunjukkan oleh diagram pada Gambar 4.1 berikut.



Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA Kabupaten Bandung, 2015

2. Kesehatan

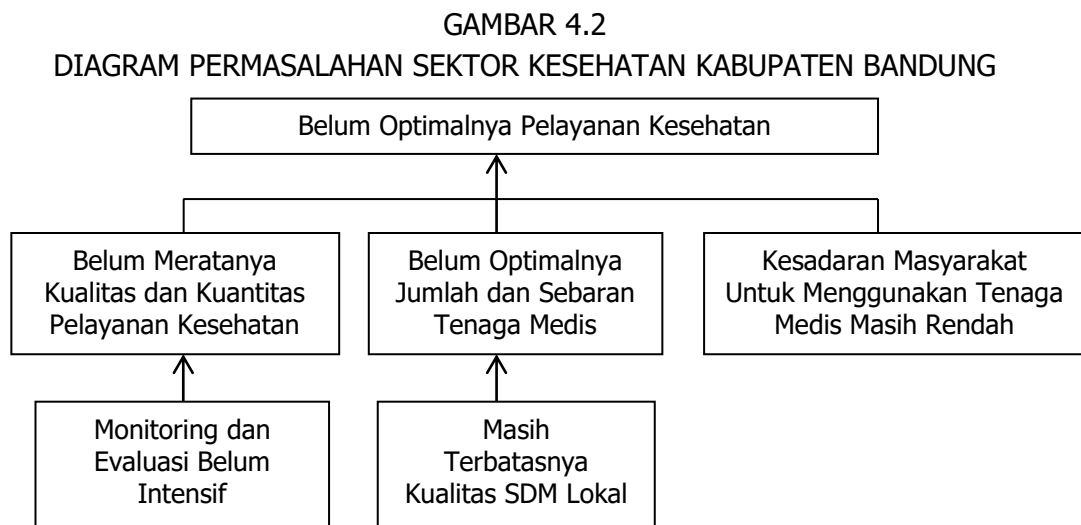
Sejalan dengan upaya peningkatan taraf kesehatan penduduk, pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan berbagai upaya, baik berupa upaya kuratif, preventif maupun promotif. Pembangunan sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah mengingat pengaruhnya yang tinggi terhadap aspek pembangunan lain, salah satunya yaitu terhadap produktivitas dan kondisi ekonomi Kabupaten Bandung.

Permasalahan dalam sektor kesehatan yang terjadi di Kabupaten Bandung pada dasarnya diakibatkan oleh belum meratanya layanan kesehatan baik berupa ketersediaan sarana, maupun ketersediaan tenaga medis pendukung. Ditinjau dari segi sarana, pada tahun 2014 rasio ketersediaan puskesmas, poliklinik dan pustu di Kabupaten Bandung yaitu 1:11.764. Angka rasio ini menunjukkan bahwa setiap unit puskesmas/ poliklinik/ pustu di Kabupaten Bandung melayani rata-rata sekitar sebelas ribu penduduk. Adapun untuk ketersediaan posyandu, angka rasio pada tahun 2014 yaitu 1:67, dimana satu unit posyandu melayani sekitar 67 balita.

Dari segi tenaga medis, sebaran serta ketersediaan tenaga medis di Kabupaten Bandung relatif masih kurang, terutama untuk tenaga medis pertolongan

persalinan. Tahun 2013, baru sekitar 80,66 % persalinan yang dibantu dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Meskipun demikian, pada dasarnya angka persentase tersebut tidak saja dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga medis, akan tetapi turut dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat menggunakan tenaga medis yang memiliki kompetensi. Pada praktiknya, seperti misalnya dalam hal persalinan, masih banyak penduduk yang lebih mengandalkan tenaga non medis. Hal ini diduga turut berpengaruh pada Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bandung yang masih tergolong tinggi, sekitar 33,90 pada tahun 2014 dan 33,64 pada tahun 2015.

Secara detail, permasalahan dalam aspek kesehatan yang terjadi di Kabupaten Bandung diilustrasikan oleh diagram masalah pada Gambar 4.2 sebagai berikut.



Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA Kabupaten Bandung, 2015

3. Penataan Ruang dan Perencanaan Pembangunan

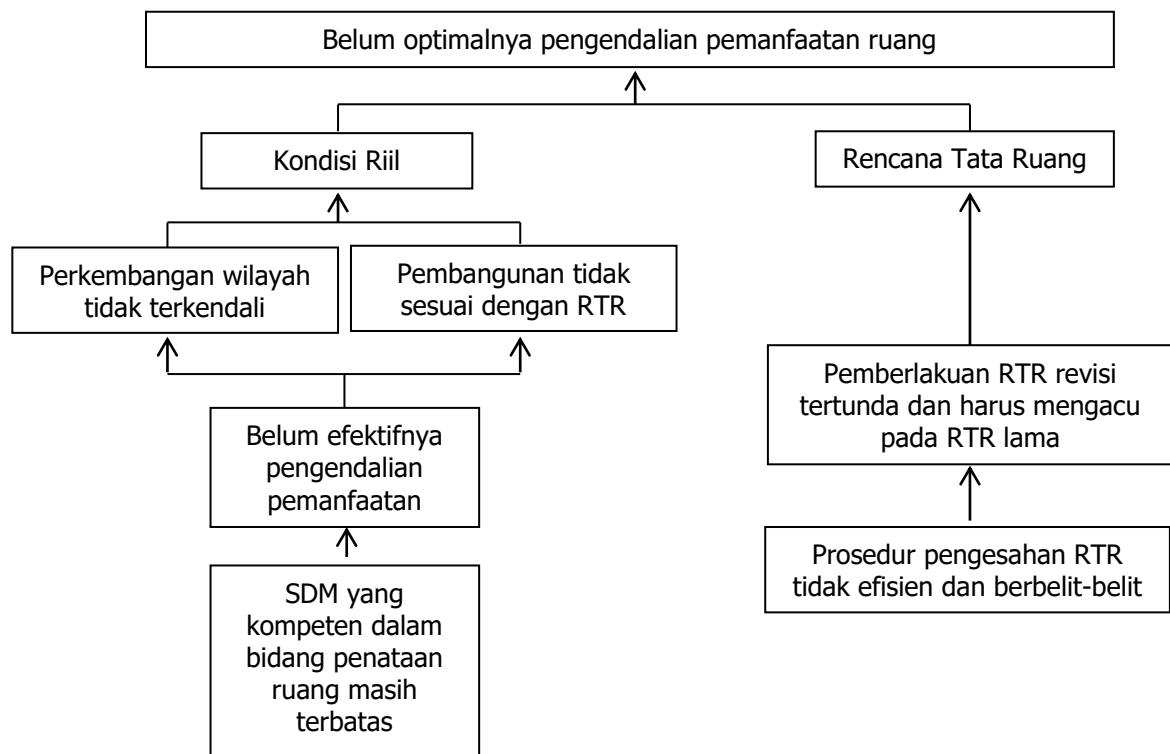
Inti dari permasalahan penataan ruang di Kabupaten Bandung yaitu adanya ketidaksesuaian antara perencanaan pembangunan dengan kondisi riil di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, ketidaksesuaian yang diakibatkan oleh dinamika pertumbuhan wilayah yang tidak terkendali, dimana seringkali berdampak pada alih fungsi lahan. Kedua, ketidaksesuaian yang diakibatkan oleh tidak terimplementasinya rencana tata ruang secara utuh. Dalam konteks Kabupaten Bandung, Rencana Tata Ruang Wilayah telah mendelineasi kawasan- kawasan tertentu sebagai kawasan strategis, akan tetapi dalam praktik di lapangan sarana dan prasarana di kawasan- kawasan tersebut belum memadai dalam mendukung perkembangan wilayah strategis.

Persoalan lain dalam bidang tata ruang di Kabupaten Bandung yaitu adanya keterbatasan dalam ketersediaan informasi mengenai rencana rinci tata ruang, rencana tapak beserta dokumen pendukung lain yang bersifat spasial, baik itu berupa peta analog maupun peta digital. Disisi lain, perencanaan tata ruang juga dihadapkan kepada persoalan berupa tidak efisiennya prosedur penyesuaian hingga pengesahan rencana tata ruang. Selain dari pada itu, kondisi eksisting juga masih dihadapkan pada

keterbatasan pengendalian dan pengawasan lapangan, yang mana ini berimplikasi pada kurang intensifnya penindakan pelanggaran tata ruang.

Persoalan pembangunan Kabupaten Bandung yang terkait dengan penataan ruang dan perencanaan dapat dilihat pada diagram permasalahan pada Gambar 4.3 berikut.

GAMBAR 4.3
DIAGRAM PERMASALAHAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANDUNG



Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA Kabupaten Bandung, 2015

4. Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil identifikasi isu lingkungan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD yang dilakukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Mengacu pada hasil KLHS, terdapat sembilan isu lingkungan utama yang perlu diperhatikan di Kabupaten Bandung. Isu – isu lingkungan tersebut antara lain:

1. Pencemaran lingkungan
2. Kerusakan lingkungan
3. Pengelolaan sumber daya air
4. Perumahan
5. Ketahanan pangan
6. Transportasi
7. Pariwisata
8. Kesehatan masyarakat
9. Perubahan iklim dan kebencanaan



Permasalahan pembangunan dalam sektor lingkungan hidup diatas, secara garis besar dapat diklasifikasikan kedalam permasalahan akibat limbah cair, limbah padat dan polusi udara. Beberapa permasalahan timbul akibat adanya industri di Kabupaten Bandung. Operasional industri pengolahan berkorelasi positif terhadap produksi limbah yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan data Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung, tahun 2013 ada sekitar 209 industri yang terpantau menghasilkan limbah cair. Dari total tersebut, baru sekitar 60 % industri yang telah melakukan pengujian kualitas air limbah dan baru sekitar 58 % yang telah melaporkan secara rutin mengenai aktivitasnya dalam produksi dan pengelolaan limbah cair industri. Selain limbah cair, pantauan BPLH menunjukkan terdapat sekitar 189 industri yang menghasilkan pencemaran udara. Untuk emisi industri ini, sekitar 98 % industri telah melakukan pengujian kualitas emisi serta melaporkannya secara rutin.

Secara rinci, permasalahan pembangunan dalam sektor lingkungan hidup tersebut dijabarkan sebagai berikut.

A. Limbah Cair

- Dalam aspek kelembagaan, adanya peleburan Dinas Kebersihan menjadi salah satu bidang di bawah Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mengakibatkan adanya perubahan (penyempitan) tupoksi, wewenang serta beban kerja, khususnya terkait sektor kebersihan.
- Dalam sektor peraturan, belum optimalnya efektifitas penerapan peraturan daerah mengakibatkan belum optimalnya pula pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bandung
- Belum adanya kebijakan pembatasan perijinan terhadap industri- industri yang berpotensi menghasilkan limbah yang berat, baik limbah cair, limbah udara maupun limbah padat.
- Dalam sektor layanan pengelolaan, kurangnya ketersediaan infrastruktur pendukung pengelolaan air limbah domestik mengakibatkan masih rendahnya cakupan pelayanan air limbah domestik
- Dalam sektor partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan mulai dari pembuangan awal hingga pembuangan akhir masih tergolong rendah. Selain dari pada itu, kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah domestik secara komunal juga masih tergolong rendah
- Dalam sektor partisipasi sektor swasta, saat ini belum ada kerjasama secara khusus antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam hal pengelolaan air limbah domestik
- Dalam sektor komunikasi/ sosial, kegiatan komunikasi/ sosialisasi dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bandung cenderung belum optimal.
- Masih kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat dalam pengolahan limbah tinja. Saat ini baru dibangun IPLT komunal di beberapa daerah, seperti Majalaya dan Pacet. Namun proses pengolahannya juga masih belum optimal.
- Tidak adanya IPLT/IPAL perumahan (yang seharusnya dibangun oleh developer) dan tidak adanya regulasi yang mengikat developer tersebut.



- Dalam sektor limbah industri, isu strategis antara lain masih lemahnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah terhadap pengelolaan limbah oleh industri polutif.

B. Limbah Padat

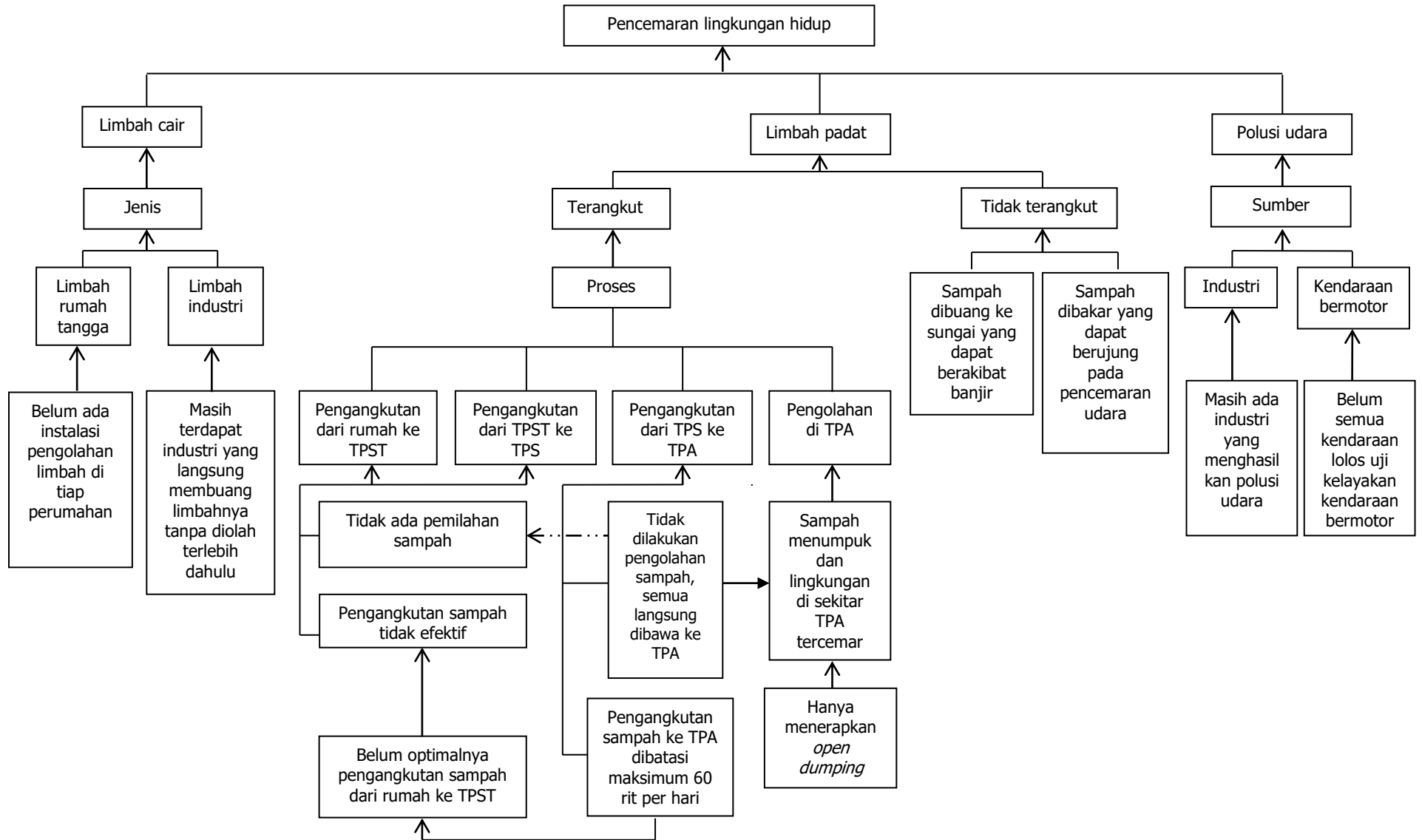
- Belum efisiennya sistem pengangkutan sampah, pengangkutan sampah oleh truk masih dilakukan dari rumah ke rumah dan bukan dari TPST.
- Masa berlaku TPA Babakan seharusnya sudah habis tahun lalu namun masih digunakan hingga sekarang.
- Tidak adanya proses pengolahan sampah di TPS sehingga seluruh sampah dibawa ke TPA yang mana saat ini masih menerapkan sistem *open dumping*.
- Kurangnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sampah, dimana seharusnya pengangkutan sampah dari rumah-rumah ke TPST dilakukan secara mandiri dengan menggunakan gerobak (yang sudah disiapkan pemerintah).
- Tidak adanya desa-desa swadaya pengelola sampah.
- Sangat tidak memadainya sarana prasarana TPA yang disebabkan bentuknya yang bukan UPTD.
- Masih terbatasnya cakupan pelayanan sampah oleh pemerintah. Mengacu pada data Indikator Kinerja Daerah tahun 2014, baru sekitar 19,06 sampah di Kabupaten Bandung yang tertangani. Adapun rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk yaitu sekitar 1:13.809, dimana satu TPS melayani sekitar 13.809 penduduk. Jika dibandingkan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di perkotaan, rasio TPS terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bandung tersebut cenderung masih dibawah standar.
- Kurangnya kesepahaman antara pemerintah dengan masyarakat Babakan dalam penyelenggaraan TPA sehingga masih terhambatnya pengangkutan sampah ke TPA.
- Masih rendahnya rasio Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) per satuan penduduk akibat kurangnya sarana dan prasarana fasilitas pengurangan sampah.
- Masih sedikitnya pembangunan *pilot project* sarana pengelolaan limbah domestik/puskesmas/ peternakan (kegiatan) akibat sulitnya mendapatkan industri/IKM yang kooperatif dan mau menerima program pengembangan produksi ramah lingkungan.
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana persampahan, ketersediaan armada, biaya dan keberadaan TPA.
- Belum optimalnya penerapan teknologi pengelolaan sampah karena belum menerapkan *sanitary landfill* (sebagian *open dumping* dan sebagian *control landfill*).
- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola persampahan skala rumah tangga.

C. Polusi Udara

- Masih terdapat industri yang menghasilkan polusi udara
- Belum semua kendaraan lolos uji kelayakan kendaraan bermotor
- Pembakaran sampah masih kerap dipraktikkan oleh masyarakat



GAMBAR 4.4
DIAGRAM PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG





5. Sumber Daya Air

Persoalan pembangunan utama dalam sektor sumber daya air di Kabupaten Bandung yaitu belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air. Secara umum, lingkup sumber daya air dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok, meliputi drainase dan pemanfaatan air baku.

Dalam sektor drainase, persoalan utama yang dihadapi yaitu persoalan banjir akibat belum optimalnya pengelolaan drainase, baik itu drainase primer, maupun drainase sekunder dan drainase tersier. Untuk drainase primer, belum optimalnya pengelolaan lebih disebabkan karena belum jelasnya pembagian kewenangan pengelolaan Sungai Citarum antara pusat (BBWS Citarum) dan daerah serta belum optimalnya upaya normalisasi sungai secara berkala dan berkesinambungan untuk mengurangi risiko terjadinya banjir tahunan serta belum optimalnya penataan wilayah sempadan sungai. Adapun untuk sektor drainase sekunder dan tersier, persoalan utama yaitu masih kurang memadai serta tidak terintegrasinya jaringan drainase sekunder dan tersier di Kabupaten Bandung. Jika dirinci berdasarkan pangkal persoalannya, persoalan tersebut lebih diakibatkan oleh belum adanya peraturan daerah yang khusus mengatur pengelolaan drainase lingkungan. Sebagai implikasinya, hal tersebut berdampak pada tidak adanya kejelasan mengenai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola drainase lingkungan.

Selain diakibatkan oleh aspek legal dan kelembagaan, pembangunan sektor drainase sekunder dan tersier juga dihadapkan pada persoalan berupa adanya keterbatasan informasi dan basis data mengenai jaringan eksisting. Persebaran dan lokasi jaringan drainase lingkungan belum terinventarisir secara keseluruhan. Tidak adanya basis data tersebut berakibat pada sulitnya penetapan rencana pengembangan kedepan. Sementara itu, partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan dan pembangunan drainase lingkungan secara terintegrasi masih tergolong rendah.

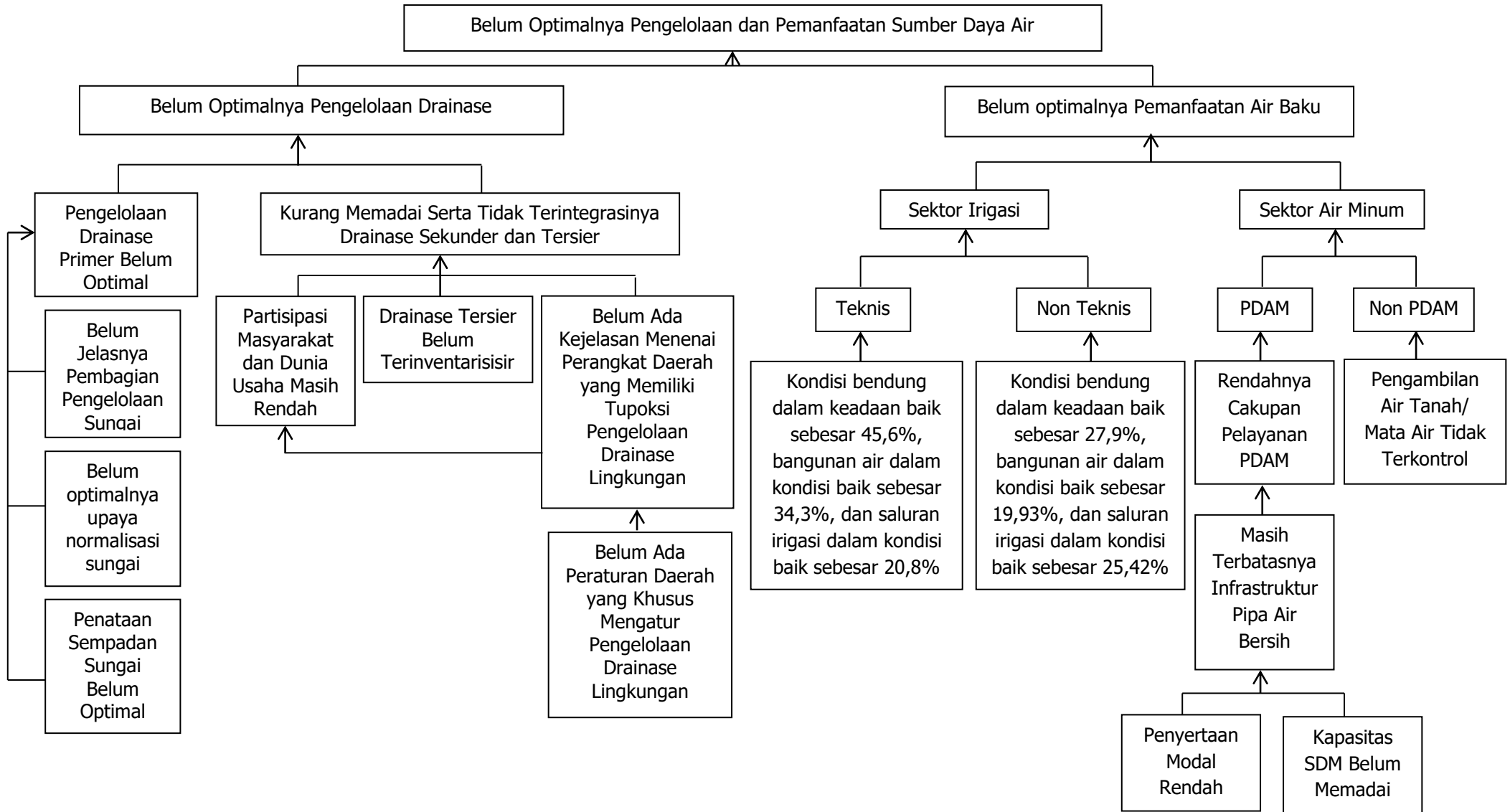
Dalam sektor pemanfaatan air baku, khususnya untuk sektor irigasi, kondisi irigasi teknis dan irigasi non-teknis belum seratus persen mantap. Untuk irigasi teknis, kondisi bendung dalam keadaan baik baru sebesar 45,6%, kondisi bangunan air yang saat ini dalam kondisi baik yaitu sebesar 34,3%, serta untuk saluran irigasi yang telah dalam kondisi baik yaitu baru mencapai 20,8%. Sedangkan untuk irigasi non-teknis, kondisi bendung dalam keadaan baik baru mencapai 27,9%, kondisi bangunan air dalam kondisi baik sebesar 19,93%, sedangkan untuk saluran irigasi yang telah memiliki kondisi baik yaitu 25,42%.

Adapun untuk sektor air minum, persoalan dapat dikelompokkan kedalam persoalan sektor air minum yang dilayani PDAM dan sektor air minum non-PDAM. Untuk sektor air minum yang dilayani PDAM, persoalan yang timbul antara lain masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih yang dilayani oleh PDAM akibat masih terbatasnya infrastruktur pipa jaringan air minum yang tersedia. Adapun untuk sektor air minum non-PDAM, persoalan yang dihadapi antara lain berkurangnya cadangan air tanah. Pengambilan air tanah yang tidak terkontrol serta adanya alih fungsi lahan di kawasan resapan air merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ketersediaan cadangan air tanah di Kabupaten Bandung.

Persoalan sumber daya air di Kabupaten Bandung beserta faktor penyebab permasalahannya disajikan dalam gambar 4.5 sebagai berikut.



GAMBAR 4.5
DIAGRAM PERMASALAHAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BANDUNG



Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA Kabupaten Bandung, 2015

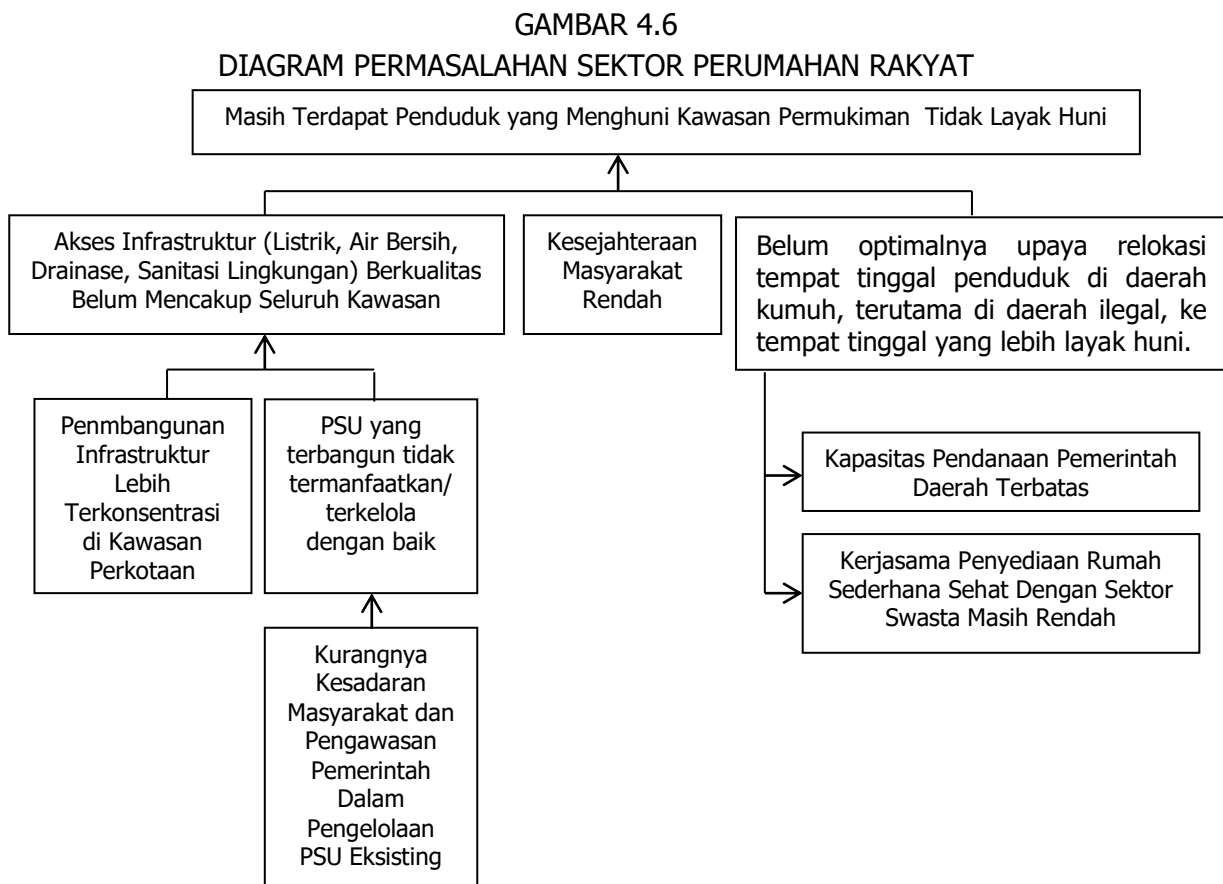
6. Perumahan Rakyat

Rumah atau aspek papan merupakan sarana dasar pokok yang idealnya wajib dipenuhi setelah aspek pangan dan sandang terpenuhi. Meskipun demikian kondisi riil di Kabupaten Bandung pada tahun 2014 menunjukkan bahwa luas permukiman layak huni baru mencapai sekitar 90,94 %. Hal tersebut berarti bahwa masih terdapat sekitar 9,06 % penduduk Kabupaten Bandung yang kawasan permukiman tidak layak huni.

Kondisi diatas dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu karena belum meratanya akses infrastruktur seperti listrik, air bersih, drainase dan sanitasi lingkungan yang memadai. Persoalan tersebut, lebih lanjut lagi dapat disebabkan oleh baik itu pembangunan infrastruktur yang lebih cenderung terkonsentrasi di perkotaan maupun karena tidak dimanfaatkannya sarana prasarana umum secara optimal.

Selain akibat kurangnya akses infrastruktur, persoalan rumah tidak layak huni juga dapat diakibatkan karena belum optimalnya upaya relokasi tempat tinggal penduduk di daerah kumuh, terutama di daerah ilegal, ke tempat tinggal yang lebih layak huni. Dalam hal ini, keterbatasan dalam kapasitas pendanaan oleh pemerintah serta belum adanya kerjasama penyediaan rumah sederhana sehat antara pemerintah daerah dengan sektor swasta merupakan beberapa faktor penyebabnya.

Pada dasarnya persoalan rumah tidak layak huni juga sangat berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Rumah tidak layak huni pada umumnya dihuni oleh keluarga prasejahtera. Secara rinci, persoalan pembangunan dalam sektor perumahan rakyat beserta faktor penyebab permasalahannya disajikan pada gambar 4.6 berikut.

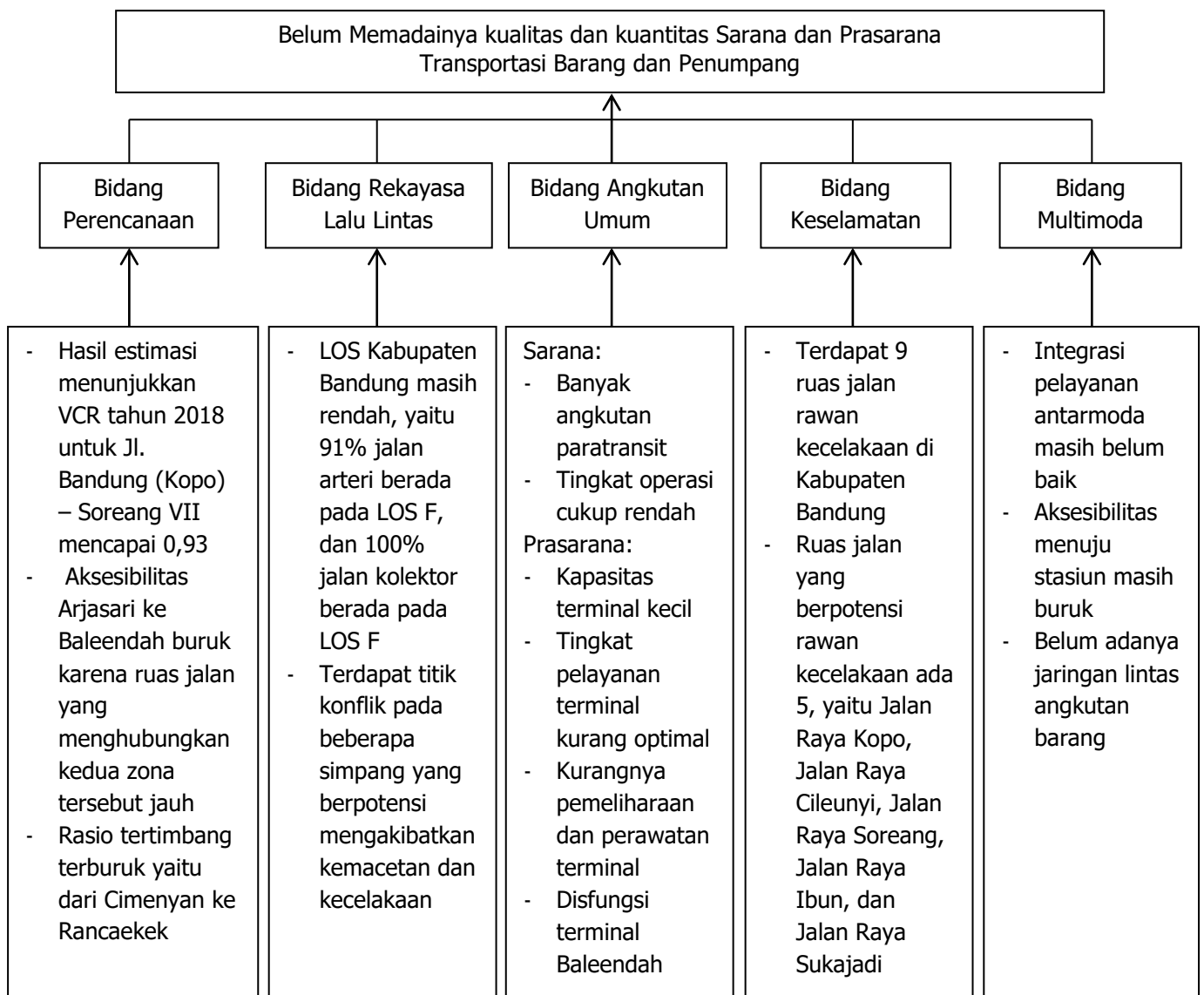


Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA Kabupaten Bandung, 2015

7. Perhubungan

Dalam sektor perhubungan, persoalan utama yang timbul yaitu belum memadainya sarana dan prasarana transportasi penumpang dan barang, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Jika dirinci lebih detail, persoalan tersebut dapat dirunut berdasarkan beberapa bidang, meliputi bidang perencanaan, bidang rekayasa lalu lintas, bidang angkutan umum, bidang keselamatan, bidang multimoda.

GAMBAR 4.7
DIAGRAM PERMASALAHAN SEKTOR PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANDUNG



Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA Kabupaten Bandung, 2015

Secara umum penyebab belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Bandung yaitu sebagai berikut:

- Masih rendahnya pelayanan angkutan publik terhadap penumpang.



- Masih terbatasnya ketersediaan jaringan jalan yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas.
- Masih rendahnya VCR (*volume capacity ratio*) dan LoS (*level of service*). VCR terburuk berada di ruas Jalan Bandung-Cileunyi I dengan VCR 0,937; Jalan Raya Banjaran III dengan VCR 0,826; dan Jalan Gajah Eretan dengan VCR 0,259.
- Masih adanya ruas jalan dengan kecepatan lalu lintas sangat lambat, yaitu Jalan Raya Cipatik (Soreang) II dengan kecepatan 7,12 km/jam; Jalan Kapten Sarwono II dengan kecepatan 5,63 km/jam; dan Jalan Gajah Eretan dengan kecepatan 20,68 km/jam.
- Masih adanya ruas jalan dengan kepadatan kendaraan sangat tinggi, yaitu di ruas Jalan Bandung (Kopo)-Soreang III dengan kepadatan 308,7; Jalan Raya Banjaran II dengan kepadatan 82,3; dan Jalan Gajah Eretan dengan kepadatan 9,3.
- Belum optimalnya upaya untuk menghidupkan kembali jalur rel kereta api yang menghubungkan Kota Bandung-Majalaya dan Kota Bandung-Ciwidey dalam rangka efisiensi transportasi barang dan penumpang.
- Belum terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor) akibat masih kurangnya ketersediaan unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- Masih rendahnya kesadaran dan disiplin pengguna jalan dan pengemudi kendaraan.

8. Sosial

Salah satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Bandung sebagai akibat dari dinamika pertumbuhan wilayah yaitu timbulnya persoalan kesejahteraan sosial. Tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berakar dari berbagai aspek pembangunan. Tingkat pengangguran yang tinggi akibat rendahnya tingkat pendidikan penduduk serta tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah merupakan dua aspek yang berkorelasi erat terhadap timbulnya persoalan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Kabupaten Bandung, pada dasarnya permasalahan dari tingginya jumlah penyandang kesejahteraan sosial diakibatkan karena belum terpadunya penanganan PMKS oleh perangkat- perangkat daerah yang terkait dengan persoalan kesejahteraan sosial.

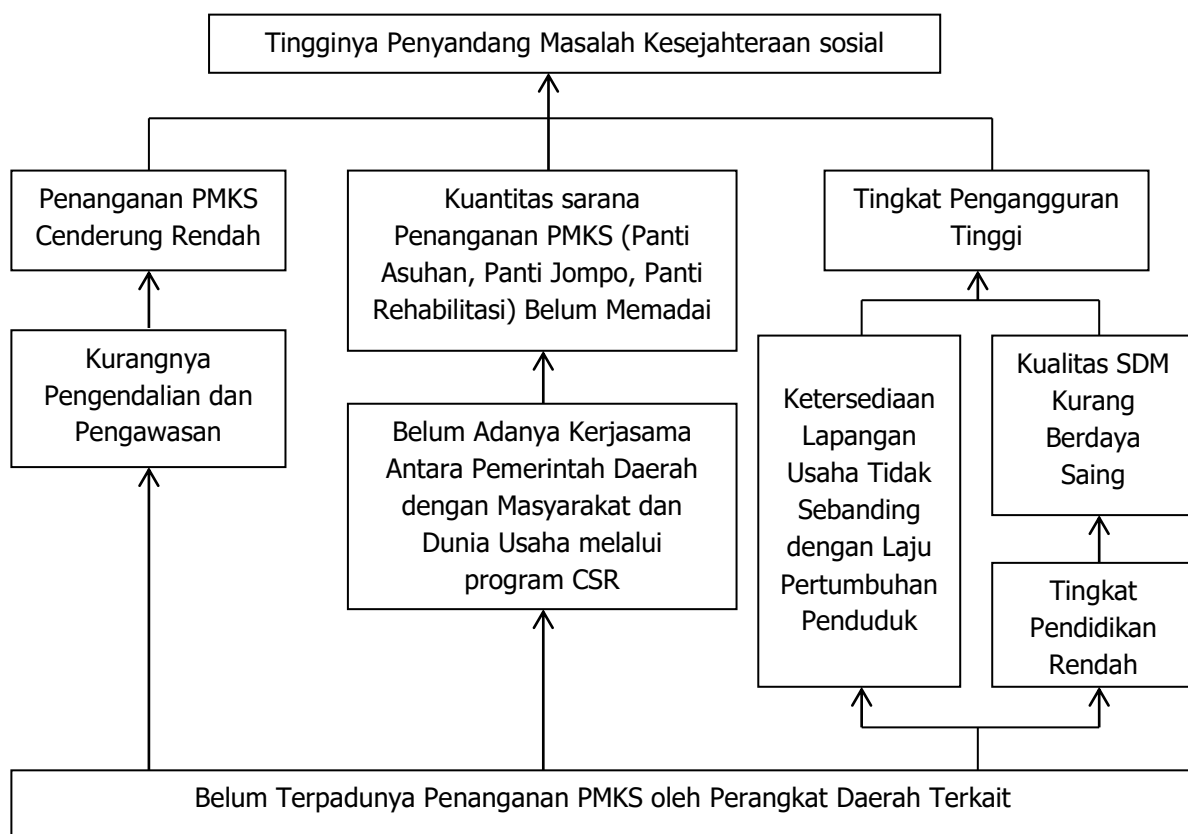
Ditinjau dari segi kesejahteraan penduduk, mengacu pada data Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, pada tahun 2012 masih terdapat sekitar 498.975 KK di Kabupaten Bandung yang masih tergolong keluarga prasejahtera. Sedangkan dari segi ketenaga kerjaan, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung pada tahun 2014 masih tergolong tinggi, dengan persentase sebesar 8,48 %. Tingginya tingkat pengangguran tersebut secara tidak langsung dipengaruhi oleh kualitas dan tingkat pendidikan sumber daya manusia. Meninjau persoalan kesejahteraan sosial yang bersifat multiaspek tersebut, maka penanganan kesejahteraan sosial secara terpadu antar berbagai *stakeholder* mutlak diperlukan.

Pemerintah sebagai aktor kunci dalam pembangunan wilayah memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pengentasan permasalahan kesejahteraan sosial. Dalam konteks kabupaten Bandung , tingginya jumlah penyandang kesejahteraan sosial diakibatkan oleh

tidak seimbangnya antara peningkatan jumlah penyandang kesejahteraan sosial dengan kemampuan pemerintah daerah dalam aspek penanganan. Mengacu pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung, pada tahun 2014, baru sekitar 18,66 % penyandang kesejahteraan sosial fakir miskin yang dapat ditangani pemerintah. Sedangkan untuk penyandang kesejahteraan sosial anak terlantar, persentase penanganan oleh pemerintah pada tahun yang sama yaitu baru sebesar 7,43 %.

Kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu alternatif bagi penyediaan dan pengelolaan sarana penanganan kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, pada kondisi eksisting di Kabupaten Bandung, kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha belum diinisiasi secara intensif. Secara rinci, permasalahan sector sosial di Kabupaten Bandung disajikan pada Gambar 4.8.

GAMBAR 4.8
DIAGRAM PERMASALAHAN SOSIAL KABUPATEN BANDUNG



Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA Kabupaten Bandung, 2015

9. Ekonomi

Sebelum membahas secara detail mengenai isu strategis sektor ekonomi Kabupaten Bandung, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai kondisi ekonomi makro Kabupaten Bandung. Secara umum, PAD Kabupaten Bandung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu subsektor yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Bandung yaitu peningkatan penerimaan pajak, berupa pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak reklame. Dari penerimaan pajak dapat dilihat bahwa Kabupaten Bandung belum



mengoptimalkan perolehan pajak dari sumber-sumber lainnya seperti sektor pariwisata, yakni pajak hotel, restoran dan hiburan, demikian juga pajak dari reklame dan parkir. Oleh karena itu perlu ada penggalan potensi pajak yang belum terpungut untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bandung. Selain itu kedepan, potensi pajak perlu ditingkatkan, diantaranya dengan meningkatkan jumlah pengunjung hotel dan restoran, dengan meningkatkan upaya-upaya mengembangkan pariwisata dan regional branding. Selain didukung oleh peningkatan nilai pajak, peningkatan PAD Kabupaten Bandung juga didorong oleh peningkatan retribusi. Dalam kurun lima tahun terakhir, terjadi peningkatan retribusi dengan penerimaan retribusi terbesar yaitu retribusi jasa umum, kemudian diikuti perizinan jasa usaha.

Sejalan dengan adanya peningkatan subsektor PAD di atas, sehingga pengembangan sektor perekonomian harus mendapat perhatian pada periode pembangunan berikut dan menjadi fokus pembangunan disamping upaya peningkatan tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat. Perekonomian disisi lain dapat menjadi roda penggerak pembangunan. Namun Perekonomian harus diiringi dengan kualitas sdm yang baik. Maka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, fokus pengembangan diarahkan pada peningkatan iklim investasi, peningkatan pariwisata, peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing umkm dan produk pertanian, dengan pendekatan ekonomi lokal dan pembangunan seluas-luasnya berbasis ekonomi kerakyatan. Dengan adanya efek multiplier pengembangan ekonomi, diharapkan dapat menggerakkan perekonomian sehingga kemampuan keuangan daerah juga meningkat (dengan meningkatnya pajak dsbnya)

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai persoalan sektor ekonomi di Kabupaten Bandung, pembahasan akan dilakukan secara sektoral berdasarkan jenis ekonomi. Dalam pembahasan ini, jenis ekonomi yang akan dipaparkan antara lain meliputi sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan, sektor pariwisata, sektor koperasi dan UKM serta sektor penanaman modal.

a. Sektor pertanian

Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027, alokasi kawasan budidaya pertanian dalam rencana pola ruang Kabupaten Bandung mencakup 93.797,73 Ha atau seluas 53, 22 % dari total seluruh area Kabupaten Bandung. Meskipun demikian, sektor pertanian bukan merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Tahun 2014, sektor pertanian hanya menyumbang sekitar 7,78 % terhadap total PDRB Kabupaten Bandung. Nilai tersebut jauh lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor industri pengolahan yang memiliki kontribusi sekitar 55,65 %.

Ketersediaan luas areal pertanian tersebut merupakan *absolute advantage* bagi Kabupaten Bandung yang berpotensi sebagai sektor unggulan. Sebagai upaya pengembangan sektor pertanian Kabupaten Bandung kedepan, dilakukan identifikasi terhadap persoalan sektor pertanian beserta faktor penyebab permasalahannya. Berdasarkan hasil kajian, persoalan utama dalam sektor pertanian di Kabupaten Bandung yaitu belum adanya jaminan mengenai kuantitas, kualitas produk pertanian serta belum adanya jaminan mengenai kontinuitas ketersediaan produk pertanian di



pasar. Jika dikaji lebih rinci, persoalan tersebut timbul akibat beberapa faktor, baik dalam proses produksi maupun dalam proses distribusi produk pertanian.

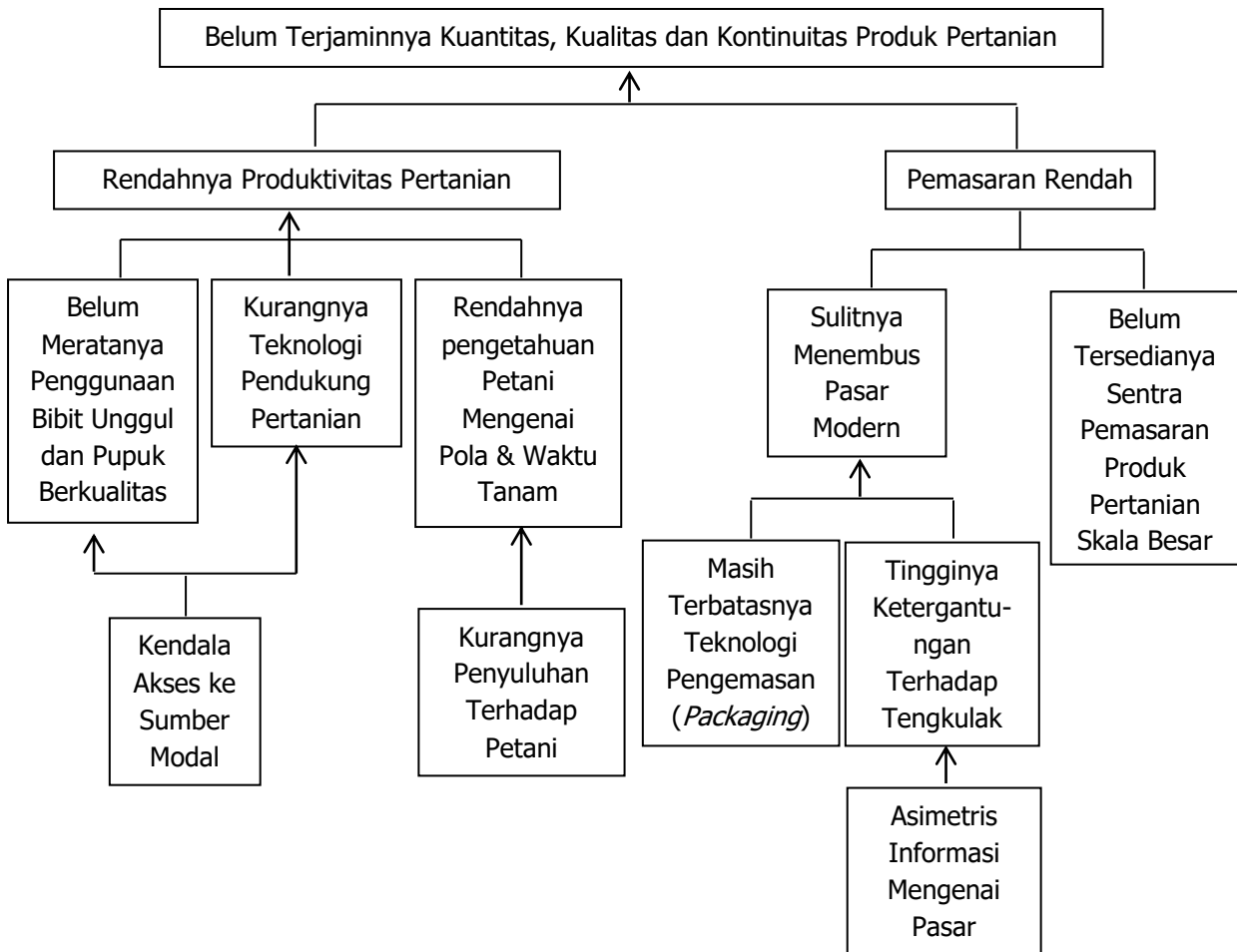
Dalam proses produksi, rendahnya produktivitas pertanian kemungkinan besar diakibatkan oleh rendahnya pengetahuan petani mengenai penguasaan teknologi pertanian serta pengetahuan terhadap pola dan waktu tanam. Selain daripada itu, belum meratanya penggunaan bibit unggul dan pupuk berkualitas dapat pula menjadi faktor penyebab. Pada intinya, hal ini perlu diantisipasi dengan intensifikasi penyuluhan dan pelatihan oleh pemerintah daerah terhadap petani.

Dalam sektor distribusi, salah satu persoalan yang dihadapi yaitu masih rendahnya pemasaran produk pertanian. Dalam hal ini, daya saing petani berperan penting dalam menentukan keberhasilan pemasaran. Pada kondisi eksisting, pertanian dilakukan oleh secara individual oleh para petani dalam skala kecil dimana para petani tersebut tidak memiliki informasi dan akses secara langsung ke pasar. Dalam memasarkan produknya, para petani memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap tengkulak. Dalam sistem ini petani menjadi pihak yang dirugikan mengingat harga jual ke tengkulak jauh lebih rendah dibandingkan jika petani memasarkan langsung produknya. Terkait hal tersebut, persoalannya hingga saat ini Kabupaten Bandung masih bergantung pada Kota Bandung (Pasar Induk Caringin) untuk memasarkan produk pertaniannya. Dalam lingkup Kabupaten Bandung sendiri, belum ada sentra pemasaran produk pertanian skala besar serta memberikan jaminan kepada konsumen mengenai kualitas, kuantitas dan kontinuitas ketersediaan pasokan produk pertanian.

Persoalan lain yang berpengaruh terhadap rendahnya daya saing pemasaran produk pertanian Kabupaten Bandung yaitu masih terbatasnya penggunaan teknologi pengemasan produk pertanian yang dilakukan oleh petani. Tanpa pengemasan yang menarik, tidak ada *Added Value* yang diperoleh dari produk pertanian yang dihasilkan.

Secara detail, persoalan sektor pertanian di Kabupaten Bandung disajikan dalam diagram pada gambar 4.9.

GAMBAR 4.9
DIAGRAM PERMASALAHAN SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG



Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA Kabupaten Bandung, 2015

b. Sektor industri

Sektor industri, terutama industri pengolahan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Kabupaten Bandung. Pada tahun 2015, kontribusi sektor ini mencapai 54,75 % terhadap total PDRB Kabupaten Bandung. Kendati demikian, sektor industri pengolahan terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir, dengan angka pertumbuhan berturut-turut dari tahun 2008 hingga tahun 2015 yaitu 60.80 %, 59.91%, 59.60%, 58.72%, 57.67%, 56.79%, 55.64% dan 54.75%.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor industri menjadi sektor yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi. Hal tersebut menjadikan sektor industri sebagai sektor strategis untuk dikembangkan kedepan. Intervensi terhadap sektor ini akan berpengaruh secara signifikan bagi perekonomian Kabupaten Bandung. Dilihat dari laju pertumbuhan, pertumbuhan sektor industri menunjukkan trend perlambatan. Oleh karena itu perlu ada upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja perekonomian sektor perindustrian. Berdasarkan pengukuran terhadap indeks *Location Quotion* (LQ), sektor industri pengolahan merupakan sektor basis baik dari sisi provinsi maupun dari sisi nasional. Demikian juga berdasarkan pengukuran terhadap indeks spesialisasi, sektor industri pengolahan merupakan sektor yang



memiliki konsentrasi yang tinggi di Kabupaten Bandung sehingga sebaiknya mendapat perhatian penting dari pemerintah.

Secara umum, perindustrian di Kabupaten Bandung dapat dikategorikan menjadi industri besar, industri menengah dan industri kecil. Oleh karena itu, permasalahan sektor industri pengolahan diklasifikasikan menurut pembagian kategori tersebut.

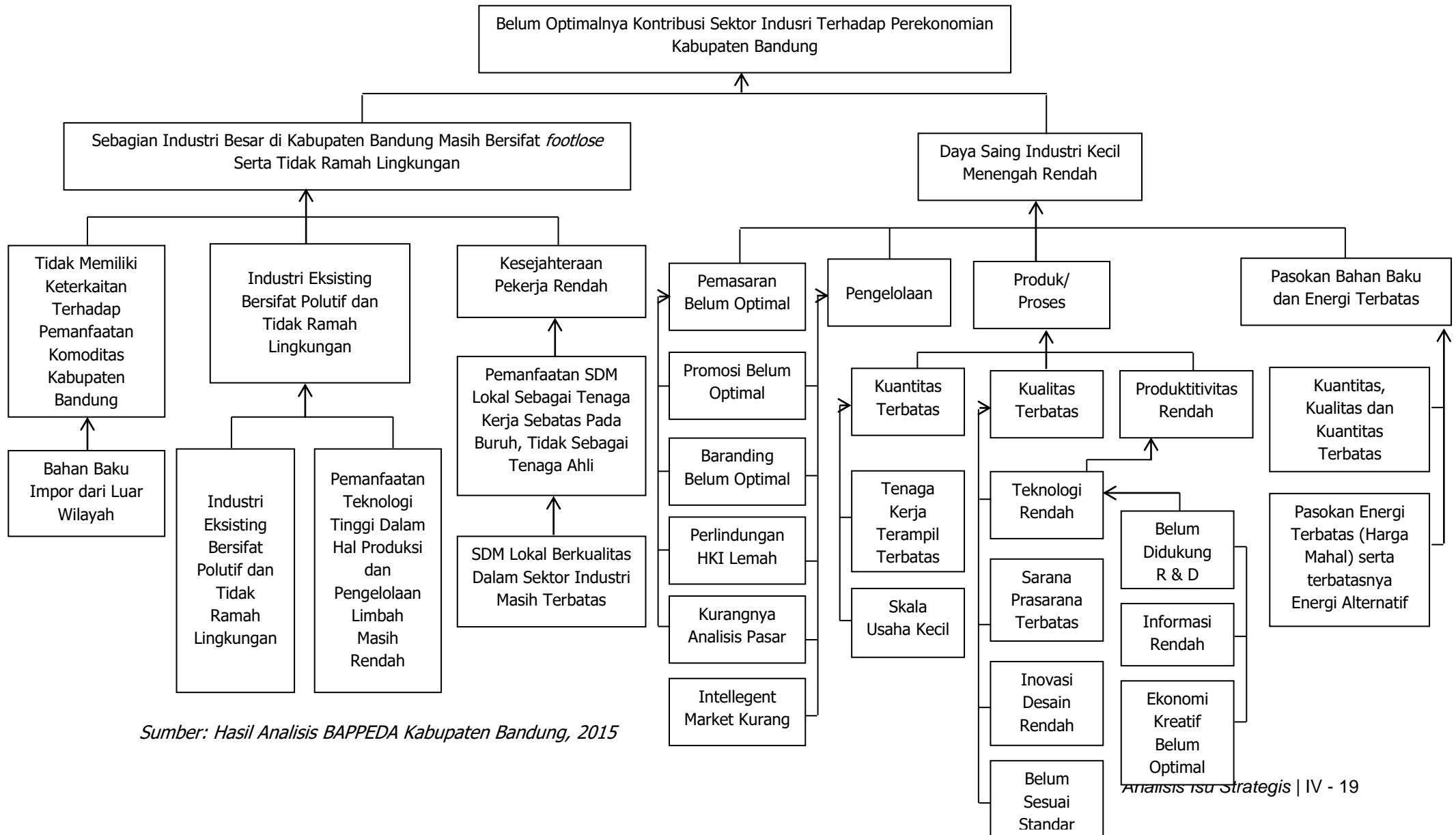
Industri besar di Kabupaten Bandung umumnya dapat dikategorikan sebagai *footlose industry*. Industri *footlose* dapat didirikan di mana saja, karena bahan baku, tenaga kerja, dan pasarnya sangat luas serta dapat ditemukan di mana saja sehingga lokasinya tidak ditentukan oleh ketersediaan bahan baku maupun pasarnya. Oleh karena itu, industri yang bersifat *footlose* umumnya tidak memiliki linkage terhadap pengolahan sektor hulunya.

Umumnya Industri besar di Kabupaten Bandung adalah industri tekstil. Berdasarkan Analisis Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2015 yang disusun oleh BPS, kontributor terbesar industri pengolahan di Kabupaten Bandung adalah sektor industri tekstil. barang dari kulit dan alas kaki. Sebagian besar bahan baku umumnya merupakan bahan baku impor yang didatangkan dari daerah / negara lain. Oleh karena bahan bakunya sebagian adalah bahan baku impor, maka industri ini relatif rentan terhadap gejolak perekonomian global seperti kenaikan harga akibat perubahan kurs mata uang asing. Keterkaitan dengan Kabupaten Bandung hanya berupa keterkaitan dalam pemanfaatan tenaga kerja. Sebagian besar tenaga kerja bukan sebagai tenaga ahli melainkan sebatas buruh pabrik dengan upah rendah.

Untuk memberikan gambaran detail mengenai isu permasalahan sektor industri di Kabupaten Bandung, berikut disajikan diagram permasalahan pada sektor tersebut.



GAMBAR 4.10
DIAGRAM PERMASALAHAN SEKTOR INDUSTRI KABUPATEN BANDUNG



Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA Kabupaten Bandung, 2015



c. Sektor perdagangan

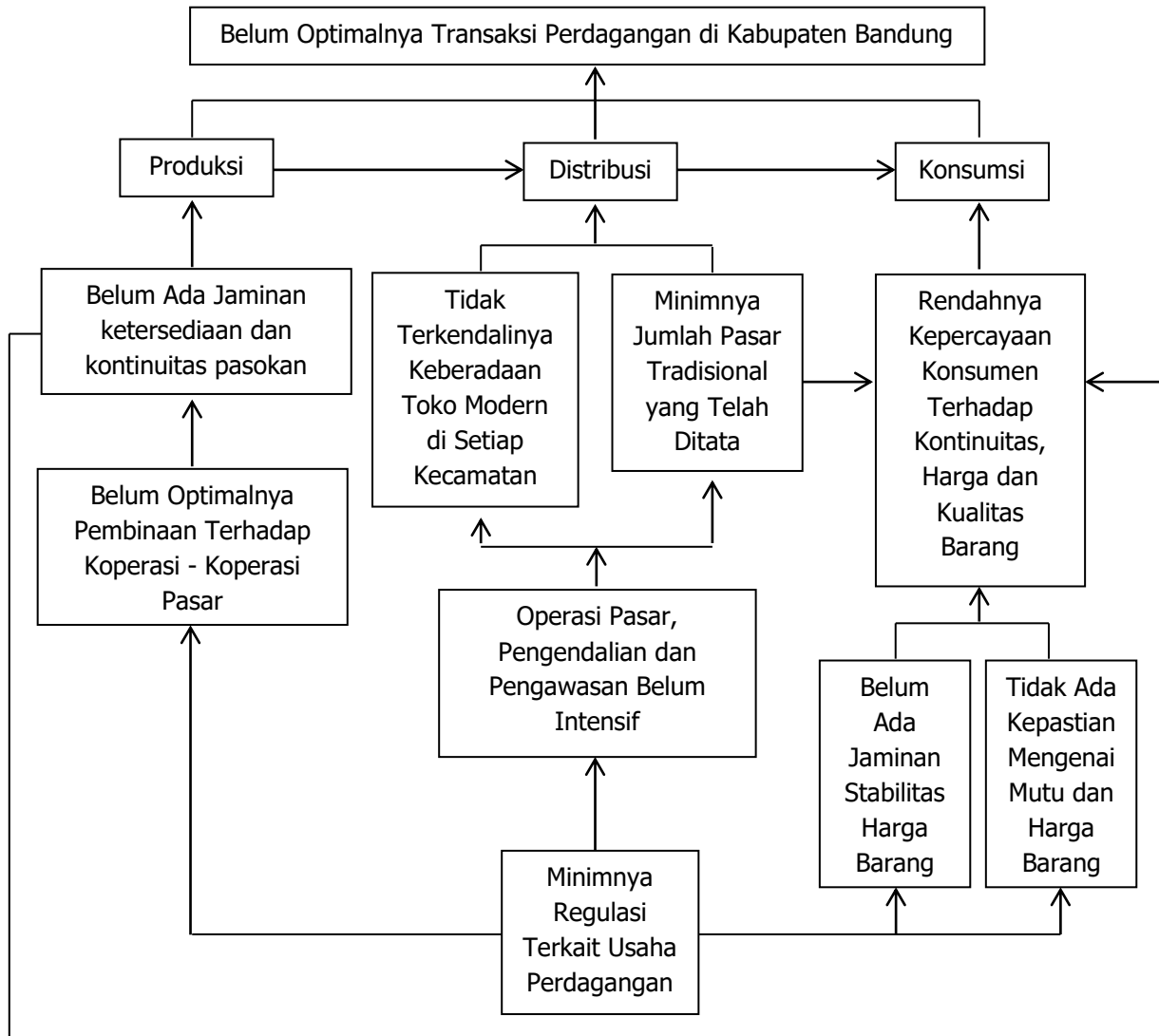
Keberhasilan sektor perdagangan diukur dari jumlah dari banyaknya jumlah transaksi yang terjadi. Belum optimalnya jumlah transaksi perdagangan merupakan salah satu isu utama dalam sektor perdagangan di Kabupaten Bandung. Persoalan ini timbul diakibatkan beberapa kendala baik dalam aspek produksi, distribusi, maupun konsumsi masyarakat.

Dalam aspek produksi, saat ini belum terdapat jaminan mengenai kontinuitas ketersediaan komoditas perdagangan. Secara tidak langsung hal ini berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan konsumen dalam bertransaksi di Kabupaten Bandung. Sebagai ilustrasi, konsumen akan lebih memilih di sentra perdagangan yang terjamin dan mampu memenuhi kebutuhannya setiap saat diperlukan. Belum adanya jaminan terhadap kontinuitas pasokan kemungkinan besar diakibatkan oleh belum optimalnya pembinaan terhadap koperasi-koperasi pasar eksisting.

Dalam aspek distribusi, isu eksisting yaitu belum minimnya jumlah pasar tradisional yang telah ditata. Disisi lain, keberadaan toko modern perkembangannya tidak terkendali. Untuk mengantisipasi hal tersebut, operasi pasar perlu dilakukan secara intensif serta didukung oleh regulasi yang memadai.

Adapun dalam aspek konsumsi, isu utama yaitu masih rendahnya kepercayaan konsumen terhadap kontinuitas, harga dan kualitas barang akibat belum adanya jaminan dan kepastian mengenai mutu barang. Secara detail, isu permasalahan sektor perdagangan di Kabupaten Bandung disajikan dalam Gambar 4.11.

GAMBAR 4.11
DIAGRAM PERMASALAHAN SEKTOR PERDAGANGAN
DI KABUPATEN BANDUNG



Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA Kabupaten Bandung, 2015

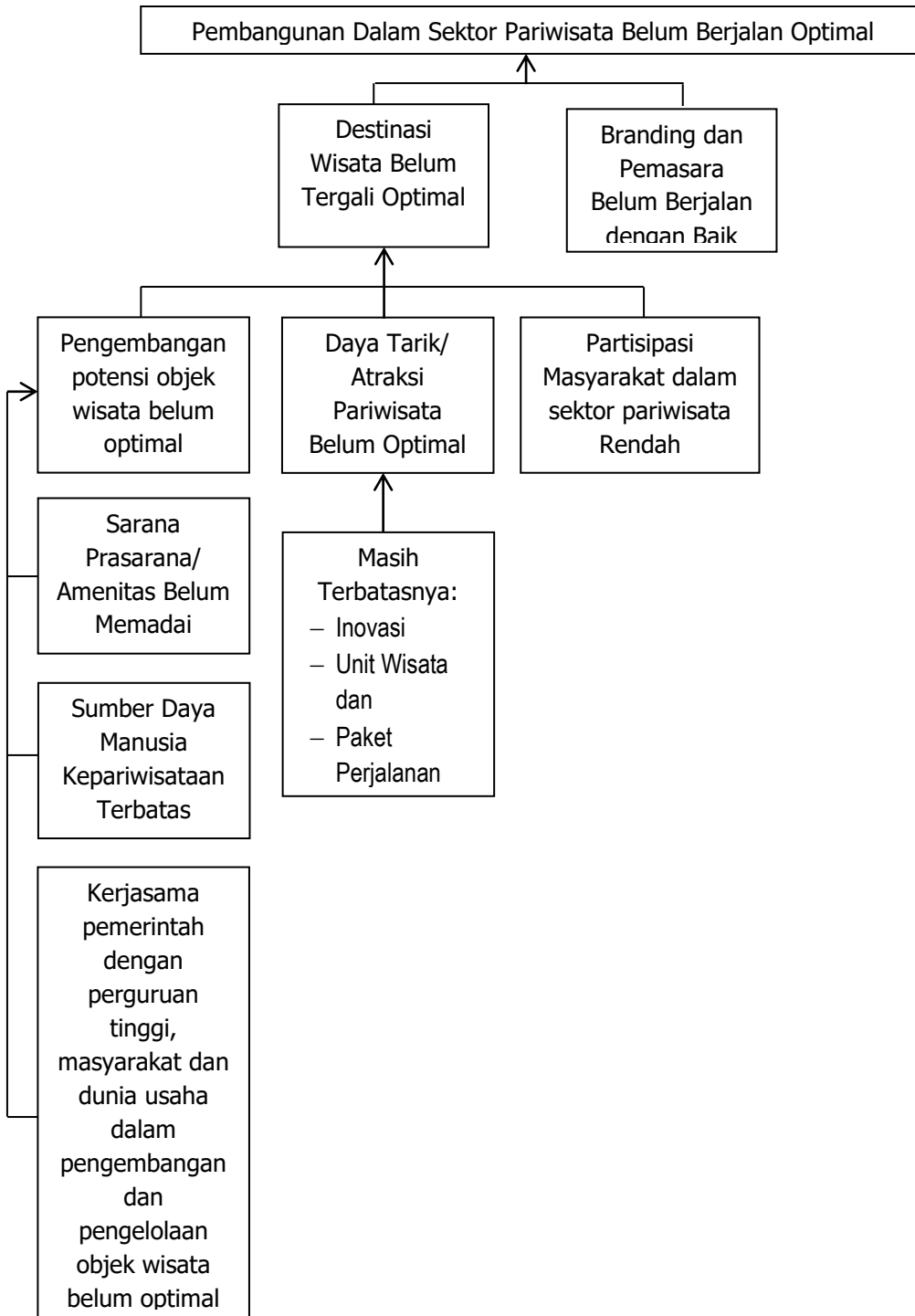
d. Sektor pariwisata

Kabupaten Bandung memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Kondisi alam yang indah dengan kontur berbukit di beberapa area beserta iklim yang sejuk menjadikan Kabupaten Bandung kaya akan potensi pariwisata. Disamping itu, keunikan budaya serta pembangunan fisik turut memperkaya potensi pariwisata, sehingga objek wisata tidak hanya meliputi objek wisata alam, tetapi juga meliputi objek wisata budaya, objek wisata agro dan objek wisata terpadu.

Meskipun demikian, pada kondisi eksisting sektor pariwisata Kabupaten Bandung masih dihadapkan pada belum optimalnya pengembangan pariwisata. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa aspek seperti belum memadainya infrastruktur pendukung, branding dan pemasaran objek pariwisata yang belum berjalan dengan baik, serta belum adanya kerjasama yang intensif baik dengan masyarakat, dunia usaha maupun dengan perguruan tinggi- perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bandung. Persoalan dalam sektor pariwisata ditampilkan dalam diagram permasalahan berikut.



GAMBAR 4.12
DIAGRAM PERMASALAHAN SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN BANDUNG



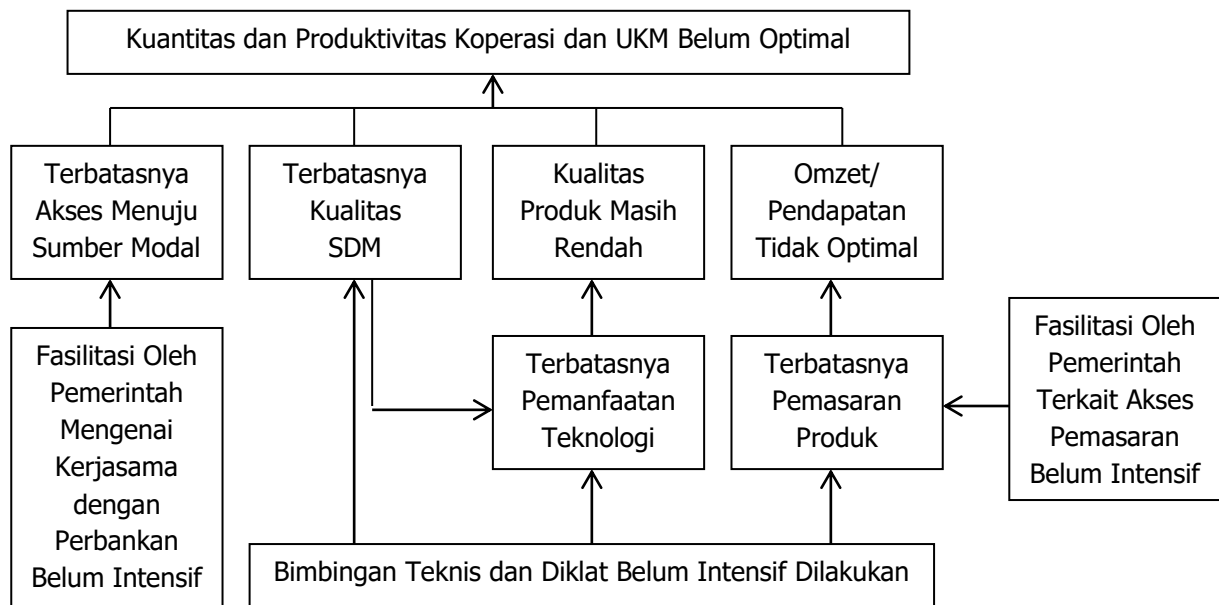
Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA Kabupaten Bandung, 2015

f. Sektor koperasi dan UKM

Dalam sektor koperasi dan UKM, persoalan utama di Kabupaten Bandung yaitu belum optimalnya kuantitas dan produktivitas koperasi. Berberapa faktor penyebab persoalan tersebut antara lain masih terbatasnya akses pelaku koperasi dan UKM terhadap sumber modal yang diakibatkan oleh belum optimalnya fasilitas oleh pemerintah mengenai kerjasama dengan perbankan dan dunia usaha.

Persoalan lain dalam yang mengakibatkan belum optimalnya kuantitas dan produktivitas koperasi yaitu masih terbatasnya sumber daya manusia unggul dibidang koperasi dan wiraswasta, masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi serta masih terbatasnya kemampuan para pelaku koperasi dan UKM dalam memasarkan produknya. Gambaran lengkap mengenai isu permasalahan dalam sektor UKM dan koperasi di Kabupaten Bandung disajikan dalam Gambar 4.12.

GAMBAR 4.12
DIAGRAM PERMASALAHAN SEKTOR KOPERASI DAN UKM



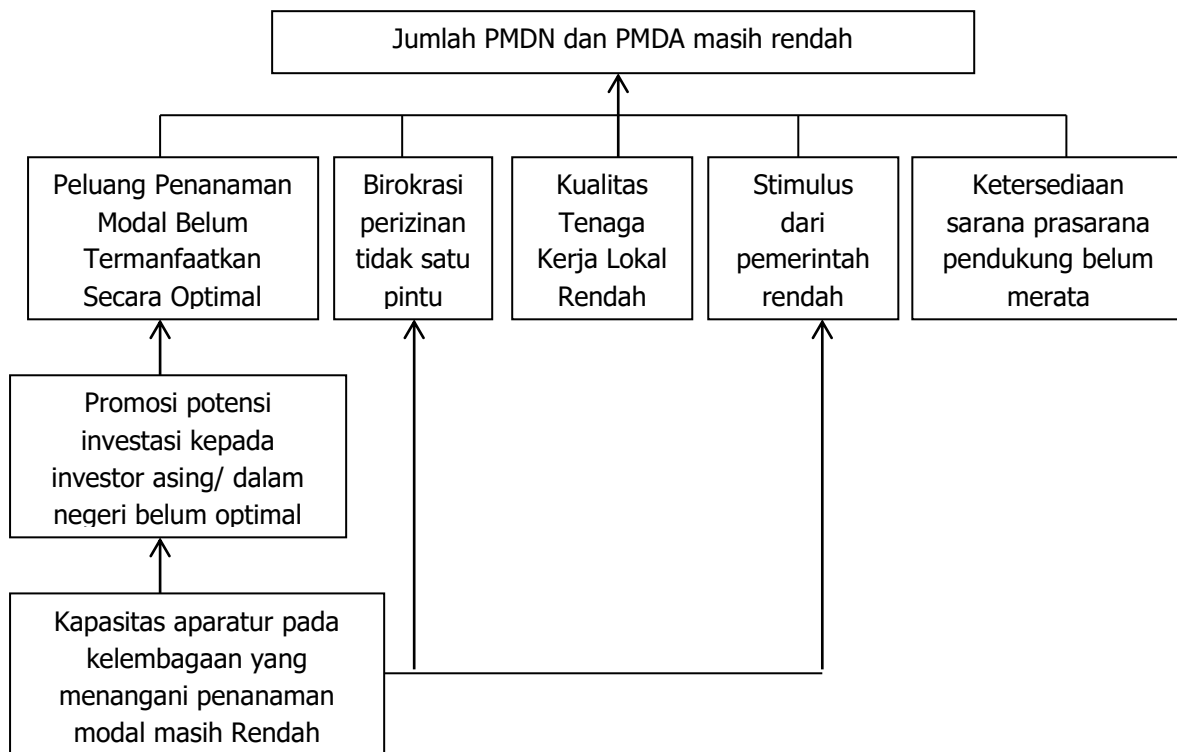
Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA Kabupaten Bandung, 2015

g. Sektor penanaman modal.

Dalam sektor penanaman modal, isu persoalan yang dihadapi yaitu masih rendahnya kuantitas PMDN dan PMDA. Peluang penanaman modal belum termanfaatkan secara optimal. Berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal (BPMP) Kabupaten Bandung, pada tahun 2014 jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Bandung berjumlah 545 investasi dengan total nilai kurang lebih sebesar satu trilyun rupiah. Belum optimalnya penangkapan pemanfaatan penanaman modal tersebut salah satunya diakibatkan oleh belum intensifnya promosi potensi investasi kepada investor asing dan dalam negeri serta dipengaruhi pula oleh masih rendahnya kapasitas aparatur pada kelembagaan yang menangani penanaman modal.

Informasi detail mengenai isu permasalahan dalam sektor penanaman modal di Kabupaten Bandung disajikan dalam Gambar 4.13.

GAMBAR 4.13
DIAGRAM PERMASALAHAN SEKTOR PENANAMAN MODAL



Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA Kabupaten Bandung, 2015

10. Pemerintahan

Dalam sektor pemerintahan, beberapa isu persoalan yang masih dihadapi Kabupaten Bandung antara lain sebagai berikut:

- Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah.
- Masih rendahnya produk hukum yang dihasilkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Masih sedikitnya jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh Perangkat Daerah akibat belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi oleh Perangkat Daerah.
- Masih sedikitnya jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan komunikasi data Pemerintah Kabupaten Bandung akibat masih kurangnya kapasitas SDM aparatur dalam pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan tugas, serta belum optimalnya koordinasi dalam pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi.

4.2. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan- permasalahan pembangunan diatas, maka pada subbab ini akan dilakukan perumusan isu strategis pengembangan



Kabupaten Bandung lima tahun kedepan. Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa depan. Apabila isu strategis tersebut tidak diantisipasi diprediksi akan menimbulkan kerugian yang besar dan/atau jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu strategis ini bersifat penting untuk dilakukan. Penentuan isu strategis Kabupaten Bandung dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
4. Merupakan kondisi/keadaan yang bersifat penting, mendasar, dan mendesak;
5. Memiliki dampak yang besar dan luas bagi daerah dan masyarakat jika tidak segera ditangani;
6. Merupakan permasalahan pembangunan jangka panjang; dan
7. Memiliki kemungkinan atau kemudahan untuk dikelola.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi, dapat diperoleh beberapa isu strategis di Kabupaten Bandung, yaitu:

1. Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
2. Masih perlunya penanggulangan kemiskinan
3. Masih terbatasnya infrastruktur dasar dan kurangnya sarana pelayanan publik yang aman dan nyaman bagi wanita, anak – anak, lansia, dan difabel
4. Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan
5. Belum optimalnya kinerja pemerintah dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan
6. Masih perlunya pemberdayaan masyarakat desa
7. Masih perlu ditingkatkannya daya saing perekonomian produk unggulan
8. Belum mantapnya ketahanan dan kemandirian pangan
9. Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

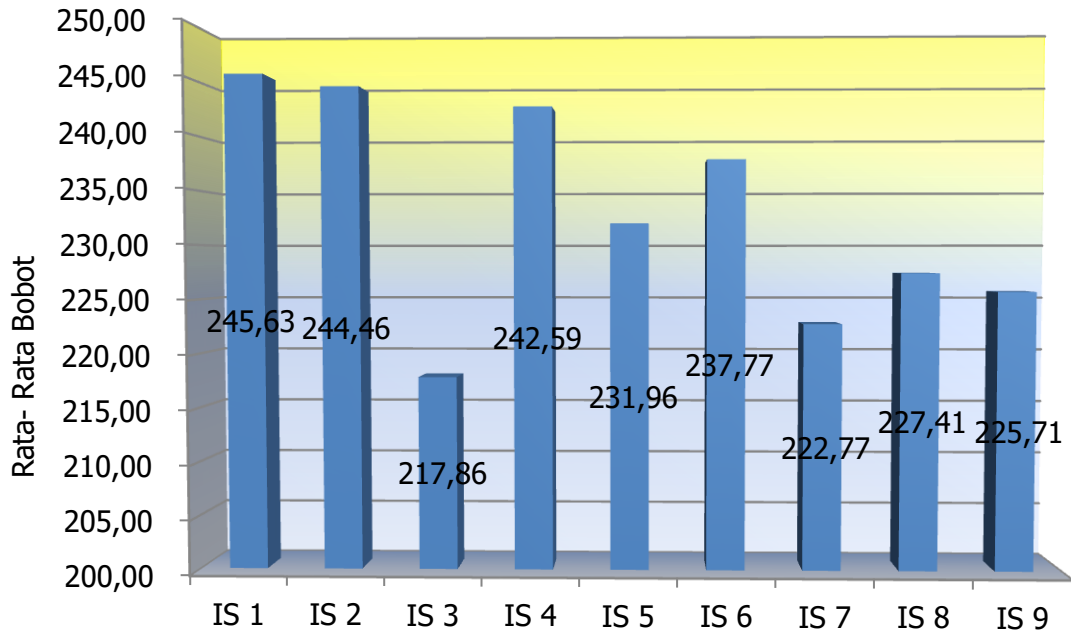
Berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi stakeholder pada forum konsultasi publik, isu Strategis 1 “Terbatasnya Jaminan Pendidikan dan Kesehatan Bagi Masyarakat” dinilai oleh stakeholder pembangunan sebagai isu paling krusial dan perlu menjadi prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Bandung.

Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan penilaian oleh stakeholder meliputi enam kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bandung
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah

5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

Hasil pembobotan terhadap penilaian isu strategis Kabupaten Bandung ditampilkan pada Gambar 4.14 berikut.



GAMBAR 4.14

HASIL PEMBOBOTAN ISU STRATEGIS KABUPATEN BANDUNG

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Menindaklanjuti isu- isu strategis di atas, pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan 11 prioritas pembangunan. Keterkaitan antara isu strategis dengan prioritas pembangunan ditampilkan pada Tabel 4.3.

TABEL 4.3

ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan
	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan
Maish perlunya penanganan kemiskinan	Penanganan kemiskinan dan PMKS
Masih terbatasnya infrastruktur dasar dan kurangnya sarana pelayanan publik yang aman dan nyaman bagi wanita, anak – anak, lansia dan difabel	Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah
Belum optimalnya penanganan banjir dan	Penanggulangan bencana banjir dan



Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
kekeringan	kekeringan
Belum optimalnya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan	Reformasi birokrasi
	Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
Masih perlunya pemberdayaan masyarakat desa	Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan
Masih perlu ditingkatkannya daya saing perekonomian produk unggulan	Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan
Belum mantapnya ketahanan pangan dan kemandirian pangan	Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan
Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya luas ruang terbuka hijau	Pengendalian pencemaran lingkungan

Sumber: Hasil Analisis, 2016

4.3. Kerjasama Antar Daerah Berbatasan

Pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem pembangunan yang lebih luas, sehingga dalam implementasinya pembangunan satu daerah tidak dapat dilepaskan dari pembangunan daerah lain disekitarnya. Keterkaitan antar daerah terjadi hampir dalam seluruh aspek pembangunan, baik itu dalam bidang pembangunan fisik, ekonomi, sosial, pemerintahan maupun pelayanan publik. Pada wilayah- wilayah perbatasan, seringkali terjadi persoalan yang penanganannya perlu melibatkan beberapa Kabupaten/Kota seperti dalam misalnya persoalan banjir, persampahan, dan transportasi. Sebagai implikasinya maka diperlukan adanya kerjasama antar daerah. Kerjasama tidak hanya penting dalam menyelesaikan masalah yang bersifat lintas batas , tetapi juga penting untuk membangun simbiosis mutualisme dalam optimalisasi pembangunan daerah.

Menyadari pentingnya kerjasama antardaerah, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menginisiasi pelaksanaan kerja sama dengan Kabupaten/ Kota berbatasan, yaitu antara lain dengan Pemerintah Kota Bandung yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Nomor 130/2786 – Bag.KS/2016 dan Nomor 130/13 –Pemum/ 2016 dengan ruang lingkup kerjasama meliputi:

1. Pengembangan infrastruktur perkotaan, yang mencakup kebinamargaan, keciptakaryaan, dan sumber daya air, khususnya penanggulangan masalah persampahan dan banjir;
2. Penataan ruang, lingkungan hidup, serta pemakaman, pertanaman dan pertanian/ ketahanan pangan;
3. Permukiman, perumahan dan sanitasi;
4. Transportasi dan perhubungan;
5. Pengembangan ekonomi kreatif;
6. Pendidikan;
7. Kesehatan;
8. Kebudayaan dan Pariwisata;



9. Promosi dan pengembangan industri, perdagangan dan investasi, serta kemetrolgian; serta
10. Bidang lain, sesuai dengan kebutuhan daerah.

Khusus dalam bidang pembangunan infrastruktur, melalui inisiasi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 Kabupaten Bandung tergabung dengan beberapa Kabupaten/Kota lain di Badan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan (BKPP) Wilayah IV Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan kerjasama daerah. Kesepakatan kerjasama dituangkan dalam Keputusan Bersama dalam acara gelar sinergitas perencanaan dan pembangunan di wilayah IV per tanggal 26 November 2015 dengan ruang lingkup kerjasama antara lain meliputi:

1. Akselerasi infrastruktur di Wilayah IV. Beberapa infrastruktur strategis yang berlokasi di Kabupaten Bandung yaitu Tol Soroja dan akses tol soroja serta Tol Bandung Intra Urban serta Tol Cileunyi- Sumedang – Dawuan;
2. Pengembangan penanganan sampah regional;
3. Pengembangan transportasi massal Bandung Raya;
4. Pembangunan berbasis kewilayahan, yang berdasarkan pada tata ruang, Wilayah Koordinasi Pemerintahan Pembangunan (WKPP) dan wilayah perbatasan antar provinsi;
5. Peningkatan percepatan pembangunan wilayah tertinggal melalui pendekatan peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarannya;
6. Peningkatan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi kreatif antara perkotaan dan perdesaan;
7. Peningkatan kerjasama antar daerah untuk menciptakan sinergitas dan pengembangan Ekonomi Kreatif;
8. Peningkatan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi;
9. Peningkatan kerjasama dalam penanganan masalah sosial PGOT (Pengemis, Gelandangan, Orang Gila), ketentraman dan ketertiban umum di perbatasan;
10. Penetapan Pantai Selatan Jawa Barat sebagai pintu masuk dalam kemaritiman.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Bandung lima tahun kedepan yang berkualitas, maka pemerintah daerah Kabupaten perlu berkomitmen mendorong peningkatan kerjasama antar daerah, khususnya dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan. Disamping untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan dalam lingkup wilayah administratif Kabupaten Bandung, melalui kerjasama antar daerah juga diharapkan dapat membangun keterpaduan perencanaan pembangunan di Jawa Barat.

PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 pada tahap ketiga. Perumusan visi untuk RPJMD 2016-2021 ini selain mengacu pada RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025, juga memperhatikan visi yang tertera pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

TABEL 5.1
VISI RPJPD, RPJMN, DAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT

VISI RPJP	VISI RPJM	
Kabupaten Bandung (Tahun 2005-2025)	Nasional (Tahun 2015-2019)	Jawa Barat (Tahun 2013-2018)
Kabupaten Bandung yang Repeh, Rapih, Kerta Raharja Tahun 2025	Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur	Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua

Sumber: RPJPD Kabupaten Bandung, RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat

Sementara itu, prioritas pembangunan berdasarkan RPJP tahap ketiga, baik secara nasional maupun daerah diarahkan pada kemandirian perekonomian yang berdaya saing. Hal ini dituangkan dalam prioritas pembangunan RPJPN Tahun 2015-2020, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020 dan RPJPD Kabupaten Bandung Tahap III Tahun 2016-2021.

TABEL 5.2
PRIORITAS PEMBANGUNAN BERDASARKAN RPJPN DAN RPJPD

RPJP Nasional Tahap III (Tahun 2015-2020)	RPJP Jawa Barat Tahap III (Tahun 2015-2020)	RPJP Kabupaten Bandung Tahap III (Tahun 2016-2021)
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.	Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan maksud sebagai persiapan dalam mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat dalam segala bidang sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi.	Peningkatan kualitas pembangunan yang berwawasan lingkungan dan peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing.

Sumber: RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kabupaten Bandung



Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan terkait serta hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan perumusan visi Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang. Visi ini dibuat untuk menentukan fokus dan arah gerak Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bekerja menuntaskan isu-isu yang ada dan meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang. Visi Pemerintah Kabupaten Bandung adalah:

“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

Di dalam visi pembangunan Kabupaten Bandung di atas, terkandung beberapa pokok- pokok visi yang secara rinci dapat diterjemahkan sebagai berikut.

TABEL 5.3
PENJELASAN VISI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 - 2021

Visi	Pokok- Pokok Visi	Penjelasan Pokok- Pokok Visi
“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”	Maju	Kondisi Kabupaten Bandung yang unggul yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki intelektualitas tinggi, memiliki moral yang baik, kreatif, dan inovatif sehingga membentuk masyarakat yang produktif serta dikung oleh kondisi lingkungan yang lestari yang dapat mendukung terselenggaranya berbagai aktivitas yang sejalan untuk mencapai kemajuan daerah.
	Mandiri	Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, untuk lebih maju serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju, dengan mengandalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki.
	Berdayasaing	Kondisi Kabupaten Bandung yang didukung oleh perekonomian yang kompetitif melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan infrastruktur penunjang dengan ditunjang oleh kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menempatkan diri unggul dalam kontek sektoral, mampu membuka diri terhadap tindak inovatif untuk memperoleh keuntungan dari persaingan, baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kondisi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dilakukan secara bersama- sama antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta, dan bertanggungjawab, dengan menjaga sinergitas interaksi yang bersifat konstruktif diantara tiga dominan utama,



Visi	Pokok- Pokok Visi	Penjelasan Pokok- Pokok Visi
		yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, partisipatif yang berlandaskan hukum, menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, transparan, responsif serta berorientasi pada konsensus, kesetaraan dan akuntabel.
	Sinergi Pembangunan Perdesaan	Kondisi pelaksanaan pembangunan pembangunan perdesaan di Kabupaten Bandung yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan menyeluruh dalam berbagai aspek pembangunan, dengan memperhatikan peningkatan kualitas SDM kelembagaan perdesaan, peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan, penyediaan sistem transportasi perdesaan yang memadai, peningkatan produk pertanian yang berdaya saing, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat perdesaan.
	Religius	Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai- nilai, norma, semangat dan kaidah agama, yang harus menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.
	Kultural	Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai- nilai budaya sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat bagi keselarasan dan kestabilan sosial. Pengembangan budaya sunda tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan masyarakat secara proporsional.
	Berwawasan Lingkungan	Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung memiliki pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan, harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2015

5.2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang



dimiliki, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan sembilan misi pembangunan sebagai berikut:

- Misi Pertama: **"Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan"**

Misi peningkatan kualitas dan cakupan layanan pendidikan sejalan dengan visi Kabupaten Bandung, khususnya dalam upaya membangun **"Sumber Daya Manusia yang Berkualitas"**. Perbaikan dalam sektor pendidikan menjadi misi pertama yang diusung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021. Penetapan sektor pendidikan sebagai prioritas pertama didasari oleh pentingnya aspek ini dalam pembangunan Kabupaten Bandung, masyarakat Kabupaten Bandung sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bandung perlu memiliki kapasitas dan daya saing dalam mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Bandung.

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang berkualitas maka diperlukan upaya – upaya untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan, yang mana antara lain dengan meningkatkan jumlah fasilitas pendidikan, terutama fasilitas sekolah menengah atas yang tersebar secara merata dan mencakup seluruh wilayah, meningkatkan kualitas pada fasilitas- fasilitas pendidikan melalui peningkatan efisiensi sekolah, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, serta meningkatkan kompetensi siswa melalui penguasaan budaya lokal, olah raga dan keterampilan lain.

- Misi Kedua: **"Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan"**

Seperti halnya misi pengembangan sektor pendidikan, misi mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan juga sejalan dengan upaya menciptakan **"Sumber Daya Manusia yang Berkualitas"**. Dalam hal ini derajat kesehatan penduduk menjadi fokus yang ingin dicapai melalui misi ini. Derajat kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas penduduk. SDM yang kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Bandung tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Bandung tanpa didukung oleh derajat kesehatan penduduk yang tinggi.

Untuk mendukung misi ini, beberapa upaya peningkatan kuantitas fasilitas kesehatan serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan. Dijabarkan lebih rinci beberapa upaya untuk mendukung pencapaian misi ini antara lain meningkatkan kuantitas dan kualitas puskesmas dan rumah sakit, menurunkan angka kesakitan penduduk melalui berbagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih serta meningkatkan jumlah tenaga medis secara optimal yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

- Misi Ketiga: **"Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan"**

Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur transportasi, infrastruktur air bersih, infrastruktur air limbah, infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur energi. Dalam implementasinya, pembangunan infrastruktur terkait erat



dengan tata ruang. Pengembangan infrastruktur dapat menstimulus perkembangan guna lahan suatu wilayah, sehingga perencanaan infrastruktur dan perencanaan tata ruang perlu dilakukan secara seiring untuk menciptakan adanya keterpaduan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah antara lain melalui mengoptimalkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta mewujudkan perencanaan tata ruang secara simultan, mulai dari perencanaan tata ruang, hingga ke pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Aspek kebencanaan merupakan salah satu komponen yang perlu diakomodir dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut didasari oleh kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki beberapa potensi bencan. Meninjau historis kebelakang, beberapa bencana cenderung tidak dapat dihindarkan dan mengganggu stabilitas pembangunan. Mitigasi berupa pencegahan terjadinya bencana tidak akan menghilangkan seluruh resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya terkait penanganan aspek kebencanaan selain mengakomodir upaya mitigasi perlu pula untuk diarahkan pada upaya adaptasi berupa rekayasa infrastruktur dan fasilitas publik agar memiliki kelentingan terhadap bencana.

- Misi Keempat: : **"Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat"**

Penetapan misi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sejalan dengan upaya membangun sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang berkualitas. Dengan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, diharapkan secara tidak langsung menciptakan stabilitas kemandirian wilayah. Beberapa upaya yang akan diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat antara lain dengan peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan masalah kesejahteraan sosial.

- Misi Kelima: **"Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif"**

Pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, seperti misalnya perdagangan dan jasa, pertanian, industri, pariwisata, koperasi dan UKM serta investasi dan modal. Misi menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Bandung untuk menciptakan **"Perekonomian yang Berdaya Saing"**.

Untuk sektor industri dan jasa, perkembangan diarahkan untuk mendorong potensi perdagangan dan jasa dalam rangka meningkatkan PAD. Pada kondisi eksisting, perdagangan dan jasa merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Kabupaten Bandung. Meskipun demikian pada kondisi eksisting pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal.

Sektor perdagangan dan jasa erat kaitannya dengan transaksi yang terjadi di suatu wilayah, untuk mendorong transaksi maka berbagai upaya seperti misalnya meningkatkan jaminan ketersediaan kontinuitas pasokan komoditas, menciptakan kepastian mengenai mutu dan harga barang, serta memberikan jaminan mengenai stabilitas harga barang perlu dilakukan. Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, regulasi



terkait perdagangan berperan penting untuk memberikan arahan serta batasan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mengoptimalkan sektor perdagangan, perlu pula ditunjang dengan keberadaan regulasi terkait usaha perdagangan dan jasa yang memadai.

Untuk sektor industri, pengembangan diarahkan pada optimalisasi pengembangan potensi pariwisata serta peningkatan pengelolaan objek wisata eksisting. Upaya- upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan *competitive advantage* sektor ekonomi Kabupaten Bandung antara lain melalui kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha serta melalui *branding* dan promosi pemasaran objek wisata.

Untuk sektor industri, pengembangan lebih diarahkan pada mendorong perkembangan industri konvensional menuju industri berteknologi tinggi dan ramah lingkungan. Beberapa upaya terkait antara lain melalui insentif dan insentif bagi industri yang telah melakukan pemanfaatan teknologi tinggi dalam hal produksi dan pengelolaan limbah. Selain dari pada itu, untuk memberikan imbas pada perekonomian lokal, maka keberadaan sektor industri perlu dikaitkan dengan penggunaan sumber daya dan bahan baku lokal.

Adapun untuk sektor pertanian dan perikanan, pengembangan lebih diarahkan pada pengoptimalan potensi pertanian dan peternakan serta penguasaan petani dan peternak terhadap teknologi pertanian dan peternakan.

- Misi Keenam: **"Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup"**

Selain ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sektor ekonomi yang berdaya saing, untuk menciptakan pembangunan Kabupaten Bandung yang berkelanjutan perlu pula ditopang oleh pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung diarahkan pada upaya menetralsir dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan- kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara dan mengelola lingkungan hidup antara lain melalui penanggulangan pencemaran lingkungan, baik oleh limbah padat, cair maupun udara.

- Misi Ketujuh: **"Meningkatkan Kemandirian Desa"**

Penetapan misi ini dilatar belakangi oleh kondisi fisik Kabupaten Bandung eksisting yang lebih didominasi oleh kawasan perdesaan. Pembangunan perdesaan tidak semata- mata dilakukan melalui pembangunan infrastruktur perdesaan, lebih dari itu pembangunan perdesaan perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat perdesaan sebagai pelaku utama pembangunan desa. Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menciptakan kemandirian desa yang jika diakumulasikan dalam skala kabupaten akan bersinergi mendukung pembangunan Kabupaten Bandung.

Misi meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat ini sejalan dengan upaya pencapaian pokok visi menciptakan **"sumber daya manusia yang berkualitas"** serta **"ekonomi yang berdaya saing"**. Beberapa upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemandirian desa antara lain dengan



meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur di perdesaan.

- Misi Kedelapan: **"Meningkatkan reformasi birokrasi"**

Untuk menjamin tercapainya pembangunan **"Sumber Daya Manusia yang Berkualitas"**, **"Ekonomi yang Berdaya Saing"**, serta **"Lingkungan yang Lestari"**, maka perlu ditunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang menjaga keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator bagi pembangunan Kabupaten Bandung.

Birokrasi dan aparatur dengan tugas utama pelayanan publik menjadi kunci bagi efektivitas dan efisiensi pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan optimalisasi bagi penyediaan pelayanan publik. Upaya- upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui meningkatkan kualitas kinerja aparatur, mempersingkat waktu pelayanan administrasi dan mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi.

- Misi Kesembilan: **"Meningkatkan Kemanan dan Ketertiban Wilayah"**

Pembangunan wilayah tidak dapat dilepaskan dari komponen keamanan dan ketertiban wilayah. Stabilitas keamanan wilayah secara signifikan akan berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan wilayah. Berdasarkan hal tersebut, sebagai upaya mencapai visi pembangunan Kabupaten Bandung, maka penetapan misi meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah mutlak diperlukan. Beberapa upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah antara lain dengan meminimalisasi terjadinya ancaman terhadap kemanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan penegakan peraturan daerah, serta Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan.

Penetapan sembilan misi pembangunan di atas selain sejalan untuk menjawab tantangan permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung, juga sejalan dengan penetapan misi pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, penetapan misi pembangunan Kabupaten Bandung selain sebagai upaya peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Bandung juga bertujuan mendukung pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Sinergitas antara misi pembangunan Kabupaten Bandung dengan misi pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 5.4.



TABEL 5.4
MISI PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI JAWA BARAT DAN KABUPATEN BANDUNG

MISI RPJP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 - 2025	MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH		
	Kabupaten Bandung (2016 – 2021)	Jawa Barat (Tahun 2013-2018)	Nasional (Tahun 2015-2019)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Kabupaten Bandung yang aman dan tertib; 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; 3. Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan; 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 5. Menciptakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan; 6. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan; 2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan; 3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan; 4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat; 5. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif; 6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup; 7. Meningkatkan Kemandirian Desa; 8. Meningkatkan reformasi birokrasi; 9. Meningkatkan Kemanan dan Ketertiban Wilayah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 2. Membangun Perekonomian yang kokoh dan Berkeadilan; 3. Meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik; 4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan; 5. Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olah raga serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan local. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Sumber: RPJMN 2015 – 2019; RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018; RPJMD Kabupaten Bandung 2016 - 2021



Sembilan misi strategi di atas merupakan bentuk tindak lanjut dari isu strategis yang telah dianalisis dan dipaparkan pada bab sebelumnya. Misi pembangunan ke-satu, yaitu misi meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan ditetapkan sebagai upaya untuk mengantisipasi isu strategis ke- satu terutama isu masih terbatasnya jaminan pendidikan bagi masyarakat. Sedangkan misi pembangunan ke-dua, yaitu misi mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan, ditetapkan untuk mengantisipasi isu strategis ke-satu, khususnya yang terkait dengan masih terbatasnya jaminan kesehatan bagi masyarakat. Adapun misi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan ditetapkan sebagai upaya untuk mengantisipasi isu strategis ke-tiga yaitu isu masih terbatasnya infrastruktur dasar dan kurangnya sarana pelayanan publik yang aman dan nyaman bagi wanita, anak- anak, lansia, dan difabel serta untuk mengantisipasi isu strategis ke-empat berupa belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan. Secara lengkap bentuk sinergi atau keterkaitan antara isu strategis dengan misi pembangunan Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 5.5.

TABEL 5.5
KETERKAITAN ANTARA ISU STRATEGIS DAN MISI PEMBANGUNAN

Misi Pembangunan		Isu Strategis	
M 1	Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan	IS 1	Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
M 2	Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan	IS 1	Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
M 3	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan	IS 3	Masih terbatasnya infrastruktur dasar dan kurangnya sarana pelayanan publik yang aman dan nyaman bagi wanita, anak- anak, lansia, dan difabel
		IS 4	Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan
M 4	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	IS 2	Masih perlunya penanggulangan kemiskinan
M 5	Menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif	IS 7	Masih perlu ditingkatkannya daya saing perekonomian produk unggulan
		IS 8	Belum mantapnya ketahanan dan kemandirian pangan
M 6	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	IS 4	Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan
		IS 9	Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya luas Ruang Terbuka Hijau
M 7	Meningkatkan kemandirian desa	IS 6	Masih perlunya pemberdayaan



Misi Pembangunan		Isu Strategis	
			masyarakat desa
M 8	Meningkatkan reformasi birokrasi	IS 5	Belum optimalnya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan
M 9	Meingkatkan keamanan dan ketertiban wilayah	IS 5	Belum optimalnya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan

Sumber: Hasil Analisis, 2016

5.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan diatas, maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut.

TABEL 5.6

KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KABUPATEN BANDUNG 2016-2021

Visi: "Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan"		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi Pertama: "Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan"	Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan berkualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalnya ketersediaan fasilitas pendidikan formal baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas Meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah 2. Meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah Meningkatnya jumlah guru per mata pelajaran yang sesuai dengan kualifikasi 3. Meningkatnya kompetensi penduduk melalui penguasaan budaya lokal, olah raga, dan pendidikan non formal 4. Meningkatnya minat baca masyarakat Kabupaten Bandung
Misi Kedua: "Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas"	Meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalnya penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah 2. Meningkatnya drajat kesehatan penduduk 3. Meningkatnya kesadaran penduduk untuk



Visi: "Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan"		
Misi	Tujuan	Sasaran
elayanan kesehatan"	drajat kesehatan masyarakat	menerapkan perilaku hidup bersih
Misi Ketiga: "Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan"	Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur dasar yang tahan terhadap bencana serta mewujudkan keserasian pembangunan dengan tata ruang wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi (%) 2. Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber air 3. Meningkatnya penataan kawasan ibu kota Kabupaten Bandung 4. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman 5. Optimalnya sistem telekomunikasi dan informatika yang terpadu melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi 6. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur listrik dan energi yang merata mencakup seluruh wilayah 7. Meningkatnya fektivitas perencanaan tata ruang 8. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan ruangn wilayah 9. Optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang 10. Meningkatnya resiliensi wilayah terhadap resiko bencana 11. Meningkatnya upaya penanganan masyarakat yang tergenang banjir
Misi Keempat "Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat"	Mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Misi Kelima: "Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Memiliki Keunggulan Kompetitif"	Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya Kondisi Ketahanan Pangan 2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian 3. Meningkatnya kesejahteraan petani 4. Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung 5. Meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta produktivitas UMKM-IKM dan kualitas produk unggulan 6. Meningkatnya destinasi wisata 7. Meningkatnya kemudahan investasi



Visi: "Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan"		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi Keenam: "Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup"	Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan serta perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan 2. Terselenggaranya konservasi sumber daya alam 3. Meningkatkan resiliensi wilayah terhadap resiko bencana 4. Adaptasi perubahan iklim
Misi Ketujuh: "Meningkatkan kemandirian Desa"	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
Misi Kedelapan: "Meningkatkan reformasi birokrasi"	Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah 2. Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik 3. Meningkatkan efisiensi kinerja dan fungsi kelembagaan 4. Meningkatkan pemanfaatan potensi daerah 5. Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik 6. Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik 7. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 8. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 9. Terwujudnya regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Misi Kesembilan: "Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah"	Meningkatkan stabilitas kemandirian yang kondusif bagi pembangunan wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kemandirian dan ketertiban masyarakat 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat

Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA, 2016



Penyusunan tujuan dan sasaran di atas sejalan dengan penetapan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Informasi detail mengenai sandingan keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung dengan tujuan dan sasaran nasional dan Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 5.7

TABEL 5.7
SINKRONISASI TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG
DENGAN TUJUAN DAN SASARAN PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan Pembangunan		Sasaran Pembangunan	
Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat
Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan berkualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan	Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai IPTEK, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya.	Optimalnya ketersediaan fasilitas pendidikan formal baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas Meningkatkan jumlah penduduk yang bersekolah	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata; Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK
		Meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah Meningkatkan jumlah guru per mata pelajaran yang sesuai dengan kualifikasi	
		Meningkatnya kompetensi penduduk melalui penguasaan budaya lokal, olah raga, dan pendidikan non formal	
		Meningkatnya minat baca masyarakat Kabupaten Bandung	
Meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan drajat kesehatan masyarakat	Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai IPTEK, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya.	Optimalnya penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata;
		Meningkatnya drajat kesehatan penduduk	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga
		Meningkatnya kesadaran penduduk untuk menerapkan perilaku hidup bersih	
Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur dasar yang tahan terhadap bencana serta mewujudkan keserasian pembangunan dengan tata ruang wilayah	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar.	Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi (%)	Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat
		Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber air	Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis
		Meningkatnya penataan kawasan ibu kota Kabupaten Bandung	
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	
		Optimalnya sistem telekomunikasi dan informatika yang terpadu melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi	
		Meningkatnya ketersediaan infrastruktur listrik dan energi yang merata mencakup seluruh wilayah	
		Meningkatnya fektivitas perencanaan tata ruang	
		Meningkatnya efektivitas pemanfaatan ruangn wilayah	
		Optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang	
		Meningkatnya resiliensi wilayah terhadap resiko bencana	
Meningkatnya upaya penanganan masyarakat yang tergenang banjir			



Tujuan Pembangunan		Sasaran Pembangunan	
Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat
Mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung	Mewujudkan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Berkurangnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing;	Tercapainya Kondisi Ketahanan Pangan	Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur
		Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	Meningkatnya daya saing usaha pertanian
		Meningkatnya kesejahteraan petani	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
		Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung	Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan
		Meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta produktivitas UMKM-IKM dan kualitas produk unggulan	Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional
		Meningkatnya destinasi wisata	Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olah raga, seni, budaya dan pariwisata.
		Meningkatnya kemudahan investasi	
Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan serta perubahan iklim	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan.	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana.
		Terselenggaranya konservasi sumber daya alam	
		Meningkatkan resiliensi wilayah terhadap resiko bencana	
		Adaptasi perubahan iklim	
Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan wilayah	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	
Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik	Meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan partisipatif. Terwujudnya pemerintahan yang modern. Terwujudnya profesionalisme pemerintahan yang didukung oleh aparatur yang kompeten.	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik.
		Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan berbasis IPTEK.
		Meningkatkan efisiensi kinerja dan fungsi kelembagaan	Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur.
		Meningkatkan pemanfaatan potensi daerah	
		Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik	
		Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik	
Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)			



Tujuan Pembangunan		Sasaran Pembangunan	
Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	
	Meningkatkan stabilitas di daerah.	Terwujudnya regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum.
Meningkatkan stabilitas kemandirian yang kondusif bagi pembangunan wilayah	Meningkatkan stabilitas di daerah.	Meningkatnya kemandirian dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum.
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat	

Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA, 2016



BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka menciptakan pembangunan Kabupaten Bandung lima tahun kedepan yang lebih terarah, Visi dan Misi pembangunan yang telah dirumuskan serta telah dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran pembangunan perlu untuk dijabarkan lebih lanjut kedalam Strategi dan Kebijakan. Pendekatan yang dipergunakan dalam proses penyusunan strategi dan kebijakan tersebut yaitu metode analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity – Threat*). Dengan metode ini, berbagai peluang dan tantangan baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal diidentifikasi sebagai basis dalam penentuan strategi. Melalui penggunaan metode SWOT ini, diharapkan dapat diperoleh strategi dan kebijakan yang bersifat holistik dan mampu menjawab tantangan pembangunan kedepan. Sebagai bahan tinjauan, hasil analisis SWOT dalam pembentukan strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung dipaparkan pada subbab 6.1 dan 6.2 sebagai berikut.

6.1.Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan yang dipaparkan dalam subbab ini erupakan hasil analisis SWOT terhadap tujuh misi pengembangan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal, diperoleh empat jenis strategi sebagai berikut:

1. Strength - Opportunity Strategy, yaitu strategi untuk menggunakan kekuatan internal dalam rangka memaksimalkan dalam menagkap peluang eksternal.
2. Strength – Weakness Strategy, yaitu strategi untuk menggunakan kekuatan internal untuk menangkal berbagai tantangan eksternal
3. Weakness – Strength Strategy, yaitu strategi yang dilakukan untuk meminimalisir kelemahan internal dengan menggunakan peluang eksternal
4. Weakness – Threat Strategy, yaitu strategi untuk meminimalisir kelemahan internal dalam menangkal tantangan eksternal

Secara detail, strategi pengembangan Kabupaten Bandung per misi pengembangan dijabarkan sebagai berikut:

A. Misi 1: Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan

TABEL 6.1
STRATEGI PENGEMBANGAN TERKAIT MISI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN CAKUPAN LAYANAN PENDIDIKAN

EKSTERNAL INTERNAL	OPPORTUNITIES - UU Sisdiknas yang mengatur sistem pendidikan (formal, nonformal, informal, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus) - Dukungan APBN untuk pendidikan sangat besar - Kebutuhan dunia usaha terhadap tenaga terampil (lulusan SMK) sangat tinggi	THREATS - Pengaruh globalisasi menimbulkan tantangan terhadap kelestarian budaya daerah - Kualitas SDM kabupaten/ kota terbatas dalam bidang akademis maupun non akademis - Sarana pendidikan berkualitas di kota yang terbatas
STRENGTH - Dukungan anggaran APBD terhadap aspek pendidikan wajar dikdas dan pendidikan vokasional cukup besar - Sudah terdapat SKPD yang membidangi urusan pendidikan, baik di level kabupaten maupun di level kecamatan - Memiliki kekayaan budaya yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan pendidikan	Strength – Opportunity Strategies: 1. Meningkatkan jumlah SMK 2. Mendorong peningkatan jumlah SMK 3. Menyelenggarakan pendidikan usia dini 4. Menyelenggarakan pendidikan bagi siswa yang berkebutuhan khusus	Strength – Threat Strategies: 1. Meningkatkan pengenalan serta menanamkan budaya sunda sejak dini 2. Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan rekreasi 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olah raga pada fasilitas pendidikan 4. Menyelenggarakan pendidikan non-formal
WEAKNESS - 1,14 % penduduk masih buta huruf - Kesadaran masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah masih rendah - APS untuk pendidikan menengah masih rendah - Tenaga pendidik belum 100 % mengikuti sertifikasi - Masih terdapat penyelenggaraan sekolah yang tidak efisien - Sarana pendidikan yang telah memadai secara kuantitas maupun kualitas belum tersebar merata	Weakness – Opportunity Strategies: 1. Menyelenggarakan pendidikan Paket A, B, C 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah 3. Meningkatkan jumlah siswa yang melanjutkan ke sekolah menengah atas 4. Meningkatkan jumlah guru bersertifikat 5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan 6. Meningkatkan jumlah ruang kelas belajar di titik – titik tertentu di Kabupaten Bandung yang masih di bawah standar 7. Meningkatkan jumlah rombongan belajar di titik- titik tertentu yang masih di bawah standar	Weakness – Threat Strategies: 1. Meningkatkan efisiensi sekolah 2. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non formal 3. Menyelenggarakan pendidikan Paket A, B, C

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2015

B. Misi 2: Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan

TABEL 6.2
STRATEGI PENGEMBANGAN TERKAIT MISI UNTUK MENGOPTIMALKAN KUANTITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

<p>EKSTERNAL</p> <p>INTERNAL</p>	<p>OPPORTUNITIES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya alokasi APBD provinsi untuk kesehatan sebesar 10% - Adanya potensi pendanaan kesehatan dari CSR - Adanya BPJS kesehatan 	<p>THREATS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan sektor lain terhadap sektor kesehatan masih rendah - Kemitraan dengan dunia usaha sudah berlangsung tetapi belum optimal - Budaya/ Culture masyarakat (misal: melahirkan di dukun beranak, perilaku BABS, menikah usia dini) - Tantangan wabah penyakit dari daerah lain - Tantangan globalisasi (peningkatan jumlah wanita bekerja)
<p>STRENGTH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran daerah untuk kesehatan cukup besar - Telah terdapat SKPD khusus yang menangani sektor kesehatan, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan 	<p>Strength – Opportunity Strategies:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan Angka Kesakitan 2. Meningkatkan Indeks Kesehatan Kabupaten Bandung 3. Meningkatkan Angka Harapan Hidup Penduduk 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga prasejahtera 5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, remaja, dan lansia. 6. Meningkatkan CSR di bidang kesehatan 7. Meningkatkan jumlah sarana kesehatan yang dikelola oleh swasta tetapi tetap mendapat pengawasan dari pemerintah 	<p>Strength – Threat Strategies:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kegiatan surveilans dan monitoring penyakit menular 2. Mengendalikan kelahiran serta mengurangi persentase pernikahan usia dini 3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan sebagai aktor dalam pembangunan keluarga
<p>WEAKNESS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya jumlah tenaga kesehatan di RS/Puskesmas Pemerintah - Tenaga keseatan belum tersebar secara merata - Kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat masih rendah 	<p>Weakness – Opportunity Strategies:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas ketersediaan sarana kesehatan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pada sarana kesehatan 3. Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan yang terdistribusi di seluruh wilayah Kabupaten 	<p>Weakness – Threat Strategies:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sektor dan lintas program 2. Meningkatkan kegiatan pembinaan masyarakat tentang PHBS 3. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan perguruan tinggidan dunia usaha dalam penyediaan atau peningkatan kualitas tenaga kesehatan

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2015

C. Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata ruang wilayah

TABEL 6.3

STRATEGI PENGEMBANGAN TERKAIT MISI UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG TERPADU DENGAN TATA RUANG WILAYAH SERTA MEMPERHATIKAN ASPEK KEBENCANAAN

<p>EKSTERNAL</p> <p>INTERNAL</p>	<p>OPPORTUNITIES</p>	<p>THREATS</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas nasional - Kemajuan IPTEK yang pesat dalam bidang telekomunikasi dan informatika - Demand terhadap infrastruktur transportasi tinggi akibat adanya bangkitan dari sektor ekonomi - Kabupaten Bandung dilalui oleh jalan provinsi yang menghubungkan Kota Bandung dengan jalur selatan Jawa Barat - Terdapat Balai Besar Wilayah Sungai yang memfasilitasi perencanaan sumber daya air - Sudah terdapat berbagai aturan dan pedoman penataan ruang dari pemerintah pusat - Potensi ekonomi dan pertanian di beberapa area tergolong tinggi - Terdapat aturan berupa UU mengenai aspek kebencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada kondisi, sektor ekonomi belum memfasilitasi pertumbuhan sektor informal - Belum terintegrasinya pembangunan infrastruktur dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan, salah satunya ditandai dengan kemacetan lalu lintas pada segmen-segmen jalan yang berbatasan dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi - Berkembangnya industri sepeda motor, memunculkan trend sepeda motor sebagai moda yang lebih diminati - Pembagian pengelolaan wilayah sungai belum jelas - Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota berbatasan belum terintegrasi secara optimal dengan RTRW Kabupaten Bandung - Perkembangan sektor ekonomi kadangkala berdampak pada alih fungsi lahan
<p>STRENGTH</p>	<p>Strength – Opportunity Strategies:</p>	<p>Strength – Threat Strategies:</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran daerah untuk pembangunan infrastruktur cukup besar - Sudah terdapat SKP yang secara khusus menangani perencanaan dan pembangunan infrastruktur - Merupakan hulu dari beberapa aliran sungai, serta memiliki potensi air baku yang tinggi - Permukiman layak huni sudah mencapai 90,94 % pada tahun 2014 - Sudah terdapat media publikasi pemerintah, baik berupa media cetak, elektronik maupun website - Sudah terdapat badan khusus yang menangani perencanaan pembangunan daerah - Terdapat beberapa wilayah yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan sebagai kawasan strategis - Sudah terdapat badan khusus yang menangani penanggulangan bencana - Dokumen perencanaan tata ruang sudah mengakomodasi aspek kebencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki simpul-simpul transportasi 2. Meningkatkan volume air baku yang ditampung 3. Meningkatkan jaringan irigasi 4. Meningkatkan kualitas permukiman penduduk 5. Meningkatkan ketersediaan informasi pemerintah kepada masyarakat 6. Meningkatkan cakupan infrastruktur telekomunikasi 7. Meningkatkan kualitas produk perencanaan tata ruang 8. Mendorong perkembangan kawasan strategis 9. Meningkatkan sinergitas pemanfaatan ruang dalam lingkup internal 10. Meningkatkan upaya mitigasi bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keterpaduan perencanaan tata ruang antar wilayah 2. Mengurangi gap antara rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang 3. Meningkatkan keterpaduan pemanfaatan ruang antar wilayah 4. Meningkatkan keterpaduan pemanfaatan ruang antar wilayah 5. Meningkatkan kontrol terhadap pemanfaatan ruang
<p>WEAKNESS</p>	<p>Weakness – Opportunity Strategies:</p>	<p>Weakness – Threat Strategies:</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Hambatan samping jalan (PKL, penyebrang jalan yang tidak pada tempatnya, angkutan umum yang berhenti tidak pada fasilitas perhentian) pada beberapa titik khususnya pada area komersial dan perdagangan tinggi - Jalan kondisi baik baru mencapai kurang lebih 50 % - Penagmanan lalu lintas melalui penyediaan marka jalan belum mencakup seluruh kawasan - Kemacetan lalu lintas pada beberapa ruas jalan - Kualitas sarana transportasi publik belum memadai - Jaringan rel kereta api tidak aktif digunakan - Jaringan drainase tersier belum terinventarisir, disisi lain SKPD yang menangani sektor drainase tersier belum jelas - Banjir tahunan - Distribusi air bersih belum mencakup seluruh kawasan - Akses sanitasi baik belum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bandung - Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman masih rendah - Pelayanan listrik belum mencakup seluruh wilayah - Kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung perkembangan kawasan tersebut. - Upaya terkait aspek kebencanaan masih terbatas pada penanggulangan bencana dalam bentuk mitigasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan jalan 2. Meningkatkan tingkat keamanan lalu lintas 3. Reaktivasi jaringan rel kereta api eksisting 4. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih 5. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sanitasi 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman 7. Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan listrik 8. Mendorong perkembangan kawasan strategis 9. Meningkatkan upaya adaptasi bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi hambatan samping jalan 2. Membangun perencanaan transportasi yang terintegrasi 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana transportasi publik 4. Menurunkan jumlah lokasi banjir dan rawan genangan

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2015

D. Misi 4: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

TABEL 6.4

STRATEGI PENGEMBANGAN TERKAIT MISI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

EKSTERNAL INTERNAL	OPPORTUNITIES	THREATS
	STRENGTH - Sudah terdapat SKPD yang khusus menangani pengelolaan sektor sosial	- Sudah terbentuk lembaga yang berfokus pada bidang sosial di tatanan nasional - Terdapat kepastian hukum dan jaminan negara yang dituangkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara Strength – Opportunity Strategies: 1. Penguatan kapasitas aparatur yang khusus membidangi pengelolaan sektor sosial 2. Intensifikasi koordinasi antar SKPD yang membidangi sektor sosial
WEAKNESS - Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	Weakness – Opportunity Strategies: Meningkatkan upaya perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	Weakness – Threat Strategies: Peningkatan kapsitas/ kemampuan para penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk terlepas dari masalah kesejahteraan sosial

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2015

E. Misi 5: Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif

TABEL 6.5

STRATEGI PENGEMBANGAN TERKAIT MISI UNTUK MENCIPTAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG MEMILIKI KEUNGGULAN KOMPETITIF

EKSTERNAL INTERNAL	OPPORTUNITIES	THREATS
	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan ekonomi Kota Bandung yang semakin pesat turut memengaruhi perekonomian Kabupaten Bandung khususnya yang berbatasan langsung - Investasi di sektor tersier (misalnya: hotel, hiburan dan restoran) menunjukkan trend positif - Terdapat banyak investor yang telah menanamkan modalny di sektor industri - Peluang wisatawan dari luar Kabupaten Bandung tinggi - Permintaan produk pertanian dan perikanan dari daerah lain tinggi - Berkembangnya trend pelestarian lingkungan ynag dikaitkan dengan berbagai bidang seperti misalnya indsutri dan pariwisata - Terdapat banyak sumber pendanaan yang belum diakses 	<ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan sentra perdagangan besar di Kota/Kabupaten berbatasan - Akses pelaku ekonomi kreatif terhadap sumber pendanaan masih rendah - Masih belum optimalnya aglomerasi perdagangan - Migrasi tenaga kerja dari wilayah lain - Daya saing wilayah lain sebagai lokasi investasi - Masih tingginya angka tidak tamat sma, yang meningkatkan potensi perkembangan ekonomi nonformal. - Meningkatnya urbanisasi. - Menurunnya lapangan kerja akibat melemahnya daya saing industri pengolahan. - Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan ekopariwisata dan kelestarian lingkungan hidup.
STRENGTH	Strength – Opportunity Strategies:	Strength – Threat Strategies:
<ul style="list-style-type: none"> - Telah banyak hotel dan restoran di Kabupaten Bandung - Kabupaten Bandung merupakan sentra penghasil produk pertanian dan komoditas perdagangan lainnya - Memiliki SDM yang kreatif dan inovatif - Memiliki banyak objek wisata - Telah berkembangnya sektor industri - Pada kondisi eksisting sudah terdapat koperasi dan UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pajak hotel, hiburan, dan restoran 2. Meningkatkan jumlah wisatawan 3. Mengembangkan kawasan pertanian dan perikanan 4. Mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan melalui pengembangan ekowisata 5. Meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata 6. Meningkatkan jumlah pelaku koperasi dan UMKM 7. Meningkatkan investasi/ penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan aglomerasi perdagangan 2. Mengembangkan ekonomi kreatif 3. Memudahkan aksesibilitas pemasaran produk- produk pertanian dan perikanan 4. Meningkatkan jumlah industri berteknologi tinggi dan ramah lingkungan 5. Menurunkan jumlah industri konvensional dengan membatasi jumlah perijinan industri konvensional 6. Meningkatkan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal di sekitar objek wisata 7. Mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan melalui pengembangan ekowisata
WEAKNESS	Weakness – Opportunity Strategies:	Weakness – Threat Strategies:
<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas SDM lokal dibidang indsutri masih rendah - Kapasitas fiskal daerah masih rendah - Kemandirian anggaran masih rendah - Industri pengolahan terus melambat laju pertumbuhannya, khususnya industri tekstil, kulit dan alas kaki - Belum ada jaminan mengenai kepastian harga dan kontinuitas pasokan barang - Masih ada objek wisata dan daya tarik wisata yang belum tergali dan belum dioptimalkan - Masih kurangnya akses ke objek wisata - Sebagian besar koperasi merupakan koperasi tidak aktif - Akses ke sumber modal masih rendah - Keterbatasan pemerintah dalam mempromosikan keunggulan daerah untuk menarik minat investor - Belum memadainya infrastruktur dasar yang menarik minat investasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha dalam sektor industri teknologi tinggi dan ramah lingkungan 2. Meningkatkan jumlah destinasi wisata 3. Meningkatkan jumlah koperasi aktif 4. Meningkatkan akses pendanaan ke sumber modal 5. Meningkatkan produktivitas UMKM dan koperasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan tingkat ketergantungan perekonomian terhadap industri pengolahan 2. Meningkatkan jaminan/kepastian mengenai harga dan kontinuitas pasokan produk pertanian dan perikanan 3. Penyederhanaan prosedur investasi

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2015

F. Misi 6: Memelihara dan mengelola lingkungan hidup dalam menciptakan pembangunan Kabupaten Bandung yang berkelanjutan

TABEL 6.6
STRATEGI PENGEMBANGAN TERKAIT MISI UNTUK MENINGKATKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

EKSTERNAL INTERNAL	OPPORTUNITIES	THREATS
	<ul style="list-style-type: none"> - Kemajuan IPTEK yang pesat dalam bidang telekomunikasi dan informatika - Telah terdapat UU tentang kebencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat industri yang tidak melakukan pengujian limbah/emisi dan melaporkannya secara rutin - Terjadi alih fungsi lahan hutan - Pertumbuhan yang pesat di sektor ekonomi mengancam kelestarian lingkungan - Faktor pemicu kebencanaan bersifat tidak dapat dihindarkan
STRENGTH	Strength – Opportunity Strategies:	Strength – Threat Strategies:
<ul style="list-style-type: none"> - Sudah terdapat SKPD yang khusus menangani pengelolaan lingkungan hidup - Rencana Tata Ruang Wilayah sudah mengakomodir aspek kebencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem informasi lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengawasi usaha/ kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan 2. Mengendalikan kerusakan hutan dan lahan 3. Meningkatkan fungsi kawasan lindung dan daerah hijau 4. Mengurangi tingkat kerusakan hutan
WEAKNESS	Weakness – Opportunity Strategies:	Weakness – Threat Strategies:
<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan hidup - Upaya terkait kebencanaan masih terbatas pada upaya mitigasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam mengawasi pencemaran dan kerusakan lingkungan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi sumber daya alam 	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2015

G. Misi 7: Meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat

TABEL 6.7
STRATEGI PENGEMBANGAN TERKAIT MISI UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA

EKSTERNAL INTERNAL	OPPORTUNITIES	THREATS
	<ul style="list-style-type: none"> - Kemajuan IPTEK yang pesat dalam bidang telekomunikasi dan informatika - Demand terhadap produk industri kreatif tinggi - Sudah terdapat aturan dari pusat yang mengatur tentang desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor perekonomian di perdesaan lemah - Akses luar terhadap komoditas di perdesaan masih terkendala aksesibilitas - Pengawasan terhadap kinerja aparatur perdesaan belum intensif - Daya tarik perkotaan yang lebih tinggi, menarik sumber daya manusia perdesaan berpendidikan tinggi untuk bermigrasi
STRENGTH	Strength – Opportunity Strategies:	Strength – Threat Strategies:
<ul style="list-style-type: none"> - Sudah terdapat SKPD khusus yang menangani pemberdayaan masyarakat perdesaan - Keeratan hubungan, semangat kebersamaan dan jiwa saling tolong menolong yang masih tinggi di kalangan masyarakat desa akan mempermudah pembentukan desa mandiri - SDM perdesaan Kabupaten Bandung kreatif dan inovatif - Persentase rumah layak huni di perdesaan sudah tergolong tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat lembaga ekonomi perdesaan melalui pengembangan ekonomi kreatif 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman di perdesaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peningkatan pendapatan desa 2. Membangun desa percontohan dan desa mandiri
WEAKNESS	Weakness – Opportunity Strategies:	Weakness – Threat Strategies:
<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan penduduk di perdesaan masih tergolong rendah - Kesadaran masyarakat perdesaan untuk mengelola infrastruktur secara berkelanjutan masih rendah - Kurangnya peran dan inisiatif pemerintah untuk memberdayakan/ menstimulus masyarakat agar mampu berkarya - Infrastruktur transportasi dalam internal perdesaan masih rendah - Pemenuhan air bersih di perdesaan sebagian besar dipenuhi oleh air tanah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengelola infrastruktur dan sarana di perdesaan 2. Meningkatkan insentif terhadap pembangunan desa 3. Intensifikasi monitoring dan evaluasi terhadap partisipasi pembangunan perdesaan 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana air bersih di perdesaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aksesibilitas transportasi di perdesaan 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perdesaan

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2015

H. Misi 8: Meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi

TABEL 6.8
STRATEGI PENGEMBANGAN TERKAIT MISI UNTUK MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI

EKSTERNAL INTERNAL	OPPORTUNITIES - Adanya UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN - Dukungan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD provinsi terhadap peningkatan kapasitas aparatur Negara - Adanya SPM tentang kepegawaian daerah - Kemajuan IPTEK yang pesat dalam bidang telekomunikasi dan informatika	THREATS - Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah - Situasi ekonomi dan politik yang tidak menentu
	STRENGTH - Terdapatnya kebijakan yang menunjang terhadap <i>good governance</i> - Dukungan anggaran APBD Kabupaten Bandung terhadap pengembangan reformasi birokrasi cukup besar - Meningkatnya aspek pelayanan terpadu masyarakat di wilayah (Yandu dan Paten)	Strength – Opportunity Strategies: 1. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga pelayanan perijinan satu pintu 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi
WEAKNESS - Masih rendahnya SDM aparatur pemda (ketidaksesuaian pendidikan dengan jabatan) - Belum optimalnya analisis dan evaluasi jabatan sebagai perencanaan manajemen SDM	Weakness – Opportunity Strategies: 1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah	Weakness – Threat Strategies: 1. Meningkatkan transparansi pelayanan publik sebagai upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintahan

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2015

I. Misi 9: Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum

TABEL 6.9

STRATEGI PENGEMBANGAN TERKAIT MISI UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

EKSTERNAL INTERNAL	OPPORTUNITIES	THREATS
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan TNI dan Polri - Tersedianya peraturan dan Undang- Undang mengenai kemanan dan ketertiban umum (Misal Undang- Undang Anti Terorisme) - Keterlibatan pemuka agama dalam menciptakan tatanan kehidupan yang menjunjung perdamaian dan toleransi antar umat beragama - Terorganisirnya partai politik mulai dari tatanan nasional hingga daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh globalisasi yang dapat menimbulkan tantangan dan pengaruh negatif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa (Misal: penyebaran paham yang tidak sesuai dengan pancasila)
STRENGTH	Strength – Opportunity Strategies:	Strength – Threat Strategies:
<ul style="list-style-type: none"> - Terdapatnya kebijakan yang menunjang terhadap <i>good governance</i> - Telah adanya Badan Kesbangpolinmas - Telah terbentuknya Satpol PP di lingkungan Kabupaten Bandung - Keberadaan linmas di setiap desa/kelurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminimalisasi terjadinya ancaman terhadap kemanan dan ketertiban masyarakat 2. Meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan
WEAKNESS	Weakness – Opportunity Strategies:	Weakness – Threat Strategies:
<ul style="list-style-type: none"> - Belum terorganisirnya personel linmas/Hansip di daerah - Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dapat berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban umum wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan implementasi norma- norma religius dalam kehidupan bermasyarakat 	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2015

J. Misi 9: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

TABEL 6.9
STRATEGI PENGEMBANGAN TERKAIT MISI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

EKSTERNAL INTERNAL	OPPORTUNITIES	THREATS
	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah terbentuk lembaga yang berfokus pada bidang sosial di tatanan nasional - Terdapat kepastian hukum dan jaminan negara yang dituangkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Situasi ekonomi dan politik dalam tatanan nasional yang tidak menentu dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk
STRENGTH	Strength – Opportunity Strategies:	Strength – Threat Strategies:
<ul style="list-style-type: none"> - Sudah terdapat SKPD yang khusus menangani pengelolaan sektor sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penguatan kapasitas aparatur yang khusus membidangi pengelolaan sektor sosial 4. Intensifikasi koordinasi antar SKPD yang membidangi sektor sosial 	<p>Meningkatkan upaya perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial bagi PMKS</p>
WEAKNESS	Weakness – Opportunity Strategies:	Weakness – Threat Strategies:
<ul style="list-style-type: none"> - Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial 	<p>Meningkatkan upaya perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial bagi PMKS</p>	<p>Peningkatan kapsitas/ kemampuan para penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk terlepas dari masalah kesejahteraan sosial</p>

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2015

6.2. Arah Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan

Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumberdaya pembangunan yang merupakan titik sentral pembangunan. Peran pendidikan sebagai *engine of growth* atau penggerak pembangunan dituntut untuk menghasilkan manusia-manusia unggul yang mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Pendidikan diselenggarakan sebagai bentuk investasi sumber daya manusia dalam jangka panjang. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintahan daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Adapun definisi pendidikan dalam hal ini yaitu mengacu pada Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana lingkup pendidikan tidak hanya meliputi pendidikan formal, tetapi juga meliputi pendidikan nonformal seperti pendidikan anak usia dini serta pendidikan informal seperti kursus dan pelatihan.

Pengembangan budaya serta pemberdayaan pemuda merupakan faktor yang tidak terkecuali dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Kebudayaan daerah merupakan hasil kreativitas dan pemikiran yang memiliki nilai luhur serta merupakan warisan bagi generasi saat ini. Kebudayaan daerah merupakan kekayaan daerah yang perlu dipahami dan dilestarikan oleh masyarakat sehingga pengembangan aspek kebudayaan ini erat kaitannya dengan pendidikan masyarakat. Demikian pula halnya dengan pemuda, Pemerintah Kabupaten Bandung menempatkan pendidikan dan pemberdayaan pemuda sebagai salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bandung lima tahun kedepan.

Berdasarkan hasil penurunan strategi pembangunan Kabupaten Bandung yang telah ditampilkan dalam subbab sebelumnya, beberapa arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2016 – 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Efisiensi jumlah siswa per rombel dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal;
2. Optimalisasi daya tampung pada sarana pendidikan agar sesuai dengan standar pelayanan minimal;
3. Peningkatan penyediaan sarana ruang kelas bagi siswa dengan kapasitas yang memadai;
4. Peningkatan pendirian sekolah menengah kejuruan berbasis vokasional sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja;
5. Pengembangan kawasan pendidikan terpadu;
6. Peningkatan sarana pendidikan berakreditasi A;
7. Perluasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang dikelola oleh masyarakat dan dunia usaha;
8. Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti dan pendidikan sekolah dasar;
9. Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti dan pendidikan sekolah menengah;
10. Pengurangan angka putus sekolah pada tingkat sekolah menengah pertama/ sederajat;
11. Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan sekolah menengah;
12. Peningkatan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sekolah menengah kejuruan berbasis vokasional;
13. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus;
14. Peningkatan pemberian beasiswa pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan;
15. Penyelenggaraan pendidikan bahasan dan budaya sunda pada setiap jenjang pendidikan (dasar dan menengah);

16. Peningkatan jumlah kebudayaan daerah yang dilestarikan;
17. Peningkatan atlet berprestasi di ajang PON dan PORDA;
18. Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana olah raga bagi kelompok disabilitas;
19. Peningkatan pembinaan kegiatan olahraga bagi aparatur;
20. Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana olahraga pada fasilitas pendidikan di setiap kecamatan;
21. Peningkatan jumlah organisasi kepemudaan (karang taruna) di setiap kecamatan;
22. Peningkatan peranan pemuda pelopor dalam berbagai bidang pembangunan;
23. Perluasan pendidikan non formal bagi masyarakat yang belum melek huruf;
24. Peningkatan Penyelenggaraan pendidikan Paket A, B, C;
25. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan minat membaca.

2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua komponen dasar yang pelayanannya bersifat wajib dipenuhi oleh pemerintah. Kualitas kesehatan penduduk berkorelasi positif dengan produktivitas penduduk. Secara agergat dalam satu kota/ kabupaten secara tidak langsung aspek kesehatan penduduk akan berpengaruh terhadap perekonomian wilayah.

Selain mencakup upaya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pengembangan aspek kesehatan juga sejalan dengan upaya pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan sebagai aktor kunci dalam pembangunan keluarga. Kesehatan berkaitan erat dengan perilaku hidup bersih yang diterapkan oleh setiap keluarga, sehingga berdasarkan hal tersebut upaya pembangunan kesehatan perlu dimulai dari level terbawah yaitu keluarga.

Beberapa kebijakan terkait misi mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bandung untuk rentang tahun 2016 - 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi ketersediaan sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik) di setiap kecamatan;
2. Penyelenggaraan informasi pelayanan kesehatan kepada public;
3. Optimalisasi kualitas pelayanan kesehatan pada sarana-sarana kesehatan;
4. Pemberian stimulan bagi tenaga medis di daerah;
5. Pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan bagi masyarakat di setiap kecamatan;
6. Peningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan yang terdistribusi di seluruh wilayah Kabupaten;
7. Peningkatan pemantauan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular secara periodik;
8. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
9. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang masuk kriteria prasejahtera;
10. Peningkatan pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
11. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, remaja, dan lansia di fasilitas-fasilitas kesehatan masyarakat;
12. Peningkatan peran fungsi wanita dalam pembinaan keluarga;
13. Peningkatan emansipasi perempuan di sektor pemerintahan;
14. Peningkatan penyebarluasan informasi/ kampanye tentang PHBS;
15. Peningkatan promosi untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
16. Penginisiasian desa siaga aktif.

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan

A. Sektor Transportasi dan Perhubungan

Pergerakan atau perpindahan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dalam rangka untuk melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial merupakan salah satu hal penting yang perlu diakomodasi oleh pemerintah daerah. Implikasi dari pergerakan yang dilakukan secara massal dan bersamaan dalam kurun waktu tertentu akan membentuk suatu aliran (*flow*).

Dengan adanya aliran pergerakan ini diperlukan rekayasa transportasi untuk menjamin terselenggaranya pergerakan yang cepat, mudah, nyaman, aman, ekonomis dan selaras dengan lingkungan. Dalam merekayasa transportasi, tentunya perlu mempertimbangkan sistem transportasi wilayah yang didalamnya mengatur pergerakan manusia dan barang antara lokasi asal dan lokasi tujuan dalam wilayah yang bersangkutan dengan menggunakan berbagai prasarana dan sarana atau moda.

Rencana sistem prasarana transportasi untuk Kabupaten Bandung berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 akan diarahkan untuk menunjang struktur ruang yang akan dibentuk. Dalam konteks transportasi sebagai alat pemenuh kebutuhan wilayah, maka *demand* pergerakan eksisting yang mengarah ke Bandung dan Cimahi sebagai kota inti perlu ditanggulangi dengan segera. Konsep transportasi yang sesuai untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan menyediakan sarana transportasi massal antarwilayah. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, kebijakan transportasi yang direncanakan di Kabupaten Bandung, antara lain:

1. Peningkatan aksesibilitas seluruh wilayah Kabupaten Bandung;
2. Pengendalian Daerah milik jalan dan ruang Milik jalan;
3. Penertiban kegiatan-kegiatan di luar lalu lintas yang dapat memicu kemacetan lalu lintas;
4. Peningkatan penyediaan sarana pengamanan lalu lintas;
5. Pengembangan dan penataan terhadap simpul- simpul transportasi;
6. Pengembangan Sistem Angkutan Publik Terpadu;
7. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pengecekan berkala mengenai kelaikan pengoperasian kendaraan umum;
8. Reaktivasi jalur kereta api eksisting sebagai upaya peningkatan layanan transportasi publik;
9. Pembebasan lahan Jalur Bus Rapid Transit (BRT);
10. Meningkatkan perencanaan sektoral bidang transportasi.

B. Sektor Sumber Daya Air

Dalam sektor sumber daya air, pengembangan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Mengacu pada tujuan tersebut, pengembangan ditekankan pada tiga aspek yang meliputi, penyediaan serta peningkatan akses terhadap air bersih dan air baku, pengendalian banjir yang kerap melanda serta pengembangan infrastruktur drainase perkotaan. Secara detail arah kebijakan pembangunan sektor sumber daya air di Kabupaten Bandung tahun 2016 – 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan air bersih yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bandung;
2. Peningkatan sistem pengelolaan irigasi partisipatif;
3. Optimalisasi potensi dan pemanfaatan air baku;
4. Penyelamatan mata air dan sumber daya air lainnya.

C. Sektor Permukiman

Untuk sektor permukiman, arah kebijakan lebih ditekankan pada upaya yang sejalan dengan strategi mengembangkan serta meningkatkan kualitas kawasan permukiman. Beberapa arah kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
2. Pengembangan Hunian Vertikal bagi (MBR) Masyarakat Berpenghasilan Rendah

D. Sektor Telekomunikasi dan Informatika

Sebagai upaya mengoptimalkan sistem telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Bandung, beberapa arah kebijakan dalam sektor telekomunikasi dan informatika yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi bidang perhubungan;
2. Peningkatan alternatif media komunikasi pemerintah terhadap publik.

E. Sektor Listrik dan Energi

Untuk sektor listrik dan energi, kebijakan di arahkan pada upaya peningkatan cakupan layanan jaringan listrik di setiap kecamatan

F. Sektor Tata Ruang

Penataan ruang merupakan komponen krusial yang penanganannya bersifat mutlak diperlukan dalam menjamin keberlangsungan pembangunan. Pada dasarnya pengembangan tata ruang di Kabupaten Bandung diarahkan pada tiga komponen yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Sehubungan hal tersebut, maka arah kebijakan dalam sektor tata ruang pun sejalan dengan upaya penyelenggaraan ketiga komponen tersebut.

Selain dari pada itu, dalam rangka menyelenggarakan penataan ruang yang komprehensif mempertimbangkan berbagai potensi dan tantangan, penyelenggaraan tata ruang Kabupaten Bandung juga akan diarahkan pada penyelenggaraan tata ruang yang terpadu dengan memperhatikan aspek kebencanaan.

Terkait dengan aspek kebencanaan, mengacu pada hasil Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) kabupaten Bandung, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Beberapa rekomendasi antara lain:

1. Relokasi penduduk dari daerah rawan bencana, misal memindahkan penduduk yang berada dipinggir tebing yang mudah longsor;
2. Pelatihan- pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi penduduk di sebuah daerah;
3. Pengkondisian rumah atau sarana umum yang tanggap bencana;
4. Penciptaan dan penyebaran kearifan lokal tentang kebencanaan.

Rekomendasi di atas turut menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi dan kebijakan sektor tata ruang. Secara detail, arahan kebijakan dalam sektor tata ruang Kabupaten Bandung antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang;
2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang;
3. Intensifikasi penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan ruang dalam lingkup pemerintah;
4. Peningkatan peraturan dan dokumen perencanaan yang mendukung terhadap upaya penertiban pengendalian pemanfaatan ruang;
5. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan dampak bencana;
6. Pemindahan (relokasi) penduduk dari kawasan rawan banjir;
7. Pembangunan polder dan kolam retensi;
8. Pengelolaan Sistem Jaringan Drainase.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Salah satu faktor penting yang mendukung kondusifnya pembangunan wilayah yaitu aspek kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan Sosial akan berpengaruh luas terhadap berbagai aspek pembangunan, terutama terhadap keamanan dan ketertiban umum wilayah. Didasari pertimbangan tersebut, maka dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung periode 2016 – 2021 ditetapkan misi yang secara khusus bertujuan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Beberapa kebijakan terkait misi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan Masalah Kesejahteraan Sosial;
3. Peningkatan lapangan pekerjaan;
4. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

5. Menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif

Untuk membangun perekonomian Kabupaten Bandung yang berdaya saing, beberapa sektor yang menjadi prioritas pengembangan antar lain meliputi sektor perdagangan dan jasa, sektor industri, sektor agrobisnis, sektor pariwisata, sektor koperasi dan UMKM serta sektor investasi. Arah kebijakan untuk setiap sektor tersebut dijabarkan sebagai berikut.

A. Sektor Perdagangan dan Jasa

Pembangunan ekonomi secara umum dipahami sebagai usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Pembangunan ekonomi merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil, juga untuk meningkatkan produktivitas. Hal ini berfungsi untuk mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan

kemiskinan. Dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik, yaitu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam RPJPD tertuang tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 adalah terwujudnya Kabupaten Bandung yang repeh, rapih, kertaraharja 2025 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai upaya yang terukur untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, sasaran pokok pembangunan di Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat salah satunya yaitu:

1. Meningkatnya perekonomian masyarakat yang berdaya saing, dengan ditandai oleh hal-hal berikut:
 - a) Terwujudnya industri manufaktur berbasis potensi lokal dicirikan oleh meningkatnya jumlah penggunaan bahan baku lokal sebagai pendorong kegiatan industri manufaktur sehingga mampu menjadi basis ekonomi masyarakat, serta memberi kontribusi bagi peningkatan PDRB;
 - b) Terwujudnya pusat-pusat perdagangan produk unggulan lokal dicirikan oleh meningkatnya jumlah sentra perdagangan produk unggulan, meluasnya jangkauan pasar ke tingkat internasional serta meningkatnya prasarana pendukung fasilitas pusat perdagangan produk unggulan;
 - c) Terwujudnya produk pertanian yang berdaya saing dicirikan dengan ketahanan pangan mandiri melalui pendorongan diversifikasi usaha tani ke arah pengembangan agrobisnis dan agroindustri dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita petani;
 - d) Meningkatnya penataan dan pembangunan sarana dan prasarana objek wisata dicirikan dengan meningkatnya pangsa pasar pariwisata lokal di tingkat internasional, berkembangnya keragaman objek-objek wisata, serta ditandai oleh peningkatan kontribusi PDRB dari sektor pariwisata;
 - e) Terwujudnya pelayanan investasi yang mudah, murah, cepat dan pasti dicirikan oleh meningkatnya pertumbuhan investasi di Kabupaten Bandung;
 - f) Mewujudkan penyediaan infrastruktur wilayah baik kuantitas maupun kualitas secara memadai dicirikan oleh meningkatnya kondisi dan kinerja jaringan jalan dan jembatan, terpenuhinya listrik di setiap kecamatan, tercapainya cakupan pelayanan dan kualitas air minum, serta terpenuhinya debit andalan air baku di setiap Daerah Irigasi (DI).

Arah pembangunan 2005-2025 dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing diarahkan pada pembangunan ekonomi masyarakat lokal. Tantangan dalam membangun perekonomian di Kabupaten Bandung hendaknya dapat memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif dengan memaksimalkan ketersediaan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia di Kabupaten Bandung.

Sektor-sektor yang selama ini memberikan sumbangan terbesar bagi nilai PDRB meliputi sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pertanian. Ketiga sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja hingga 67,7%. Upaya untuk meningkatkan ekonomi yang berdaya saing dilakukan

melalui penguatan dan pengembangan industri manufaktur yang berbasis potensi sumber daya lokal, pengembangan sentra-sentra perdagangan produk unggulan lokal, pengembangan agropolitan, pengembangan kepariwisataan, pengembangan iklim investasi yang kondusif serta peningkatan kualitas infrastruktur wilayah.

Sasaran pembangunan dibidang ekonomi pada tahun 2025 mendatang hendaknya mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sebesar Rp45.029.300/tahun atau setara dengan US\$4.502 (asumsi kurs US\$ sebesar Rp10.000). Pencapaian tersebut dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan, diantaranya:

1. Penggalian potensi pajak yang belum terpungut pada sektor perdagangan, hotel dan restoran;
2. Pengembangan sentra perdagangan dan pergudangan;
3. Pengembangan kebijakan atau regulasi yang mendorong perkembangan iklim usaha perdagangan;
4. Pengembangan kestatistikan dan data base perdagangan;
5. Pengembangan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat;
6. Penataan dan pemberdayaan PKL;
7. Meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan;
8. Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting;
9. Memperpendek jalur / rantai distribusi , khususnya produk-produk pertanian dengan Meningkatkan kerjasama dan kemitraan produsen dengan pedagang pasar;
10. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri / P3 DN;
11. Peningkatan branding, promosi dan pemasaran produk;
12. Pengembangan ukm ikm di wilayah pariwisata;
13. Pengembangan E-Commerce;
14. Peningkatan ekspor produk barang dan jasa;
15. Pengurangan Impor dengan Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
16. Pembentukan dan Pengembangan Komite Promosi dan Pemasaran dalam wadah Bussiness Development Center.

B. Sektor Usaha Agrobisnis

Sebagai salah satu potensi unggulan Kabupaten Bandung, sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pengembangan yang sejalan dalam mendukung pengembangan ekonomi Kabupaten Bandung. Beberapa araha kebijakan terkait pengembangan sektor usaha agribisnis antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas kawasan pertanian dan perikanan;
2. Peningkatan pelaku usaha pengolahan serta sentra- sentra pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan;
3. Peningkatan pengawasan terhadap produk pertanian, peternakan dan perikanan; serta
4. Peingkatan pendapatan petani dari sektor pertanian.

C. Sektor Pariwisata

Selain sektor perdagangan/ jasa, industri dan agrobisnis, sektor lain yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Bandung yaitu sektor pariwisata. Untuk sektor pariwisata ini, arah kebijakan meliputi:

1. Pengembangan dan pemeliharaan objek wisata di Kabupaten Bandung;
2. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan melalui pengembangan ekowisata;
3. Peningkatan promosi pariwisata;
4. Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata serta pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
5. Peningkatan penyediaan jaringan transportasi yang memadai menuju kawasan objek wisata.

D. Sektor Koperasi dan UMKM

Dalam sektor koperasi dan UMKM, kebijakan di arahkan pada upaya tercapainya sasaran untuk emningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM. Beberapa arah kebijakan terkait hal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan mesin dan peralatan IKM pada sentra dan klaster UMKM;
2. Pengembangan jaringan dan kemitraan quadrohelix;
3. Pengembangan komunitas dan penguatan kelembagaan;
4. Peningkatan Pangsa Pasar dan perluasan pemasaran;
5. Peningkatan akses permodalan terutama melalui koperasi;
6. Penguatan permodalan koperasi melalui penyertaan modal;
7. Peningkatan keanggotaan koperasi dari sektor pertanian, perdagangan dan usaha kecil menengah;
8. Peningkatan penggunaan teknologi tinggi serta teknologi pengolahan limbah dalam sektor industri;
9. Meningkatkan jumlah kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha dalam sektor industri teknologi tinggi dan ramah lingkungan;
10. Mendorong perbaikan teknologi proses produksi produk unggulan yang mampu bersaing di pasar internasional; ;
11. Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM pelaku usaha / UKM / IKM;
12. Peningkatkan mutu pengelolaan (management), proses produksi UMKM dan IKM;
13. Peningkatkan jaminan mutu produk-produk UMKM dan IKM;
14. Pegembangan Desain dan Kemasan produk-produk UKM dan IKM;
15. Pengembangan Legailitas Hak Cipta;
16. Peningkatan pendampingan dan pembinaan dalam mengembangkan ciri khas / keunikan produk;
17. Pengembangan regulasi dan kebijakan yang menunjang pertumbuhan industri olahan berbasis masyarakat;
18. Pengembangan litbang yang menunjang pertumbuhan industri olahan berbasis masyarakat.

E. Sektor Investasi/ Penanaman Modal

Dalam sektor investasi/ penanaman modal, kebijakan akan diarahkan pada upaya meningkatkan investasi, khususnya dalam sektor ekonomi kreatif. Beberapa arah kebijakan terkait hal tersebut antara lain:

1. Peningkatan fasilitasi kerjasama bidang investasi oleh pemerintah;
2. Peningkatan branding daerah, promosi dan potensi investasi;
3. Peningkatan efektivitas prosedur perijinan investasi;

6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupannya dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Inti dari permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya.

Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung sudah perlu mendapatkan perhatian khusus karena jika tidak ditangani secepatnya dikhawatirkan akan berdampak buruk untuk jangka panjang. Pembuangan limbah padat yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah baru bagi lingkungan, pembuangan limbah cair yang tidak melalui proses pengolahan terlebih dahulu juga akan mencemari sungai yang pada akhirnya akan merusak biota di dalam ekosistem sungai, sementara polusi udara yang ditimbulkan dari proses pembuangan residu ke udara tanpa disaring terlebih dahulu akan menimbulkan polusi udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

Mengacu pada hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD yang telah disusun oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung, rekomendasi bentuk mitigasi terhadap lingkungan hidup yang terkait dengan pencemaran udara antara lain:

1. Memasang filter pada cerobong asap pabrik/ industry;
2. Pembangunan RTH pada kawasan industri dan jalur hijau sekitar pabrik;
3. Pembangunan jalur hijau di kanan kiri jalan;
4. Vegetasi disetiap pembangunan perumahan baru.

Adapun rekomendasi terhadap kerusakan lingkungan hidup, khusus terkait lahan kritis antara lain:

1. Memberikan penyuluhan kepada petani ladang berpindah untuk mengubah sistem pertanian dari ladang berpindah menjadi ladang menetap;
2. Melarang penebangan hutan liar tanpa izin dari pemerintah, dalam hal ini dinas kehutanan;
3. Memberikan sanksi tegas kepada pembalok sehingga memberi efek jera;
4. Memberikan pengarahan tentang penebangan hutan secara selektif, artinya pohon yang ditebang harus benar- benar pohon yang layak untuk ditebang dan tidak dilakukan secara bersamaan untuk jenis hutan produksi (penataan jadwal);
5. Melakukan penghijauan, yaitu penanam tanaman di luar kawasan hutan, khususnya lahan- lahan kritis;
6. Untuk mitigasi lahan kritis akibat erosi, bentuk mitigasi antara lain menerapkan sistem terasering (membuat teras- teras bertingkat pada tanah pertanian yang letaknya miring), countur plowing (membajak menurut garis kontur), dan crop

rotation (pergantian jenis tanaman supaya tana tidak kehabisan salah satu unsur hara aibat penyerapan secara terus menerus oleh satu jenis tanaman).

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang menimbulkan penurunan kualitas lingkungan serta mempertimbangkan rekomendasi KLHS, maka kebijakan lingkungan hidup yang direncanakan di Kabupaten Bandung, antara lain:

1. Peningkatan dokumen terkait lingkungan yang dapat diakses oleh masyarakat;
2. Peningkatan aktivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
3. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam menyediakan infrastruktur sanitasi lingkungan;
4. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam penyediaan sanitasi lingkungan;
5. Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup;
6. Peningkatan jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang kehutanan;
7. Peningkatan pelestarian sumber daya hutan;
8. Peningkatan upaya konservasi terhadap hutan rakyat;
9. Peningkatan penanganan lahan kritis;
10. Pengembangan biopori sebagai upaya pengelolaan air tanah;
11. Penyelenggaraan koordinasi konservasi sumber daya alam secara intensif antara pemerintah dan masyarakat;
12. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
13. Peningkatan pengelolaan dan pengaturan areal pemakaman umum dan bukan umum;
14. Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup;
15. Penyusunan rencana aksi perubahan iklim daerah.

7. Meningkatkan Kemandirian Desa

Pengembangan perdesaan menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Bandung. Penetapan misi meningkatkan kemandirian desa sejalan untuk mendukung gerakan pembangunan desa semesta (Gerakan Desa) sebagaimana arahan dalam Surat Keputusan Menko PMK No 2 Tahun 2015 tentang Tim Koordinasi Penguatan Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan menjadi kunci dalam meningkatkan kemandirian desa yang diharapkan dapat mendorong perkembangan Kabupaten Bandung secara keseluruhan. Terlebih lagi mengingat luas wilayah Kabupaten Bandung yang sebagian besar merupakan wilayah perdesaan. Dalam rangka pengembangan perdesaan tersebut, maka kebijakan diarahkan pada:

1. Pengembangan desa mandiri percontohan;
2. Peningkatan jumlah swadaya bagi pembangunan desa.

8. Meningkatkan Reformasi Birokrasi

Peran pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat memperoleh pelayanan yang baik dapat dilihat dari kinerja pelayanan publik. Semakin baik pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, maka akan semakin baik pula kehidupan masyarakat dari segi ketertiban administrasi, ketertiban bermasyarakat, keamanan dan kesejahteraan masyarakat di suatu

daerah. Pelayanan publik di Kabupaten Bandung masih perlu ditingkatkan melalui reformasi birokrasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Beberapa kebijakan terkait peningkatan pelayanan publik yang direncanakan, diantaranya:

1. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah;
2. Peningkatan jumlah aparatur yang memiliki jabatan fungsional AP/IP;
3. Penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah;
4. Penataan Kelembagaan;
5. Penyusunan data potensi wilayah kecamatan;
6. Optimalisasi penataan arsip daerah melalui peningkatan kapasitas SDM pengelola arsip daerah serta peningkatan kualitas infrastruktur kearsipan;
7. Peningkatan penyampaian informasi kinerja pemerintah melalui media diseminasi informasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominformasi ;
8. Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan;
9. Penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat;
10. Penyelenggaraan Layanan Jaringan Komunikasi Data di Lingkungan Pemkab Bandung;
11. Penyediaan Aplikasi Penunjang E-Government;
12. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
13. Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi;
14. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah;
15. Memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
16. Mengoptimalkan kesesuaian program yang direncanakan dengan yang dianggarkan;

9. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah

Penyelenggaraan tujuh misi yang telah dipaparkan sebelumnya tidak dapat dilepaskan dari aspek keamanan dan ketertiban wilayah. Keberhasilan pencapaian pembangunan Kabupaten Bandung tidak akan terwujud tanpa didukung oleh stabilitas keamanan wilayah. Beberapa kebijakan terkait misi meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah;
2. Meningkatkan unit satuan aparat keamanan dalam masyarakat;
3. Meningkatkan kesiagaan aparat keamanan dalam mengamankan wilayah;
4. Pencegahan tindak kriminal melalui sosialisasi kewaspadaan dini/ deteksi dini;
5. Meningkatkan jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik;
7. Meningkatkan kehidupan beragama dalam kehidupan masyarakat;
8. Meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.

TABEL 6.11
Matriks Keterkaitan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan berkualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan	1.1. Optimalnya ketersediaan fasilitas pendidikan formal baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.	1.1.1. Meningkatkan efisiensi sekolah	1.1.1.1. Efisiensi jumlah siswa per rombel dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal
				1.1.1.2. Optimalisasi daya tampung pada sarana pendidikan agar sesuai dengan standar pelayanan minimal
			1.1.2. Meningkatkan jumlah ruang kelas belajar	1.1.2.1. Peningkatan penyediaan sarana ruang kelas bagi siswa dengan kapasitas yang memadai
			1.1.3. Meningkatkan jumlah sekolah menengah atas kejuruan	1.1.3.1. Peningkatan pendirian sekolah menengah kejuruan berbasis vokasional sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja
			1.1.4. Menginisiasi pengembangan kawasan pendidikan terpadu	1.1.4.1. Pengembangan kawasan pendidikan terpadu
			1.1.5. Meningkatkan mutu pelayanan sarana pendidikan	1.1.5.1. Peningkatan sarana pendidikan berakreditasi A
		1.2. Meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah	1.2.1. Menyelenggarakan pendidikan usia dini	1.2.1.1. Perluasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang dikelola oleh masyarakat dan dunia usaha
			1.2.2. Meningkatkan angka partisipasi sekolah tingkat sekolah dasar dan sederajat	1.2.2.1. Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti dan pendidikan sekolah dasar serta
			1.2.3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah	1.2.3.1. Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti dan pendidikan sekolah menengah
			1.2.4. Meningkatkan jumlah siswa yang melanjutkan ke sekolah menengah atas	1.2.4.1. Pengurangan angka putus sekolah pada tingkat sekolah menengah pertama/ sederajat
				1.2.3.2. Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan sekolah menengah
			1.2.5. Mendorong peningkatan jumlah siswa SMK	1.2.5.1. Peningkatan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sekolah menengah kejuruan berbasis vokasional
			1.2.6. Menyelenggarakan pendidikan bagi siswa yang berkebutuhan khusus	1.2.5.2. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
		1.1. Meningkatnya jumlah guru profesional	1.1.1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan	1.1.1.1. Peningkatan pemberian beasiswa pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan
		1.2. Meningkatnya kompetensi penduduk melalui penguasaan budaya lokal, olah raga, dan pendidikan non formal	1.2.1. Meningkatkan pengenalan serta menanamkan budaya sunda sejak dini	1.2.1.1. Penyelenggaraan pendidikan bahasan dan budaya sunda pada setiap jenjang pendidikan (dasar dan menengah)
			1.2.2. Melestarikan kebudayaan daerah	1.2.2.1. Peningkatan jumlah kebudayaan daerah yang dilestarikan
			1.2.3. Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi, olah raga rekreasi, olah raga bagi disabilitas dan	1.2.3.1. Peningkatan atlet berprestasi di ajang PON dan PORDA

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			oleh raga aparatur sipil negara	
				1.2.3.2. Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana olah raga bagi kelompok disabilitas
				1.2.3.3. Peningkatan pembinaan kegiatan olahraga bagi aparatur
			1.2.4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olah raga	1.2.4.1. Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana olahraga pada fasilitas pendidikan di setiap kecamatan
			1.2.5. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan	1.2.5.1. Peningkatan jumlah organisasi kepemudaan (karang taruna) di setiap kecamatan
				1.2.5.2. Peningkatan peranan pemuda pelopor dalam berbagai bidang pembangunan
			1.2.6. Menyelenggarakan pendidikan non-formal	1.2.6.1. Perluasan pendidikan non formal bagi masyarakat yang belum melek huruf
				1.2.6.2. Peningkatan Penyelenggaraan pendidikan Paket A, B, C
		1.5. Meningkatnya minat baca masyarakat Kabupaten Bandung	1.5.1. Meningkatkan minat baca masyarakat	1.2.6.3. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan minat membaca
2	Meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan drajat kesehatan masyarakat	2.1. Optimalnya penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah	2.1.1. Meningkatkan efektivitas ketersediaan sarana kesehatan	2.1.1.1. Optimalisasi ketersediaan sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik) di setiap kecamatan
			2.1.2. Meningkatkan kualitas pelayanan pada sarana kesehatan	2.1.2.1. Penyelenggaraan informasi pelayanan kesehatan kepada publik
				2.1.2.2. Optimalisasi kualitas pelayanan kesehatan pada sarana-sarana kesehatan
				2.1.2.3. Pemberian stimulan bagi tenaga medis di daerah
			2.1.3. Mengoptimalkan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan	2.1.3.1. Pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan bagi masyarakat di setiap kecamatan
			2.1.4. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan perguruan tinggi dan dunia usaha dalam penyediaan atau peningkatan kualitas tenaga kesehatan	2.1.4.1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan yang terdistribusi diseluruh wilayah kabupaten
		2.2. Meningkatnya drajat kesehatan penduduk sejalan dengan upaya membangun keluarga berencana dan keluarga sejahtera	2.2.1. Menurunkan Angka Kesakitan	2.2.1.1. Peningkatan kualitas kesehatan siswa sekolah dasar
				2.2.1.2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan
			2.2.2. Meningkatkan Angka Harapan Hidup Penduduk	2.2.2.1. Peningkatan kualitas asupan gizi masyarakat
			2.2.3. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga prasejahtera	2.2.3.1. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan pasien yang masuk kriteria prasejahtera
			2.2.4. Mengendalikan kelahiran serta mengurangi persentase pernikahan usia dini	2.2.4.1. Peningkatan pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
			2.2.5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, remaja dan lansia	2.2.5.1. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, remaja, dan lansia di fasilitas- fasilitas kesehatan masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2.2.6. Meningkatkan pemberdayaan perempuan sebagai aktor kunci dalam pembangunan keluarga	2.2.6.1. Peningkatan peran fungsi wanitas dalam pembinaan keluarga
				2.2.6.2. Peningkatan emansipasi perempuan di sector pemerintahan
		2.3. Meningkatnya kesadaran penduduk untuk menerapkan perilaku hidup bersih	2.3.1. Meningkatkan promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sektor dan lintas program	2.3.1.1. Peningkatan penyebaran informasi/ kampanye tentang PHBS
				2.3.1.2. Penginisiasian desa siaga aktif
3	Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur dasar yang tahan terhadap bencana serta mewujudkan keserasian pembangunan dengan tata ruang wilayah	3.1. Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi (%)	3.1.1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan jalan	3.1.1.1. Peningkatan aksesibilitas seluruh wilayah Kabupaten Bandung
			3.1.2. Memperbaiki kondisi lalu lintas, mengurangi hambatan samping jalan dan meningkatkan tingkat keamanan lalu lintas	3.1.2.1. Pengendalian Daerah milik jalan dan ruang Milik jalan
				3.1.2.2. Penertiban kegiatan-kegiatan di luar lalu lintas yang dapat memicu kemacetan lalu lintas
				3.1.2.3. Peningkatan penyediaan sarana pengamanan lalu lintas
				3.1.2.4. Pengembangan dan penataan terhadap simpul-simpul transportasi
			3.1.3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana transportasi publik	3.1.3.1. Pengembangan Sistem Angkutan Publik Terpadu
				3.1.3.2. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pengecekan berkala mengenai kelaikan pengoperasian kendaraan umum
			3.1.4. Pengembangan Sistem Transportasi Umum Masal	3.1.4.1. Reaktivasi jalur kereta api eksisting sebagai upaya peningkatan layanan transportasi publik
				3.1.4.2. Pembebasan lahan Jalur Bus Rapid Transit (BRT)
			3.1.5. Menyusun data base dan rencana transportasi yang terintegrasi	3.1.5.1. Meningkatkan perencanaan sektoral bidang transportasi
		3.2. Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber air	3.2.1. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih	3.2.1.1. Meningkatkan ketersediaan air bersih yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bandung
			3.2.1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan irigasi	3.2.1.1. Peningkatan sistem pengelolaan irigasi partisipatif
			3.2.2. Meningkatkan ketersediaan air baku	3.2.2.1. Optimalisasi potensi dan pemanfaatan air baku
				3.2.2.2. Penyelelamatanmata air dan sumber daya air lainnya
		3.3. Meningkatnya penataan kawasan ibu kota Kabupaten Bandung	3.3.1. Meningkatkan penataan infrastruktur kawasan ibu kota Kabupaten Bandung	3.3.1.1. Pengembangan sistem jaringan jalan dan drainase Kawasan Perkotaan Soreang
				3.3.1.2. Penataan Kawasan Perkotaan Soreang

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.4. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	3.4.1. Meningkatkan kualitas permukiman penduduk	3.4.1.1. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
				3.4.1.2. Pengembangan Hunian Vertikal bagi (MBR) Masyarakat Berpenghasilan Rendah
			3.4.2. Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan/data dan informasi bidang keciptakaryaan	3.4.2.1. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan /data dan informasi bidang keciptakaryaan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan sektor Cipta Karya
		3.5. Optimalnya sistem telekomunikasi dan informatika yang terpadu melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi	3.5.1. Meningkatkan keterpaduan sistem informasi perhubungan	3.5.1.1. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi bidang perhubungan
			3.5.2. Meningkatkan ketersediaan informasi pemerintah kepada masyarakat	3.5.2.1. Peningkatan alternatif media komunikasi pemerintah terhadap publik
		3.6. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur listrik dan energi yang merata mencakup seluruh wilayah	3.6.1. Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan listrik	3.6.1.1. Peningkatan cakupan layanan jaringan listrik di setiap kecamatan
		3.7. Meningkatnya efektivitas perencanaan tata ruang	3.7.1. Meningkatkan kualitas produk perencanaan tata ruang	3.7.1.1. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang
			3.7.2. Meningkatkan keterpaduan perencanaan tata ruang antar wilayah	3.7.2.1. Intensifikasi kerjasama penyelenggaraan perencanaan tata ruang dengan kabupaten/kota yang berbatasan
		3.8. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan ruang wilayah	3.8.1. Mengurangi ketidaksesuaian rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang	3.8.1.1. Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang
			3.8.2. Meningkatkan sinergitas pemanfaatan ruang dalam lingkup internal	3.8.2.1. Intensifikasi penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan ruang dalam lingkup pemerintah
		3.9. Optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang	3.9.1. Meningkatkan kontrol terhadap pemanfaatan ruang	3.9.1.1. Peningkatan peraturan dan dokumen perencanaan yang mendukung terhadap upaya penertiban pengendalian pemanfaatan ruang
		3.10. Meningkatnya upaya pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi	3.10.1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sanitasi	3.10.1.1. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam menyediakan infrastruktur sanitasi lingkungan
				3.10.1.2. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam penyediaan sanitasi lingkungan
			1.10.2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman	1.10.2.1. Peningkatan kesadaran serta jumlah komunitas masyarakat yang bergerak dibidang pengelolaan lingkungan permukiman
		1.11. Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana	1.11.2. Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana	1.11.2.1. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan dampak bencana
		1.12. Meningkatnya upaya penanganan masyarakat yang tergenang banjir	1.12.2. Meningkatkan infrastruktur rawan banjir	1.12.2.1. Pemindahan (relokasi) penduduk dari kawasan rawan banjir
			1.12.3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	1.12.3.1. Pembangunan polder dan kolam retensi
				1.12.3.2. Pengelolaan Sistem Jaringan Drainase
4	Mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten	4.1. Berkurangnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	4.1.1. Meningkatkan upaya perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	4.1.1.1. Peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan (PMKS)
				4.1.1.2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan Masalah Kesejahteraan Sosial
		4.2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam sektor ketenagakerjaan	4.2.1. Meningkatkan kesempatan kerja	4.2.1.1. Peningkatan lapangan pekerjaan
			4.2.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja	4.2.2.1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
5	Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Memiliki Keunggulan Kompetitif	5.1. Tercapainya Kondisi Ketahanan Pangan	5.1.1. Meningkatkan ketahanan pangan	5.1.1.1. Pemantapan dan kemandirian pangan
		5.2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	5.2.1. Memperluas jangkauan pemasaran komoditas pertanian unggulan	5.2.1.1. Peningkatan pemasaran produk pertanian unggulan
		5.3. Meningkatnya kesejahteraan petani	5.3.1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelompok tani	5.3.1.1. Peningkatan keberpihakan kepada petani
			5.3.2. Meningkatkan intensitas penyuluhan petani	5.3.2.1. Peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian
		5.4. Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung	5.4.1. Meningkatkan jumlah objek pajak dan pengawasan pajak pada sektor perdagangan, hotel dan restoran	5.4.1.1. Penggalan potensi pajak yang belum terpungut pada sektor perdagangan, hotel dan restoran
			5.4.1. Mengembangkan aglomerasi perdagangan	5.4.1.1. Pengembangan sentra perdagangan dan pergudangan
				5.4.1.2. Pengembangan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat
				5.4.1.3. Penataan dan pemberdayaan PKL
			5.4.2. Meningkatkan Efisiensi Distribusi Dan Perdagangan Dalam Negeri Dan Luar Negeri	5.4.2.1. Meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan
				5.4.2.2. Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting
				5.4.2.3. Memperpendek jalur / rantai distribusi , khususnya produk-produk pertanian dengan Meningkatkan kerjasama dan kemitraan produsen dengan pedagang pasar
				5.4.2.4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri / P3 DN
				5.4.2.5. Peningkatan Perlindungan konsumen
			5.4.3. Meningkatkan Pangsa Pasar dan Memperluas Pemasaran Barang dan Jasa	5.4.4.1. Peningkatan branding, promosi dan pemasaran produk
				5.4.4.2. Pengembangan ukm ikm di wilayah pariwisata
				5.4.4.3. Pengembangan E-Commerce
				5.4.4.4. Peningkatan ekspor produk barang dan jasa
				5.4.4.5. Pengurangan Impor dengan Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
				5.4.4.6. Pembentukan dan Pengembangan Komite Promosi dan Pemasaran dalam wadah Bussiness

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Development Center
		5.5. Meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta produktivitas UMKM-IKM dan kualitas produk unggulan	5.5.1. Mengembangkan sentra dan kluster pengembangan UMKM unggulan berbasis ekonomi kreatif	5.5.1.1. Pengembangan mesin dan peralatan IKM pada sentra dan kluster UMKM
				5.5.1.2. Pengembangan jaringan dan kemitraan quadrohelix
				5.5.1.3. Pengembangan komunitas dan penguatan kelembagaan
				5.5.1.4. Peningkatan Pangsa Pasar dan perluasan pemasaran
			5.5.2. Meningkatkan akumulasi, aksesibilitas dan kemampuan permodalan	5.5.2.1. Peningkatan akses permodalan terutama melalui koperasi
				5.5.2.2. Penguatan permodalan koperasi melalui penyertaan modal
				5.5.2.3. Peningkatan keanggotaan koperasi dari sektor pertanian, perdagangan dan usaha kecil menengah
			5.5.3. Meningkatkan SDM, Sarana Prasarana dan Implementasi Teknologi Serta Pengembangan Sistem inovasi di bidang produksi dan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar internasional;	5.5.3.1. Peningkatan penggunaan teknologi tinggi serta teknologi pengolahan limbah dalam sektor industri
				5.5.3.2. Meningkatkan jumlah kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha dalam sektor industri teknologi tinggi dan ramah lingkungan
				5.5.3.3. Mendorong perbaikan teknologi proses produksi produk unggulan yang mampu bersaing di pasar internasional;
			5.5.4. Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM pelaku usaha / UKM / IKM	5.5.4.1. Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM pelaku usaha / UKM / IKM
			5.5.5. Meningkatkan mutu, sertifikasi maupun standarisasi mutu proses, produksi dan produk KUKM-IKM	5.5.5.1. Peningkatkan mutu pengelolaan (management), proses produksi UMKM dan IKM
				5.5.5.2. Peningkatkan jaminan mutu produk-produk UMKM dan IKM
				5.5.5.3. Pengembangan Desain dan Kemasan produk-produk UKM dan IKM
				5.5.5.4. Pengembangan Legailitas Hak Cipta
			5.5.6. Pengembangan ciri khas/ keunikan produk	5.5.6.1. Peningkatan pendampingan dan pembinaan dalam mengembangkan ciri khas / keunikan produk
			5.5.7. Mengembangkan Agroindustri	5.5.7.1. Pengembangan regulasi dan kebijakan yang menunjang pertumbuhan industri olahan berbasis masyarakat.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				5.5.7.2. Pengembangan litbang yang menunjang pertumbuhan industri olahan berbasis masyarakat.
		5.6. Meningkatnya destinasi wisata	5.6.1. Meningkatkan jumlah destinasi wisata	5.6.1.1. Pengembangan dan pemeliharaan objek wisata di Kabupaten Bandung
		5.7.		5.7.1.1. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan melalui pengembangan ekowisata
			5.7.2. Meningkatkan jumlah wisatawan	5.7.2.1. Peningkatan promosi pariwisata
			5.7.3. Meningkatkan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal di sekitar objek wisata	5.7.3.1. Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata serta pengembangan pariwisata berbasis masyarakat
			5.7.4. Meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata	5.7.4.1. Peningkatan penyediaan jaringan transportasi yang memadai menuju kawasan objek wisata
		5.8. Meningkatnya investasi	5.8.1. Meningkatkan investasi/ penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri	5.7.1.1. Peningkatan fasilitasi kerjasama bidang investasi oleh pemerintah
				5.7.1.2. Peningkatan branding daerah, promosi dan potensi investasi
			5.8.2. Menyederhanakan prosedur investasi	5.7.2.1. Peningkatan efektivitas prosedur perijinan investasi
6	Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan	6.1. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan	6.1.1. Mengembangkan sistem informasi lingkungan	6.1.1.1. Peningkatan dokumen terkait lingkungan yang dapat diakses oleh masyarakat
			6.1.2. Membina dan mengawasi usaha/ kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan	6.1.2.1. Peningkatan aktivitas pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
				6.1.2.2. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam menyediakan infrastruktur sanitasi lingkungan
				6.1.2.3. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam penyediaan sanitasi lingkungan
			6.1.3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam mengawasi pencemaran dan kerusakan lingkungan	6.1.3.1. Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup
		6.2. Terselenggaranya konservasi sumber daya alam	6.2.1. Mengendalikan kerusakan hutan dan lahan alam	6.2.1.1. Peningkatan jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang kehutanan
				6.2.1.2. Peningkatan pelestarian sumber daya hutan
			6.2.2. Meningkatkan fungsi kawasan lindung dan daerah hijau	6.2.2.1. Peningkatan upaya konservasi terhadap hutan rakyat
			6.2.3. Mengurangi tingkat kerusakan hutan	6.2.3.1. Peningkatan penanganan lahan kritis
			6.2.4. Memelihara dan meningkatkan ketersediaan air tanah	6.2.4.1. Pengembangan biopori sebagai upaya pengelolaan air tanah
			6.2.5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi sumber daya alam	6.2.5.1. Penyelenggaraan koordinasi konservasi sumber daya alam secara intensif antara pemerintah dan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				masyarakat
			6.2.6. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau	6.2.6.1. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
			6.2.7. Meningkatkan kualitas sarana prasarana TPU	6.2.7.1. Peningkatan pengelolaan dan pengaturan areal pemakaman umum dan bukan umum
			6.2.8. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam mengawasi pencemaran dan kerusakan lingkungan	6.2.8.1. Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup
		6.3. Terselenggaranya adaptasi perubahan iklim	6.3.1. Meningkatkan upaya adaptasi perubahan iklim di masyarakat	6.3.1.1. Penyusunan rencana aksi perubahan iklim daerah
7	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan wilayah	7.1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan	7.1.1. Membangun desa percontohan	7.1.1.1. Pengembangan desa mandiri percontohan
		7.2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	7.2.1. Meningkatkan swadaya masyarakat bagi pembangunan desa	7.2.1.1. Peningkatan jumlah swadaya bagi pembangunan desa
8	Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik	8.1. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah	8.1.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah	8.1.1.1. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah
			8.1.2. Melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah dan memberlakukan sistem reward and punishment	8.1.2.1. Peningkatan jumlah aparatur yang memiliki jabatan fungsional APIP
				8.1.2.2. Penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah
		8.2. Meningkatkan efisiensi kinerja dan fungsi kelembagaan	8.2.1. Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah	8.2.1.1. Penataan Kelembagaan
		8.3. Meningkatkan pemanfaatan potensi daerah	8.3.1. Inventarisasi potensi daerah	8.3.1.1. Penyusunan data potensi wilayah kecamatan
		8.4. Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik	8.4.1. Meningkatkan pengelolaan arsip daerah	8.4.1.1. Optimalisasi penataan arsip daerah melalui peningkatan kapasitas SDM pengelola arsip daerah serta peningkatan kualitas infrastruktur kearsipan
			8.4.2. Meningkatkan transparansi informasi dan pelayanan publik	8.4.2.1. Peningkatan penyampaian informasi kinerja pemerintah melalui media diseminasi informasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominfo
			8.4.3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	8.4.3.1. Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan
			8.4.4. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	8.4.4.1. Penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat
		8.5. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	8.5.1. Menyelenggarakan E-Government di lingkungan Pemkab Bandung	8.5.1.1. Penyelenggaraan Layanan Jaringan Komunikasi Data di Lingkungan Pemkab Bandung
				8.5.1.2. Penyediaan Aplikasi Penunjang E-Government
				8.5.1.3. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		8.6. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	8.6.1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	8.6.1.1. Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi
			8.6.2. Meningkatkan efektivitas manajemen aset daerah	8.6.2.1. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah
		8.7. Terwujudnya regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	8.7.1. Meningkatnya kepastian hukum terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan	8.7.1.1. Memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
		8.8. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	8.8.1. Optimalisasi akurasi dan ketepatan waktu perencanaan pembangunan	8.8.1.1. Mengoptimalkan kesesuaian program yang direncanakan dengan yang dianggarkan
9	menciptakan stabilitas keamanan wilayah dalam mendukung pembangunan wilayah	9.1. Meningkatnya kemandirian dan ketertiban masyarakat	9.1.1. Meminimalisasi terjadinya ancaman terhadap kemandirian dan ketertiban masyarakat	9.1.1.1. Meningkatkan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah
				9.1.1.2. Meningkatkan unit satuan aparaturnya keamanan dalam masyarakat
			9.1.2. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah	9.1.2.1. Meningkatkan kesiagaan aparaturnya keamanan dalam mengamankan wilayah
				9.1.2.2. Pencegahan tindak kriminal melalui sosialisasi kewaspadaan dini/ deteksi dini
		9.2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat	9.2.1. Meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan	9.2.1.1. Meningkatkan jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan.
			9.2.2. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat	9.2.2.1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik
			9.2.3. Meningkatkan implementasi norma- norma religius dalam kehidupan bermasyarakat	9.2.3.1. Meningkatkan kehidupan beragama dalam kehidupan masyarakat
				9.2.3.2. Meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

BAB 7

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai target indikator kinerja misi pada sasaran pembangunan Kabupaten Bandung lima tahun ke depan, maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program pembangunan daerah berdasarkan bidang urusan dan Perangkat Daerah penanggung jawabnya. Untuk mendapatkan program pembangunan yang inheren pada setiap strategi, maka dibutuhkan kebijakan umum. Indikator kinerja diperlukan untuk menggambarkan tingkat pencapaian secara langsung dari sasaran pembangunannya.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Bandung, untuk menjaga alur keterkaitan dengan misi yang telah dipaparkan pada bab V, serta dalam rangka mengikuti arahan kemenpan, pada Tabel 5.1 berikut akan dipaparkan keterkaitan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung beserta indikator tujuan dan sasaran.

TABEL 7.1
INDIKATOR TUJUAN

Misi	Tujuan	Indikator	Capaian Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1 "Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan"	Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan berkualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan	Indeks Pendidikan	86,29	88,19
Misi 2: "Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan"	Meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan drajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	76,72	78,78
Misi 3: "Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan"	Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur dasar yang tahan terhadap bencana serta mewujudkan keserasian pembangunan dengan tata ruang wilayah	Meningkatnya LPE sektor konstruksi dan bangunan pada PDRB (%)		
Misi 4: "Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat"	Mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung	Berkurangnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		
Misi 5: "Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Memiliki Keunggulan Kompetitif"	Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rp 672.548.761.361,-	Rp 2.022.438.056.758,-
Misi 6: "Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup"	Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan	Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara (%)	Pengendalian Pencemaran Air: 54 % Pengendalian Pencemaran Udara: 87 % Pengendalian Pengelolaan Limbah B3: 43 %	Pengendalian Pencemaran Air: 57 % Pengendalian Pencemaran Udara: 100 % Pengendalian Pengelolaan Limbah B3: 45,69 %



Misi	Tujuan	Indikator	Capaian Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pengendalian Pencemaran Lingkungan: 61,3 %	Pengendalian Pencemaran Lingkungan: 71,86
Misi 7: "Meningkatkan kemandirian Desa"	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan wilayah	Jumlah Desa Mandiri		
Misi 8: "Meningkatkan reformasi birokrasi"	Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,23 (Tahun 2014)	78,77
Misi 9: "Meningkatkan keamanan dan ketertiban Wilayah"	Meningkatkan stabilitas keamanan yang kondusif bagi pembangunan wilayah	Meningkatnya persentase penanganan aksi demo (%)		

Sumber: Hasil analisis, 2016

Sebagai bentuk mewujudkan perencanaan yang implementatif, sasaran pembangunan Kabupaten Bandung dijabarkan ke dalam strategi dan arah kebijakan. Strategi dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Baik strategi maupun arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien yang terangkum dalam kebijakan umum daerah.

Perumusan kebijakan umum bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung, dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Secara rinci, kebijakan umum dan program pembangunan daerah untuk setiap misi pengembangan dipaparkan sebagai berikut.

1. Misi 1: "Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan"

Tujuan dari penetapan misi ini yaitu untuk meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan berkualitas serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Penjabaran program pembangunan daerah terkait misi meningkatkan kualitas dan cakupan cakupan layanan pendidikan ditampilkan pada Table 7.2 sebagai berikut.

TABEL 7.2
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH TERKAIT MISI 1

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Optimalnya ketersediaan fasilitas pendidikan formal baik dari	Meningkatkan efisiensi sekolah	Efisiensi jumlah siswa per rombel dengan mengacu pada Standar	Persentase ruang kelas baik: a. Tingkat SD/MI/ Sederajat b. Tingkat SMP/	71,37 % 84,59 %	77,40 % 85,45 %	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Pendidikan	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	segi kuantitas maupun dari segi kualitas		Pelayanan Minimal	MTs/ Sederajat				Pendidikan	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
			Optimalisasi daya tampung pada sarana pendidikan agar sesuai dengan standar pelayanan minimal						Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
		Meningkatkan jumlah ruang kelas belajar	Peningkatan penyediaan sarana ruang kelas bagi siswa dengan kapasitas yang memadai						Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
			Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan						
		Meningkatkan jumlah sekolah menengah atas kejuruan	Peningkatan pendirian sekolah menengah kejuruan berbasis vokasional sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja						Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
			Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan						
		Meningkatkan mutu pelayanan sarana pendidikan	Pengembangan kawasan pendidikan terpadu						Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
									Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan									
	Meningkatkan mutu pelayanan sarana pendidikan	Peningkatan sarana pendidikan berakreditasi A	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan						
		Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan							
2	Meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah	Menyelenggarakan pendidikan usia dini	Perluasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang dikelola oleh masyarakat dan dunia usaha	APM SD/ MI/ sederajat APM SMP/ MTs/ sederajat APM SMA/ MA/ sederajat APK SD/ MI/	94,67 82,84 42,16 105,38	94,73 84,59 50,01 105,43	Program pendidikan anak usia dini	Pendidikan	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Capaian 2015	Target 2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Meningkatkan angka partisipasi sekolah tingkat sekolah dasar dan sederajat	Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti dan pendidikan sekolah dasar	sederajat APK SMP/ MTs/ sederajat APK SMA/ MA/ sederajat	97,70	97,98	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Pendidikan	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan	
		Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah	Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti dan pendidikan sekolah menengah		56,65	59,68			Program pendidikan menengah	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
		Meningkatkan jumlah siswa yang melanjutkan ke sekolah menengah atas	Pengurangan angka putus sekolah pada tingkat sekolah menengah pertama/ sederajat		Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Pendidikan			Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan	
			Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan sekolah menengah							Program pendidikan menengah
		Mendorong peningkatan jumlah siswa SMK	Peningkatan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sekolah menengah berbasis kejuruan berbasis vokasional		Program pendidikan menengah	Pendidikan			Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan	
		Menyelenggarakan pendidikan bagi siswa yang berkebutuhan khusus	Peningkatan penyediaan sarana pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus.		Program pendidikan luar biasa	Pendidikan			Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan	
3	Meningkatnya jumlah guru profesional	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan	Peningkatan pemberian beasiswa pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan	Persentase tingkat pendidikan guru (berkualifikasi S1/DIV ke atas): a. Tingkat SD/ MI/ Sederajat b. Tingkat SMP/MTs/ Sederajat c. Tingkat SMA/MA/SMK/ Sederajat	74,29 81,89 79,56	90 90 90	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan	



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Capaian 2015	Target 2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	Meningkatnya kompetensi penduduk melalui penguasaan budaya lokal, olah raga, dan pendidikan non formal	Meningkatkan pengenalan serta menanamkan budaya sunda sejak dini	Penyelenggaraan pendidikan bahasa dan budaya sunda pada setiap jenjang pendidikan (dasar dan menengah)	Jumlah Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Unit Sarana)	37 Unit	40 Unit	Program pengelolaan keragaman budaya	Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan	
		Melestarikan kebudayaan daerah	Peningkatan jumlah kebudayaan daerah yang dilestarikan				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan
							Program Pengelolaan Keragaman Budaya			Kebudayaan
		Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi olah raga rekreasi, olah raga bagi disabilitas dan olah raga aparat sipil negara	Peningkatan atlet berprestasi di ajang PON dan PORDA	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat Provinsi (Orang)	725 Orang	754 Orang	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga	
							Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga		Kepemudaan dan Olahraga	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga
							Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga			Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Peningkatan pembinaan kegiatan olahraga bagi aparat	Peningkatan jumlah organisasi kepemudaan (karang taruna) di setiap kecamatan	Peningkatan peranan pemuda pelopor dalam berbagai bidang pembangunan	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga	
							Program peningkatan peran serta kepemudaan		Kepemudaan dan Olahraga	
							Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			Kepemudaan dan Olahraga



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
					Capaian 2015	Target 2020														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
		Menyelenggarakan pendidikan non-formal	Perluasan pendidikan non formal bagi masyarakat yang belum melek huruf	APK Paket A APK Paket B APK Paket C	0,58 3,74 2,17	0,62 3,85 2,58	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Kepemudaan dan Olahraga	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga											
							Program pendidikan non formal			Pendidikan	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan									
							Program pendidikan non formal					Pendidikan	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan							
							Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan							Pendidikan	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan					
5	Meningkatnya budaya baca masyarakat Kabupaten Bandung	Meningkatkan budaya baca masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan budaya membaca																	

Sumber: Hasil Analisis, 2016

2. Misi 2: "Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan"

Tujuan dari penetapan misi ini yaitu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan drajat kesehatan masyarakat. Penjabaran program pembangunan daerah terkait misi mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan ini ditampilkan pada Table 7.3 sebagai berikut.

TABEL 7.3
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH TERKAIT MISI 2

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Optimalnya penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah	Meningkatkan efektivitas ketersediaan sarana kesehatan	Optimalisasi ketersediaan sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik) di setiap kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Kesehatan	75,90 %	77,20 %	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
							Program pengadaan, peningkatan dan prasarana rumah		



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Capaian 2015	Target 2020									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
		Meningkatkan kualitas pelayanan pada sarana kesehatan	Penyelenggaraan informasi pelayanan kesehatan kepada public				sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru/ rumah sakit mata	Kesehatan	kesehatan						
							Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan						
							Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan						
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan												
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan												
Mengoptimalkan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan	Pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan bagi masyarakat di setiap kecamatan	Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan perguruan tinggi dan duna usaha dalam penyediaan atau peningkatan kualitas tenaga kesehatan	Peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan yang terdistribusi di seluruh wilayah kabupaten				Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan						
Meningkatnya derajat kesehatan penduduk sejalan dengan upaya membangun keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Menurunkan Angka Kesakitan									Peningkatan pemantauan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular secara periodik	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan		
		Meningkatkan Angka Harapan Hidup Penduduk	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat											Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
										Program Upaya Kesehatan Masyarakat				Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				AHH AKB	71,03* 33,64	72,26 33,50	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		
							Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		
							Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		
							Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
		Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga prasejahtera	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang masuk kriteria prasejahtera	Cakupan pasangan usia subur peserta KB Aktif	70 %*	90%	Program Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Mengendalikan kelahiran serta mengurangi persentase pernikahan usia dini	Peningkatan pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera				Program Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Program kesehatan reproduksi remaja	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Program kesehatan reproduksi remaja	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Berencana
		Meningkatkan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penyakit menular seksual	Peningkatan penanggulangan narkoba dan penyakit menular seksual				Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV/Aids	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatkan akses pelayanan bagi ibu, remaja, dan lansia	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, remaja, dan lansia di fasilitas-fasilitas kesehatan masyarakat				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesehatan
							Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesehatan
							Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesehatan
							Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesehatan
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan sebagai aktor kunci dalam pembangunan keluarga	Peningkatan peran fungsi wanita dalam pembinaan keluarga				Program penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Peningkatan emansipasi perempuan di sektor-sektor pemerintahan				Program peningkatan peran serta dan kesejahteraan jender dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan (Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Meningkatnya kesadaran penduduk untuk menerapkan perilaku hidup bersih	Meningkatkan promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sektor dan lintas program	Peningkatan Penyebarluasan Informasi/ Kampanye Tentang PHBS	Persentase PHBS pada rumah tangga	39,9 %	50%	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
		Meningkatkan kegiatan pembinaan masyarakat mengenai tentang PHBS	Peningkatan promosi untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	Persentase penyelenggaraan promosi kesehatan	80 %	100 %	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan
			Penginisiasian desa siaga aktif				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan

Hasil Analisis, 2016

3. Misi 3: "Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan"

Tujuan dari penetapan misi ini yaitu untuk meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur dasar yang tahan terhadap bencana serta mewujudkan keserasian pembangunan dengan tata ruang wilayah. Penjabaran program pembangunan daerah terkait misi mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan tersebut ditampilkan pada Table 7.4 sebagai berikut.

TABEL 7.4
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH TERKAIT MISI 3

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya aksesibilitas,	Meningkatkan kualitas dan	Peningkatan aksesibilitas	Rata-rata persentase	82.79 %	92 %	Program pembangunan jalan	Pekerjaan Umum dan	Perangkat Daerah yang



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Capaian 2015	Target 2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi (%)	kapasitas jaringan jalan	seluruh wilayah Kabupaten Bandung	jalan mantap (baik dan sedang)			dan jembatan	Penataan Ruang	menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
							Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
							Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
							Program pembangunan saluran drainase/ gorong- gorong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
							Program pembangunan turap/ talud/ bronjong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
							Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
							Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Perhubungan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan	
		Program inspeksi jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan						
		Memperbaiki kondisi lalu lintas, mengurangi hambatan samping jalan dan meningkatkan tingkat keamanan lalu lintas	Pengendalian Daerah milik jalan dan ruang Milik jalan	Level of Service (LOS)	LOS D (2,83)	LOS C (4)				
		Penertiban kegiatan-kegiatan di luar lalu lintas yang dapat memicu kemacetan lalu								



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			lintas						Ruang
			Peningkatan penyediaan sarana pengamanan lalu lintas				Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Perhubungan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pengembangan dan penataan terhadap simpul-simpul transportasi				Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Perhubungan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan
			Pengembangan Sistem Angkutan Publik Terpadu				Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Perhubungan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana transportasi publik	Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pengecekan berkala mengenai kelaikan pengoperasian kendaraan umum				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan
			Reaktivasi jalur kereta api eksisting sebagai upaya peningkatan layanan transportasi public				Program peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan
		Pengembangan Sistem Transportasi Umum Masal	Pembebasan lahan Jalur Bus Rapid Transit (BRT)				Program peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan
							Program peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan
							Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Perhubungan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan
							Program peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan
							Program peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Capaian 2015	Target 2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Menyusun data base dan rencana transportasi yang terintegrasi	Meningkatkan perencanaan sektoral bidang transportasi				Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Perhubungan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan	
							Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
							Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber air	Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih	Meningkatkan ketersediaan air bersih yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bandung	Akses aman terhadap air bersih	95.01%	100 %	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan irigasi				Peningkatan sistem pengelolaan irigasi partisipatif	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatkan ketersediaan air baku				Optimalisasi potensi dan pemanfaatan air baku	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Penyelelaman mata air dan sumber daya air lainnya	Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Meningkatnya penataan kawasan ibu kota Kabupaten	Meningkatkan penataan infrastruktur kawasan ibu kota	Pengembangan sistem jaringan jalan dan drainase Kawasan Perkotaan	Persentase terbangunya sistem jaringan jalan dan drainase	0 %	100 %	Program pembangunan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan	



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bandung	Kabupaten Bandung	Soreang	Kawasan Perkotaan Soreang (Koridor Jalan Tol Soroja)					Umum dan Penataan Ruang
			Penataan Kawasan Perkotaan Soreang				Program pembangunan jaringan drainase utama	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Meningkatkan kualitas permukiman penduduk	Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase luas kawasan kumuh (%)	9,38 %	0 %	Program pengembangan perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Pengembangan Hunian Vertikal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah				Program Pengembangan Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan/data dan informasi bidang keciptakarya sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan sektor Cipta Karya	Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan /data dan informasi bidang keciptakarya sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan sektor Cipta Karya	Persentase Dokumen Perencanaan/Data dan Informasi Bidang Keciptakarya			Pengembangan Data / Informasi	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Optimalnya sistem telekomunikasi dan informatika yang terpadu melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi	Meningkatkan keterpaduan sistem informasi perhubungan	Pengembangan infrastruktur telekomunikasi bidang perhubungan	Persentase terbangunya jaringan fiber optik	0 %	100 %	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa	Komunikasi dan Informasi	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Komunikasi dan Informasi
		Meningkatkan ketersediaan informasi pemerintah kepada masyarakat	Peningkatan alternatif media komunikasi pemerintah terhadap publik				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa	Komunikasi dan Informasi	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Komunikasi dan Informasi



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur listrik dan energi yang merata mencakup seluruh wilayah	Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan listrik	Peningkatan cakupan layanan jaringan listrik di setiap kecamatan				Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
7	Meningkatnya efektivitas perencanaan tata ruang	Meningkatkan kualitas produk perencanaan tata ruang	Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang	Persentase tersedianya dokumen penataan ruang	35,69%	60 %	Program perencanaan tata ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program perencanaan tata ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program pengembangan data/informasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatkan keterpaduan perencanaan tata ruang antar wilayah	Intensifikasi kerjasama penyelenggaraan perencanaan tata ruang dengan kabupaten/kota yang berbatasan	Persentase keterpaduan antar daerah yang berbatasan mengenai kerjasama perencanaan penyediaan sarana, prasarana dan pelayanan publik	20 %	100 %	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Urusaan Pemerintahan Umum	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusaan Pemerintahan Umum
8	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan ruang	Mengurangi ketidaksesuaian rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang	Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang	Persentase luas pemanfaatan lahan budidaya non pertanian yang berijin sesuai rencana	55 %	58 %	Program pengembangan data/informasi	Urusaan Pemerintahan Umum	Perangkat Daerah yang Menangani Urusaan Pemerintahan Umum
							Program	Pekerjaan	Perangkat



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				tata ruang			pemanfaatan ruang	Umum dan Penataan Ruang	Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatkan sinergitas pemanfaatan ruang dalam lingkup internal	Intensifikasi penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan ruang dalam lingkup pemerintah	Program pemanfaatan ruang			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
9	Optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatkan kontrol terhadap pemanfaatan ruang	Peningkatan peraturan dan dokumen perencanaan yang mendukung terhadap upaya penertiban pengendalian pemanfaatan ruang				Program pengendalian pemanfaatan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Meningkatnya upaya pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi	Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sanitasi	Peningkatan kapasitas pemerintah dalam menyediakan infrastruktur sanitasi lingkungan	Akses Terhadap Sanitasi	59 %	100 %	Program peningkatan pengendalian polusi	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Lingkungan Hidup
							Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Lingkungan Hidup
							Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
							Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
							Program lingkungan sehat perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman	Peningkatan kesadaran serta jumlah komunitas masyarakat yang bergerak dibidang pengelolaan lingkungan permukiman				Program pemberdayaan komunitas perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana	Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana	Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan dampak bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	75%	100%	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
							Program pengembangan data/ informasi	Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penunjang Pemerintahan
							Program perencanaan pengembangan kota- kota menengah dan besar	Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penunjang Pemerintahan
							Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penunjang Pemerintahan
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Capaian 2015	Target 2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/ sosial	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
							Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	
12	Meningkatnya upaya penanganan masyarakat yang tergenang banjir	Meningkatkan infrastruktur rawan banjir	Pemindahan (relokasi) penduduk dari kawasan rawan banjir	Tertanganinya wilayah berpotensi banjir seluas 14.937,9 m2	14.937,9 m2		Program pengembangan perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	Pembangunan polder dan kolam retensi	Persentase polder/kolam retensi		0 %	100 %	Program Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pengelolaan Sistem Jaringan Drainase		Persentase penanganan drainase skala kawasan dan skala kota	6,7 %	15 %	Program pengendalian banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber air lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								Program pengendalian banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber: Hasil Analisis, 2016



4. Misi 4: "Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat"

Penetapan misi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat memiliki kaitan erat dengan upaya untuk mencapai tujuan menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang berdayasaing. Untuk mencapai penjabaran program pembangunan daerah terkait misi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat ini ditampilkan pada Table 7.5 sebagai berikut.

TABEL 7.5
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH TERKAIT MISI 4

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berkurangnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Meningkatkan upaya perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	Peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rata- Rata PMKS yang ditangani dan mampu berinteraksi sosial (%)	50,34 %	52,84 %	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				Sosial	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial	
			Program pembinaan anak terlantar				Sosial	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial	
			Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo				Sosial	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial	
			Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma				Sosial	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial	
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				Sosial	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial	
			Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)				Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah				Sosial	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial	
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan Masalah Kesejahteraan							



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Sosial				Kesejahteraan Sosial (PMKS)		
							Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Sosial	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial
2	Meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam sektor ketenagakerjaan	Meningkatkan kesempatan kerja	Peningkatan lapangan pekerjaan	TPT	8,48	8,42	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Ketenagakerjaan
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja				Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (Disnaker)	Tenaga Kerja	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Ketenagakerjaan
							Program peningkatan kesempatan kerja	Tenaga Kerja	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Ketenagakerjaan
							Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Ketenagakerjaan
							Program Transmigrasi Regional	Tenaga Kerja	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Ketenagakerjaan

Sumber: Hasil Analisis, 2016

5. Misi 5: "Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif"

Tujuan dari penetapan misi ini yaitu untuk meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah. Penjabaran program pembangunan daerah terkait misi menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif tersebut ditampilkan pada Table 7.6 sebagai berikut.



TABEL 7.6
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH TERKAIT MISI 5

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Capaian 2015	Target 2020							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung	Meningkatkan jumlah objek pajak dan pengawasan pajak pada sektor perdagangan, hotel dan restoran	Penggalian potensi pajak yang belum terpungut pada sektor perdagangan, hotel dan restoran.	LPE Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (%)	8,99	9,79	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penunjang Pemerintahan				
			Pengembangan sentra perdagangan dan pergudangan				Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			Perdagangan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perdagangan		
			Pengembangan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat				Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri					Perdagangan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perdagangan
			Penataan dan pemberdayaan PKL				Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan						
2	Meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta produktivitas UMKM-IKM dan kualitas produk unggulan	Mengembangkan sentra dan kluster pengembangan KUMKM-IKM unggulan berbasis ekonomi kreatif	Pengembangan mesin dan peralatan IKM pada sentra dan kluster KUMKM	Nilai omzet UMKM-IKM (Rp Trilyun)	3.09 (Tahun 2014)	6.54	Program penataan struktur industri	Perindustrian	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perindustrian				
							Program pengembangan sentra-sentra industri potensial			Perindustrian	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perindustrian		
							Program pengembangan industri kecil dan menengah					Perindustrian	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perindustrian
							Program pengembangan industri kecil dan menengah						



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Usuran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
							Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pengembangan jaringan dan kemitraan quadrohelix				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pengembangan komunitas dan penguatan kelembagaan				Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah		
			Peningkatan Pangsa Pasar dan perluasan pemasaran				Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Perdagangan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perdagangan
		Meningkatkan akumulasi, aksesibilitas dan kemampuan permodalan KUMKM- IKM	Peningkatan akses permodalan, terutama melalui koperasi				Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah		
			Penguatan permodalan koperasi melalui penyertaan modal				Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi dan Perluasan Akses Permodalan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Peningkatan keanggotaan koperasi dari sektor pertanian, perdagangan dan usaha kecil menengah				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		
3	Tercapainya Kondisi Ketahanan Pangan	Meningkatkan ketahanan pangan	Pemantapan dan kemandirian pangan	Persentase ketersediaan pangan utama (Skor PPH Ketersediaan)	81,30	92.7	Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	Ketahanan Pangan	Perangkat Daerah yang menangani urusan ketahanan pangan



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
							Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	Pertanian	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
							Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pertanian	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
							Program peningkatan produksi hasil peternakan	Peternakan	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
							Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pertanian	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
							Dst. Program penjaminan kualitas produk peternakan	Pertanian	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
							Program pengembangan budidaya perikanan	Kelautan dan Perikanan	Perangkat Daerah yang menangani urusan kelautan dan perikanan
4	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	Memperluas jangkauan pemasaran komoditas pertanian unggulan	Peningkatan pemasaran produk pertanian unggulan	Jumlah komoditas pertanian yang memiliki daya saing berskala nasional	4 jenis	9 jenis	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
							Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Pertanian	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
							Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Kelautan dan Perikanan	Perangkat Daerah yang menangani urusan kelautan dan perikanan
5	Meningkatnya kesejahteraan petani	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelompok tani	Peningkatan keberpihakan kepada petani	Jumlah kelompok tani yang berpredikat utama	220 kelompok tani	288 kelompok tani	Program peningkatan kesejahteraan petani	Pertanian	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatkan intensitas penyuluhan petani	Peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian				Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Pertanian	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
6	Meningkatnya destinasi wisata	Meningkatkan jumlah destinasi wisata	Pengembangan dan pemeliharaan objek wisata di Kabupaten Bandung	Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan	55	64	Program pengembangan destinasi pariwisata	Pariwisata	Perangkat Daerah yang menangani urusan pariwisata
			Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan melalui pengembangan ekowisata						
		Meningkatkan jumlah wisatawan	Peningkatan promosi pariwisata				Program Pengembangan Pemasaran pariwisata		
		Meningkatkan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal di sekitar objek wisata	Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata serta pengembangan pariwisata berbasis masyarakat				Program pengembangan kemitraan		
		Meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata	Peningkatan penyediaan jaringan transportasi yang memadai menuju kawasan objek wisata				Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam		
							Program pembangunan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Meningkatnya investasi	Meningkatkan investasi/ penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri	Peningkatan fasilitas kerjasama bidang investasi oleh pemerintah	Nilai Investasi (Rp Trilyun)	6,8 (Tahun 2016)	7,8	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Penanaman Modal	Perangkat Daerah yang menangani Penanaman Modal
			Peningkatan branding daerah, promosi dan				Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi		



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Capaian 2015	Target 2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			potensi investasi				Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah			
		Menyederhanakan akan prosedur investasi	Peningkatan efektivitas prosedur perijinan investasi				Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi			
								Program Peningkatan pelayanan publik		

Sumber: Hasil Analisis, 2016

6. Misi 6: "Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup"

Tujuan dari penetapan misi ini yaitu untuk menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan. Penjabaran program pembangunan daerah terkait misi meningkatkan kelestarian lingkungan hidup ini ditampilkan pada Table 7.7 sebagai berikut.

TABEL 7.7
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH TERKAIT MISI 6

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan	Mengembangkan sistem informasi lingkungan	Peningkatan dokumen terkait lingkungan yang dapat diakses oleh masyarakat				Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup
			Peningkatan aktivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Air	54 %*	56,75 %	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup
			Membina dan mengawasi usaha/ kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan	Pengendalian Pencemaran Udara	87 %*	91,44 %			
				Pengendalian Pengelolaan Limah B3	43 %*	50%			
			Peningkatan kapasitas pemerintah dalam menyediakan infrastruktur	Persentase volume sampah yang dapat dikelola pemerintah	19,06 %	34 %	Program peningkatan pengendalian polusi	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			sanitasi lingkungan					Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup
								Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup
								Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup
								Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup
								Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup
		Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam mengawasi pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan kemampuan masyarakat dalam penyediaan sanitasi lingkungan					Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup
			Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup					Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup
								Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup
								Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup
2	Terselenggaranya konservasi sumber daya alam	Mengendalikan kerusakan hutan dan lahan	Peningkatan jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang kehutanan	Persentase luas lahan kritis yang tertanami (%) Luas Persemaian Desa/Kebun Rakyat Meningkatnya Persentase Ruang Terbuka Hijau (%)	66,37 % 0,25 Ha 0,19 %	76,97 % 2,25 Ha 0,24 %		Kehutanan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kehutanan
			Peningkatan pelestarian sumber daya hutan					Kehutanan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kehutanan
			Meningkatkan fungsi kawasan lindung dan daerah hijau					Kehutanan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kehutanan
			Mengurangi tingkat kerusakan hutan					Kehutanan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kehutanan



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Memelihara dan meningkatkan ketersediaan air tanah	Pengembangan biopori sebagai upaya konservasi air tanah				Program Pengelolaan Bidang Air Tanah	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi sumber daya alam	Penyelenggaraan koordinasi konservasi sumber daya alam secara intensif antara pemerintah dan masyarakat				Program perlindungan dan konservasi sumber daya	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
		Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau	Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola pemerintah, masyarakat dan dunia usaha				Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Perumahan Rakyat	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Perumahan Rakyat
		Meningkatkan kualitas sarana prasarana TPU	Peningkatan pengelolaan dan pengaturan areal pemakaman umum dan bukan umum				Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Perumahan Rakyat	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Perumahan Rakyat
		Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam mengawasi pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan pengelolaan dan pengaturan areal pemakaman umum dan bukan umum				Program pengelolaan areal pemakaman	Perumahan Rakyat	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Perumahan Rakyat
							Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Perumahan Rakyat	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Prumahan Rakyat
							Pengembangan Perumahan	Perumahan Rakyat	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Perumahan Rakyat
							Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Lingkungan Hidup



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Terselenggaranya adaptasi perubahan iklim	Meningkatkan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim di Masyarakat	Penyusunan Rencana Aksi Perubahan Daerah	Jumlah kecamatan/ desa yang memiliki dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Adaptasi Perubahan Iklim (API)			Program Adaptasi Perubahan Iklim (dst)	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Lingkungan Hidup

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2016

7. Misi 7: "Meningkatkan Kemandirian Desa"

Tujuan dari penetapan misi ini yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan wilayah. Penjabaran program pembangunan daerah terkait misi meningkatkan kemandirian desa ini ditampilkan pada Table 7.8 sebagai berikut.

TABEL 7.8
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH TERKAIT MISI 7

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan	Membangun desa percontohan	Pengembangan desa mandiri percontohan	Jumlah desa swasembada/ cepat berkembang	4	10	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
				Jumlah desa swakarya/ desa berkembang	18	25	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
							Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Meningkatkan swadaya masyarakat bagi pembangunan desa	Peningkatan jumlah swadaya bagi pembangunan desa	Jumlah swadaya dalam pembangunan desa	20%	70%	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA, 2016

**8. Misi 8: "Meningkatkan Reformasi Birokrasi"**

Tujuan dari penetapan misi ini yaitu untuk meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik. Penjabaran program pembangunan daerah terkait misi meningkatkan reformasi birokrasi ini ditampilkan pada Table 7.9 sebagai berikut.

TABEL 7.9
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH TERKAIT MISI 8

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah	Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur (%)	20%	23.19%	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Dst, Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani urusan penunjang pemerintahan
							Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Dst, Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani urusan penunjang pemerintahan
							Program peningkatan profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Dst, Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani urusan penunjang pemerintahan
		Melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah dan memberlakukan sistem reward and punishment	Peningkatan jumlah aparatur yang memiliki jabatan fungsional APIP				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Dst, Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani urusan penunjang pemerintahan
							Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Dst, Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani urusan penunjang pemerintahan
							Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Dst, Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani urusan penunjang pemerintahan
2	Meningkatkan efisiensi kinerja dan fungsi kelembagaan	Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah	Penataan Kelembagaan	Jumlah Perangkat Daerah yang telah ditata secara kelembagaan	72 PD	62 PD	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Dst, Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani urusan penunjang pemerintahan



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Meningkatkan pemanfaatan potensi daerah	Inventarisasi potensi daerah	Penyusunan data potensi wilayah kecamatan	Jumlah kecamatan yang telah memiliki roadmap kewilayahan	0 Kec	31 Kec	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Dst, Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani urusan penunjang pemerintahan
4	Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik	Meningkatkan pengelolaan arsip daerah	Optimalisasi penataan arsip daerah melalui peningkatan kapasitas SDM pengelola arsip daerah serta peningkatan kualitas infrastruktur kearsipan	Jumlah lembaga yang sudah melaksanakan penataan kearsipan	6 Aplikasi	9 Aplikasi	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Kearsipan	Perangkat Daerah yang menangani urusan kearsipan
		Meningkatkan transparansi informasi dan pelayanan publik	Peningkatan penyampaian informasi kinerja pemerintah melalui media diseminasi informasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominfo	Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh Perangkat Daerah			Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Kearsipan	Perangkat Daerah yang menangani urusan kearsipan
							Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	Kearsipan	Perangkat Daerah yang menangani urusan kearsipan
							Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana kearsipan	Kearsipan	Perangkat Daerah yang menangani urusan kearsipan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan	Perangkat Daerah	6 Aplikasi	9 Aplikasi	Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa	Komunikasi dan Informatika	Perangkat Daerah yang menangani urusan kearsipan		
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat				Program penataan administrasi kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perangkat Daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		
							Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Dst, Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani urusan penunjang pemerintahan



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Menyelenggarakan E-Government di lingkungan Pemkab Bandung	Penyelenggaraan Layanan Jaringan Komunikasi Data di Lingkungan Pemkab Bandung	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	0 Aplikasi	20 Aplikasi	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Komunikasi dan Informatika	S Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika
			Penyediaan Aplikasi Penunjang E-Government				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Komunikasi dan Informatika	Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)				Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Komunikasi dan Informatika	Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika
6	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi	Status Laporan	WDP	WTP	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Dst, Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani urusan penunjang pemerintahan
		Meningkatkan efektivitas manajemen aset daerah	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah				Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Dst, Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani urusan penunjang pemerintahan
7	Terwujudnya regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kepastian hukum terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan	Memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah				Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Dst, Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani urusan penunjang pemerintahan
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Dst, Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani urusan penunjang pemerintahan
							Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Dst, Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani urusan penunjang pemerintahan
8	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi akurasi dan ketepatan waktu perencanaan pembangunan	Mengoptimalkan kesesuaian program yang direncanakan dengan yang	Persentase kesesuaian program pada dokumen	94%	100%	Program pengembangan data/informasi	Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penunjang



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dianggarkan	perencanaan terhadap program pada dokumen anggaran					Pemerintahan
							Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	Statistik	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Statistik
							Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penunjang Pemerintahan
							Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penunjang Pemerintahan
							Program perencanaan pembangunan daerah	Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penunjang Pemerintahan
							Program perencanaan sosial dan budaya	Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penunjang Pemerintahan
							Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penunjang Pemerintahan
							Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penunjang Pemerintahan
							Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Urusan Penunjang Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penunjang Pemerintahan

Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA, 2016



9. Misi 9: "Meningkatkan keamanan dan ketertiban Wilayah"

Penetapan misi meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah sejalan dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan wilayah dalam mendukung pembangunan wilayah. Untuk mencapai penjabaran program pembangunan daerah terkait misi meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah ini ditampilkan pada Table 7.10 sebagai berikut.

TABEL 7.10
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH TERKAIT MISI 9

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Meminimalisasi terjadinya ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani urusan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
			Meningkatkan unit satuan aparatur keamanan dalam masyarakat				Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani urusan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
		Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Meningkatkan kesiagaan aparatur keamanan dalam mengamankan wilayah				Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani urusan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
			Pencegahan tindak kriminal melalui sosialisasi kewaspadaan dini/ deteksi dini				Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang menangani urusan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
2	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan	Meningkatkan jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan.	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	70%	80%	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Dst Pemerintahan Umum	Perangkat Daerah yang menangani urusan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Capaian 2015	Target 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatkan pendidikan politik masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik				Program pendidikan politik masyarakat	Dst Pemerintahan Umum	Perangkat Daerah yang menangani urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
		Meningkatkan implemetasi norma-norma religius dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan kehidupan beragama dalam kehidupan masyarakat				Program PengembanganWawasan Kebangsaan	Dst Pemerintahan Umum	Perangkat Daerah yang menangani urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
			Meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama				Program PengembanganWawasan Kebangsaan	Dst Pemerintahan Umum	Perangkat Daerah yang menangani urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA, 2016



BAB 8

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Bandung berisi program-program prioritas, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Prioritas pembangunan Kabupaten Bandung diarahkan pada beberapa hal yang dianggap merupakan isu strategis daerah sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan segera. Hal tersebut antara lain:

1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan;
2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan;
3. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS;
4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah;
5. Penanggulangan banjir dan kekeringan;
6. Reformasi birokrasi;
7. Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan;
8. Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan;
9. Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan;
10. Pengendalian pencemaran lingkungan dan penyediaan RTH;
11. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penetapan sebelas prioritas pembangunan Kabupaten Bandung dilakukan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Secara detail, sandingan keterkaitan antara prioritas pembangunan Kabupaten Bandung, Nasional dan Provinsi Jawa Barat dijabarkan pada Tabel 8.1.

TABEL 8.1
SINERGITAS DAN SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG
DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI JAWA BARAT

Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Nasional
Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan kependidikan - Peningkatan peran pemuda dan olah raga 	<ul style="list-style-type: none"> - Revolusi Mental - Pelayanan Pendidikan
Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, dan kualitas tenaga kesehatan - Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, KB dan kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kesehatan
Penanggulangan kemiskinan dan PMKS	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerataan antar kelompok pendapatan
Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan - Peningkatan penataan ruang daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Perumahan dan Permukiman - Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan - Pembangunan desa dan kawasan perdesaan - Pembangunan perkotaan
Penanggulangan banjir dan kekeringan	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan - Penanganan Resiko Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan - Pembangunan Perkotaan
Reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK 	<ul style="list-style-type: none"> - Reformasi Fiskal - Reformasi Agraria - Revolusi Mental - Konsolidasi Demokrasi Efektivitas Diplomasi - Reformasi Birokrasi
Pemantapan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penataan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Desa dan

Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Nasional
wilayah perdesaan	ruang daerah	Kawasan Perdesaan
Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan iklim investasi dan daya saing usaha - Peningkatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan Daya Saing Industri - Peningkatan destinasi wisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha - Kemaritiman dan Kelautan - Pembangunan Pariwisata
Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan cadangan pangan pemerintah, ketersediaan informasi, harga, dan akses pangan, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, serta penanganan daerah rawan pangan, 	<ul style="list-style-type: none"> - Kedaulatan Pangan
Pengendalian pencemaran lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana, 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan - Pembangunan Perkotaan
Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat - Peningkatan kesadaran politik dan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilitas Keamanan dan Ketertiban - Kepastian dan Penegakan Hukum

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Sejalan dengan penetapan sembilan misi pembangunan yang telah dipaparkan pada Bab V serta penetapan sebelas prioritas di atas, Bupati Bandung memiliki gagasan untuk mengembangkan lima fokus pembangunan. Kelima fokus pembangunan tersebut meliputi: 1). Sumber Daya Manusia, 2). Kualitas Infrastruktur, 3). Ekonomi, 4). Ketahanan Pangan, serta 5). Kualitas Lingkungan. Pada dasarnya lima fokus pembangunan mewakili baik misi pembangunan maupun prioritas pembangunan Kabupaten Bandung. Penetapan fokus pembangunan dianggap mampu mengemas misi dan prioritas pembangunan dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami publik, tanpa mengurangi inti penting dari misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung. Harapannya melalui penetapan fokus pembangunan melalui penggunaan bahasa yang lebih komunikatif dan sederhana, sembilan

misi pembangunan Kabupaten Bandung dapat lebih mudah tersampaikan kepada masyarakat luas.

Adapun keterkaitan antara misi pembangunan, prioritas pembangunan dan fokus pembangunan disajikan pada Tabel 8.2.

TABEL 8.2
KETERKAITAN MISI, PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG

Misi Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan
Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan	Sumber Daya Manusia
Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan	
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Penanggulangan kemiskinan dan PMKS	
Meningkatkan kemandirian desa	Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan	
Meningkatkan reformasi birokrasi	Reformasi birokrasi	
Meningkatkan kemandirian dan ketertiban umum wilayah	Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	
Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan	Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah	Kualitas Infrastruktur
	Penanggulangan banjir dan kekeringan	
Menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif	Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan	Ekonomi
	Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan	Ketahanan Pangan
Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran lingkungan	Kualitas Lingkungan

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Selain pencetusan fokus pembangunan, Kepala Daerah Kabupaten Bandung memberi perhatian khusus bagi pembangunan di sektor ekonomi, fisik dan sosial, yang dituangkan dalam janji kampanye kepala daerah. Secara detail janji kampanye Bupati Bandung diantaranya:

1. Janji Kampanye dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik
 - Pembangunan infrastruktur yang mendukung terhadap pertumbuhan sektor ekonomi;

- Penanganan lahan kritis dalam bentuk bank pohon dan pembuatan embung-embung sumur resapan;
- Implementasi bank sampah;
- 2. Janji Kampanye dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - Mendorong pembentukan OVOP (One Village One Product) atau kampung – kampung yang memiliki produk unggulan (ternak/ sapi, strawberry, kopi, fashion);
 - Meningkatkan pertanian terpadu berbasis organik;
 - Pengembangan ekonomi kreatif;
 - Peningkatan pembangunan kepariwisataan melalui pembentukan BUMD bidang pariwisata dll;
 - Pembangunan Pasar Induk Agro dan Pasar Industri/ Tekstil;
- 3. Janji Kampanye dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial
 - Peningkatan SDM pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, serta pada karakter masyarakat yang bersifat universal;
 - Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
 - Peningkatan Angka Melek Al- Quran;
 - Mendorong terciptanya Soreang sebagai Kota Religius/ Kota Dzikir dan Sholawat;
 - Peningkatan kapasitas kecamatan, kelurahan dan desa;
 - Penguatan regulasi pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait RAKSA;
 - Mendorong optimalisasi PAD;
 - Meningkatkan kerjasama perbatasan.
 - Peningkatan kerja sama dengan Perguruan Tinggi;

Baik, misi, prioritas pembangunan, fokus pembangunan maupun janji kampanye Bupati Bandung akan diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program- program prioritas. Dalam rangka menunjang pelaksanaan program prioritas pembangunan Kabupaten Bandung tersebut, maka pada pelaksanaannya perlu ditunjang oleh anggaran program operasional pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil rekapitulasi anggaran pendanaan, dapat disimpulkan total belanja langsung seluruh Perangkat Daerah pada tahun ke-1 (2016) sebesar Rp 1.280.945.582.481,00, pada tahun ke-2 (2017) sebesar Rp 1.412.322.314.422,00 pada tahun ke-3 (2018) sebesar 1.489.099.682.743,00, pada tahun ke-4 (2019) sebesar Rp 1.503.592.547.987,00, sementara pada tahun ke-5 sebesar Rp 1.524.574.033.660,00. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran kebutuhan pendanaan setiap Perangkat Daerah.

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD yang menangani urusan pengendalian Penduduk dan KB													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.341.453.701	100 %	1.381.697.312	100 %	1.423.148.232	BKBPP		
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	1.667.787.299	100 %	1.717.820.918	100 %	1.769.355.545	BKBPP		
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	84.872.000	100 %	87.418.160	100 %	90.040.705	BKBPP		
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	50.923.200	100 %	52.450.896	100 %	54.024.423	BKBPP		
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	126.247.100	100 %	130.034.513	100 %	133.935.548	BKBPP		
Total Belanja Rutin						3.271.283.300		3.369.421.799		3.470.504.453	BKBPP		
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-		-		-	BKBPP		
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			-		-		-	BKBPP		
1	11	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak (%)	100 %	940.646.985	100 %	968.866.395	100 %	997.932.386	BKBPP		
1	11	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Prosentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		328.879.000		338.745.370		348.907.731	BKBPP		
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (orang)	1882 Orang	477.405.000	1889 Orang	491.727.150	1895 Orang	506.478.965	BKBPP		
1	12		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			-		-		-	BKBPP		
1	12	15	Program Keluarga Berencana	Cakupan pasangan usia subur peserta KB Aktif	85,80%	2.477.201.500	87,20%	2.551.517.545	88,60%	2.628.063.071	BKBPP		
1	12	15	Program Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	16,50%		16,60%		16,80%		BKBPP		
1	12	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah remaja yang mengikuti program dan jumlah remaja yang memahami mengenai kesehatan reproduksi remaja (%)	100 %	422.238.200	100 %	434.905.346	100 %	447.952.506	BKBPP		
1	12	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan pembinaan remaja dan kegiatan penyuluhan tentang kesehatan reprodksi	92,50 %		95,00 %		97,50 %		BKBPP		

1	12	18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Prosentase pembinaan keluarga berencana melalui penyediaan data mikro keluarga sejahtera pada kegiatan pendataan R/I/KS tahun 2011 Terkendalinya Data Pengguna Gakinda Melalui Penyediaan Kartu Gakinda yang Baru (DAK)		100 %	3.419.598.970	100 %	3.522.186.939	100 %	3.627.852.547	BKBPP
1	12	21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Prosentase persoalan narkoba, PMS termasuk HIV/Aids yang ditanggulangi		100 %	159.135.000	100 %	163.909.050	100 %	168.826.322	BKBPP
1	12	22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Jumlah dan kualitas bahan informasi serta aksesibilitas masyarakat terhadap informasi tersebut (%)		100 %	63.654.000	100 %	65.563.620	100 %	67.530.529	BKBPP
1	12	23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Jumlah pelatihan bagi tenaga pendamping bina keluarga (pelatihan)		5 Pelatihan	318.270.000	5 Pelatihan	327.818.100	5 Pelatihan	337.652.643	BKBPP
Total Belanja Renja							8.607.028.655		8.865.239.515		9.131.196.700	BKBPP
Total Belanja							11.878.311.955		12.234.661.313		12.601.701.153	BKBPP

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan penunjang pemerintahan												
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						SKPD Penanggung jawab		
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Belanja Rutin												
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100 %	1.255.835.071	100 %	1.293.510.123	100 %	1.332.315.426	BKPP	
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)	100 %	910.942.846	100 %	938.271.131	100 %	966.419.265	BKPP	
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur (%)	100 %	53.045.000	100 %	54.636.350	100 %	56.275.441	BKPP	
x	xx	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS (%)	100 %	79.567.500	100 %	81.954.525	100 %	84.413.161	BKPP	
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	100 %	371.932.444	100 %	383.090.417	100 %	394.583.130	BKPP	
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100 %	106.090.000	100 %	109.272.700	100 %	112.550.881	BKPP	
Total Belanja Rutin						2.777.412.860		2.860.735.246		2.946.557.303	BKPP	
Belanja Renja												
1			Urusan Wajib								BKPP	
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								BKPP	
1	20	47	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)		7.573.407.577		7.800.609.804		8.034.628.098	BKPP	
1	20	48	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian	100 %	3.035.592.423	100 %	3.126.660.196	100 %	3.220.460.002	BKPP	
Total Belanja Renja						10.609.000.000		10.927.270.000		11.255.088.100	BKPP	
Total Belanja						13.386.412.860		13.788.005.246		14.201.645.403	BKPP	

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan pangan													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dukungan terhadap program pelayanan administrasi perkantoran		1.961.555.935			2.020.402.613			2.081.014.692	BKP3
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Sarana dan prasarana mebelair Kantor BKPPP dan 8 UPT		1.008.019.440			1.038.260.023			1.069.407.823	BKP3
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	meningkatnya kedisiplinan aparatur		-			-			-	BKP3
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan Sumber Daya Manusia BKPPP		-			-			-	BKP3
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar kinerja BKPPP		161.234.776			166.071.819			171.053.974	BKP3
Total Belanja Rutin						3.130.810.150			3.224.734.455			3.321.476.489	BKP3
Belanja Renja													
2			Urusan Pilihan										BKP3
2	1		Pertanian										BKP3
2	1	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah peningkatan SDM pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan		1.815.730.350			1.870.202.261			1.926.308.328	BKP3
2	1	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatnya Ketahanan Pangan Pansyarakat dan menjadikan Kabupaten Bandung Tahan Pangan		820.924.420			845.552.153			870.918.717	BKP3
2	1	18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan jasa UPJA (Unit Pengelola Jasa Alat dan Mesin Pertanian)		663.062.500			682.954.375			703.443.006	BKP3
2	1	19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah kelompok tani yang dibina (POKTAN)	870	396750000	Poktan	885	456.262.500	Poktan	902	524.701.875	BKP3
2	1	20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah penyuluh bersertifikasi keahlian		709.463.000			751.250.371			795.499.018	BKP3
2	1	22	Program peningkatan produksi hasil peternakan			5.458.800.000			7.015.000.000			7.959.000.000	BKP3
2	1	24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah kelompok ternak yang terbina melalui penyuluhan penerapan teknologi peternakan									BKP3
2	1	24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah Produksi Daging (Ton)									BKP3
2	1	24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah Produksi Telur(Ton)									BKP3
2	1	24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah Produksi Susu (Liter)									BKP3
2	2		Kehutanan			-			-			-	BKP3

2	2	17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Melestarikan Sumber Daya Hutan melalui SDM Penyuluh Kehutanan		100	%	265.225.000	100	%	273.181.750		281.377.203	BKP3
2	5		Kelautan dan Perikanan					-			-		-	BKP3
2	5	22	Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Meningkatnya Sistem Penyuluh Perikanan melalui SDM Penyuluh Perikanan				159.135.000			163.909.050		168.826.322	BKP3
1			Urusan Wajib					-			-		-	BKP3
1	21		Ketahanan Pangan					-			-		-	BKP3
1	21	15	Program Ketahanan Pangan	Produktivitas padi (Kw/Ha)		63,44	%	6.930.388.897	63,80	%	7.338.588.803	63,75	7.770.831.684	BKP3
Total Belanja Renja								17.219.479.167			19.396.901.262		21.000.906.153	BKP3
Total Belanja								20.350.289.317			22.621.635.717		24.322.382.641	BKP3

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		100 persen	845.213.726	100 persen	870.570.137	100 persen	896.687.241	BPMPD	
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	tercapainya peningkatan sarana dan prasarana		100 persen	702.846.250	100 persen	723.931.638	100 persen	745.649.587	BPMPD	
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	terlaksananya peningkatan disiplin aparatur		100 persen	40.844.650	100 persen	42.069.990	100 persen	43.332.089	BPMPD	
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	terfasilitasinya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			-		-		-	BPMPD	
Total Belanja Rutin							1.588.904.626		1.636.571.764		1.685.668.917	BPMPD	
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib									BPMPD	
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa									BPMPD	
1	22	13	Program Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perdesaan	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan			676.854.200		697.159.826		718.074.621	BPMPD	
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase rata-rata kegiatan APBDes tahunan yang sesuai dengan RKPDes		100 persen	3.903.759.781	100 persen	4.020.872.575	100 persen	4.141.498.752	BPMPD	
1	22	16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah BUMDES yang aktif			134.203.850		138.229.966		142.376.864	BPMPD	
1	22	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa (Lembaga Masyarakat Desa)	Jumlah kelompok masyarakat pembangunan desa (Lembaga Masyarakat Desa)		50 Persen	3.177.395.500	60 Persen	3.272.717.365	70 Persen	3.370.898.886	BPMPD	
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur desa yang berkualifikasi minimal SMA/ Sederajat		70 Persen	1.073.630.800	80 Persen	1.105.839.724	90 Persen	1.139.014.916	BPMPD	
Total Belanja Renja							8.965.844.131		9.234.819.455		9.511.864.039	BPMPD	
Total Belanja							10.554.748.757		10.871.391.219		11.197.532.956	BPMPD	

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan penanaman modal													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional Administrasi Perkantoran		687.251.020			707.868.551			729.104.607	BPMP
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur		570.923.335			588.051.035			605.692.566	BPMP
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		63.654.000			65.563.620			67.530.529	BPMP
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Ketersediaan Pelaporan Kecapaian Kinerja dan Keuangan		70.284.625			72.393.164			74.564.959	BPMP
Total Belanja Rutin						1.392.112.980			1.433.876.369			1.476.892.660	BPMP
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib										BPMP
1	16		Penanaman Modal										BPMP
1	16	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai investasi, jumlah investor, jumlah izin baru, jumlah kerjasama investasi antara pemerintah dengan dunia usaha dan jumlah UMKM yang bermitra,		1.670.917.500			1.721.045.025			1.772.676.376	BPMP
1	16	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi, Jumlah investor		1.241.253.000			1.278.490.590			1.316.845.308	BPMP
1	16	17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Jumlah profil peluang investasi unggulan		323.574.500			333.281.735			343.280.187	BPMP
Total Belanja Renja						3.235.745.000			3.332.817.350			3.432.801.871	BPMP
Total Belanja						4.627.857.980			4.766.693.719			4.909.694.531	BPMP

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan Ketentrangan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat														
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Belanja Rutin														
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	21	%	1.229.978.043	21	%	1.266.877.385	22	%	1.304.883.706	BPBD
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	19	%	1.270.388.000	20	%	1.300.399.640	20	%	1.335.671.629	BPBD
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase motivasi kerja pegawai	23	%	161.827.000	25	%	174.781.810	26	%	183.765.264	BPBD
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan	8	Buku	153.830.500	8	Buku	158.445.415	8	Buku	163.198.777	BPBD
Total Belanja Rutin							2.816.023.543		2.900.504.250		2.987.519.377	BPBD		
Belanja Renja														
1			Urusan Wajib										BPBD	
1	3		Pekerjaan Umum										BPBD	
1	3	28	Program Pengendalian Banjir		1	Kegiatan	1.525.000.000	1	Kegiatan	1.285.000.000	1	Kegiatan	1.500.000.000	BPBD
													BPBD	
1	4		Perumahan										BPBD	
1	4	18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase perbaikan sarana dan prasarana masyarakat pasca bencana (%)	24	%	689.585.000	25	%	700.272.550	26	%	731.580.727	BPBD
1	6		Perencanaan Pembangunan				-			-			-	BPBD
1	6	15	Program Pengembangan data/informasi	Persentase wilayah Kabupaten Bandung yang telah terbangun system data dan informasi kebencanaan daerah	20	%	525.000.000	20	%	525.000.000	21	%	550.000.000	BPBD
1	6	19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi	22	%	1.150.000.000	22	%	1.150.000.000	22	%	1.150.000.000	BPBD
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				-			-			-	BPBD
1	19	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah personil yang siap diturunkan pada pra, saat dan pasca bencana	1.825	Orang	668.948.325	1.825	Orang	674.016.774	1.825	Orang	679.237.278	BPBD
1	19	21	Program Penanganan Darurat Kebencanaan	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	24	%	600.000.000	26	%	650.000.000	26	%	650.000.000	BPBD
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase terbinanya anggota linmas siaga bencana dengan 100 orang linmas	13,00	%	1.254.209.000	15,00	%	1.381.835.270	12,00	%	1.163.290.328	BPBD

1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah Kecamatan yang telah melakukan mitigasi bencana	3	Kecamatan	350.000.000	3	Kecamatan	350.000.000	3	Kecamatan	350.000.000	BPBD
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase bantuan logistic dan peralatan untuk kebutuhan korban bencana	22	%	1.000.000.000	27	%	1.200.000.000	29	%	1.300.000.000	BPBD
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase fasilitas publik yang memiliki jalur evakuasi	29	%	2.000.000.000	29	%	2.000.000.000	29	%	2.000.000.000	BPBD
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa				-			-			-	BPBD
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah personil kebencanaan yang memiliki keahlian penanggulangan bencana	80	Orang	544.007.000	80	Orang	551.327.210	80	Orang	558.867.027	BPBD
Total Belanja Renja							10.306.749.325			10.467.451.804			10.632.975.360	BPBD
Total Belanja							13.122.772.868			13.367.956.054			13.620.494.736	BPBD

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

		#REF!			#REF!					#REF!			
PD: Yang menangani urusan lingkungan hidup													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran		1.147.224.584		1.181.641.322		1.217.090.561		BPLH	
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur		727.777.400		749.610.722		772.099.044		BPLH	
x	xx	3				-		-		-		BPLH	
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Penunjang Kerja Aparatur		37.131.500		38.245.445		39.392.808		BPLH	
Total Belanja Rutin						1.912.133.484		1.969.497.489		2.028.582.413		BPLH	
Belanja Renja													
2						-		-		-		BPLH	
2	1		Pertanian									BPLH	
2	1	18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan									BPLH	
2	2		Kehutanan									BPLH	
2	2	16	Program rehabilitasi hutan dan lahan									BPLH	
1	8		Lingkungan Hidup									BPLH	
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan									BPLH	
1			Urusan Wajib			-		-		-		BPLH	
1	3		Pekerjaan Umum			-		-		-		BPLH	
1	3	28	Program pengendalian banjir	a		9.070.695		9.342.816		9.623.100		BPLH	
1	8		Lingkungan Hidup			-		-		-		BPLH	
1	8	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Forum kemitraan pengendalian pencemaran dan penegakan hukum lingkungan			3		6		7	BPLH	
1	8	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase cakupan pengawasan pelaksanaan dokumen/ ijin lingkungan		25%		25%		25%		BPLH	
1	8	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase penataan usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup		75%		80%		85%		BPLH	
1	8	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase parameter kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu		95%		95%		95%		BPLH	
1	8	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan penertiban pelanggaran hukum lingkungan		100%		100%		100%		BPLH	
1	8	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup		2 kebijakan		2 kebijakan		1 kebijakan		BPLH	
						2.583.238.455		2.660.735.609		2.740.557.677			

1	8	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan lingkungan terhadap masyarakat										BPLH
1	8	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah penyuluh kehutanan pada perlindungan dan konservasi hutan										BPLH
1	8	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas hutan rakyat		6440,41 Ha	1.076.813.500	6504,82 Ha	1.109.117.905	6569,86 Ha	1.142.391.442			BPLH
1	8	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah masyarakat yang mendapat peningkatan kapasitas		558 Orang	1.076.813.500	558 Orang	1.109.117.905	558 Orang	1.142.391.442			BPLH
1	8	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah lubang resapan biopori yang dibuat masyarakat		31 Lubang Biopori	1.076.813.500	31 Lubang Biopori	1.109.117.905	31 Lubang Biopori	1.142.391.442			BPLH
1	8	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen lingkungan yang dapat diakses		3 dokumen	461.491.500	2 dokumen	475.336.245	2 dokumen	489.596.332			BPLH
1	8	20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah sarana pengolahan Air limbah (IPAL)		10 Unit	2.280.935.000	10 Unit	2.349.363.050	10 Unit	2.419.843.942			BPLH
1	8	20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase parameter kualitas lingkungan yang dapat diuji		90 %	2.280.935.000	95 %	2.349.363.050	100 %	2.419.843.942			BPLH
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)											BPLH
1	8	31	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam											BPLH
1	8	32	Program Adaptasi Perubahan Iklim											BPLH
1	8	26	Program Pengelolaan Bidang Air Tanah	a			31.827.000		32.781.810		33.765.264			BPLH
Total Belanja Renja							6.443.376.150		6.636.677.435		6.835.777.758			BPLH
Total Belanja							8.355.509.634		8.606.174.923		8.864.360.171			BPLH

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan penunjang pemerintahan													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)	100 %	936.986.880	100 %	965.096.486	100 %	994.049.381	Bappeda		
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100 %	1.384.474.500	100 %	1.426.008.735	100 %	1.468.788.997	Bappeda		
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100 %	-	100 %	-	100 %	195.879.238	Bappeda		
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100 %	134.734.300	100 %	138.776.329	100 %	142.939.619	Bappeda		
Total Belanja Rutin						2.456.195.680		2.529.881.550		2.801.657.235	Bappeda		
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-		-		-	Bappeda		
1	5		Penataan Ruang			-		-		-	Bappeda		
1	5	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Peraturan mengenai Perencanaan Tata Ruang Perda/Perbup							Bappeda		
1	6		Perencanaan Pembangunan			-		-		-	Bappeda		
1	6	15	Program Pengembangan data/informasi	Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan	100 %	770.000.000	100 %	795.000.000	100 %	820.000.000	Bappeda		
1	6	19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup kota-kota menengah dan besar	100 %	408.446.500	100 %	420.699.895	100 %	430.320.892	Bappeda		
1	6	20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan (orang)	10 Orang	106.090.000	10 Orang	106.090.000	10 Orang	106.090.000	Bappeda		
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan	100 %	4.683.887.000	100 %	4.890.000.000	100 %	4.915.000.000	Bappeda		
1	6	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi	100 %	529.267.000	100 %	529.267.000	100 %	535.000.000	Bappeda		

1	6	23	Program perencanaan sosial dan budaya	Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan sosial budaya		100 %	636.540.000	100 %	650.000.000	100 %	650.000.000	Bappeda
1	6	24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan prasarana dan SDA		100 %	162.537.000	100 %	162.713.630	100 %	165.826.322	Bappeda
1	23		Statistik				-		-		-	Bappeda
1	23	15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung			1.270.000.000		1.270.000.000		1.270.367.189	Bappeda
Total Belanja Renja							8.566.767.500		8.823.770.525		8.892.604.403	Bappeda
Total Belanja							11.022.963.180		11.353.652.075		11.694.261.638	Bappeda

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan komunikasi dan informatika, urusan perpustakaan dan urusan kearsipan													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran		1.124.433.416			1.158.166.418			1.192.911.411	Bapapsi
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		885.729.284			912.301.163			939.670.198	Bapapsi
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		111.023.185			114.353.881			117.784.497	Bapapsi
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		72.193.895			74.359.712			76.590.503	Bapapsi
Total Belanja Rutin						2.193.379.780			2.259.181.174			2.326.956.609	Bapapsi
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib										Bapapsi
1	24		Kearsipan										Bapapsi
1	24	15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah penambahan khasanah kearsipan (Paket)		80.281.486			82.689.930			85.170.628	Bapapsi
1	24	16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase alih media dari fisik arsip menjadi soft copy (Ket: sejumlah berkas yang mengalami penyusutan, sejumlah berkas itu pula yang dialihmediakan)		981.409.946			1.010.852.244			1.041.177.811	Bapapsi
1	24	17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Jumlah pemeliharaan rutin kearsipan dan perpustakaan melalui fumigasi (Paket)		186.074.434			191.656.667			197.406.367	Bapapsi
1	24	18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Jumlah lembaga yang sudah melaksanakan penataan kearsipan		334.975.250			345.024.507			355.375.242	Bapapsi
1	25		Komunikasi dan Informatika			-			-			-	Bapapsi
1	25	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya kualitas jaringan komunikasi OPD di lingkungan Pemkab Bandung									Bapapsi
1	25	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi melalui media: Grafika, Elektronika, Interpersonal, Luar Ruang, dan Tradisional		3.491.588.780			3.596.336.443			3.704.226.536	Bapapsi
1	25	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah implmentasi aplikasi penunjang E-Governmen									Bapapsi
1	25	17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah aparatur yang memahami TIK		223.849.900			230.565.397			237.482.359	Bapapsi

1	26	Perpustakaan					-			-			-	Bapapsi
1	26	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, non anggota) yang terlayani oleh jenis perpustakaan di Kabupaten Bandung; Jumlah koleksi bahan pustaka	446494 (Orang)		1.385.126.317			1.426.680.106	500.000	Orang	1.469.480.510	Bapapsi
Total Belanja Renja							6.683.306.111			6.883.805.295			7.090.319.453	Bapapsi
Total Belanja							8.876.685.892			9.142.986.468			9.417.276.062	Bapapsi

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran		100 %	19.366.656.264	100 %	19.947.655.952	100 %	20.546.085.630	Bina Marga	
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100 %	2.466.592.500	100 %	2.540.590.275	100 %	2.616.807.983	Bina Marga	
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase peningkatan disiplin pegawai		100 %	122.003.500	100 %	125.663.605	100 %	129.433.513	Bina Marga	
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase pelaksanaan diklat/kursus		100 %	477.405.000	100 %	491.727.150	100 %	506.478.965	Bina Marga	
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase terlaksananya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun		100 %	60.471.300	100 %	62.285.439	100 %	64.154.002	Bina Marga	
Total Belanja Rutin							22.493.128.564		23.167.922.421		23.862.960.093	Bina Marga	
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib									Bina Marga	
1	1		Pendidikan									Bina Marga	
1	1	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun									Bina Marga	
1	3		Pekerjaan Umum									Bina Marga	
1	3	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase penambahan panjang jalan sepanjang 5 Km	0% (0Km)	60 %	20.000.000.000	80,00 %	20.000.000.000	100 %	20.000.000.000	Bina Marga	
1	3	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase penambahan jembatan (5 jembatan)	0% (0 Jembatan)	60 %	20.000.000.000	80,00 %	20.000.000.000	100 %	20.000.000.000	Bina Marga	
1	3	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rata-rata persentase jalan mantap (baik dan sedang)	82,79 &	88,32 %	20.000.000.000	90,16 %	20.000.000.000	92 %	20.000.000.000	Bina Marga	
1	3	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase kondisi jembatan baik	81,93%	86,772		88,39		90		Bina Marga	
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dari banjir (Persentase jalan yang telah memiliki saluran drainase/ saluran pembuangan air)	57,23%	64,29 %	24.000.000.000,00	66,64 %	24.000.000.000,00	69 %	24.000.000.000	Bina Marga	
1	3	17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Prosentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dari longsor	20,72%	38,29 %	20.000.000.000	44,14 %	20.000.000.000	50,00 %	20.000.000.000	Bina Marga	
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase terpeliharanya jalan dan jembatan			179.181.501.175		184.556.946.210		190.093.654.597	Bina Marga	
1	3	20	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase pelanggaran terhadap DAMIJA dan RUMIJA	50%	44 %	500.000.000	42,00 %	500.000.000	40 %	500.000.000	Bina Marga	

1	3	22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Persentase ketersediaan data kondisi sarana dan prasarana transportasi	69%	87,6 %	500.000.000	93,80 %	500.000.000	100 %	500.000.000	Bina Marga
1	3	23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase ketersediaan alat berat untuk menunjang kegiatan kebinamargaan	24%	27,6 %	5.000.000.000	28,80 %	5.000.000.000	30,00 %	5.000.000.000	Bina Marga
1	3	24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya									Bina Marga
1	3	28	Program pengendalian banjir									Bina Marga
1	3	29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Panjang jalan yang memiliki trotoar	432,44 Km	459,446 Km	4.500.000.000	468,45 Km	4.500.000.000	477,45 Km	4.500.000.000	Bina Marga
1	3	29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya masterplan dan dokumen pengendalian kawasan perkotaan Soreang (koridor jl Tol Soroja), dan Kawasan Perkotaan Rancaekek Kencana		60 %	500.000.000	80,00 %	500.000.000	100 %	500.000.000	Bina Marga
1	7		Perhubungan				-		-		-	Bina Marga
1	7	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase PJU terbangun (Ideal Terbangun sebanyak 3500 Titik Cahaya)	32,89%	50,38 %	20.000.000.000	55,75 %	20.000.000.000	61,47 %	20.000.000.000	Bina Marga
Total Belanja Renja							314.181.501.175		319.556.946.210		325.093.654.597	Bina Marga
Total Belanja							336.674.629.739		342.724.868.631		348.956.614.690	Bina Marga

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	1.590.379.277	100 %	1.638.090.655	100 %	1.687.233.374	Disdukcasip	
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana		100 %	922.983.000	100 %	950.672.490	100 %	979.192.665	Disdukcasip	
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana peningkatan disiplin aparatur		100 %	193.083.800	100 %	198.876.314	100 %	204.842.603	Disdukcasip	
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	jumlah laporan rencana dan capaian kinerja dan keuangan dinas		17 Dokumen	159.135.000	17 Dokumen	163.909.050	17 Dokumen	168.826.322	Disdukcasip	
Total Belanja Rutin							2.865.581.077		2.951.548.509		3.040.094.964	Disdukcasip	
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib									Disdukcasip	
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil									Disdukcasip	
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan/kepemi-likan KK (Kartu Keluarga) (%)	68,69	87 %	9.654.190.000	94 %	9.943.815.700	96 %	10.242.130.171	Disdukcasip	
				Cakupan penerbitan/kepemi-likan KTP (Kartu Tanda Penduduk) (%)	86,69	94 %		96 %		98 %		Disdukcasip	
				Cakupan penerbitan/kepemi-likan Akta Kelahiran (%)	62,62	64 %		64,50 %		65 %		Disdukcasip	
				Cakupan penerbitan/kepemi-likan Akta Kematian (%)	14,06	9 %		12 %		15 %		Disdukcasip	
Total Belanja Renja							9.654.190.000		9.943.815.700		10.242.130.171	Disdukcasip	
Total Belanja							12.519.771.077		12.895.364.209		13.282.225.135	Disdukcasip	

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan kesehatan														
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020				
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
Belanja Rutin														
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelayanan administrasi perkantoran		2.029.366.889			2.090.247.896			2.152.955.333	Dinkes	
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		1.269.472.940			1.307.557.128			1.346.783.842	Dinkes	
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tersosialisasinya peraturan tata cara peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pengelola kegiatan Dinas dan UPTD		129.429.800			133.312.694			137.312.075	Dinkes	
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	prosentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tercapai		629.202.816			648.078.900			667.521.267	Dinkes	
Total Belanja Rutin						4.057.472.445			4.179.196.618			4.304.572.517	Dinkes	
Belanja Renja														
1			Urusan Wajib										Dinkes	
1	2		Kesehatan										Dinkes	
1	2	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rata-rata belanja obat yang bermutu per kapita (Rp/kapita)	4.924	Rp/kapita	4.521.555.800	5.077	Rp/kapita	4.657.202.474	5.236	Rp/kapita	4.796.918.548	Dinkes
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	100	%	103.452.602.600	100	%	106.556.180.678	100	%	109.752.866.098	Dinkes
1	2	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase produk olahan makanan dan minuman yang telah sertifikasi layak edar	100	%	212.180.000	100	%	218.545.400	100	%	225.101.762	Dinkes
1	2	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase cakupan desa siaga aktif	75,0	%		775,0	%		80,0	%		Dinkes
1	2	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase penyelenggaraan promosi kesehatan	100	%	2.064.511.612	100	%	2.126.446.961	100	%	2.190.240.369	Dinkes
1	2	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Rasio masyarakat yang mendapat penyuluhan pelayanan kesehatan									Dinkes	
1	2	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	AHH	71,77	Tahun		72,01	tahun		72,26	tahun		Dinkes
1	2	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan desa UCI (Universal Child Immunization)	100	%	1.541.487.700	100	%	1.587.732.331	100	%	1.635.364.301	Dinkes
1	2	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan pedesaan)			2.269.265.100			2.337.343.053			2.407.463.345	Dinkes
1	2	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Desa/ Kelurahan mengalami Wabah dan KLB penyakit menular yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100	%		100	%		100	%		Dinkes

1	2	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	85,68%	7.020.219.000	86,95%	7.100.020.000	88,27%	7.201.050.000	Dinkes
1	2	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD	100%		100%		100%		Dinkes
1	2	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase data dan informasi pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam rangka fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan	100 %	1.678.343.800	100 %	1.728.694.114	100 %	1.780.554.937	Dinkes
1	2	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarkes (RS) di Kab/Kota (%)	100 %	38.192.400.000	100 %	39.338.172.000	100 %	40.518.317.160	Dinkes
1	2	25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang dibangun sesuai standar	100 %		100 %		100 %		Dinkes
1	2	25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio puskesmas persatuan penduduk	1:52490		1:51970		1:51455		Dinkes
1	2	25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio poliklinik persatuan penduduk	6,9423611	11.574.206.820	6,873611111	11.921.433.025	6,805555556	12.279.076.015	Dinkes
1	2	25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio posyandu persatuan balita	01.57		01.55		01.53		Dinkes
1	2	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah RS dengan kondisinya (standar pelayanannya, dll)	100 %	10.609.000	100 %	10.927.270	100 %	11.255.088	Dinkes
1	2	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase relokasi RSUD Soreang	40 %		80 %		100 %		Dinkes
1	2	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase pembangunan RSIA Bihbul	40 %		80 %		100 %		Dinkes
1	2	28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan Puskesmas dengan tenaga dokter dan paramedik (%)	100 %		100 %		100 %		Dinkes
1	2	28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rasio dokter persatuan penduduk	3,2409722	6.365.400.000	2,936111111	6.556.362.000	2,659722222	6.753.052.860	Dinkes
1	2	28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah poliklinik swasta							Dinkes

1	2	29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Balita Gizi Buruk			4	%	84.872.000		3	%	87.418.160	3,0	%	90.040.705	Dinkes	
1	2	29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	AKB			33,69	%			33,62	%		33,55	%		Dinkes	
1	2	30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Jumlah Puskesmas Santun Lansia			16	Puskesmas	79.567.500	21 Puskesmas			81.954.525	26 Puskesmas		84.413.161	Dinkes	
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan kunjungan ibu hamil k4 Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan NIFAS Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan pelayanan anak			85,80	%	2.970.732.180		86,30	%	3.059.854.145		86,80	%	3.151.649.770	Dinkes
Total Belanja Renja									179.637.953.612				185.027.092.221			190.577.904.987	Dinkes	
Total Belanja									183.695.426.057				189.206.288.839			194.882.477.504	Dinkes	

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Operasional Kantor		2.314.764.164			2.384.207.089			2.455.733.302	Diskoperindag
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran		1.060.900.000			1.092.727.000			1.125.508.810	Diskoperindag
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase pemenuhan Operasional perkantoran		238.702.500			245.863.575			253.239.482	Diskoperindag
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		-			-			-	Diskoperindag
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		101.846.400			104.901.792			108.048.846	Diskoperindag
Total Belanja Rutin						3.716.213.064			3.827.699.456			3.942.530.440	Diskoperindag
Belanja Renja													
2	6	15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase kasus permasalahan/pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti		456.187.000			469.872.610			483.968.788	Diskoperindag
2	6	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan Nilai Eskport Barang dan Jasa		710.803.000			732.127.090			754.090.903	Diskoperindag
2	6	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Prosentase pasar tradisional yang direvitalisasi		4.774.050.000			4.917.271.500			5.064.789.645	Diskoperindag
2	6	19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Dokumen Kajian dan Lokasi PKL yang ditata tempat usahanya		270.529.500			278.645.385			287.004.747	Diskoperindag
2	7		Industri			-			-			-	Diskoperindag
2	7	15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Prosentase Pertumbuhan Omzet Usaha IKM		1.439.150.634			1.482.325.153			1.526.794.907	Diskoperindag
2	7	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Prosentase Pertumbuhan IKM		554.850.700			571.496.221			588.641.108	Diskoperindag
2	7	17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM Olahan Makanan yang mendapat pelatihan peningkatan GMP dan AMT		1.504.356.200			1.549.486.886			1.595.971.493	Diskoperindag
1			Urusan Wajib			-			-			-	Diskoperindag
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			-			-			-	Diskoperindag
1	15	15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Prosentase Pertumbuhan UMKM		360.706.000			371.527.180			382.672.995	Diskoperindag
1	15	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan Omzet UMKM		1.664.021.650			1.713.942.300			1.765.360.568	Diskoperindag
1	15	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang difasilitasi Sertifikasi Halal dan PIRT		248.621.915			256.080.572			263.762.990	Diskoperindag

1	15	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Aktif				914.349.926			941.780.424			970.033.837	Diskoperindag
Total Belanja Renja								12.897.626.525			13.284.555.321			13.683.091.980	Diskoperindag
Total Belanja								16.613.839.589			17.112.254.777			17.625.622.420	Diskoperindag

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Pariwisata													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		823.500.281			848.205.289			873.651.448	Dispapar
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		807.466.957			831.690.965			856.641.694	Dispapar
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur		44.287.271			45.615.889			46.984.365	Dispapar
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		130.942.643			134.870.923			138.917.050	Dispapar
Total Belanja Rutin						1.806.197.151			1.860.383.066			1.916.194.558	Dispapar
Belanja Renja													
2			Urusan Pilihan			-			-			-	Dispapar
2	4		Pariwisata										Dispapar
2	4	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Bandung, Rata-rata lama tinggal, Jumlah Desa Wisata yang Dipromosikan		1.129.858.500			1.163.754.255			1.198.666.883	Dispapar
2	4	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan, Rata-rata Lama Tinggal Jumlah Objek Wisata Unggulan, Jumlah Destinasi Wisata, Jumlah Desa Wisata yang Dikembangkan		27.334.396.161			28.154.428.046			28.999.060.887	Dispapar
2	4	17	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kunjungan Wisatawan, Rata-rata Lama Tinggal, Jumlah MOU/ Surat Perjanjian Kerjasama Jumlah Pelaku Usaha Wisata yang Dimitrakan		509.232.000			524.508.960			540.244.229	Dispapar
1			Urusan Wajib			-			-			-	Dispapar
1	18		Kepemudaan dan Olahraga			-			-			-	Dispapar
1	18	15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah pemuda berprestasi	409 Orang	249.523.680			257.009.390			264.719.672	Dispapar
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Tingkat keterlibatan pemuda dalam organisasi (jumlah klub olah raga per 10000 penduduk)	14 Klub Olahraga 15 Klub Olahraga	2.503.724.000		16 Klub Olahraga	2.578.835.720		16 Klub Olahraga	2.656.200.792	Dispapar

1	18	17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah yang mengikuti penyuluhan pencegahan penyalahgunaan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda bagi : Pemuda pelajar Usia 16 - 30 th, FKWM dan FIKR (orang)	600 Orang	656 Orang		118.596.800	675 Orang		125.582.152	696 Orang		132.978.940	Dispopar
1	18	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase pengembangan potensi sarpras olahraga		100 %		153.618.320	100 %		158.226.870	100 %		162.973.676	Dispopar
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pengiriman atlet pelajar dan pelatih dan Popwilda Jabar				5.408.141.390			5.570.385.631			5.737.497.200	Dispopar
1	18	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Gedung olah raga per 10000 penduduk (gedung)	1.739 unit gedung	1903 unit sarana prasarana		5.165.850.979	1962 unit sarana prasarana o		5.320.826.508	2022 unit sarana prasarana olah		5.480.451.304	Dispopar
Total Belanja Renja							42.572.941.830				43.853.557.533			45.172.793.582	Dispopar
Total Belanja							44.379.138.981				45.713.940.599			47.088.988.140	Dispopar

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan penunjang pemerintahan													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (operasional perkantoran)		4.362.971.564		4.493.860.711		4.628.676.532		DPPK	
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran		969.132.150		998.206.115		1.028.152.298		DPPK	
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Khusus		74.263.000		76.490.890		78.785.617		DPPK	
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah SDA yang Dikirim untuk peningkatan kapasitas		84.872.000		87.418.160		90.040.705		DPPK	
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen		318.270.000		327.818.100		337.652.643		DPPK	
Total Belanja Rutin						5.809.508.714		5.983.793.976		6.163.307.795		DPPK	
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-		-		-		DPPK	
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			-		-		-		DPPK	
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah								DPPK	
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase serapan belanja daerah								DPPK	
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Capaian target PAD Bidang Perhubungan		14.059.279.969		14.481.058.368		14.915.490.119		DPPK	
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah aset daerah yang tercatat								DPPK	
1	24		Kearsipan			-		-		-		DPPK	
1	24	17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Program Penataan Arsip SKPD		229.932.040		236.830.001		243.934.901		DPPK	
1	24	16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Program Pendataan dan Penataan Arsip		-		-		-		DPPK	
Total Belanja Renja						14.289.212.009		14.717.888.369		15.159.425.020		DPPK	
Total Belanja						20.098.720.723		20.701.682.344		21.322.732.815		DPPK	

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan pendidikan, Urusan kebudayaan													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran		6.305.860.488		6.495.036.303		6.689.887.392		Dikbud	
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		949.174.499		977.649.734		1.006.979.226		Dikbud	
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		165.500.400		170.465.412		175.579.374		Dikbud	
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		95.481.000		98.345.430		101.295.793		Dikbud	
Total Belanja Rutin						7.516.016.388		7.741.496.879		7.973.741.786		Dikbud	
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib									Dikbud	
1	1		Pendidikan									Dikbud	
1	1	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini		4.769.460.865		4.912.544.691		5.059.921.032		Dikbud	
1	1	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	96,65%	50.563.902.309	97,33%	52.080.819.378	98,02%	53.643.243.959		Dikbud	
1	1	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah kecamatan dengan rata- rata jumlah siswa perrombel yang belum sesuai dengan SPM – Tingkat SD/MI	18 Kecamatan		16 Kecamatan		14 Kecamatan			Dikbud	
1	1	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah kecamatan dengan rata- rata jumlah siswa perrombel yang belum sesuai dengan SPM – Tingkat SMP/MTs	18 Kecamatan		16 Kecamatan		14 Kecamatan			Dikbud	
1	1	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah kecamatan dengan rata- rata rasio jumlah kelas terhadap rombel yang lebih kecil dari 1: 1 – Tingkat SMP/MTs	26 Kecamatan		24 Kecamatan		22 Kecamatan			Dikbud	
1	1	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase ruang kelas baik- Tingkat SD/MI	71,37%		73,45%		75,58%			Dikbud	
1	1	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase ruang kelas baik- Tingkat SMP/MTs	78,52%		79,44%		80,37%			Dikbud	
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah		37.142.363.148		38.256.634.043		39.404.333.064		Dikbud	
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Angka Kelulusan tingkat SMP/ sederajat (%)	100%		100%		100%			Dikbud	
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP/ Sederajat	83,44		86,29		89,25			Dikbud	

1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMA		62,77		71,45		81,33		Dikbud
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Jumlah kecamatan dengan rata-rata jumlah siswa perrombel yang belum sesuai dengan SPM – Tingkat SMA/MA/SMK		1 Kecamatan		1 Kecamatan		0 Kecamatan		Dikbud
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Persentase kondisi ruang kelas baik – Tingkat SMA/MA/SMK		67%		68%		69%		Dikbud
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Rasio jumlah siswa SMK terhadap non-SMK								Dikbud
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Jumlah kecamatan dengan rata-rata rasio jumlah kelas terhadap rombel yang lebih kecil dari 1: 1 – Tingkat SMA/MA/SMK		22 Kecamatan		20 Kecamatan		18 Kecamatan		Dikbud
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Rasio jumlah SMK terhadap non-SMK								Dikbud
1	1	18	Program Pendidikan Non Formal	APK Paket A		6,00%	10.038.288.845	61,00%	10.339.437.510	62,00%	10.649.620.636	Dikbud
1	1	18	Program Pendidikan Non Formal	APK Paket B		3755,00%		376,00%		37,65%		Dikbud
1	1	18	Program Pendidikan Non Formal	APK Paket C		23,70%		24,40%		25,10%		Dikbud
1	1	18	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga pendidikan non-formal								Dikbud
1	1	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tingkat pendidikan guru (berkualifikasi S1/DIV ke atas) – jenjang SD/MI		60,40%	2.976.669.693	61,00%	3.065.969.783	6161,00%	3.157.948.877	Dikbud
1	1	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tingkat pendidikan guru (berkualifikasi S1/DIV ke atas) – jenjang SMP/MTs		94,37%		96,03%		9772,00%		Dikbud
1	1	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tingkat pendidikan guru (berkualifikasi S1/DIV ke atas) – jenjang SMA/MA/SMK		94,21%		95,21%		9621,00%		Dikbud
1	1	21	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Jumlah pengumpul perpustakaan		500.250	1.818.438.103	500.500	1.925.544.107	500.750	2.038.958.655	Dikbud
1	1	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang memiliki akreditasi A tahun berkenaan		32%	2.173.436.125	38%	2.238.639.209	46%	2.305.798.385	Dikbud
2			Urusan Pilihan				-		-		-	Dikbud
2	4		Pariwisata				-		-		-	Dikbud
2	4	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	a			53.045.000		54.636.350		56.275.441	Dikbud

1		Urusan Wajib				-				-			-	Dikbud
1	17	Kebudayaan				-				-			-	Dikbud
1	17	15 Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		52	3.357.313.531	62		3.458.032.937	75			3.561.773.925	Dikbud
1	17	16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rata-rata Jumlah keragaman budaya yang dilestarikan tingkat Kecamatan (jenis)		6 jenis	4.201.164.000	6 jenis		4.327.198.920	8 jenis			4.457.014.888	Dikbud
1	17	17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya		39 Unit	4.849.851.305	39 Unit		4.995.346.844	40 Unit			5.145.207.249	Dikbud
1	17	18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya (Kelempok)	Jumlah kerja sama dalam pengelolaan kekayaan budaya (Kelempok)			15.913.500			16.390.905				16.882.632	Dikbud
1	18	Kepemudaan dan Olahraga				-			-				-	Dikbud
1	18	15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	a			18.565.750			19.122.723				19.696.404	Dikbud
Total Belanja Renja						121.978.412.173			125.690.317.399				129.516.675.146	Dikbud
Total Belanja						129.494.428.561			133.431.814.278				137.490.416.932	Dikbud

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan perhubungan														
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020				
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
Belanja Rutin														
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perhubungan	Capaian target PAD Bidang Perhubungan			2.142.652.828			2.206.932.412			2.273.140.385	Dishub
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan			1.096.132.436			1.129.016.409			1.162.886.901	Dishub
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik Bidang Perhubungan			109.060.520			112.332.336			115.702.306	Dishub
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase SDM Perhubungan (PNS) yang telah mengikuti diklat kompetensi Bidang Perhubungan			130.734.177			134.656.202			138.695.888	Dishub
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan			167.744.204			172.776.530			177.959.825	Dishub
Total Belanja Rutin							3.646.324.164			3.755.713.889			3.868.385.305	Dishub
Belanja Renja														
1			Urusan Wajib Perhubungan											Dishub
1	7		Program Manajemen Rekayasa dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan											Dishub
1	7	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	LOS	LOS = D (2,89)	LOS = D (3,5)	2.000.000.000	LOS = D (3,7)		2.000.000.000	LOS = C (4)		2.000.000.000	Dishub
1	7	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya Master Plan Transportasi		60 %	1.000.000.000	80 %		1.000.000.000	100 %		1.000.000.000	Dishub
1	7	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	-Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek -Halte	66,67%	71,43 %	2.000.000.000	71,43 %		2.000.000.000	71,67 %		2.000.000.000	Dishub
					2,57%	6,41 %		8,25 %			10,08 %			
1	7	17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan untuk jaringan jalan kabupaten	38,38%	40,87 %	2.000.000.000	41,70 %		2.000.000.000	42,53 %		2.000.000.000	Dishub
1	7	17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Rasio ijin trayek angkutan umum	1:18	1:16	3.000.000.000	1:15		3.000.000.000	1:14		3.000.000.000	Dishub
1	7	17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Penertiban kegiatan sepanjang Rel yang akan direaktivasi		60 %	500.000.000	80 %		500.000.000	100 %		500.000.000	Dishub
1	7	17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Panjang trase yang dibebaskan		60 %	1.000.000.000	80 %		1.000.000.000	100 %		1.000.000.000	Dishub
1	7	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase pembebasan lahan untuk Pembangunan Terminal		0%	2.000.000.000	80 %		2.000.000.000	100 %		2.000.000.000	Dishub

1	7	19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Presentase fasilitas perlengkapan jalan (% rata-rata daripada rambu-rambu, marka, dan guardrail)	7,70%	17,33	%	5.000.000.000	20,17	%	5.000.000.000	23,11	%	5.000.000.000	Dishub
1	7	20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	-Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000. - Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum	66,67%	83,33	%	2.500.000.000	100	%	2.500.000.000	100	%	2.500.000.000	Dishub
1	25		Komunikasi dan Informatika					-			-			-	Dishub
1	25	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tahapan pengendalian komunikasi dan informasi				159.135.000			163.909.050			168.826.322	Dishub
Total Belanja Renja								21.159.135.000			21.163.909.050			21.168.826.322	Dishub
Total Belanja								24.805.459.164			24.919.622.939			25.037.211.627	Dishub

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan pertanian, urusan kehutanan														
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020				
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
Belanja Rutin														
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terfasilitasinya kegiatan surat menyurat pelaksanaan tugas kedinasan		697.328.916			718.248.784			739.796.247	Distanbunhut	
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terfasilitasinya sarana dan prasarana aparatur		780.693.267			804.114.065			828.237.487	Distanbunhut	
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Terfasilitasinya pakain Dinas		30.925.235			31.852.992			32.808.582	Distanbunhut	
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya sistem pelaporan kinerja dan keuangan		62.754.887			64.637.534			66.576.660	Distanbunhut	
Total Belanja Rutin						1.571.702.306			1.618.853.375			1.667.418.976	Distanbunhut	
Belanja Renja														
2			Urusan Pilihan										Distanbunhut	
2	1		Pertanian										Distanbunhut	
2	1	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok tani yang terregistrasi		713.769.650			962.247.739			1.229.386.672	Distanbunhut	
2	1	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Peningkatan Produktivitas Utama:		5.067.174.124			5.219.189.348			5.375.765.028	Distanbunhut	
				Padi (Ton)	546.594	581033	Ton		587.424	Ton		593.886	Ton	Distanbunhut
				Jagung (Ton)	43.494	44945	Ton		45.440	Ton		45.939	Ton	Distanbunhut
				Ubi Kayu (Ton)	105.724	109251	Ton		110.453	Ton		111.668	Ton	Distanbunhut
2	1	17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah nilai transaksi di sentra pertanian/perkebunan (Rupiah)		1612175250		1707132372				1807682469	Distanbunhut	
2	1	18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan dan Hortikultura Utama:	24	4.636.732.000		25	4.928.998.021		26	5.239.053.386	Distanbunhut	
2	1	19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Kopi (ton)	27.489				5.534.299.826			5.860.270.086	Distanbunhut	
				Teh (unit)	17.304								Distanbunhut	
				Tembakau (unit)	6.792								Distanbunhut	
				Bawang merah (ton)	39.565								Distanbunhut	
				Cabai (Ton)	26.238								Distanbunhut	
				Kentang (ton)	4.136								Distanbunhut	
				Kubis (ton)	78.112								Distanbunhut	
				Tomat (ton)	64.474								Distanbunhut	
2	1	21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak										Distanbunhut	
2	1	22	Program peningkatan produksi hasil peternakan										Distanbunhut	
2	1	24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan										Distanbunhut	

2	2	Kehutanan				-			-			-	Distanbunhut
2	2	15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Diusahakan		546.363.500			562.754.405			579.637.037	Distanbunhut
2	2	16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis		1.782.312.000			1.835.781.360			1.890.854.801	Distanbunhut
2	2	17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Luas Hutan Rakyat	6440,41 Ha	371.315.000	6504,82 Ha		382.454.450	6569,86 Ha		393.928.084	Distanbunhut
Total Belanja Renja						19.956.302.782			20.955.542.949			22.376.577.562	Distanbunhut
Total Belanja						21.528.005.088			22.574.396.324			24.043.996.539	Distanbunhut

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan pekerjaan umum dan tata ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman														
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020				
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Operasional Perkantoran			866.322.461			892.312.135			919.081.499	Dispertasih
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana Penunjang Aparatur			2.405.728.773			2.477.900.636			2.552.237.655	Dispertasih
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Penunjang Disiplin Aparatur			-			-			-	Dispertasih
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas aparatur			-			-			-	Dispertasih
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya informasi kinerja dinas pertasih yang representatif			53.045.000			54.636.350			56.275.441	Dispertasih
Total Belanja Rutin						3.325.096.234			3.424.849.121			3.527.594.595	Dispertasih	
Belanja Renja														
1			Urusan Wajib			-			-				-	Dispertasih
1	3		Pekerjaan Umum			-			-				-	Dispertasih
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan			-			-				-	Dispertasih
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase kondisi jembatan baik	86,77 %	-	88,39 %	-	90 %	-	-	-	-	Dispertasih
1	3	24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	a		159.135.000			163.909.050				168.826.322	Dispertasih
1	4		Perumahan			-			-				-	Dispertasih
1	4	15	Program Pengembangan Perumahan	Presentase ketersediaan rumah layak huni	86,02 %			86,09 %				86,15 %		Dispertasih
1	4	15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase PSU yang sudah diserahterimakan	15 %			20 %				25 %		Dispertasih
1	4	15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase luas kawasan kumuh	7,00 %		20.243.419.540	5,86 %		20.820.722.126		4,69 %	21.415.343.790	Dispertasih
1	4	15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase infrastruktur perdesaan	9,03 %			8,75 %				8,40 %		Dispertasih
1	4	15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan formal yang belum terdata	15,00 %			20,00 %				25,00 %		Dispertasih
1	4	15	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen bidang keciptakaryaan	1 dokumen			1 dokumen				1 dokumen		Dispertasih
1	4	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan layanan air minum non perpipaan	46,66 %			43,33 %				40 %		Dispertasih
1	4	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan	40 %	15.242.286.063		60 %	15.699.554.645			80 %	16.170.541.284	Dispertasih
1	4	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Akses aman terhadap sanitasi	59%			100 %				100 %		Dispertasih

1	4	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah dokumen penyelenggaraan keserasian kawasan		60 %		80 %		100 %		Dispertasih
1	4	17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Jumlah pembinaan kelompok pengelola air bersih dan sanitasi (Kelompok)	Kelompok	385 kelompok	265.225.000	435 kelompok	273.181.750	485 kelompok	281.377.203	Dispertasih
1	4	18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase rumah yang rusak akibat bencana alam/sosial yang ditangani	100%	100 %	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	Dispertasih
1	4	19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Peningkatan capaian tingkat waktu tanggap (respon time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	40%	75 %		80 %		85 %		Dispertasih
1	4	19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	0%	70 %	1.952.179.091	75 %	2.010.744.464	80 %	2.071.066.798	Dispertasih
1	4	19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	0%	70 %		75 %		80 %		Dispertasih
1	4	19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3.000 sd 5.000 liter pada WMK	0%	70 %		75 %		80 %		Dispertasih
1	4	20	Program pengelolaan areal pemukiman	Rasio TPU persatuan penduduk (1/6)		01.37	896.459.651	01.40	923.353.441	01.44	951.054.044	Dispertasih
1	5		Penataan Ruang				-		-		-	Dispertasih
1	5	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase ketersediaan Informasi mengenai RTR Wilayah kab/kota beserta rencana rincian melalui peta analog dan peta digital		50,00 %	113.940.660	55,00 %	117.358.880	60,00 %	120.879.646	Dispertasih
1	5	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase Jumlah Bangunan Ber SLF (Sertifikat Layak Fungsi)		3 %		4 %		5 %		Dispertasih
1	5	16	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase bangunan ber-IMB	7%	10 %		11 %		12 %		Dispertasih
1	5	16	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase survey dan pemetaan		30 %	318.270.000	40 %	327.818.100	50 %	337.652.643	Dispertasih
1	5	16	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase penyelenggaraan pemanfaatan ruang		51 %		68 %		85 %		Dispertasih
1	5	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase luas pemanfaatan lahan budidaya non pertanian yang berijin sesuai rencana tata ruang	55,50%	57 %	149.876.526	57,5 %	154.372.821	58 %	159.004.006	Dispertasih
1	6		Perencanaan Pembangunan				-		-		-	Dispertasih

1	6	15	Program Pengembangan data/informasi	Persentase jumlah dokumen perencanaan/data dan informasi bidang keciptakaryaan		100 %			100 %		100 %		305.305.520	Dispertasih
1	6	15	Program Pengembangan data/informasi	Persentase jumlah bangunan pemerintah yang sudah terdata secara teknis administrasi		56 %	287.779.734		73 %	296.413.126	90 %		305.305.520	Dispertasih
1	6	15	Program Pengembangan data/informasi	Jumlah pedoman tentang pelaksanaan pembangunan gedung negara di Kabupaten		100 %			100 %		100 %			Dispertasih
1	6	15	Program Pengembangan data/informasi	Jumlah dokumen HSGBN		100 %			100 %		100 %			Dispertasih
1	6	18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Jumlah dokumen di kawasan strategis		49 dokumen	84.872.000		65 dokumen	87.418.160	82 dokumen		90.040.705	Dispertasih
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan		100 %	-		100 %	-	100 %		-	Dispertasih
1	8		Lingkungan Hidup				-			-			-	Dispertasih
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang dapat dikelola pemerintah	19,06%	60 %			80 %		80 %			Dispertasih
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rasio penduduk yang terlayani TPS/ TPST terhadap penduduk yang		1:10	11.415.784.480		1:6	11.758.258.014	1:5		12.111.005.754	Dispertasih
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rasio penduduk yang terlayani truk sampah terhadap penduduk yang belum terlayani		1:9			1:6		1:5			Dispertasih
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase Luas RTH Perkotaan		0,21 %			0,22 %		0,23 %			Dispertasih
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah lokasi penataan dan pemeliharaan RTH Perkotaan		22 lokasi	1.060.900.000		24,00 lokasi	1.092.727.000	26,00 lokasi		1.125.508.810	Dispertasih
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa				-			-			-	Dispertasih
1	22	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase pendampingan dan urusan bersama sarana dan prasarana lingkungan permukiman		100 %	127.308.000		100 %	131.127.240	100 %		135.061.057	Dispertasih
Total Belanja Renja							54.317.435.745			55.856.958.817			57.442.667.581	Dispertasih
Total Belanja							57.642.531.979			59.281.807.938			60.970.262.176	Dispertasih

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan															
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab		
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020					
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp				
Belanja Rutin															
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase memenuhi kebutuhan dalam rangka administrasi perkantoran	81	%	943.244.590	83	%	971.541.928	85	%	1.000.688.186	Disnakan	
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	80	%	981.332.500	82,50	%	1.010.772.475	84	%	1.041.095.649	Disnakan	
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase pemenuhan sarana peningkatan disiplin aparatur (%)			-			-			-	Disnakan	
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (dokumen)	18	Dok	106.090.000	17	Dok	109.272.700	17	Dok	112.550.881	Disnakan	
Total Belanja Rutin							2.030.667.090			2.091.587.103			2.154.334.716	Disnakan	
Belanja Renja															
2	1		Urusan Pilihan Pertanian				-			-			-	Disnakan	
2	1	21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	- Persentase status kesehatan hewan (%)	69,4	71,5	%		72	%		72,50	%		Disnakan
				- Jumlah pelayanan pencegahan dan pengendalian PHMS (ekor)	72300	69.707	Ekor	1.750.000.000	71.588	Ekor	2.250.000.000	73.908	Ekor	2.587.500.000	Disnakan
2	1	22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah kelompok ternak terbina dalam mendorong peningkatan produksi hasil peternakan (kelompok)	190	58	Kel		60	Kel		62	Kel		Disnakan
				Populasi ternak ruminansia besar (ekor)	61.117	63.330	Ekor	4.264.605.820	63.805	Ekor	4.392.543.995	64.283	Ekor	4.524.320.314	Disnakan
				Populasi ternak ruminansia kecil (ekor)	282.530	298.554	Ekor		304.114	Ekor		809.787	Ekor		Disnakan
				Populasi unggas (ekor)	6.586.513	7.326.814	Ekor		7.600.682	Ekor		7.889.304	Ekor		Disnakan
2	1	23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah pelaku pengolahan dan pemasaran hasil peternakan terbina (Orang)	125	195	Orang		215	Orang		183	Orang		Disnakan
				Persentase sarana prasarana pemasaran pengolahan promosi hasil ternak (%)	40,90	77,40	%	3.010.200.000	100	%	1.672.000.000	-	%	550.000.000	Disnakan
2	1	24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah peternak yang menerapkan teknologi peternakan (Orang)	46	20	Orang	687.993.650	25	Orang	708.633.460	28	Orang	729.892.463	Disnakan
2	1	25	Program Penjaminan Produk Asal Hewan/Ternak	Pengawasan Mutu Produk Asal Hewan (PAH) yang HAUS (%)	82,60	82,04	%	1.527.483.820	84,06	%	1.573.308.335	85,08	%	1.620.507.585	Disnakan
2	5		Kelautan dan Perikanan				-			-			-	Disnakan	

2	5	20	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah pelaku usaha budidaya perikanan bersertifikat dan pembenih pembesar terbina (Orang)	321	1.626	Orang	5.738.445.000	1.656	Orang	5.800.160.000	1.125	Orang	2.306.730.306	Disnakan
				Jumlah produksi benih ikan (000 ekor)		1.851.780	Ekor		1.944.369	Ekor		2.041.500	Ekor		Disnakan
2	5	23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah pelaku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan terbina (Orang)	90	240	Orang	835.000.000	250	Orang	898.000.000	260	Orang	935.000.000	Disnakan
				Jumlah SDM pengolah peternakan terlatih (Orang)	100	40	Orang		40	Orang		40	Orang		Disnakan
				Jumlah fasilitasi saraa prasarana pengolahan peternakan (satuan)		5	Satuan		5	Satuan		5	Satuan		Disnakan
Total Belanja Renja							17.813.728.290			17.294.645.789			13.253.950.668	Disnakan	
Total Belanja							19.844.395.380			19.386.232.892			15.408.285.384	Disnakan	

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan sosial														
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020				
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	presentase pelayana adminitrasi perkantoran			1.434.408.517			1.477.440.772			1.521.763.996	Dinsos
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur			3.558.682.960			3.665.443.449			3.775.406.752	Dinsos
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur			159.135.000			163.909.050			168.826.322	Dinsos
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			159.135.000			163.909.050			168.826.322	Dinsos
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			90.176.500			92.881.795			95.668.249	Dinsos
Total Belanja Rutin							5.401.537.977			5.563.584.116			5.730.491.640	Dinsos
Belanja Renja														
1			Urusan Wajib				-			-			-	Dinsos
1	13		Sosial				-			-			-	Dinsos
1	13	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lai	rata - rata persentase pmks memiliki kemandirian ekonomi			4.559.960.380			4.696.759.191			4.837.661.967	Dinsos
1	13	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase rata - rata PMKS yang ditangani mampu menghadapi situasi kritis			5.479.654.590			5.644.044.228			5.813.365.555	Dinsos
1	13	17	Program pembinaan anak terlantar	Rata - rata anak yang ditangani mampu mendapat kesejahteraan sosial yang harmoni			1.407.814.300			1.450.048.729			1.493.550.191	Dinsos
1	13	18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Rata - rata penyandang cacat yang ditangani berfungsi secara fisik			1.821.724.435			1.876.376.168			1.932.667.453	Dinsos
1	13	19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif melayani PMKS			138.977.900			143.147.237			147.441.654	Dinsos
1	13	20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Rata - rata PMKS yang ditangani mampu berinteraksi sosial			303.947.850			313.066.286			322.458.274	Dinsos
1	13	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentasi warga masyarakat yang menjadi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan kalangan dunia usaha yang berperan dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial			2.756.271.245			2.838.959.382			2.924.128.164	Dinsos
Total Belanja Renja							16.468.350.700			16.962.401.223			17.471.273.258	Dinsos

Total Belanja					21.869.888.677			22.525.985.337			23.201.764.897	Dinsos
---------------	--	--	--	--	----------------	--	--	----------------	--	--	----------------	--------

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan energi dan sumber daya																															
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab																		
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020																							
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																						
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terwujudnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran									789.468.735							813.152.797								837.547.381	SDAPE		
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur									1.583.923.700							1.631.441.411								1.680.384.653	SDAPE		
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tercapainya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									-							-								-	SDAPE		
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									40.526.380							41.742.171								42.994.437	SDAPE		
Total Belanja Rutin													2.413.918.815							2.486.336.379							2.560.926.471	SDAPE			
Belanja Renja																															
2			Urusan Pilihan										-							-								-	SDAPE		
2	3		Energi dan Sumberdaya Mineral										-							-								-	SDAPE		
2	3	15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Prosentase ketaatan good mining practice terhadap aturan pertambangan bagi usaha pertambangan berijin									-							-								-	SDAPE		
2	3	16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Jumlah terbangunnya sumur resapan									-							-								-	SDAPE		
2	3	17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi									-							-								-	SDAPE		
2	3	18	Program Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Prosentase koordinasi dan monev pengelolaan energi dan sumber daya mineral									25 %							50 %								75 %	SDAPE		
1			Urusan Wajib										-							-								-	SDAPE		
1	3		Pekerjaan Umum										-							-								-	SDAPE		
1	3	24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Prosentase kondisi jaringan irigasi kewenangan Kabupaten									12.035.061.780							12.396.113.633								12.767.997.042	SDAPE		
1	3	26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanganan drainase utama									78 Persen							88 Persen								100 Persen	SDAPE		
1	3	26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Prosentase pembebasan lahan dan pembangunan embung									40 Persen							87 Persen								100 Persen	SDAPE		
1	3	26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase pembebasan lahan sekitar mata air (2 lokasi/ titik dari 8 lokasi/ titik)									12 Persen							18 Persen								25 Persen	SDAPE		

1	3	26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Rasio jaringan irigasi		72,55	Persen	12.000.000.000	77,55	Persen	12.000.000.000	82,55	Persen	12.000.000.000	SDAPE
1	3	28	Program pengendalian banjir	Prosentase penanganan drainase perkotaan											SDAPE
1	3	28	Program pengendalian banjir	Persentase terbangunnya polder pengendalian banjir (Soreang, Cangkuang, dan Rancaekek)		15 %		5.000.000.000	4 %		17.000.000.000	50 %		7.000.000.000	SDAPE
1	3	28	Program pengendalian banjir	Persentase penanganan drainase utama dan penanganan pasca bencana		1168 %		30.000.000.000	1.334 %		30.000.000.000	15 %		30.000.000.000	SDAPE
Total Belanja Renja								68.485.061.780			84.796.113.633			70.817.997.042	SDAPE
Total Belanja								70.898.980.595			87.282.450.013			73.378.923.513	SDAPE

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan tenaga kerja, Urusan transmigrasi													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.097.874.992			1.130.811.242			1.164.735.579	Disnaker
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur		635.903.460			654.980.564			674.629.981	Disnaker
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Penunjang kerja aparatur		65.245.350			67.202.711			69.218.792	Disnaker
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		-			-			-	Disnaker
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		68.534.140			70.590.164			72.707.869	Disnaker
Total Belanja Rutin						1.867.557.942			1.923.584.680			1.981.292.220	Disnaker
Belanja Renja						-			-			-	Disnaker
2			Urusan Pilihan			-			-			-	Disnaker
2	8		Ketrasmigrasian			-			-			-	Disnaker
2	8	17	Program Transmigrasi Regional	Jumlah lokasi transmigrasi yang terjajagi		318.270.000			327.818.100			337.652.643	Disnaker
1			Urusan Wajib			-			-			-	Disnaker
1	14		Ketenagakerjaan			-			-			-	Disnaker
1	14	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		16.969.095.500			17.478.168.365			18.002.513.416	Disnaker
1	14	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		9.335.920.000			9.615.997.600			9.904.477.528	Disnaker
1	14	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Prosentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)		3.094.634.691			3.187.473.732			3.283.097.944	Disnaker
Total Belanja Renja						29.717.920.191			30.609.457.797			31.527.741.531	Disnaker
Total Belanja						31.585.478.133			32.533.042.477			33.509.033.751	Disnaker

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan penunjang pemerintahan														
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020				
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran			949.077.957			977.550.296			1.006.876.805	Inspektorat
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur			390.326.328			402.036.118			414.097.201	Inspektorat
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur			71.610.750			73.759.073			75.971.845	Inspektorat
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase peserta sosialisasi peraturan perundang - undangan			209.273.134			215.551.328			222.017.868	Inspektorat
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan			65.775.800			67.749.074			69.781.546	Inspektorat
Total Belanja Rutin							1.686.063.969			1.736.645.888			1.788.745.265	Inspektorat
Belanja Renja														
1			Urusan Wajib				-			-			-	Inspektorat
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				-			-			-	Inspektorat
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase peningkatan efektivitas kinerja pemerintah daerah (%)				100 %					100 %	Inspektorat
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	(Persentase LAKIP SKPD yang sesuai dengan ketentuan Menpan)			6.577.580.000			6.774.907.400			6.978.154.622	Inspektorat
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah kecamatan yang telah memiliki data potensi wilayah										Inspektorat
1	20	21	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang terlatih (orang)			-			-			-	Inspektorat
Total Belanja Renja							6.577.580.000			6.774.907.400			6.978.154.622	Inspektorat
Total Belanja							8.263.643.969			8.511.553.288			8.766.899.887	Inspektorat

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan jumlah kebutuhan administrasi perkantoran (%)		839.127.397			864.301.219			890.230.256	Kesbangpol
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor		656.267.380			675.955.402			696.234.064	Kesbangpol
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		35.805.375			36.879.536			37.985.922	Kesbangpol
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya anggaran untuk laporan kegiatan selama 1 tahun		66.836.700			68.841.801			70.907.055	Kesbangpol
Total Belanja Rutin					1.598.036.853			1.645.977.958				1.695.357.297	Kesbangpol
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-			-			-	Kesbangpol
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			-			-			-	Kesbangpol
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase peningkatan masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini		2.292.068.749			2.360.830.811			2.431.655.736	Kesbangpol
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan	100 %	2.040.166.423		100 %	2.101.371.415		100 %	2.164.412.558	Kesbangpol
1	19	21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam politik	100 %	651.773.941		100 %	671.327.159		100 %	691.466.973	Kesbangpol
Total Belanja Renja					4.984.009.112			5.133.529.385				5.287.535.267	Kesbangpol
Total Belanja					6.582.045.965			6.779.507.344				6.982.892.564	Kesbangpol

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan kesehatan														
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020				
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran rumah sakit			1.173.869.045			1.209.085.117			1.245.357.670	RSUD Cicalengka
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase ketersediaan sarana prasarana aparatur			526.647.734			542.447.166			558.720.581	RSUD Cicalengka
x	xx	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur											RSUD Cicalengka
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	terpenuhinya kebutuhan petugas medis dan non medis rumah sakit yang terlatih			477.405.000			491.727.150			506.478.965	RSUD Cicalengka
Total Belanja Rutin						2.177.921.780			2.243.259.433			2.310.557.216	RSUD Cicalengka	
Belanja Renja						-			-				-	RSUD Cicalengka
1			Urusan Wajib			-			-				-	RSUD Cicalengka
1	2		Kesehatan			-			-				-	RSUD Cicalengka
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOR; LOS;TOI	BOR 60 -85; LOS 6-9; TOI 1-3	21.692.328.220	BOR 60 -85; LOS 6-9; TOI 1-3	22.343.098.067	BOR 60 -85; LOS 6-9; TOI 1-3	23.013.391.009				RSUD Cicalengka
1	2	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang memenuhi standar	100 %	-	100 %	-	100 %	-			-	RSUD Cicalengka
1	2	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarkes (RS) di Kab/Kota (%)	100 %	636.540.000	100 %	655.636.200	100 %	675.305.286				RSUD Cicalengka
1	2	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah RS dengan kondisinya (standar pelayanannya, dll)		-		-		-			-	RSUD Cicalengka
Total Belanja Renja						22.328.868.220			22.998.734.267			23.688.696.295	RSUD Cicalengka	
Total Belanja						24.506.790.000			25.241.993.700			25.999.253.511	RSUD Cicalengka	

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan kesehatan														
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020				
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Ketersediaan sarana Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.775.644.157			2.858.913.482			2.944.680.887	RSUD Majalaya
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			141.042.354			145.273.625			149.631.833	RSUD Majalaya
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Ketersediaan sarana Penunjang Peningkatan Disiplin aparatur			133.097.150			137.090.064			141.202.766	RSUD Majalaya
Total Belanja Rutin						3.049.783.661			3.141.277.171			3.235.515.486	RSUD Majalaya	
Belanja Renja														
1			Urusan Wajib			-			-				-	RSUD Majalaya
1	2		Kesehatan			-			-				-	RSUD Majalaya
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOR; LOS;TOI	BOR 60 - 85; LOS 6-9; TOI 1-3	65.272.176.339		BOR 60 -85; LOS 6-9; TOI 1-3	67.230.341.629		BOR 60 -85; LOS 6-9; TOI 1-3		69.247.251.878	RSUD Majalaya
1	2	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan											RSUD Majalaya
1	2	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin											RSUD Majalaya
1	2	26	Program pengaayaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit											RSUD Majalaya
1	2	28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan											RSUD Majalaya
Total Belanja Renja						65.272.176.339			67.230.341.629				69.247.251.878	RSUD Majalaya
Total Belanja						68.321.960.000			70.371.618.800				72.482.767.364	RSUD Majalaya

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD. Yang menangani urusan kesehatan													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			971.360.040			1.000.500.841			1.030.515.866	RSUD Soreang
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			275.109.866			283.363.162			291.864.057	RSUD Soreang
Total Belanja Rutin						1.246.469.906			1.283.864.003			1.322.379.923	RSUD Soreang
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-			-			-	RSUD Soreang
1	2		Kesehatan			-			-			-	RSUD Soreang
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	BOR; LOS;TOI		63.256.250.094	BOR 60 -85; LOS 6-9; TOI 1-3		65.153.937.597	BOR 60 -85; LOS 6-9; TOI 1-3		67.108.555.725	RSUD Soreang
1	2	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan										RSUD Soreang
1	2	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin										RSUD Soreang
1	2	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah RS dengan kondisinya (standar pelayanannya, dll)		30.766.100.000			31.689.083.000			32.639.755.490	RSUD Soreang
Total Belanja Renja						94.022.350.094			96.843.020.597			99.748.311.215	RSUD Soreang
Total Belanja						95.268.820.000			98.126.884.600			101.070.691.138	RSUD Soreang

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat														
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020				
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran			691.457.489			712.201.213			733.567.250	Satpol PP
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran			1.577.834.134			1.625.169.158			1.673.924.233	Satpol PP
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur			554.850.700			571.496.221			588.641.108	Satpol PP
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan			106.090.000			109.272.700			112.550.881	Satpol PP
Total Belanja Rutin						2.930.232.323			3.018.139.292			3.108.683.471	Satpol PP	
Belanja Renja														
1			Urusan Wajib			-			-				-	Satpol PP
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			-			-				-	Satpol PP
1	19	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penegakan Perda	100 %				100 %					Satpol PP
1	19	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rata- rata jumlah hansip/ linmas per RT			11.017.102.768			11.347.615.851			11.688.044.327	Satpol PP
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan patroli petugas	3 Kali/ hari		2.124.558.340		3 Kali/ hari				2.253.943.943	Satpol PP
1	19	20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat			318.270.000			327.818.100			337.652.643	Satpol PP
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Terwujudnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			-			-			-	Satpol PP
Total Belanja Renja						13.459.931.108			13.863.729.042			14.279.640.913	Satpol PP	
Total Belanja						16.390.163.431			16.881.868.334			17.388.324.384	Satpol PP	

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menanggapi urusan penunjang pemerintahan														
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020				
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			17.592.588.896				18.120.366.562			18.663.977.559	Setda
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			9.762.932.250				10.055.820.218			10.357.494.824	Setda
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur			848.720.000				874.181.600			900.407.048	Setda
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	% pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Menunjang Peningkatan Keterampilan dan Wawasan sumberdaya aparatur SETDA			53.045.000			54.636.350			56.275.441	Setda
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan			98.769.790			101.732.884			104.784.870	Setda
Total Belanja Rutin							28.356.055.936			29.206.737.614			30.082.939.742	Setda
Belanja Renja														
1			Urusan Wajib			-				-			-	Setda
1	6		Perencanaan Pembangunan			-				-			-	Setda
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban			610.017.500			628.318.025			647.167.566	Setda
1	9		Pertanahan			-				-			-	Setda
1	9	16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase fasilitasi proses pengurusan perijinan			530.450.000			546.363.500			562.754.405	Setda
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			-				-			-	Setda
1	19	49	Program Peningkatan Kehidupan Beragama	Rasio sarana peribadatan terhadap jumlah penduduk										Setda
1	19	49	Program Peningkatan Kehidupan Beragama	Persentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang kerukunan dalam kehidupan beragama			2.746.766.642			2.829.169.641			2.914.044.730	Setda
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			-				-			-	Setda
1	20	16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Jumlah fasilitasi pertemuan KDH/WKDH dengan masyarakat dan stakeholder lainnya (kali)			5.015.404.750			5.165.866.893			5.320.842.899	Setda

1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					2.280.935.000				2.349.363.050			2.419.843.942	Setda
1	20	18	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah					-				-			-	Setda
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	tercapainya peningkatan				4.455.780.000				4.589.453.400			4.727.137.002	Setda
1	20	25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintah				1.400.388.000				1.442.399.640			1.485.671.629	Setda
1	20	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan (Perda, Perbup, Kepbup)				6.434.964.805				6.628.013.750			6.826.854.162	Setda
1	20	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah SKPD yang telah ditata secara kelembagaan				1.538.305.000				1.584.454.150			1.631.987.775	Setda
1	20	48	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					106.090.000				109.272.700			112.550.881	Setda
1	25		Komunikasi dan Informatika					-				-			-	Setda
1	25	17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan				159.135.000				163.909.050			168.826.322	Setda
1	25	50	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase kerjasama dengan Media Massa				530.450.000				546.363.500			562.754.405	Setda
1	25	51	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersampainya Informasi yang cepat dan akurat semua program dan kegiatan kepada publik				212.180.000				218.545.400			225.101.762	Setda
Total Belanja Renja								26.020.866.697				26.801.492.698			27.605.537.479	Setda
Total Belanja								54.376.922.633				56.008.230.312			57.688.477.221	Setda

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

PD: Yang menangani urusan penunjang pemerintahan														
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020				
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.133.256.788				4.257.254.492			4.384.972.127	Setwan
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			40.636.272.075				1.273.360.237			1.311.561.044	Setwan
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur			307.550.666				316.777.186			326.280.502	Setwan
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			167.375.010				172.396.261			177.568.148	Setwan
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			250.979.235				258.508.612			266.263.870	Setwan
Total Belanja Rutin						45.495.433.774				6.278.296.787			6.466.645.691	Setwan
Belanja Renja						-				-			-	Setwan
1			Urusan Wajib			-				-			-	Setwan
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			-				-			-	Setwan
1	20	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			16.356.530.779				16.847.226.702			17.352.643.504	Setwan
1	20	25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			-				-			-	Setwan
1	20	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			215.857.079				222.332.792			229.002.776	Setwan
Total Belanja Renja						16.572.387.859				17.069.559.494			17.581.646.279	Setwan
Total Belanja						62.067.821.633				23.347.856.282			24.048.291.970	Setwan

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Cileunyi													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran %		180.817.089			186.241.601			191.828.849	Cileunyi
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur		160.567.215			165.384.231			170.345.758	Cileunyi
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penunjang kerja aparatur		33.842.710			34.857.991			35.903.731	Cileunyi
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur		-			-			-	Cileunyi
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		11.972.257			12.331.424			12.701.367	Cileunyi
Total Belanja Rutin						387.199.270			398.815.248			410.779.706	Cileunyi
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-			-			-	Cileunyi
1	1		Pendidikan			-			-			-	Cileunyi
1	1	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini		-			-			-	Cileunyi
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Rata-rata angka partisipasi murni jenjang SMA/ sederajat tingkat kecamatan		53.045.000			54.636.350			56.275.441	Cileunyi
1	2		Kesehatan			-			-			-	Cileunyi
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rata-rata presentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompetenskala kecamatan %		53.045.000			54.636.350			56.275.441	Cileunyi
1	3		Pekerjaan Umum			-			-			-	Cileunyi
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rata-rata presentase pembangunan saluran drainase / gorong-gorong tingkat kecamatan									Cileunyi
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rata-rata presentase jalan mantap (baik dan sedang) kabupaten lingkungankecamatan		74.263.000			76.490.890			78.785.617	Cileunyi
1	6		Perencanaan Pembangunan			-			-			-	Cileunyi
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata presentase usulan program / kegiatan kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD (%)		47.989.812			49.429.506			50.912.391	Cileunyi

1	8	Lingkungan Hidup					-			-			-	Cileunyi
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Presentase cakupan pelayanan persampahan (%)			53.045.000			54.636.350			56.275.441	Cileunyi
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rata-rata presentase pengelolaan RTH tingkat kecamatan			26.522.500			27.318.175			28.137.720	Cileunyi
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil				-			-			-	Cileunyi
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rata-rata masyarakat yang sudah memiliki KK lingkup kecamatan Rata-rata masyarakat yang sudah memiliki KTP lingkup kecamatan			37.985.525			39.125.090			40.298.843	Cileunyi
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				-			-			-	Cileunyi
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	jumlah kegiatan pembinaan organisasi perempuan			46.546.988			47.943.397			49.381.699	Cileunyi
1	18		Kepemudaan dan Olahraga				-			-			-	Cileunyi
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan			-			-			-	Cileunyi
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	jumlah pembinaan cabang olahraga			21.218.000			21.854.540			22.510.176	Cileunyi
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				-			-			-	Cileunyi
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	jumlah kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			70.422.542			72.535.218			74.711.275	Cileunyi
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	jumlah penanganan kejadian bencana alam			45.204.949			46.561.097			47.957.930	Cileunyi
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	jumlah penanganan korban bencana alam			33.354.696			34.355.337			35.385.997	Cileunyi
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				-			-			-	Cileunyi
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	jumlah peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan			5.654.597			5.824.235			5.998.962	Cileunyi
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	jumlah pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH			132.612.500			136.590.875			140.688.601	Cileunyi

1	22	Pemberdayaan Masyarakat Desa					-			-			-	Cileunyi
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	jumlah organisasi masyarakat desa			47.740.500			49.172.715			50.647.896	Cileunyi
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	jumlah pelatihan			46.069.583			47.451.670			48.875.220	Cileunyi
Total Belanja Renja							794.720.190			818.561.796			843.118.650	Cileunyi
Total Belanja							1.181.919.460			1.217.377.044			1.253.898.355	Cileunyi

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Cimenyan													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional perkantoran		158.926.249		163.694.036		168.604.857			Cimenyan
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		246.128.800		253.512.664		261.118.044			Cimenyan
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pegawai yang memenuhi auran kedisiplinan		17.504.850		18.029.996		18.570.895			Cimenyan
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Peraturan Perundang-undangan dan pelayanan publik		18.035.300		18.576.359		19.133.650			Cimenyan
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan		14.003.880		14.423.996		14.856.716			Cimenyan
Total Belanja Rutin						454.599.079		468.237.051		482.284.163			Cimenyan
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-		-		-			Cimenyan
1	1		Pendidikan			-		-		-			Cimenyan
1	1	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah kegiatan		10.609.000		10.927.270		11.255.088			Cimenyan
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Frekwensi penyuluhan/ sosialisasi berbagai informasi pendidikan bagi siswa sekolah menengah		63.654.000		65.563.620		67.530.529			Cimenyan
1	1	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah masyarakat		31.827.000		32.781.810		33.765.264			Cimenyan
1	2		Kesehatan			-		-		-			Cimenyan
1	2	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase penggunaan air bersih oleh masyarakat di kecamatan		42.436.000		43.709.080		45.020.352			Cimenyan
1	3		Pekerjaan Umum			-		-		-			Cimenyan
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah pembangunan/ perbaikan saluran drainase/ gorong-gorong									Cimenyan
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan mantap kabupaten (baik dan sedang) lingkup kecamatan		127.308.000		131.127.240		135.061.057			Cimenyan
1	6		Perencanaan Pembangunan			-		-		-			Cimenyan
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan program/kegiatan kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD		26.522.500		27.318.175		28.137.720			Cimenyan

1	8	Lingkungan Hidup					-						-	Cimemyan		
1	8	24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				-						-	Cimemyan		
1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil					-						-	Cimemyan		
1	10	15 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penertiban KTP lingkup kecamatan				12.730.800						13.112.724	13.506.106	Cimemyan	
1	11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					-						-	Cimemyan		
1	11	18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah kelembagaan organisasi perempuan ditingkat Kecamatan				31.827.000						32.781.810	33.765.264	Cimemyan	
1	18	Kepemudaan dan Olahraga					-						-	Cimemyan		
1	18	17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah peserta dan jumlah paket yang diberikan				13.791.700						14.205.451	14.631.615	Cimemyan	
1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					-						-	Cimemyan		
1	19	16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/dektesi dini				31.827.000						32.781.810	33.765.264	Cimemyan	
1	19	17 Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan				29.705.200						30.596.356	31.514.247	Cimemyan	
1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					-						-	Cimemyan		
1	20	20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah urusan yang dilaksanakan oleh kecamatan sesuai pelimpahan kewenangan				159.135.000						163.909.050	168.826.322	Cimemyan	
1	22	Pemberdayaan Masyarakat Desa					-						-	Cimemyan		
1	22	15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat kecamatan				31.827.000						32.781.810	33.765.264	Cimemyan	
1	22	18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah desa swakarsa dan jumlah desa swasembada				31.827.000						32.781.810	33.765.264	Cimemyan	
Total Belanja Renja							645.027.200						664.378.016	684.309.356	Cimemyan	
Total Belanja							1.099.626.279							1.132.615.067	1.166.593.519	Cimemyan

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Cilengkrang												
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						SKPD Penanggung jawab		
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Belanja Rutin												
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran		213.563.914		219.970.832		226.569.957	Cilengkrang	
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	terbangunnya rumah dinas		232.337.100		239.307.213		246.486.429	Cilengkrang	
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya perlengkapan dinas beserta perlengkapannya		21.005.820		21.635.995		22.285.074	Cilengkrang	
x	xx	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	program fasilitas pindah/purna tugas pns		-		-		-	Cilengkrang	
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	jumlah sosialisasi		15.913.500		16.390.905		16.882.632	Cilengkrang	
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	laporan dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		8.381.110		8.632.543		8.891.520	Cilengkrang	
Total Belanja Rutin						491.201.444		505.937.488		521.115.612	Cilengkrang	
Belanja Renja												
1			Urusan Wajib			-		-		-	Cilengkrang	
1	1		Pendidikan			-		-		-	Cilengkrang	
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	terselenggaranya pembinaan kepada forum masyarakat peduli pendidikan		53.045.000		54.636.350		56.275.441	Cilengkrang	
1	2		Kesehatan			-		-		-	Cilengkrang	
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	terlaksananya penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu		53.045.000		54.636.350		56.275.441	Cilengkrang	
1	3		Pekerjaan Umum			-		-		-	Cilengkrang	
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	tersedianya saluran drainase							Cilengkrang	
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	terpeliharanya jalan		91.767.850		94.520.886		97.356.512	Cilengkrang	
1	6		Perencanaan Pembangunan			-		-		-	Cilengkrang	
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik		42.436.000		43.709.080		45.020.352	Cilengkrang	
1	8		Lingkungan Hidup			-		-		-	Cilengkrang	
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		31.827.000		32.781.810		33.765.264	Cilengkrang	
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	terpeliharanya RTH		26.522.500		27.318.175		28.137.720	Cilengkrang	

1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil					-			-			-	Cilengkrang
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	meningkatnya pelayanan publik dan bidang kependudukan			30.235.650			31.142.720			32.077.001	Cilengkrang
1	11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					-			-			-	Cilengkrang
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan			36.961.756			38.070.609			39.212.727	Cilengkrang
1	18	Kepemudaan dan Olahraga					-			-			-	Cilengkrang
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	terbinanya organisasi kepemudaan			18.035.300			18.576.359			19.133.650	Cilengkrang
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasaryakatan Olahraga	terbinanya cabang olahraga prestasi di tngkat kecamatan			21.218.000			21.854.540			22.510.176	Cilengkrang
1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					-			-			-	Cilengkrang
1	19	16	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	meningkatnya kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik mencegah kejahatan			58.519.244			60.274.821			62.083.066	Cilengkrang
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	terlaksananya pelaksanaan hari besar islam			42.393.564			43.665.371			44.975.332	Cilengkrang
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	tersedianya sarana dan prasaran evakuasi korban bencana alam			11.882.080			12.238.542			12.605.699	Cilengkrang
1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					-			-			-	Cilengkrang
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	terdatanya potensi sumber sumber pendapatan daeah			5.304.500			5.463.635			5.627.544	Cilengkrang
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	pengendali managemen pelaksanaan kebijakan KDH			84.702.256			87.243.324			89.860.623	Cilengkrang
1	22	Pemberdayaan Masyarakat Desa					-			-			-	Cilengkrang
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	terselenggaranya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan			18.565.750			19.122.723			19.696.404	Cilengkrang
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	terselenggaranya pembinaan administrasi pemerintahan desa			35.540.150			36.606.355			37.704.545	Cilengkrang
Total Belanja Renja							662.001.600			681.861.648			702.317.497	Cilengkrang
Total Belanja							1.153.203.044			1.187.799.136			1.223.433.110	Cilengkrang

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Bojongsoang													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran		174.430.971		179.663.900		185.053.817		Bojongsoang	
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		379.982.553		391.382.030		403.123.490		Bojongsoang	
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		39.094.165		40.266.990		41.475.000		Bojongsoang	
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Publik		15.913.500		16.390.905		16.882.632		Bojongsoang	
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		37.343.680		38.463.990		39.617.910		Bojongsoang	
Total Belanja Rutin						646.764.869		666.167.815		686.152.850		Bojongsoang	
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-		-		-		Bojongsoang	
1	2		Kesehatan			-		-		-		Bojongsoang	
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	persentase persalinannya ditolong oleh Tenaga Kesehatan yang berkompeten skala Kecamatan		21.218.000		21.854.540		22.510.176		Bojongsoang	
1	3		Pekerjaan Umum			-		-		-		Bojongsoang	
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong								Bojongsoang	
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan mantap kabupaten (baik dan sedang) lingkup kecamatan		206.875.500		213.081.765		219.474.218		Bojongsoang	
1	6		Perencanaan Pembangunan			-		-		-		Bojongsoang	
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	presentase usulan program/kegiatan kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD		47.740.500		49.172.715		50.647.896		Bojongsoang	
1	8		Lingkungan Hidup			-		-		-		Bojongsoang	
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan Pelayanan sampah skala kecamatan		25.673.780		26.443.993		27.237.313		Bojongsoang	
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pengelolaan RTH		31.827.000		32.781.810		33.765.264		Bojongsoang	
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil			-		-		-		Bojongsoang	

1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan KK dan KTP lingkup Kecamatan tahun berkenan				33.948.800				34.967.264			36.016.282	Bojongsoang
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					-				-			-	Bojongsoang
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan di tingkat Kecamatan (LSM, dan Non LSM) (Satuan Organisasi)				37.131.500				38.245.445			39.392.808	Bojongsoang
1	13		Sosial					-				-			-	Bojongsoang
1	13	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase peningkatan potensi petugas sosial tentang PMKS				-				-			-	Bojongsoang
1	18		Kepemudaan dan Olahraga					-				-			-	Bojongsoang
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pemuda berprestasi dalam pembangunan skala kecamatan				12.730.800				13.112.724			13.506.106	Bojongsoang
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat kecamatan				25.461.600				26.225.448			27.012.211	Bojongsoang
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					-				-			-	Bojongsoang
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini				45.738.051				47.110.193			48.523.499	Bojongsoang
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan				47.443.448				48.866.751			50.332.754	Bojongsoang
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Penanganan kejadian Bencana Alam				72.141.200				74.305.436			76.534.599	Bojongsoang
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					-				-			-	Bojongsoang
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan				9.017.650				9.288.180			9.566.825	Bojongsoang
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan tingkat Kecamatan				106.090.000				109.272.700			112.550.881	Bojongsoang
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa					-				-			-	Bojongsoang

1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat dalam Pembangunan tingkat Kecamatan				61.175.738			63.011.010			64.901.340	Bojongsoang
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	- Jumlah Desa Swakarsa - Jumlah Desa Swasembada				41.014.394			42.244.826			43.512.171	Bojongsoang
Total Belanja Renja								825.227.961			849.984.800			875.484.344	Bojongsoang
Total Belanja								1.471.992.830			1.516.152.615			1.561.637.194	Bojongsoang

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Margahayu				-									-		
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program			Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
						Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
						Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													Margahayu		
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor		215.042.020		221.493.280		228.138.079		Margahayu			
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana aparatur		205.284.150		211.442.675		217.785.955		Margahayu			
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Program Displin Aparatur		21.218.000		21.854.540		22.510.176		Margahayu			
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		21.218.000		21.854.540		22.510.176		Margahayu			
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		29.705.200		30.596.356		31.514.247		Margahayu			
Total Belanja Rutin						492.467.370		507.241.391		522.458.632		Margahayu			
Belanja Renja													Margahayu		
1			Urusan Wajib			-		-		-		Margahayu			
1	1		Pendidikan			-		-		-		Margahayu			
1	1	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Program pendidikan anak usia dini		21.218.000		21.854.540		22.510.176		Margahayu			
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Program Pendidikan Menengah		58.349.500		60.099.985		61.902.985		Margahayu			
1	2		Kesehatan			-		-		-		Margahayu			
1	2	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah kegiatan penyuluhan lingkungan sehat berbasis RW		-		-		-		Margahayu			
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		53.045.000		54.636.350		56.275.441		Margahayu			
1	3		Pekerjaan Umum			-		-		-		Margahayu			
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong								Margahayu			
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan		74.263.000		76.490.890		78.785.617		Margahayu			
1	6		Perencanaan Pembangunan			-		-		-		Margahayu			
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Program perencanaan pembangunan daerah		26.522.500		27.318.175		28.137.720		Margahayu			
1	8		Lingkungan Hidup			-		-		-		Margahayu			
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan		53.045.000		54.636.350		56.275.441		Margahayu			
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		26.522.500		27.318.175		28.137.720		Margahayu			

1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil					-			-			-	Margahayu
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya program administrasi kependudukan di kecamatan			21.218.000			21.854.540			22.510.176	Margahayu
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				-			-			-	Margahayu
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			31.827.000			32.781.810			33.765.264	Margahayu
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				-			-			-	Margahayu
1	15	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah kegiatan pendataan perijinan usaha mikro kecil menengah			-			-			-	Margahayu
1	17		Kebudayaan				-			-			-	Margahayu
1	17	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan budaya			-			-			-	Margahayu
1	18		Kepemudaan dan Olahraga				-			-			-	Margahayu
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Program peningkatan peran serta kepemudaan			15.913.500			16.390.905			16.882.632	Margahayu
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Program pembinaan dan pemsarakatan olahraga			63.654.000			65.563.620			67.530.529	Margahayu
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				-			-			-	Margahayu
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			26.522.500			27.318.175			28.137.720	Margahayu
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Program pengembangan wawasan kebangsaan			63.654.000			65.563.620			67.530.529	Margahayu
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			26.522.500			27.318.175			28.137.720	Margahayu
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				-			-			-	Margahayu
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			10.609.000			10.927.270			11.255.088	Margahayu
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			31.827.000			32.781.810			33.765.264	Margahayu

1	22	Pemberdayaan Masyarakat Desa					-			-			-	Margahayu
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			31.827.000			32.781.810			33.765.264	Margahayu
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			31.827.000			32.781.810			33.765.264	Margahayu
Total Belanja Renja							668.367.000			688.418.010			709.070.550	Margahayu
Total Belanja							1.160.834.370			1.195.659.401			1.231.529.183	Margahayu

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Margaasih													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat		236.725.258			243.827.016			251.141.826	Margaasih
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan mebeleur		168.577.010			173.634.320			178.843.350	Margaasih
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		16.974.400			17.483.632			18.008.141	Margaasih
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		15.913.500			16.390.905			16.882.632	Margaasih
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD		-			-			-	Margaasih
Total Belanja Rutin						438.190.168			451.335.873			464.875.949	Margaasih
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-			-			-	Margaasih
1	2		Kesehatan			-			-			-	Margaasih
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyuluhan keehatan ibu hamil dan keluarga kurang mampu		53.045.000			54.636.350			56.275.441	Margaasih
1	3		Pekerjaan Umum			-			-			-	Margaasih
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong									Margaasih
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan		74.263.000			76.490.890			78.785.617	Margaasih
1	3	24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya										Margaasih
1	6		Perencanaan Pembangunan			-			-			-	Margaasih
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui musrenbang		42.542.090			43.818.353			45.132.903	Margaasih
1	8		Lingkungan Hidup			-			-			-	Margaasih
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		53.045.000			54.636.350			56.275.441	Margaasih
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau		26.522.500			27.318.175			28.137.720	Margaasih
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			-			-			-	Margaasih

1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan				53.045.000			54.636.350			56.275.441	Margaasih
1	17		Kebudayaan				-				-			-	Margaasih
1	17	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pengembangan wawasan kebangsaan dalam peningkatan toleransi kehidupan beragama			49.862.300				51.358.169			52.898.914	Margaasih
1	18		Kepemudaan dan Olahraga				-				-			-	Margaasih
1	18	17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Pembinaan organisasi kepemudaan di wilayah kecamatan margaasih			95.481.000				98.345.430			101.295.793	Margaasih
1	18	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terbinanya cabang olahraga di daerah			-				-			-	Margaasih
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				-				-			-	Margaasih
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam			118.820.800				122.385.424			126.056.987	Margaasih
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				-				-			-	Margaasih
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			281.032.410				289.463.382			298.147.284	Margaasih
Total Belanja Renja							847.659.100				873.088.873			899.281.539	Margaasih
Total Belanja							1.285.849.268				1.324.424.746			1.364.157.489	Margaasih

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Katapang													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Pelayanan Publik		256.309.875		263.999.172		271.919.147		Katapang	
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Demi Peningkatan Taraf Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Katapang		327.181.560		336.997.007		347.106.917		Katapang	
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur Kecamatan Katapang		18.671.840		19.231.995		19.808.955		Katapang	
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		10.609.000		10.927.270		11.255.088		Katapang	
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		37.131.500		38.245.445		39.392.808		Katapang	
Total Belanja Rutin						649.903.775		669.400.889		689.482.915		Katapang	
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-		-		-		Katapang	
1	1		Pendidikan			-		-		-		Katapang	
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Terselenggaranya Pendidikan Menengah		53.045.000		54.636.350		56.275.441		Katapang	
1	1	18	Program Pendidikan Non Formal	Tercapainya Peningkatan Pendidikan bagi Masyarakat Kecamatan Katapang terutama bagi Masyarakat yang Putus Sekolah		-		-		-		Katapang	
1	2		Kesehatan			-		-		-		Katapang	
1	2	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Terciptanya lingkungan sehat di Permukiman Warga		26.522.500		27.318.175		28.137.720		Katapang	
1	2	29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		-		-		-		Katapang	
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Meningkatnya Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		48.270.950		49.719.079		51.210.651		Katapang	
1	3		Pekerjaan Umum			-		-		-		Katapang	
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Jalan yang Representatif		122.003.500		125.663.605		129.433.513		Katapang	
1			Urusan Wajib			-		-		-		Katapang	

1	6	Perencanaan Pembangunan					-			-			-	Katapang
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Terfasilitasinya Usulan-usulan Perencanaan Pembangunan Daerah			29.705.200			30.596.356			31.514.247	Katapang
1	8	Lingkungan Hidup					-			-			-	Katapang
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terkelolanya Sampah dengan Sistematis			42.436.000			43.709.080			45.020.352	Katapang
1	8	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup			-			-			-	Katapang
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)			14.852.600			15.298.178			15.757.123	Katapang
1	9	Pertanahan					-			-			-	Katapang
1	9	16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya Penyuluhan Hukum Pertanahan			13.261.250			13.659.088			14.068.860	Katapang
1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil					-			-			-	Katapang
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Program Penataan Administrasi Kependudukan			22.278.900			22.947.267			23.635.685	Katapang
1	11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					-			-			-	Katapang
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan			37.131.500			38.245.445			39.392.808	Katapang
1	13	Sosial					-			-			-	Katapang
1	13	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Tercapainya peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial			-			-			-	Katapang
1	14	Ketenagakerjaan					-			-			-	Katapang
1	14	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di Wilayah Kecamatan Katapang Menghadapi Pasar Bebas Asia			21.218.000			21.854.540			22.510.176	Katapang
1	15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					-			-			-	Katapang
1	15	15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Terciptanya Iklim usaha kecil menengah yang kondusif di Wilayah Kecamatan Katapang			-			-			-	Katapang
1	15	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			15.913.500			16.390.905			16.882.632	Katapang
1	17	Kebudayaan					-			-			-	Katapang

1	17	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terselenggaranya Program Pengelolaan Keragaman Budaya				37.131.500			38.245.445			39.392.808	Katapang
1	18		Kepemudaan dan Olahraga					-			-			-	Katapang
1	18	17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Meningkatnya Kecakapan Hidup Pemuda dan Jiwa Wirausaha Para Pemuda				21.218.000			21.854.540			22.510.176	Katapang
1	18	18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Meningkatnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama bagi kaum muda-mudi di wilayah Kecamatan Katapang				-			-			-	Katapang
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga				63.654.000			65.563.620			67.530.529	Katapang
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					-			-			-	Katapang
1	19	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tercapainya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				-			-			-	Katapang
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terselenggaranya Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal				71.080.300			73.212.709			75.409.090	Katapang
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terwujudnya Masyarakat dengan Wawasan Kebangsaan yang Luas serta Memiliki Toleransi Beragama				18.035.300			18.576.359			19.133.650	Katapang
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Terlaksananya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				106.090.000			109.272.700			112.550.881	Katapang
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					-			-			-	Katapang
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				-			-			-	Katapang
1	20	19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terbinanya Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan				31.827.000			32.781.810			33.765.264	Katapang
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tercapainya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH				90.176.500			92.881.795			95.668.249	Katapang
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa					-			-			-	Katapang

1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa di wilayah Kecamatan Katapang					-					-	Katapang
1	22	20	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Tercapainya pengembangan pemberdayaan masyarakat desa					-					-	Katapang
2			Urusan Pilihan						-					-	Katapang
2	1		Pertanian						-					-	Katapang
2	1	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tercapainya peningkatan kesejahteraan petani di wilayah Kecamatan Katapang					-					-	Katapang
2	6		Perdagangan						-					-	Katapang
2	6	19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Terbinanya Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Wilayah Kecamatan Katapang				15.913.500				16.390.905		16.882.632	Katapang
Total Belanja Renja								901.765.000				928.817.950		956.682.489	Katapang
Total Belanja								1.551.668.775				1.598.218.839		1.646.165.404	Katapang

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Cangkung													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		224.668.558			231.408.615			238.350.874	Cangkuang
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		73.202.100			75.398.163			77.660.108	Cangkuang
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya Peningkatan Displin Aparatur		20.157.100			20.761.813			21.384.667	Cangkuang
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		21.218.000			21.854.540			22.510.176	Cangkuang
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		19.096.200			19.669.086			20.259.159	Cangkuang
Total Belanja Rutin						358.341.958			369.092.217			380.164.984	Cangkuang
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-			-			-	Cangkuang
1	3		Pekerjaan Umum			-			-			-	Cangkuang
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	Terwujudnya Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong									Cangkuang
1	3	18	Program rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terwujudnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Jembatan		132.612.500			136.590.875			140.688.601	Cangkuang
1	6		Perencanaan Pembangunan			-			-			-	Cangkuang
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah		53.045.000			54.636.350			56.275.441	Cangkuang
1	8		Lingkungan Hidup			-			-			-	Cangkuang
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terwujudnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		50.392.750			51.904.533			53.461.668	Cangkuang
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terwujudnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		15.913.500			16.390.905			16.882.632	Cangkuang
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil			-			-			-	Cangkuang
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Penataan Administrasi Kependudukan		53.045.000			54.636.350			56.275.441	Cangkuang
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			-			-			-	Cangkuang
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Terwujudnya Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan		37.131.500			38.245.445			39.392.808	Cangkuang
1	18		Kepemudaan dan Olahraga			-			-			-	Cangkuang

1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Terwujudnya Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			18.565.750			19.122.723			19.696.404	Cangkuang
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terwujudnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			39.783.750			40.977.263			42.206.580	Cangkuang
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				-			-			-	Cangkuang
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terwujudnya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal			48.801.400			50.265.442			51.773.405	Cangkuang
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terwujudnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan			37.131.500			38.245.445			39.392.808	Cangkuang
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				-			-			-	Cangkuang
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			18.565.750			19.122.723			19.696.404	Cangkuang
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			230.215.300			237.121.759			244.235.412	Cangkuang
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa				-			-			-	Cangkuang
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			47.740.500			49.172.715			50.647.896	Cangkuang
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa			39.783.750			40.977.263			42.206.580	Cangkuang
Total Belanja Renja							822.727.950			847.409.789			872.832.082	Cangkuang
Total Belanja							1.181.069.908			1.216.502.006			1.252.997.066	Cangkuang

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Dayeuhkolot													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional perkantoran		191.674.551			197.424.788			203.347.532	Dayeuhkolot
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)		302.356.500			311.427.195			320.770.011	Dayeuhkolot
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penunjang kerja aparatur (%)		23.870.250			24.586.358			25.323.948	Dayeuhkolot
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		17.451.805			17.975.359			18.514.620	Dayeuhkolot
Total Belanja Rutin						535.353.106			551.413.700			567.956.111	Dayeuhkolot
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-			-			-	Dayeuhkolot
1	1		Pendidikan			-			-			-	Dayeuhkolot
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Angka partisipasi sekolah (APS) jenjang Sekolah Menengah Atas dan sederajat tingkat kecamatan		53.045.000			54.636.350			56.275.441	Dayeuhkolot
1	2		Kesehatan			-			-			-	Dayeuhkolot
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten skala kecamatan		53.045.000			54.636.350			56.275.441	Dayeuhkolot
1	3		Pekerjaan Umum			-			-			-	Dayeuhkolot
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase pembangunan saluran drainase/gorong-gorong									Dayeuhkolot
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan mantap kabupaten (baik dan sedang) lingkup kecamatan		212.180.000			218.545.400			225.101.762	Dayeuhkolot
1	6		Perencanaan Pembangunan			-			-			-	Dayeuhkolot
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan program/kegiatan kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD		44.557.800			45.894.534			47.271.370	Dayeuhkolot
1	8		Lingkungan Hidup			-			-			-	Dayeuhkolot
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan pelayanan sampah skala kecamatan		58.349.500			60.099.985			61.902.985	Dayeuhkolot
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pengelolaan RTH		53.045.000			54.636.350			56.275.441	Dayeuhkolot
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil			-			-			-	Dayeuhkolot

1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penertiban KK lingkup kecamatan tahun berkenaan				32.887.900				33.874.537			34.890.773	Dayeuhkolot
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					-				-			-	Dayeuhkolot
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah kelembagaan organisasi perempuan ditingkat kecamatan (LSM dan non LSM) (satu organisasi)				42.436.000				43.709.080			45.020.352	Dayeuhkolot
1	18		Kepemudaan dan Olahraga					-				-			-	Dayeuhkolot
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Frekuensi penyuluhan terhadap pemuda tingkat kecamatan				11.669.900				12.019.997			12.380.597	Dayeuhkolot
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	jumlah club olah raga menurut cabang olah raga ditingkat kecamatan				33.948.800				34.967.264			36.016.282	Dayeuhkolot
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					-				-			-	Dayeuhkolot
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	presentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini				43.496.900				44.801.807			46.145.861	Dayeuhkolot
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	presntase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan				32.357.450				33.328.174			34.328.019	Dayeuhkolot
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase penanganan kejadian bencana alam				249.311.500				256.790.845			264.494.570	Dayeuhkolot
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					-				-			-	Dayeuhkolot
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	presentase capaian retribusi kecamatan pada tahun berkenaan				5.304.500				5.463.635			5.627.544	Dayeuhkolot
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan				53.045.000				54.636.350			56.275.441	Dayeuhkolot
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa					-				-			-	Dayeuhkolot
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	presentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat kecamatan				49.862.300				51.358.169			52.898.914	Dayeuhkolot

1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	jumlah desa swakrya, jumlah desa swasembada				44.557.800			45.894.534			47.271.370	Dayeuhkolot
Total Belanja Renja								1.073.100.350			1.105.293.361			1.138.452.161	Dayeuhkolot
Total Belanja								1.608.453.456			1.656.707.060			1.706.408.272	Dayeuhkolot

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Banjaran														
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020				
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
Belanja Rutin														
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			259.967.791			267.766.824			275.799.829	Banjaran
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100.923.417			103.951.120			107.069.653	Banjaran
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	jumlah Program Peningkatan Disiplin Aparatur			27.583.400			28.410.902			29.263.229	Banjaran
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	jumlah Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			10.609.000			10.927.270			11.255.088	Banjaran
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	jumlah peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			39.465.480			40.649.444			41.868.928	Banjaran
Total Belanja Rutin						438.549.088			451.705.560			465.256.727	Banjaran	
Belanja Renja														
1			Urusan Wajib			-			-				-	Banjaran
1	1		Pendidikan			-			-				-	Banjaran
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	jumlah Pembinaan Forum Masyarakat peduli Pendidikan			53.045.000			54.636.350			56.275.441	Banjaran
1	2		Kesehatan			-			-				-	Banjaran
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	jumlah Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak			53.045.000			54.636.350			56.275.441	Banjaran
1	3		Pekerjaan Umum			-			-				-	Banjaran
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	jumlah Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong										Banjaran
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	jumlah Program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan			212.180.000			218.545.400			225.101.762	Banjaran
1	6		Perencanaan Pembangunan			-			-				-	Banjaran
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	jumlah perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan			42.436.000			43.709.080			45.020.352	Banjaran
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil			-			-				-	Banjaran
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	jumlah Penataan Administrasi Kependudukan			10.609.000			10.927.270			11.255.088	Banjaran
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			-			-				-	Banjaran

1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	jumlah Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan				47.740.500			49.172.715			50.647.896	Banjaran
1	18		Kepemudaan dan Olahraga					-			-			-	Banjaran
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	jumlah Peningkatan peran serta kepemudaan				12.730.800			13.112.724			13.506.106	Banjaran
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	jumlah Pembinaan dan Pemsarakatan Olahraga				54.689.395			56.330.077			58.019.979	Banjaran
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					-			-			-	Banjaran
1	19	16	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	jumlah Pemeliharaan Kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				44.663.890			46.003.807			47.383.921	Banjaran
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	jumlah Pengembangan Wawasan Kebangsaan				51.984.100			53.543.623			55.149.932	Banjaran
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	jumlah Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				42.436.000			43.709.080			45.020.352	Banjaran
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					-			-			-	Banjaran
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	jumlah Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				5.304.500			5.463.635			5.627.544	Banjaran
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	jumlah peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				95.852.315			98.727.884			101.689.721	Banjaran
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa					-			-			-	Banjaran
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	jumlah Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan				47.740.500			49.172.715			50.647.896	Banjaran
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	jumlah Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa				47.740.500			49.172.715			50.647.896	Banjaran
Total Belanja Renja								822.197.500			846.863.425			872.269.328	Banjaran
Total Belanja								1.260.746.588			1.298.568.985			1.337.526.055	Banjaran

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Pameungpeuk													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional Administrasi Perkantoran		227.669.140			234.499.214			241.534.191	Pemeungpeuk
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		233.822.360			240.837.031			248.062.142	Pemeungpeuk
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		26.522.500			27.318.175			28.137.720	Pemeungpeuk
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (%)		58.349.500			60.099.985			61.902.985	Pemeungpeuk
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		37.131.500			38.245.445			39.392.808	Pemeungpeuk
Total Belanja Rutin						583.495.000			600.999.850			619.029.846	Pemeungpeuk
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-			-			-	Pemeungpeuk
1	1		Pendidikan			-			-			-	Pemeungpeuk
1	1	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat									Pemeungpeuk
1	1	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang									Pemeungpeuk
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Angka rata-rata lama Sekolah (RLS) Tingkat Kecamatan		53.045.000			54.636.350			56.275.441	Pemeungpeuk
1	2		Kesehatan			-			-			-	Pemeungpeuk
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Prosentase persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten skala kecamatan		31.827.000			32.781.810			33.765.264	Pemeungpeuk
1	3		Pekerjaan Umum			-			-			-	Pemeungpeuk
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase pembangunan saluran drainase/gorong-gorong									Pemeungpeuk
1	4		Perumahan			-			-			-	Pemeungpeuk
1	4	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase penggunaan air bersih oleh masyarakat di kecamatan		31.827.000			32.781.810			33.765.264	Pemeungpeuk
1	6		Perencanaan Pembangunan			-			-			-	Pemeungpeuk
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	persentase usulan program/kegiatan kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD		42.436.000			43.709.080			45.020.352	Pemeungpeuk
1	8		Lingkungan Hidup			-			-			-	Pemeungpeuk

1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan Sampah Skala Kecamatan			26.522.500			27.318.175			28.137.720	Pemeungpeuk
1	8	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)											Pemeungpeuk
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil				-			-			-	Pemeungpeuk
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Administrasi Kependudukan			53.045.000			54.636.350			56.275.441	Pemeungpeuk
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				-			-			-	Pemeungpeuk
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Prosentase kelembagaan organisasi perempuan di tingkat Kecamatan (LSM dan Non LSM) (Satuan Organisasi) yang dibina			53.045.000			54.636.350			56.275.441	Pemeungpeuk
1	18		Kepemudaan dan Olahraga				-			-			-	Pemeungpeuk
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Kegiatan gelar produk dab kesenian pemuda dan karang taruna			21.218.000			21.854.540			22.510.176	Pemeungpeuk
1	18	18	Program Upaya Pencegahan Penyalagunaan Narkoba											Pemeungpeuk
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Prosentase klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat kecamatan yang dibina			47.740.500			49.172.715			50.647.896	Pemeungpeuk
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				-			-			-	Pemeungpeuk
1	19	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan											Pemeungpeuk
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/diteksi dini			74.263.000			76.490.890			78.785.617	Pemeungpeuk
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan			95.481.000			98.345.430			101.295.793	Pemeungpeuk
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase penanganan kejadian bencana alam			10.609.000			10.927.270			11.255.088	Pemeungpeuk
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				-			-			-	Pemeungpeuk

1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase capaian retribusi kecamatan pada tahun berkenaan				10.609.000				10.927.270			11.255.088	Pemeungpeuk
1	20	19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang memenuhi administrasi keuangan												Pemeungpeuk
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pelimpahan kewenangan bupati kepada camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan				212.180.000				218.545.400			225.101.762	Pemeungpeuk
1	20	23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah aplikasi yang bisa diakses di kecamatan												Pemeungpeuk
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa					-				-			-	Pemeungpeuk
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat Kecamatan				31.827.000				32.781.810			33.765.264	Pemeungpeuk
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	- Jumlah desa swakarya - Jumlah desa swasembada				63.654.000				65.563.620			67.530.529	Pemeungpeuk
1	24		Kerarsipan													Pemeungpeuk
1	24	15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan													Pemeungpeuk
1	24	17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan													Pemeungpeuk
Total Belanja Renja								859.329.000				885.108.870			911.662.136	Pemeungpeuk
Total Belanja								1.442.824.000				1.486.108.720			1.530.691.982	Pemeungpeuk

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Pangalengan													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi perkantoran		212.132.709			218.496.691			225.051.591	Pangalengan
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		242.585.394			249.862.956			257.358.844	Pangalengan
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur		22.278.900			22.947.267			23.635.685	Pangalengan
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kasitas sumber daya aparatur		-			-			-	Pangalengan
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	prosentase peningkatan pengembangan sistem kinerja dan keuangan		12.730.800			13.112.724			13.506.106	Pangalengan
Total Belanja Rutin						489.727.803			504.419.637			519.552.227	Pangalengan
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-			-			-	Pangalengan
1	1		Pendidikan			-			-			-	Pangalengan
1	1	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Bimbingan teknis pos paud dan lembaga		64.714.900			66.656.347			68.656.037	Pangalengan
1	2		Kesehatan			-			-			-	Pangalengan
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kesehatan masyarakat		59.410.400			61.192.712			63.028.493	Pangalengan
1	3		Pekerjaan Umum			-			-			-	Pangalengan
1	3	17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Terpeliharanya jalan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat		-			-			-	Pangalengan
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan		79.567.500			81.954.525			84.413.161	Pangalengan
1	6		Perencanaan Pembangunan			-			-			-	Pangalengan
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik		39.783.750			40.977.263			42.206.580	Pangalengan
1	8		Lingkungan Hidup			-			-			-	Pangalengan
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		38.722.850			39.884.536			41.081.072	Pangalengan
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil			-			-			-	Pangalengan
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Sosialisasi kebijakan kependudukan		38.722.850			39.884.536			41.081.072	Pangalengan
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			-			-			-	Pangalengan

1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Pembinaan organisasi perempuan				47.740.500			49.172.715			50.647.896	Pangalengan
1	18		Kepemudaan dan Olahraga					-			-			-	Pangalengan
1	18	17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda				27.052.950			27.864.539			28.700.475	Pangalengan
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					-			-			-	Pangalengan
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja				79.037.050			81.408.162			83.850.406	Pangalengan
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama				12.730.800			13.112.724			13.506.106	Pangalengan
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam				48.801.400			50.265.442			51.773.405	Pangalengan
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					-			-			-	Pangalengan
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah				16.443.950			16.937.269			17.445.387	Pangalengan
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				159.135.000			163.909.050			168.826.322	Pangalengan
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa					-			-			-	Pangalengan
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Sosialisasi pembinaan dan monitoring kegiatan P4				26.522.500			27.318.175			28.137.720	Pangalengan
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa				75.854.350			78.129.981			80.473.880	Pangalengan
Total Belanja Renja								814.240.750			838.667.973			863.828.012	Pangalengan
Total Belanja								1.303.968.553			1.343.087.610			1.383.380.238	Pangalengan

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Arjasari													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Operasional Perkantoran		234.288.732			241.317.394			248.556.915	Arjasari
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur		142.372.780			146.643.963			151.043.282	Arjasari
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkan Disiplin Aparatur		21.642.360			22.291.631			22.960.380	Arjasari
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur di Kecamatan Arjasari		22.915.440			23.602.903			24.310.990	Arjasari
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kecamatan Arjasari		17.568.504			18.095.559			18.638.426	Arjasari
Total Belanja Rutin						438.787.816			451.951.450			465.509.994	Arjasari
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-			-			-	Arjasari
1	2		Kesehatan			-			-			-	Arjasari
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Terlaksananya Penyuluhan bagi Ibu hamil dan Keluarga Tidak Mampu		63.654.000			65.563.620			67.530.529	Arjasari
1	3		Pekerjaan Umum			-			-			-	Arjasari
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Tersedianya Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong									Arjasari
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya Jalan dan Jembatan		91.025.220			93.755.977			96.568.656	Arjasari
1	3	24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Terlaksananya Sumur Resapan Air		63.654.000			65.563.620			67.530.529	Arjasari
1	6		Perencanaan Pembangunan			-			-			-	Arjasari
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Pasilitasi Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan		42.223.820			43.490.535			44.795.251	Arjasari
1	8		Lingkungan Hidup			-			-			-	Arjasari
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tersedianya roda sampah dan tempat sampah		58.349.500			60.099.985			61.902.985	Arjasari
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terealisasikannya Ruang Terbuka Hijau		33.736.620			34.748.719			35.791.180	Arjasari
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil			-			-			-	Arjasari
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi Administrasi Kependudukan di Tingkat Kecamatan		46.467.420			47.861.443			49.297.286	Arjasari

1	11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					-			-			-	Arjasari
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan			46.467.420			47.861.443			49.297.286	Arjasari
1	18		Kepemudaan dan Olahraga				-			-			-	Arjasari
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan			-			-			-	Arjasari
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terlaksananya Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di tingkat Daerah			35.858.420			36.934.173			38.042.198	Arjasari
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				-			-			-	Arjasari
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			92.934.840			95.722.885			98.594.572	Arjasari
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terwujudnya wawasan kebangsaan di kecamatan Arjasari			17.186.580			17.702.177			18.233.243	Arjasari
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi penduduk korban bencana alam			37.661.950			38.791.809			39.955.563	Arjasari
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				-			-			-	Arjasari
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah di Kecamatan Arjasari			8.275.020			8.523.271			8.778.969	Arjasari
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH			186.824.490			192.429.225			198.202.101	Arjasari
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa				-			-			-	Arjasari
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			-			-			-	Arjasari
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			-			-			-	Arjasari
Total Belanja Renja							824.319.300			849.048.879			874.520.345	Arjasari
Total Belanja							1.263.107.116			1.301.000.329			1.340.030.339	Arjasari

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Cimaung													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat		234.971.323		242.020.463		249.281.077		Cimaung	
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		139.030.945		143.201.873		147.497.930		Cimaung	
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		21.218.000		21.854.540		22.510.176		Cimaung	
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas		15.913.500		16.390.905		16.882.632		Cimaung	
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran		6.365.400		6.556.362		6.753.053		Cimaung	
Total Belanja Rutin						417.499.168		430.024.143		442.924.868		Cimaung	
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-		-		-		Cimaung	
1	1		Pendidikan			-		-		-		Cimaung	
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah		87.524.250		90.149.978		92.854.477		Cimaung	
1	2		Kesehatan			-		-		-		Cimaung	
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu		87.524.250		90.149.978		92.854.477		Cimaung	
1	6		Perencanaan Pembangunan			-		-		-		Cimaung	
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah		49.371.634		50.852.783		52.378.366		Cimaung	
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil			-		-		-		Cimaung	
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		54.132.423		55.756.395		57.429.087		Cimaung	
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			-		-		-		Cimaung	
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Pembinaan organisasi perempuan		54.636.350		56.275.441		57.963.704		Cimaung	
1	18		Kepemudaan dan Olahraga			-		-		-		Cimaung	
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan organisasi kepemudaan		21.748.450		22.400.904		23.072.931		Cimaung	
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah		39.306.345		40.485.535		41.700.101		Cimaung	

1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					-			-			-	Cimaung
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan			60.012.461			61.812.835			63.667.220	Cimaung
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama			49.289.414			50.768.096			52.291.139	Cimaung
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				-			-			-	Cimaung
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			16.178.725			16.664.087			17.164.009	Cimaung
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH			267.887.859			275.924.495			284.202.230	Cimaung
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa				-			-			-	Cimaung
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan			55.219.845			56.876.440			58.582.734	Cimaung
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa			44.610.845			45.949.170			47.327.645	Cimaung
Total Belanja Renja							887.442.850			914.066.136			941.488.120	Cimaung
Total Belanja							1.304.942.018			1.344.090.279			1.384.412.987	Cimaung

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Cicalengka				-									-		
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program			Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
						Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
						Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin															
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		202.743.727			208.826.039			215.090.820	Cicalengka		
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		200.510.100			206.525.403			212.721.165	Cicalengka		
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan Peningkatan Disiplin Kerja		16.974.400			17.483.632			18.008.141	Cicalengka		
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		15.913.500			16.390.905			16.882.632	Cicalengka		
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kegiatan Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan		8.381.110			8.632.543			8.891.520	Cicalengka		
Total Belanja Rutin						444.522.837			457.858.522			471.594.278	Cicalengka		
Belanja Renja															
1			Urusan Wajib			-			-			-	Cicalengka		
1	1		Pendidikan			-			-			-	Cicalengka		
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Kegiatan Pendidikan Menengah		53.045.000			54.636.350			56.275.441	Cicalengka		
1	2		Kesehatan			-			-			-	Cicalengka		
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	kegiatan peningkatan peran serta dan kesetaraan		53.045.000			54.636.350			56.275.441	Cicalengka		
1	3		Pekerjaan Umum			-			-			-	Cicalengka		
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terlaksananya Pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong									Cicalengka		
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan		84.872.000			87.418.160			90.040.705	Cicalengka		
1	6		Perencanaan Pembangunan			-			-			-	Cicalengka		
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah		42.436.000			43.709.080			45.020.352	Cicalengka		
1	8		Lingkungan Hidup			-			-			-	Cicalengka		
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		33.948.800			34.967.264			36.016.282	Cicalengka		
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Tersedianya Prasarana Pengolahan perSampahan		42.436.000			43.709.080			45.020.352	Cicalengka		
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil			-			-			-	Cicalengka		
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan		42.436.000			43.709.080			45.020.352	Cicalengka		

1	11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					-			-			-	Cicalengka
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Kegiatan Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan jender dalam pembangunan			47.740.500			49.172.715			50.647.896	Cicalengka
1	18		Kepemudaan dan Olahraga				-			-			-	Cicalengka
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Kegiatan Peningkatan Peran serta Kepemudaan			26.522.500			27.318.175			28.137.720	Cicalengka
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				-			-			-	Cicalengka
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kegiatan Pemeliharaan Kantibmas dan pencegahan tindak Kriminal			68.958.500			71.027.255			73.158.073	Cicalengka
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			25.461.600			26.225.448			27.012.211	Cicalengka
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kegiatan Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam			31.827.000			32.781.810			33.765.264	Cicalengka
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				-			-			-	Cicalengka
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			196.266.500			202.154.495			208.219.130	Cicalengka
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH											Cicalengka
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa				-			-			-	Cicalengka
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			77.445.700			79.769.071			82.162.143	Cicalengka
Total Belanja Renja							826.441.100			851.234.333			876.771.363	Cicalengka
Total Belanja							1.270.963.937			1.309.092.855			1.348.365.641	Cicalengka

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Nagreg													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan di perkantoran kecamatan nagreg		198.513.673			204.469.083			210.603.156	Nagreg
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	jumlah Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		280.342.825			288.753.110			297.415.703	Nagreg
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	jumlah peningkatan disiplin aparatur		33.418.350			34.420.901			35.453.528	Nagreg
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	jumlah kapasitas sumber daya aparatur		31.827.000			32.781.810			33.765.264	Nagreg
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	jumlah pelaporan keuangan		9.638.277			9.927.425			10.225.248	Nagreg
Total Belanja Rutin						553.740.124			570.352.328			587.462.898	Nagreg
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-			-			-	Nagreg
1	1		Pendidikan			-			-			-	Nagreg
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	jumlah Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan		53.045.000			54.636.350			56.275.441	Nagreg
1	2		Kesehatan			-			-			-	Nagreg
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	jumlah Terselenggaranya Pembinaan Kepada Forum masyarakat peduli Pendidikan		53.045.000			54.636.350			56.275.441	Nagreg
1	3		Pekerjaan Umum			-			-			-	Nagreg
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	jumlah gorong-gorong									Nagreg
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	jumlah rehabilitasi jalan		79.567.500			81.954.525			84.413.161	Nagreg
1	6		Perencanaan Pembangunan			-			-			-	Nagreg
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	jumlah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik		18.300.525			18.849.541			19.415.027	Nagreg
1	8		Lingkungan Hidup			-			-			-	Nagreg
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	jumlah Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		53.045.000			54.636.350			56.275.441	Nagreg
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	jumlah RTH di kecamatan		21.218.000			21.854.540			22.510.176	Nagreg

1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil					-			-			-	Nagreg
1	10	15 Program Penataan Administrasi Kependudukan	jumlah penataan administrasi kependudukan				68.958.500			71.027.255			73.158.073	Nagreg
1	11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					-			-			-	Nagreg
1	11	18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	jumlah Kegiatan pembinaan organisasi perempuan				41.109.875			42.343.171			43.613.466	Nagreg
1	18	Kepemudaan dan Olahraga					-			-			-	Nagreg
1	18	16 Program peningkatan peran serta kepemudaan	jumlah Pembinaan organisasi kepemudaan				33.418.350			34.420.901			35.453.528	Nagreg
1	18	20 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	jumlah Pembinaan cabang olah raga prestasi				59.410.400			61.192.712			63.028.493	Nagreg
1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					-			-			-	Nagreg
1	19	16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	jumlah Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan				47.740.500			49.172.715			50.647.896	Nagreg
1	19	17 Program pengembangan wawasan kebangsaan	jumlah peningkatan pengamanan terhadap aset daerah (piket)				58.349.500			60.099.985			61.902.985	Nagreg
1	19	22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	jumlah Pengadaan sarana prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam				26.522.500			27.318.175			28.137.720	Nagreg
1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					-			-			-	Nagreg
1	20	17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	jumlah Intensifikasi dan eksensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah				18.565.750			19.122.723			19.696.404	Nagreg
1	20	20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH				53.045.000			54.636.350			56.275.441	Nagreg
1	22	Pemberdayaan Masyarakat Desa					-			-			-	Nagreg
1	22	15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	jumlah Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan				36.070.600			37.152.718			38.267.300	Nagreg

1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa				21.218.000			21.854.540			22.510.176	Nagreg
Total Belanja Renja								742.630.000			764.908.900			787.856.167	Nagreg
Total Belanja								1.296.370.124			1.335.261.228			1.375.319.065	Nagreg

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Cikancung														
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020				
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
Belanja Rutin														
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional perkantoran			171.472.630			176.616.809			181.915.314	Cikancung
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)			151.507.129			156.052.343			160.733.913	Cikancung
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Penunjang Kerja Aparatur(%)			24.931.150			25.679.085			26.449.457	Cikancung
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rata-rata Prosentase Pemenuhan kwalitas Sumber Daya aparatur(%)			15.913.500			16.390.905			16.882.632	Cikancung
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan(%)			8.381.110			8.632.543			8.891.520	Cikancung
Total Belanja Rutin							372.205.519			383.371.685			394.872.836	Cikancung
Belanja Renja														
1			Urusan Wajib				-			-			-	Cikancung
1	1		Pendidikan				-			-			-	Cikancung
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Rata-rata angka partisipasiMurni jenjang SMA/ sederajat tingkat Kecamatan			53.045.000			54.636.350			56.275.441	Cikancung
1	2		Kesehatan				-			-			-	Cikancung
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rata-rata Persentase Persalinan yang di tolong Oleh Tenaga Kesehatan yang berkompeten skala Kecamatan (%)			53.045.000			54.636.350			56.275.441	Cikancung
1	3		Pekerjaan Umum				-			-			-	Cikancung
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Prosetase Pembangunan saluran drainase/ Gorong-gorong										Cikancung
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rata-rata Prosentase jalan mantap (baik dan sedang)Kabupaten lingkup kecamatan(%)			74.263.000			76.490.890			78.785.617	Cikancung
1	3	28	Program pengendalian banjir	Persentase pengendalian banjir			-			-			-	Cikancung
1	6		Perencanaan Pembangunan				-			-			-	Cikancung
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata Persentase pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan(%)			32.516.585			33.492.083			34.496.845	Cikancung

1	7	Perhubungan					-			-			-	Cikancung
1	7	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase pembebasan lahan untuk Pembangunan Terminal										Cikancung
1	8	Lingkungan Hidup					-			-			-	Cikancung
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Cakupan pelayanan Persampahan(%)			53.045.000			54.636.350			56.275.441	Cikancung
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Pengelolaan RTH			26.522.500			27.318.175			28.137.720	Cikancung
1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil					-			-			-	Cikancung
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rata-rata Prosentase cakupan masyarakat yang sudah memenuhi kk lingkup kecamatan (%) Rata-rata cakupan masyarakat yang sudah memiliki KTP lingkup kecamatan(%)			53.045.000			54.636.350			56.275.441	Cikancung
1	11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					-			-			-	Cikancung
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rata-rata Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan tingkat Kecamatan (LSM/Non LSM)(Organisasi)(Orang)			53.045.000			54.636.350			56.275.441	Cikancung
1	18	Kepemudaan dan Olahraga					-			-			-	Cikancung
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Prosentase peningkatan peran serta kepemudaan			19.096.200			19.669.086			20.259.159	Cikancung
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Rata-rata Jumlah Klub Olahraga menurut Cabang Olahraga tingkat Kecamatan			53.045.000			54.636.350			56.275.441	Cikancung
1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					-			-			-	Cikancung
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase masyarakat yang mengikuti kewaspadaan dini/deteksi dini			47.740.500			49.172.715			50.647.896	Cikancung
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rata-rata Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan 100			36.070.600			37.152.718			38.267.300	Cikancung
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rata-rata Prosentase Penanganan Kejadian Bencana Alam(%)			53.045.000			54.636.350			56.275.441	Cikancung

1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					-					-	Cikancung	
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rata-rata persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan(%)			10.609.000					10.927.270	11.255.088	Cikancung
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rata-rata Persentase pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan(%)			137.917.000					142.054.510	146.316.145	Cikancung
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa				-					-	-	Cikancung
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	jumlah peserta lembaga dan organisasi masyarakat yang mendapatkan penyuluhan(kegiatan)			42.436.000					43.709.080	45.020.352	Cikancung
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	- Jumlah desa Swakarya - Jumlah desa swasembada "			42.436.000					43.709.080	45.020.352	Cikancung
Total Belanja Renja							840.922.385					866.150.057	892.134.558	Cikancung
Total Belanja							1.213.127.904					1.249.521.742	1.287.007.394	Cikancung

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Rancaekek													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan administrasi perkantoran sebagai bahan penunjang kinerja sehingga meningkatnya pelayanan prima dan kinerja aparatur kecamatan			309.656.574			318.946.271		328.514.659	Rancaekek
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang siap pakai sehingga meningkatnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat			201.305.775			207.344.948		213.565.297	Rancaekek
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang siap pakai sehingga meningkatnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat			24.931.150			25.679.085		26.449.457	Rancaekek
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatkan sistem laporan capaian kinerja dan kenangan			6.365.400			6.556.362		6.753.053	Rancaekek
Total Belanja Rutin							542.258.899			558.526.666		575.282.466	Rancaekek
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib				-			-		-	Rancaekek
1	1		Pendidikan				-			-		-	Rancaekek
1	1	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan Bagi pendidikan anak usia Dini			-			-		-	Rancaekek
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Partisipasi dalam bidang pendidikan			53.045.000			54.636.350		56.275.441	Rancaekek
1	2		Kesehatan				-			-		-	Rancaekek
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase Persalinan yang di tolong Oleh Tenaga Kesehatan yang berkompeten skala Kecamatan (%)			73.732.550			75.944.527		78.222.862	Rancaekek
1	3		Pekerjaan Umum				-			-		-	Rancaekek
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong									Rancaekek
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	jalan yang baik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat			153.830.500			158.445.415		163.198.777	Rancaekek

1	3	28	Program pengendalian banjir	Mengurangi dampak banjir				-				-	Rancaekek
1	6		Perencanaan Pembangunan					-				-	Rancaekek
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Musrenbang			15.913.500			16.390.905		16.882.632	Rancaekek
1	8		Lingkungan Hidup					-				-	Rancaekek
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	tersedianya Gerobak sampah dan tong sampah			21.218.000			21.854.540		22.510.176	Rancaekek
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Ruang terbuka hijau yang baik dan nyaman			17.186.580			17.702.177		18.233.243	Rancaekek
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil					-				-	Rancaekek
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	terselenggaranya pelayanan terhadap kependudukan			53.045.000			54.636.350		56.275.441	Rancaekek
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					-				-	Rancaekek
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan			29.705.200			30.596.356		31.514.247	Rancaekek
1	13		Sosial					-				-	Rancaekek
1	13	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lai	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tingkat Kecamatan yang tertangani tahun berkenaan			111.394.500			114.736.335		118.178.425	Rancaekek
1	18		Kepemudaan dan Olahraga					-				-	Rancaekek
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Organisasi Pemuda			10.609.000			10.927.270		11.255.088	Rancaekek
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat kecamatan			21.218.000			21.854.540		22.510.176	Rancaekek
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					-				-	Rancaekek
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Presentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini			57.076.420			58.788.713		60.552.374	Rancaekek
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan			21.218.000			21.854.540		22.510.176	Rancaekek
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Penanganan kejadian Bencana Alam			7.956.750			8.195.453		8.441.316	Rancaekek

1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					-			-			-	Rancaekek
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan			5.304.500			5.463.635			5.627.544	Rancaekek
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan			166.506.133			171.501.317			176.646.357	Rancaekek
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa				-			-			-	Rancaekek
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Perangkat desa yang dibina			21.218.000			21.854.540			22.510.176	Rancaekek
Total Belanja Renja							840.177.633			865.382.962			891.344.451	Rancaekek
Total Belanja							1.382.436.532			1.423.909.628			1.466.626.917	Rancaekek
							2.542.000.232			2.618.260.239			2.696.808.046	

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Ciparay				-										-
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Belanja Rutin														
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		258.967.273		266.736.291		274.738.380		Ciparay		
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	jumlah peningkatan sarana dan prasarana aparatur		142.160.600		146.425.418		150.818.181		Ciparay		
	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	jumlah peningkatan disiplin aparatur		16.974.400		17.483.632		18.008.141		Ciparay		
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	jumlah peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		8.381.110		8.632.543		8.891.520		Ciparay		
Total Belanja Rutin						426.483.383		439.277.884		452.456.221		Ciparay		
Belanja Renja														
1			Urusan Wajib			-		-		-		Ciparay		
1	1		Pendidikan			-		-		-		Ciparay		
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	jumlah pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan		79.567.500		81.954.525		84.413.161		Ciparay		
1	2		Kesehatan			-		-		-		Ciparay		
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	jumlah penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu		79.567.500		81.954.525		84.413.161		Ciparay		
1	3		Pekerjaan Umum			-		-		-		Ciparay		
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	jumlah saluran draenasae/gorong-gorong								Ciparay		
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	jumlah pemeliharaan jalan dan jembatan		84.872.000		87.418.160		90.040.705		Ciparay		
1	6		Perencanaan Pembangunan			-		-		-		Ciparay		
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	jumlah perencanaan pembangunan daerah		47.740.500		49.172.715		50.647.896		Ciparay		
1	8		Lingkungan Hidup			-		-		-		Ciparay		
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	jumlah penanganan dan pengelolaan persampahan		47.740.500		49.172.715		50.647.896		Ciparay		
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	jumlah rth kecamatan		26.522.500		27.318.175		28.137.720		Ciparay		
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil			-		-		-		Ciparay		
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	jumlah penataan adminitrasi kependudukan		31.827.000		32.781.810		33.765.264		Ciparay		

1	11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					-			-			-	Ciparay
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	jumlah kegiatan pembinaan organisasi perempuan			42.436.000			43.709.080			45.020.352	Ciparay
1	18		Kepemudaan dan Olahraga				-			-			-	Ciparay
1	18	17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	jumlah pembinaan organisasi kepemudaan			37.131.500			38.245.445			39.392.808	Ciparay
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	jumlah pembinaan cabang olahraga			63.654.000			65.563.620			67.530.529	Ciparay
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				-			-			-	Ciparay
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini			-			-			-	Ciparay
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	jumlah peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama			51.984.100			53.543.623			55.149.932	Ciparay
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				-			-			-	Ciparay
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	jumlah intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			180.353.000			185.763.590			191.336.498	Ciparay
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa				-			-			-	Ciparay
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	jumlah pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa			53.045.000			54.636.350			56.275.441	Ciparay
Total Belanja Renja							826.441.100			851.234.333			876.771.363	Ciparay
Total Belanja							1.252.924.483			1.290.512.217			1.329.227.584	Ciparay

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Pacet													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Administrsi Perkantoran		187.188.693		192.804.354		198.588.484		Pacet	
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur		136.856.100		140.961.783		145.190.636		Pacet	
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penunjang kerja Aparatur		30.235.650		31.142.720		32.077.001		Pacet	
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Pegawai Kecamatan dan aparatur desa yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi		15.913.500		16.390.905		16.882.632		Pacet	
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		8.381.110		8.632.543		8.891.520		Pacet	
Total Belanja Rutin						378.575.053		389.932.304		401.630.273		Pacet	
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-		-		-		Pacet	
1	2		Kesehatan			-		-		-		Pacet	
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Prosentase penyuluhan kesehatan bagi Ibu Hamil dari keluarga kurang		79.567.500		81.954.525		84.413.161		Pacet	
1	3		Pekerjaan Umum			-		-		-		Pacet	
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Prosentase Pembangunan Drainase/gorong-gorong								Pacet	
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		106.090.000		109.272.700		112.550.881		Pacet	
1	6		Perencanaan Pembangunan			-		-		-		Pacet	
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata presantase Usulan Program/Kegiatan Kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD		47.740.500		49.172.715		50.647.896		Pacet	
1	8		Lingkungan Hidup			-		-		-		Pacet	
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan pelayanan sampah skala kecamatan		53.045.000		54.636.350		56.275.441		Pacet	
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rata-rata presentase pengelolaan RTH tingkat Kecamatan		26.522.500		27.318.175		28.137.720		Pacet	
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil			-		-		-		Pacet	

1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	"- Rata-rata Cakupan masyarakat yang sudah memiliki KK Lingkup Kecamatan (%) - Rata-rata Cakupan masyarakat yang sudah memiliki KTP Lingkup Kecamatan (%)"				53.045.000				54.636.350			56.275.441	Pacet
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					-				-			-	Pacet
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rata-rata Jumlah kelembagaan Organisasi Perempuan tingkat Kecamatan (LSM/Non LSM) (organisasi) (org)				53.045.000				54.636.350			56.275.441	Pacet
1	18		Kepemudaan dan Olahraga					-				-			-	Pacet
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Terbinaanya Organisasi Kepemudaan				47.740.500				49.172.715			50.647.896	Pacet
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Rata-rata Jumlah klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat Kecamatan				84.872.000				87.418.160			90.040.705	Pacet
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					-				-			-	Pacet
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rata-rata persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini (%)				53.045.000				54.636.350			56.275.441	Pacet
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rata-rata Prosentase Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Tentang Wawasan Kebangsaan				-				-			-	Pacet
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rata-rata Persentase penanganan kejadian bencana alam (%)				53.045.000				54.636.350			56.275.441	Pacet
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					-				-			-	Pacet
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rata-rata Prosentase Capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan				-				-			-	Pacet
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase Peimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan				-				-			-	Pacet
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa					-				-			-	Pacet

1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rata-rata Prosentase Terselenggaranya Pembinaan Admiistrasi Pemerintah Desa										-	-	-	Pacet
Total Belanja Renja														657.758.000	677.490.740	697.815.462	Pacet
Total Belanja														1.036.333.053	1.067.423.044	1.099.445.736	Pacet

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Kertasari													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik		166.260.110			171.247.914			176.385.351	Kertasari
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur		259.071.780			266.843.933			274.849.251	Kertasari
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Terciptanya Good Governance		21.005.820			21.635.995			22.285.074	Kertasari
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		11.669.900			12.019.997			12.380.597	Kertasari
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya Pelaksanaan Pemerintahan yang Akuntabel		3.500.970			3.605.999			3.714.179	Kertasari
Total Belanja Rutin						461.508.580			475.353.838			489.614.453	Kertasari
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-			-			-	Kertasari
1	1		Pendidikan			-			-			-	Kertasari
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Kepedulian Masyarakat Terhadap Pendidikan		84.872.000			87.418.160			90.040.705	Kertasari
1	2		Kesehatan			-			-			-	Kertasari
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat		84.872.000			87.418.160			90.040.705	Kertasari
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Meningkatnya Angka Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		42.436.000			43.709.080			45.020.352	Kertasari
1	3		Pekerjaan Umum			-			-			-	Kertasari
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Peningkatan sarana Infrastruktur									Kertasari
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Pendukung Perekonomian masyarakat		175.048.500			180.299.955			185.708.954	Kertasari
1	3	25	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Debit air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan produksi air minum (L/Detik)	5.679	L/Detik	-	6.196	L/Detik	-		-	Kertasari
1	6		Perencanaan Pembangunan			-			-			-	Kertasari
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan Pembangunan Yang Partisipatif		23.339.800			24.039.994			24.761.194	Kertasari
1	8		Lingkungan Hidup			-			-			-	Kertasari
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan										Kertasari
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang Asri		29.174.750			30.049.993			30.951.492	Kertasari
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil			-			-			-	Kertasari

1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi Adminduk		11.669.900			12.019.997			12.380.597	Kertasari
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			-			-			-	Kertasari
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan		23.339.800			24.039.994			24.761.194	Kertasari
1	14		Ketenagakerjaan			-			-			-	Kertasari
1	14	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Terwujudnya program peningkatan kesempatan kerja		-			-			-	Kertasari
1	18		Kepemudaan dan Olahraga			-			-			-	Kertasari
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan Serta Peran Organisasi Kepemudaan		11.669.900			12.019.997			12.380.597	Kertasari
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Terselenggaranya Pembinaan Cabang Olah Raga Berprestasi di Tingkat daerah		23.339.800			24.039.994			24.761.194	Kertasari
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			-			-			-	Kertasari
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Menurunnya tingkat Kejahatan kriminal		56.015.520			57.695.986			59.426.865	Kertasari
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terlaksananya Peringatan Hari Hari Besar		33.842.710			34.857.991			35.903.731	Kertasari
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			-			-			-	Kertasari
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel		11.669.900			12.019.997			12.380.597	Kertasari
1	20	19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terwujudnya program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		-			-			-	Kertasari
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH		58.349.500			60.099.985			61.902.985	Kertasari
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa			-			-			-	Kertasari
1	22	16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Terwujudnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		-			-			-	Kertasari
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa		23.339.800			24.039.994			24.761.194	Kertasari
Total Belanja Renja						692.979.880			713.769.276			735.182.355	Kertasari
Total Belanja						1.154.488.460			1.189.123.114			1.224.796.808	Kertasari

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Baleendah													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		244.867.042		252.213.053		259.779.445		Baleendah	
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		159.188.045		163.963.686		168.882.597		Baleendah	
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase peningkatan disiplin aparatur		38.192.400		39.338.172		40.518.317		Baleendah	
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		15.913.500		16.390.905		16.882.632		Baleendah	
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan		27.583.400		28.410.902		29.263.229		Baleendah	
Total Belanja Rutin						485.744.387		500.316.719		515.326.220		Baleendah	
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-		-		-		Baleendah	
1	1		Pendidikan			-		-		-		Baleendah	
1	1	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase Pendidikan Anak Usia Dini		10.609.000		10.927.270		11.255.088		Baleendah	
1	2		Kesehatan			-		-		-		Baleendah	
1	2	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentase Pengembangan Lingkungan Sehat		-		-		-		Baleendah	
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Prosentase Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak		-		-		-		Baleendah	
1	3		Pekerjaan Umum			-		-		-		Baleendah	
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Prosentase Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong								Baleendah	
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		106.090.000		109.272.700		112.550.881		Baleendah	
1	6		Perencanaan Pembangunan			-		-		-		Baleendah	
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase Perencanaan Pembangunan Daerah		42.436.000		43.709.080		45.020.352		Baleendah	
1	8		Lingkungan Hidup			-		-		-		Baleendah	
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		106.090.000		109.272.700		112.550.881		Baleendah	
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		84.872.000		87.418.160		90.040.705		Baleendah	
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			-		-		-		Baleendah	

1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Prosentase peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan				84.872.000			87.418.160		90.040.705	Baleendah
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				-				-		-	Baleendah
1	15	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			-				-		-	Baleendah
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				-				-		-	Baleendah
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			21.218.000				21.854.540		22.510.176	Baleendah
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase pengembangan wawasan kebangsaan			21.218.000				21.854.540		22.510.176	Baleendah
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			79.567.500				81.954.525		84.413.161	Baleendah
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				-				-		-	Baleendah
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			59.940.850				61.739.076		63.591.248	Baleendah
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa				-				-		-	Baleendah
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			74.263.000				76.490.890		78.785.617	Baleendah
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Prosentase Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa			38.192.400				39.338.172		40.518.317	Baleendah
2	6		Perdagangan				-				-		-	Baleendah
2	6	19	Program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lila dan asongan	Prosentase Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan			-				-		-	Baleendah
Total Belanja Renja							729.368.750				751.249.813		773.787.307	Baleendah
Total Belanja							1.215.113.137				1.251.566.531		1.289.113.527	Baleendah

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Majalaya											
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Belanja Rutin											
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Publik		179.339.874		184.720.071		190.261.673	Majalaya
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	penunjang pelayanan publik		340.548.900		350.765.367		361.288.328	Majalaya
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	penunjang peningkata kinerja aparatur		24.931.150		25.679.085		26.449.457	Majalaya
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	penunjang peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		15.913.500		16.390.905		16.882.632	Majalaya
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	tercapainya peningkatan kinerja pelaporan pencapaian keuangan		8.381.110		8.632.543		8.891.520	Majalaya
Total Belanja Rutin						569.114.534		586.187.970		603.773.610	Majalaya
Belanja Renja											
1			Urusan Wajib			-		-		-	Majalaya
1	3		Pekerjaan Umum			-		-		-	Majalaya
1	3	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	panjang jalan dan jembatan		74.263.000		76.490.890		78.785.617	Majalaya
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	rata rata prosentase pembangunan drenase/gorong-gorong tingkat kecamatan (persen)							Majalaya
1	6		Perencanaan Pembangunan			-		-		-	Majalaya
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	rata rata persentase usulan program/kegiatan kecamatan yang ditetapkan dalam rkpd (%)		42.436.000		43.709.080		45.020.352	Majalaya
1	8		Lingkungan Hidup			-		-		-	Majalaya
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	persentase pencakupan persampahan (%)		63.654.000		65.563.620		67.530.529	Majalaya
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	rata rata persentase pengelolaan rth tingkat kecamatan		265.225.000		273.181.750		281.377.203	Majalaya
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			-		-		-	Majalaya
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	rata rata jumlah kelembagaan organisasi perempuan tingkat kecamatan (lsm /non lsm)		47.740.500		49.172.715		50.647.896	Majalaya
1	18		Kepemudaan dan Olahraga			-		-		-	Majalaya
1	18	17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	rata rata jumlah pemuda berjiwa wirausaha		47.740.500		49.172.715		50.647.896	Majalaya

1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					-						-	Majalaya		
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	rata rata persentasi penanganan bencana alam			94.420.100						97.252.703	100.170.284	Majalaya	
1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					-						-	Majalaya		
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	rata rata persentase pelimpahan kewenangan bupati kepada camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan (%)			212.180.000						218.545.400	225.101.762	Majalaya	
Total Belanja Renja							847.659.100						873.088.873	899.281.539	Majalaya	
Total Belanja							1.416.773.634							1.459.276.843	1.503.055.149	Majalaya

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Ibum													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		275.155.830			283.410.505			291.912.820	Ibum
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur		226.279.361			233.067.742			240.059.774	Ibum
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur		-			-			-	Ibum
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		-			-			-	Ibum
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		3.500.970			3.605.999			3.714.179	Ibum
Total Belanja Rutin						504.936.161			520.084.246			535.686.774	Ibum
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-			-			-	Ibum
1	1		Pendidikan			-			-			-	Ibum
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Prosentase Pendidikan Menengah		58.349.500			60.099.985			61.902.985	Ibum
1	2		Kesehatan			-			-			-	Ibum
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Prosentase Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak		58.349.500			60.099.985			61.902.985	Ibum
1	3		Pekerjaan Umum			-			-			-	Ibum
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Prosentase pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong									Ibum
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		168.491.077			173.545.809			178.752.184	Ibum
1	6		Perencanaan Pembangunan			-			-			-	Ibum
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase Perencanaan Pembangunan Daerah		37.960.063			39.098.865			40.271.831	Ibum
1	8		Lingkungan Hidup			-			-			-	Ibum
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Pengangkutan sampah		136.856.100			140.961.783			145.190.636	Ibum
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		-			-			-	Ibum
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			-			-			-	Ibum
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Prosentase Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		33.948.800			34.967.264			36.016.282	Ibum

1	18	Kepemudaan dan Olahraga				-			-			-	Ibun
1	18	16 Program peningkatan peran serta kepemudaan	Prosentase Peningkatan peranserta kepemudaan			32.887.900			33.874.537			34.890.773	Ibun
1	18	20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Prosentase Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga			44.557.800			45.894.534			47.271.370	Ibun
1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				-			-			-	Ibun
1	19	16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase pemeliharaan kantrantibmas dan pecegahan tindak kriminal			23.339.800			24.039.994			24.761.194	Ibun
1	19	17 Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase pengembangan wawasan kebangsaan			55.591.160			57.258.895			58.976.662	Ibun
1	19	22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			33.948.800			34.967.264			36.016.282	Ibun
1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				-			-			-	Ibun
1	20	17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			27.052.950			27.864.539			28.700.475	Ibun
1	20	20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			80.097.950			82.500.889			84.975.915	Ibun
1	22	Pemberdayaan Masyarakat Desa				-			-			-	Ibun
1	22	15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			44.557.800			45.894.534			47.271.370	Ibun
1	22	18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			44.557.800			45.894.534			47.271.370	Ibun
Total Belanja Renja						880.547.000			906.963.410			934.172.312	Ibun
Total Belanja						1.385.483.161			1.427.047.656			1.469.859.086	Ibun

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Soreang													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			259.342.437			267.122.710			275.136.391	Soreang
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			307.661.000			316.890.830			326.397.555	Soreang
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur			30.766.100			31.689.083			32.639.755	Soreang
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			7.956.750			8.195.453			8.441.316	Soreang
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			8.487.200			8.741.816			9.004.070	Soreang
Total Belanja Rutin						614.213.487			632.639.891			651.619.088	Soreang
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-			-			-	Soreang
1	1		Pendidikan			-			-			-	Soreang
1	1	17	Program Pendidikan Menengah			53.045.000			54.636.350			56.275.441	Soreang
1	2		Kesehatan			-			-			-	Soreang
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			53.045.000			54.636.350			56.275.441	Soreang
1	3		Pekerjaan Umum			-			-			-	Soreang
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong										Soreang
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan			106.090.000			109.272.700			112.550.881	Soreang
1	6		Perencanaan Pembangunan			-			-			-	Soreang
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah			79.567.500			81.954.525			84.413.161	Soreang

1	8	Lingkungan Hidup					-			-			-	Soreang
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rata-rata prosentase Cakupan Pelayanan sampah skala kecamatan			53.045.000			54.636.350			56.275.441	Soreang
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rata-rata Persentase Pengelolaan RTH tingkat Kecamatan			42.436.000			43.709.080			45.020.352	Soreang
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil				-			-			-	Soreang
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rata-rata cakupan masyarakat yang sudah memiliki KK lingkungan kecamatan			21.218.000			21.854.540			22.510.176	Soreang
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				-			-			-	Soreang
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Pembinaan organisasi Perempuan			47.740.500			49.172.715			50.647.896	Soreang
1	18		Kepemudaan dan Olahraga				-			-			-	Soreang
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan organisasi Kepemudaan			21.218.000			21.854.540			22.510.176	Soreang
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumah Klub Olahraga menurut Cabang Olahraga tingkat Kecamatan			42.436.000			43.709.080			45.020.352	Soreang
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				-			-			-	Soreang
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	prosentase masyarakat yang mengikuti kewaspadaan dini/deteksi dini			53.045.000			54.636.350			56.275.441	Soreang
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rata-rata Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan			31.827.000			32.781.810			33.765.264	Soreang
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rata rata Persentase Penanganan kejadian Bencana alam			26.522.500			27.318.175			28.137.720	Soreang
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				-			-			-	Soreang
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber Pendapatan Daerah			5.304.500			5.463.635			5.627.544	Soreang

1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentasentase pelimpahan kewenangan Bupati ke pada Camat yang di laksanakan di tingkat Kecamatan				53.045.000				54.636.350			56.275.441	Soreang
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa					-				-			-	Soreang
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	prosentase lembaga dan organisai masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat kecamatan				26.522.500				27.318.175			28.137.720	Soreang
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	prosentase Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa				26.522.500				27.318.175			28.137.720	Soreang
Total Belanja Renja								742.630.000				764.908.900			787.856.167	Soreang
Total Belanja								1.356.843.487				1.397.548.791			1.439.475.255	Soreang

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Pasirjambu													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional perkantoran		240.711.365		247.932.706		255.370.687		Pasirjambu	
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran		158.378.578		163.129.936		168.023.834		Pasirjambu	
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran		19.096.200		19.669.086		20.259.159		Pasirjambu	
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		9.017.650		9.288.180		9.566.825		Pasirjambu	
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran		10.184.640		10.490.179		10.804.885		Pasirjambu	
Total Belanja Rutin					437.388.433		450.510.086		464.025.389		Pasirjambu		
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-		-		-		Pasirjambu	
1	1		Pendidikan			-		-		-		Pasirjambu	
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	jumlah pembinaan masyarakat peduli pendidikan		53.045.000		54.636.350		56.275.441		Pasirjambu	
1	2		Kesehatan			-		-		-		Pasirjambu	
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu		53.045.000		54.636.350		56.275.441		Pasirjambu	
1	3		Pekerjaan Umum			-		-		-		Pasirjambu	
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya Jalan		153.830.500		158.445.415		163.198.777		Pasirjambu	
1	6		Perencanaan Pembangunan			-		-		-		Pasirjambu	
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Presentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang dianggarkan, capaian kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan, ketepatan waktu penyelesaian Dokumen Perencanaan		39.253.300		40.430.899		41.643.826		Pasirjambu	
1	8		Lingkungan Hidup			-		-		-		Pasirjambu	
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		46.043.060		47.424.352		48.847.082		Pasirjambu	
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Tersedianya terpeliharanya RTH selama 1 tahun		42.436.000		43.709.080		45.020.352		Pasirjambu	

1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil				-			-			-	Pasirjambu
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Adminduk Tingkat Kecamatan			34.479.250			35.513.628			36.579.036	Pasirjambu
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				-			-			-	Pasirjambu
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Pembinaan PKK dan Posyandu Kecamatan dan Desa			42.436.000			43.709.080			45.020.352	Pasirjambu
1	18		Kepemudaan dan Olahraga				-			-			-	Pasirjambu
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Terbinanya Organisasi Kepemudaan Tingkat Kecamatan			25.992.050			26.771.812			27.574.966	Pasirjambu
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terciptanya Olahragawan berprestasi di Tingkat Kecamatan			59.940.850			61.739.076			63.591.248	Pasirjambu
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				-			-			-	Pasirjambu
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Bintek anggota Linmas			46.891.780			48.298.533			49.747.489	Pasirjambu
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terselenggaranya pelaksanaan hari besar Islam, Tarling, PKUU			63.441.820			65.345.075			67.305.427	Pasirjambu
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Tersedianya Sarana evakuasi penduduk dari ancaman bencana alam			57.659.915			59.389.712			61.171.404	Pasirjambu
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				-			-			-	Pasirjambu
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya dokumen potensi sumber pendapatan yang terdapat di Kecamatan			12.730.800			13.112.724			13.506.106	Pasirjambu
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH			103.437.750			106.540.883			109.737.109	Pasirjambu
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa				-			-			-	Pasirjambu
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Kegiatan ini dilaksanakan agar terlaksananya Bintek lembaga dan Organisasi masyarakat			34.479.250			35.513.628			36.579.036	Pasirjambu
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Kegiatan ini dilaksanakan agar terlaksananya pembinaan Administrasi pemerintahan desa			37.131.500			38.245.445			39.392.808	Pasirjambu
Total Belanja Renja							906.273.825			933.462.040			961.465.901	Pasirjambu
Total Belanja							1.343.662.258			1.383.972.126			1.425.491.290	Pasirjambu

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Ciwidey				-										-
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020				
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
Belanja Rutin														
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tersedianya jasa surat menyurat		256.415.881			264.108.357			272.031.608	Ciwidey	
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur		208.954.864			215.223.510			221.680.215	Ciwidey	
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Terlaksananya kegiatan program peningkatan disiplin aparatur		15.913.500			16.390.905			16.882.632	Ciwidey	
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		15.913.500			16.390.905			16.882.632	Ciwidey	
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		8.381.110			8.632.543			8.891.520	Ciwidey	
Total Belanja Rutin						505.578.855			520.746.220			536.368.607	Ciwidey	
Belanja Renja														
1			Urusan Wajib			-			-			-	Ciwidey	
1	1		Pendidikan			-			-			-	Ciwidey	
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah		53.045.000			54.636.350			56.275.441	Ciwidey	
1	2		Kesehatan			-			-			-	Ciwidey	
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Terlaksananya kegiatan peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		53.045.000			54.636.350			56.275.441	Ciwidey	
1	3		Pekerjaan Umum			-			-			-	Ciwidey	
1	3	16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong									Ciwidey	
1	6		Perencanaan Pembangunan			-			-			-	Ciwidey	
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik		37.131.500			38.245.445			39.392.808	Ciwidey	
1	8		Lingkungan Hidup			-			-			-	Ciwidey	
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya kegiatan program pengelolaan persampahan		53.045.000			54.636.350			56.275.441	Ciwidey	
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terlaksananya pemeliharaan RTH		31.827.000			32.781.810			33.765.264	Ciwidey	

1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil												-	Ciwidey		
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan										42.436.000	43.709.080	45.020.352	Ciwidey
1	11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												-	-	-	Ciwidey
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Terlaksananya kegiatan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan										47.740.500	49.172.715	50.647.896	Ciwidey
1	18	Kepemudaan dan Olahraga												-	-	-	Ciwidey
1	18	17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Program peningkatan peran serta Kepemudaan										21.218.000	21.854.540	22.510.176	Ciwidey
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Program pembinaan dan permasyarakatan olah raga										39.253.300	40.430.899	41.643.826	Ciwidey
1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri												-	-	-	Ciwidey
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan Kantribnas dan pencegahan tindak kriminal										79.567.500	81.954.525	84.413.161	Ciwidey
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Program pengembangan wawasan kebangsaan										41.375.100	42.616.353	43.894.844	Ciwidey
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Terlaksananya program kegiatan pencegahan dini dan penanggulangan pencegahan bencana alam										73.202.100	75.398.163	77.660.108	Ciwidey
1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian												-	-	-	Ciwidey
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Program peningkatan dan pembangunan pengelolaan keuangan daerah										15.913.500	16.390.905	16.882.632	Ciwidey
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya kegiatan penataan administrasi kependudukan										53.045.000	54.636.350	56.275.441	Ciwidey
1	22	Pemberdayaan Masyarakat Desa												-	-	-	Ciwidey
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan										74.263.000	76.490.890	78.785.617	Ciwidey
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa										74.263.000	76.490.890	78.785.617	Ciwidey
Total Belanja Renja														790.370.500	814.081.615	838.504.063	Ciwidey
Total Belanja														1.295.949.355	1.334.827.835	1.374.872.670	Ciwidey

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Rancabali														
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020				
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
Belanja Rutin														
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			298.305.216			307.254.372			316.472.003	Rancabali
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.194.573.400			1.230.410.602			1.267.322.920	Rancabali
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur			16.974.400			17.483.632			18.008.141	Rancabali
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			90.176.500			92.881.795			95.668.249	Rancabali
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan			8.381.110			8.632.543			8.891.520	Rancabali
Total Belanja Rutin							1.608.410.626			1.656.662.944			1.706.362.833	Rancabali
Belanja Renja														
1			Urusan Wajib				-			-			-	Rancabali
1	1		Pendidikan				-			-			-	Rancabali
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Program pendidikan menengah			53.045.000			54.636.350			56.275.441	Rancabali
1	2		Kesehatan				-			-			-	Rancabali
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluar kurang mampu			53.045.000			54.636.350			56.275.441	Rancabali
1	3		Pekerjaan Umum				-			-			-	Rancabali
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Prosentase rata-rata pembangunan saluran drainase/gorong-gorong										Rancabali
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan mantap baik sedang kabupaten lingkup kecamatan			74.263.000			76.490.890			78.785.617	Rancabali
1	6		Perencanaan Pembangunan				-			-			-	Rancabali
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan program/kegiatan kecamatan			15.913.500			16.390.905			16.882.632	Rancabali
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil				-			-			-	Rancabali
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase cakupan masyarakat yang sudah memiliki KK dan KTP			10.609.000			10.927.270			11.255.088	Rancabali
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				-			-			-	Rancabali

1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	kelembagaan organisasi perempuan LSM dan non LSM				47.740.500			49.172.715			50.647.896	Rancabali
1	17		Kebudayaan					-			-			-	Rancabali
1	17	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatkan toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama dan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa				-			-			-	Rancabali
1	18		Kepemudaan dan Olahraga					-			-			-	Rancabali
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	peningkatan prestasi kepemudaan				10.609.000			10.927.270			11.255.088	Rancabali
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Peningkatan jumlah club olahraga menurut cabang olah raga				31.827.000			32.781.810			33.765.264	Rancabali
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					-			-			-	Rancabali
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi keaspadaan dini				127.308.000			131.127.240			135.061.057	Rancabali
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase jumlah yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan				25.461.600			26.225.448			27.012.211	Rancabali
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					-			-			-	Rancabali
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase capaian retribusi pada tahun berkenan				21.218.000			21.854.540			22.510.176	Rancabali
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat				95.481.000			98.345.430			101.295.793	Rancabali
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa					-			-			-	Rancabali
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan				31.827.000			32.781.810			33.765.264	Rancabali
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	persentase jumlah desa swakarya				37.131.500			38.245.445			39.392.808	Rancabali
Total Belanja Renja								635.479.100			654.543.473			674.179.777	Rancabali
Total Belanja								2.243.889.726			2.311.206.417			2.380.542.610	Rancabali

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Solokanjeruk			Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						SKPD Penanggung jawab
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Belanja Rutin											
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		269.098.813		277.171.777		285.486.930		Solokanjeruk
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		235.403.101		242.465.194		249.739.150		Solokanjeruk
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur		18.671.840		19.231.995		19.808.955		Solokanjeruk
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		17.504.850		18.029.996		18.570.895		Solokanjeruk
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		9.219.221		9.495.798		9.780.672		Solokanjeruk
Total Belanja Rutin					549.897.825		566.394.759		583.386.602		Solokanjeruk
Belanja Renja											
1			Urusan Wajib		-		-		-		Solokanjeruk
1	2		Kesehatan		-		-		-		Solokanjeruk
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		85.869.246		88.445.323		91.098.683		Solokanjeruk
1	6		Perencanaan Pembangunan		-		-		-		Solokanjeruk
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah		64.714.900		66.656.347		68.656.037		Solokanjeruk
1	8		Lingkungan Hidup		-		-		-		Solokanjeruk
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		84.872.000		87.418.160		90.040.705		Solokanjeruk
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil		-		-		-		Solokanjeruk
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		64.714.900		66.656.347		68.656.037		Solokanjeruk
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		-		-		-		Solokanjeruk
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	2 Organisasi	68.958.500	2 Organisasi	71.027.255	2 Organisasi	73.158.073		Solokanjeruk
1	18		Kepemudaan dan Olahraga		-		-		-		Solokanjeruk
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	5 Orang	32.887.900	6 Orang	33.874.537	7 Orang	34.890.773		Solokanjeruk
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	5 Klub	64.184.450	5 Klub	66.109.984	6 Klub	68.093.283		Solokanjeruk

1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				-				-			-	Solokanjeruk
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/diteksi dini		80,50 %	124.655.750	81,00 %	128.395.423	82,00 %		132.247.285	Solokanjeruk	
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan		80,50 %	102.270.760	81,00 %	105.338.883	82,00 %		108.499.049	Solokanjeruk	
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				-		-			-	Solokanjeruk	
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase capaian retribusi kecamatan pada tahun berkenaan		81 %	5.834.950	82 %	6.009.999	83 %		6.190.298	Solokanjeruk	
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan internal dan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Kegiatan)		7 Kegiatan	82.919.944	7 Kegiatan	85.407.542	7 Kegiatan		87.969.769	Solokanjeruk	
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa				-		-			-	Solokanjeruk	
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat kecamatan		71 %	59.940.850	71,5 %	61.739.076	72 %		63.591.248	Solokanjeruk	
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya		71 %	49.331.850	72 %	50.811.806	73 %		52.336.160	Solokanjeruk	
Total Belanja Renja							891.156.000		917.890.680			945.427.400	Solokanjeruk	
Total Belanja							1.441.053.825		1.484.285.439			1.528.814.003	Solokanjeruk	

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Paseh													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			192.555.680			198.332.350			204.282.321	Paseh
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			136.219.560			140.306.147			144.515.331	Paseh
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur			14.852.600			15.298.178			15.757.123	Paseh
x	xx	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			20.157.100			20.761.813			21.384.667	Paseh
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			9.335.920			9.615.998			9.904.478	Paseh
Total Belanja Rutin						373.120.860		384.314.486		395.843.920		Paseh	
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-			-			-	Paseh
1	1		Pendidikan			-			-			-	Paseh
1	1	17	Program Pendidikan Menengah			74.263.000			76.490.890			78.785.617	Paseh
1	2		Kesehatan			-			-			-	Paseh
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			74.263.000			76.490.890			78.785.617	Paseh
1	3		Pekerjaan Umum			-			-			-	Paseh
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong										Paseh
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan			84.872.000			87.418.160			90.040.705	Paseh
1	6		Perencanaan Pembangunan			-			-			-	Paseh
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah			42.436.000			43.709.080			45.020.352	Paseh
1	8		Lingkungan Hidup			-			-			-	Paseh

1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase cakupan pelayanan persampahan (%)				46.679.600			48.079.988		49.522.388	Paseh
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase pengeloan RTH				31.827.000			32.781.810		33.765.264	Paseh
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil					-			-		-	Paseh
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rata rata prosentase cakupan masyarakat yang sudah memiliki KK lingkup Kecamatan (%) rata rata cakupan masyarakat yang sudah memiliki KTP lingkup kecamatan (%)				33.948.800			34.967.264		36.016.282	Paseh
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					-			-		-	Paseh
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rata-rata jumlah kelembagaan organisasi perempuan tingkat Kecamatan (Lsm/ non Lsm, organisasi) (orang)				53.045.000			54.636.350		56.275.441	Paseh
1	18		Kepemudaan dan Olahraga					-			-		-	Paseh
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rata rata jumlah prestasi skala Kecamatan (orang)				31.827.000			32.781.810		33.765.264	Paseh
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	rata-rata jumlah klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat kecamatan				63.654.000			65.563.620		67.530.529	Paseh
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					-			-		-	Paseh
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rata rata prosentse masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/ deteksi dini				57.288.600			59.007.258		60.777.476	Paseh
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rata rata prosentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan				53.045.000			54.636.350		56.275.441	Paseh
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rata-rata Prosentase Penanganan Kejadian Bencana Alam (%)				46.679.600			48.079.988		49.522.388	Paseh
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					-			-		-	Paseh

1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rata rata prosentase capaian dan retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan				27.583.400				28.410.902			29.263.229	Paseh
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rata rata prosentase pelimpahan kewenangan bupati kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan (%)				132.612.500				136.590.875			140.688.601	Paseh
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa					-				-			-	Paseh
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata rata prosentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat kecamatan (%)				44.557.800				45.894.534			47.271.370	Paseh
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	rata rata prosentase (%)				42.436.000				43.709.080			45.020.352	Paseh
Total Belanja Renja								941.018.300				969.248.849			998.326.314	Paseh
Total Belanja								1.314.139.160				1.353.563.335			1.394.170.235	Paseh

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kecamatan Kutawaringin													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional perkantoran (%)		200.443.972			206.457.291			212.651.010	Kutawaringin
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		231.276.200			238.214.486			245.360.921	Kutawaringin
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penunjang kerja aparatur (%)		28.644.300			29.503.629			30.388.738	Kutawaringin
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		22.278.900			22.947.267			23.635.685	Kutawaringin
Total Belanja Rutin						482.643.372			497.122.673			512.036.353	Kutawaringin
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-			-			-	Kutawaringin
1	1		Pendidikan			-			-			-	Kutawaringin
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang Sekolah Menengah Atas dan sederajat Tingkat Kecamatan		53.045.000			54.636.350			56.275.441	Kutawaringin
1	2		Kesehatan			-			-			-	Kutawaringin
1	2	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase Persalinan yang ditolong Oleh Tenaga Kesehatan yang berkompeten skala Kecamatan (%)		53.045.000			54.636.350			56.275.441	Kutawaringin
1	3		Pekerjaan Umum			-			-			-	Kutawaringin
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (%)									Kutawaringin
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan mantap kabupaten (baik dan sedang) lingkup kecamatan (%)		132.612.500			136.590.875			140.688.601	Kutawaringin
1	4		Perumahan			-			-			-	Kutawaringin
1	4	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Penggunaan Air Bersih oleh masyarakat di kecamatan (%)		21.218.000			21.854.540			22.510.176	Kutawaringin
1	6		Perencanaan Pembangunan			-			-			-	Kutawaringin
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Usulan program/Kegiatan Kecamatan yang ditetapkan Dalam RKPD (%)		31.827.000			32.781.810			33.765.264	Kutawaringin
1	8		Lingkungan Hidup			-			-			-	Kutawaringin

1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan Pelayanan sampah skala kecamatan (%)				53.045.000			54.636.350			56.275.441	Kutawaringin
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Pengelolaan RTH (%)				21.218.000			21.854.540			22.510.176	Kutawaringin
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil					-			-			-	Kutawaringin
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan KK Lingkup Kecamatan tahun berkenaan (%)				21.218.000			21.854.540			22.510.176	Kutawaringin
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					-			-			-	Kutawaringin
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan di tingkat Kecamatan (LSM dan Non LSM) (satuan)				37.131.500			38.245.445			39.392.808	Kutawaringin
1	13		Sosial					-			-			-	Kutawaringin
1	13	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lai	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tingkat Kecamatan yang tertangani tahun berkenaan				21.218.000			21.854.540			22.510.176	Kutawaringin
1	13	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tingkat Kecamatan yang tertangani tahun berkenaan				-			-			-	Kutawaringin
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					-			-			-	Kutawaringin
1	15	15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	jumlah pelaku UMKM Tingkat Kecamatan				-			-			-	Kutawaringin
1	15	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	jumlah pelaku UMKM Tingkat Kecamatan (satuan pelaku UMKM)				16.974.400			17.483.632			18.008.141	Kutawaringin
1	17		Kebudayaan					-			-			-	Kutawaringin
1	17	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Keragaman budaya yang dilestarikan di lingkup kecamatan				-			-			-	Kutawaringin
1	18		Kepemudaan dan Olahraga					-			-			-	Kutawaringin
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Frekuensi Penyuluhan Terhadap Pemuda Tingkat Kecamatan (satunya kali)				26.522.500			27.318.175			28.137.720	Kutawaringin
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah Klub Olahraga menurut Cabang Olahraga tingkat Kecamatan				31.827.000			32.781.810			33.765.264	Kutawaringin
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					-			-			-	Kutawaringin

1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Presentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini (%)				42.436.000				43.709.080			45.020.352	Kutawaringin
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan (%)				25.461.600				26.225.448			27.012.211	Kutawaringin
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Penanganan kejadian Bencana alam (%)				37.131.500				38.245.445			39.392.808	Kutawaringin
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					-				-			-	Kutawaringin
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan (%)				10.609.000				10.927.270			11.255.088	Kutawaringin
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan (%)				53.045.000				54.636.350			56.275.441	Kutawaringin
1	21		Ketahanan Pangan					-				-			-	Kutawaringin
1	21	15	Program Ketahanan Pangan	Jumlah jenis tanaman pangan yang dikonsumsi masyarakat kecamatan (jenis)												Kutawaringin
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa					-				-			-	Kutawaringin
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat kecamatan (%)				21.218.000				21.854.540			22.510.176	Kutawaringin
1	22	16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan tingkat Kecamatan (Lembaga)				15.913.500				16.390.905			16.882.632	Kutawaringin
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	'- Jumlah desa Swakarya - Jumlah desa swasembada				21.218.000				21.854.540			22.510.176	Kutawaringin
1	22	19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah Perempuan Pelaku Usaha Ekonomi Produktif (satunya orang)				15.913.500				16.390.905			16.882.632	Kutawaringin
Total Belanja Renja								763.848.000				786.763.440			810.366.343	Kutawaringin
Total Belanja								1.246.491.372				1.283.886.113			1.322.402.697	Kutawaringin

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kelurahan Pasawahan				-									-	
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020				
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
Belanja Rutin														
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			332.845.153			342.830.508			353.115.423	Kelurahan Pasawahan
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			3.214.608.689			3.311.046.950			3.410.378.358	Kelurahan Pasawahan
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur			28.644.300			29.503.629			30.388.738	Kelurahan Pasawahan
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			3.076.610			3.168.908			3.263.976	Kelurahan Pasawahan
Total Belanja Rutin						3.579.174.753			3.686.549.995			3.797.146.495	Kelurahan Pasawahan	
Belanja Renja														
1			Urusan Wajib			-			-				-	Kelurahan Pasawahan
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			-			-				-	Kelurahan Pasawahan
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH			742.630.000			764.908.900			787.856.167	Kelurahan Pasawahan
Total Belanja Renja						742.630.000			764.908.900			787.856.167	Kelurahan Pasawahan	
Total Belanja						4.321.804.753			4.451.458.895			4.585.002.662	Kelurahan Pasawahan	

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kelurahan Padasuka												
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						SKPD Penanggung jawab		
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Belanja Rutin												
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor		107.638.150			110.867.295		114.193.313	Kelurahan Padasuka
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur		174.501.139			179.736.173		185.128.259	Kelurahan Padasuka
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan capaian kinerja		3.500.970			3.605.999		3.714.179	Kelurahan Padasuka
Total Belanja Rutin						285.640.259			294.209.467		303.035.751	Kelurahan Padasuka
Belanja Renja												
1			Urusan Wajib			-			-		-	Kelurahan Padasuka
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			-			-		-	Kelurahan Padasuka
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase pelimpahan kewenangan bupati kepada camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan %		345.356.899			355.717.606		366.389.134	Kelurahan Padasuka
Total Belanja Renja						345.356.899			355.717.606		366.389.134	Kelurahan Padasuka
Total Belanja						630.997.158			649.927.073		669.424.885	Kelurahan Padasuka

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kelurahan Andir													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Posentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		157.649.740			162.379.232			167.250.609	Kelurahan Andir
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana		5.102.398.550			5.255.470.507			5.413.134.622	Kelurahan Andir
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Porsentase peningkatan disiplin aparatur		17.504.850			18.029.996			18.570.895	Kelurahan Andir
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Porsentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		5.834.950			6.009.999			6.190.298	Kelurahan Andir
Total Belanja Rutin						5.283.388.090			5.441.889.733			5.605.146.425	Kelurahan Andir
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-			-			-	Kelurahan Andir
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			-			-			-	Kelurahan Andir
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		1.007.855.000			1.038.090.650			1.069.233.370	Kelurahan Andir
Total Belanja Renja						1.007.855.000			1.038.090.650			1.069.233.370	Kelurahan Andir
Total Belanja						6.291.243.090			6.479.980.383			6.674.379.794	Kelurahan Andir

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kelurahan Baleendah												
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						SKPD Penanggung jawab		
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Belanja Rutin												
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Adimintrasi Perkantoran		158.975.865		163.745.141		168.657.495		Kelurahan Baleendah
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		249.597.943		257.085.881		264.798.458		Kelurahan Baleendah
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prsentase Peningkatan disiplin aparatur		3.978.375		4.097.726		4.220.658		Kelurahan Baleendah
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		11.807.817		12.162.052		12.526.913		Kelurahan Baleendah
Total Belanja Rutin						424.360.000		437.090.800		450.203.524		Kelurahan Baleendah
Belanja Renja												
1			Urusan Wajib			-		-		-		Kelurahan Baleend
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			-		-		-		Kelurahan Baleendah
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentasi peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH		1.007.855.000		1.038.090.650		1.069.233.370		Kelurahan Baleendah
Total Belanja Renja						1.007.855.000		1.038.090.650		1.069.233.370		Kelurahan Baleendah
Total Belanja						1.432.215.000		1.475.181.450		1.519.436.894		Kelurahan Baleendah

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kelurahan Jelegong												
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						SKPD Penanggung jawab		
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Belanja Rutin												
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		154.891.400		159.538.142		164.324.286		Kelurahan Jelegong
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Porsentase Peningkatan sarana dan prasarana		107.150.900		110.365.427		113.676.390		Kelurahan Jelegong
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Porsentase Peningkatan disiplin aparatur		13.261.250		13.659.088		14.068.860		Kelurahan Jelegong
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Porsentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		5.834.950		6.009.999		6.190.298		Kelurahan Jelegong
Total Belanja Rutin						281.138.500		289.572.655		298.259.835		Kelurahan Jelegong
Belanja Renja												
1			Urusan Wajib			-		-		-		Kelurahan Jelegong
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			-		-		-		Kelurahan Jelegong
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Porsentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		630.039.866		648.941.062		668.409.294		Kelurahan Jelegong
Total Belanja Renja						630.039.866		648.941.062		668.409.294		Kelurahan Jelegong
Total Belanja						911.178.366		938.513.717		966.669.128		Kelurahan Jelegong

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kelurahan Cibeunying													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Kantor		66.518.430			68.513.983			70.569.402	Kelurahan Cibeunying
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur		264.694.550			272.635.387			280.814.448	Kelurahan Cibeunying
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		3.500.970			3.605.999			3.714.179	Kelurahan Cibeunying
Total Belanja Rutin						334.713.950			344.755.369			355.098.030	Kelurahan Cibeunying
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-			-			-	Kelurahan Cibeunying
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			-			-			-	Kelurahan Cibeunying
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	rata rata persentase pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan		625.053.636			643.805.245			663.119.402	Kelurahan Cibeunying
Total Belanja Renja						625.053.636			643.805.245			663.119.402	Kelurahan Cibeunying
Total Belanja						959.767.586			988.560.613			1.018.217.432	Kelurahan Cibeunying

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kelurahan Sulaeman												
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						SKPD Penanggung jawab		
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Belanja Rutin												
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran		144.812.850		149.157.236		153.631.953		Kelurahan Sulaeman
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		110.917.095		114.244.608		117.671.946		Kelurahan Sulaeman
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur		8.168.930		8.413.998		8.666.418		Kelurahan Sulaeman
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		6.630.625		6.829.544		7.034.430		Kelurahan Sulaeman
Total Belanja Rutin						270.529.500		278.645.385		287.004.747		Kelurahan Sulaeman
Belanja Renja												
1			Urusan Wajib			-		-		-		Kelurahan Sulaeman
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			-		-		-		Kelurahan Sulaeman
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terwujudnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		424.360.000		437.090.800		450.203.524		Kelurahan Sulaeman
Total Belanja Renja						424.360.000		437.090.800		450.203.524		Kelurahan Sulaeman
Total Belanja						694.889.500		715.736.185		737.208.271		Kelurahan Sulaeman

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kelurahan Wargamekar				-									-	
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab	
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020				
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
Belanja Rutin														
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Porsentase Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		187.779.300			193.412.679			199.215.059	Kelurahan Wargamekar	
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Porsentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		180.353.000			185.763.590			191.336.498	Kelurahan Wargamekar	
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Porsentase Peningkatan Disiplin Aparatur		11.669.900			12.019.997			12.380.597	Kelurahan Wargamekar	
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Porsentase Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		5.834.950			6.009.999			6.190.298	Kelurahan Wargamekar	
Total Belanja Rutin					385.637.150			397.206.265			409.122.452	Kelurahan Wargamekar		
Belanja Renja														
1			Urusan Wajib			-			-			-	Kelurahan Wargamekar	
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			-			-			-	Kelurahan Wargamekar	
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		882.138.350			908.602.501			935.860.576	Kelurahan Wargamekar	
Total Belanja Renja					882.138.350			908.602.501			935.860.576	Kelurahan Wargamekar		
Total Belanja					1.267.775.500			1.305.808.765			1.344.983.028	Kelurahan Wargamekar		

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kelurahan Rancaekek Kencana												
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						SKPD Penanggung jawab		
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Belanja Rutin												
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	meningkatkan penataan administrasi perkantoran		137.492.640		141.617.419		145.865.942		Kelurahan Rancaekek Kencana
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	meningkatnya kapasitas sarana dan prasara aparatur		171.017.080		176.147.592		181.432.020		Kelurahan Rancaekek Kencana
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	meningkatnya integritas kedisiplinan aparatur		18.247.480		18.794.904		19.358.752		Kelurahan Rancaekek Kencana
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	meningkatkan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		12.730.800		13.112.724		13.506.106		Kelurahan Rancaekek Kencana
Total Belanja Rutin						339.488.000		349.672.640		360.162.819		Kelurahan Rancaekek Kencana
Belanja Renja												
1			Urusan Wajib		-			-		-		Kelurahan Rancaekek Kencana
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		-			-		-		Kelurahan Rancaekek Kencana
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya kualitas program / kegiatan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya		820.075.700		844.677.971		870.018.310		Kelurahan Rancaekek Kencana
Total Belanja Renja						820.075.700		844.677.971		870.018.310		Kelurahan Rancaekek Kencana
Total Belanja						1.159.563.700		1.194.350.611		1.230.181.129		Kelurahan Rancaekek Kencana

**Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021**

SKPD : Kelurahan Manggahang													
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									SKPD Penanggung jawab
				Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
Belanja Rutin													
x	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		76.384.800			78.676.344			81.036.634	Kelurahan Manggahang
x	xx	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana		173.457.150			178.660.865			184.020.690	Kelurahan Manggahang
x	xx	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Peningkatan disiplin aparatur		11.669.900			12.019.997			12.380.597	Kelurahan Manggahang
x	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD		3.713.150			3.824.545			3.939.281	Kelurahan Manggahang
Total Belanja Rutin						265.225.000			273.181.750			281.377.203	Kelurahan Manggahang
Belanja Renja													
1			Urusan Wajib			-			-			-	Kelurahan Manggahang
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			-			-			-	Kelurahan Manggahang
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		424.360.000			437.090.800			450.203.524	Kelurahan Manggahang
Total Belanja Renja						424.360.000			437.090.800			450.203.524	Kelurahan Manggahang
Total Belanja						689.585.000			710.272.550			731.580.727	Kelurahan Manggahang
Total Belanja Langsung						1.489.099.682.743			1.503.592.547.987			1.524.574.033.660	

#REF!

#REF!

4.575.237.124.776

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

4.575.237.124.776

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 9. Pemanta Ketahan: Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 12. Penanganan Resiko Bencana

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 12. Penanganan Resiko Bencana

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 9. Pemantaj Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

7. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

7. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

7. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

7. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

7. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3. Investasi dan Daya Saing Usaha

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 3. Investasi dan Daya Saing Usaha

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 3. Investasi dan Daya Saing Usaha

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 3. Investasi dan Daya Saing Usaha

3. Infr: 8. Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan

4. Infr Perumahan dan Permukiman

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Infr Perumahan dan Permukiman

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 8. Pela Reformasi Birokrasi

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 8. Pela Reformasi Birokrasi

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 8. Pela Reformasi Birokrasi

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 12. Penanganan Resiko Bencana

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 12. Penanganan Resiko Bencana

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 11. Lingkungan

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 11. Lingkungan

4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 4. Insfrastruktur

11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

14. Penataan Ruang

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 14. Penataan Ruang

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

1. Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pendidikan

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insf Pelayanan Pendidikan

4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 12. Penanganan Resiko Bencana

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan | 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

3. Investasi dan Daya Saing Usaha

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 3. Investasi dan Daya Saing Usaha

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 3. Investasi dan Daya Saing Usaha

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 3. Investasi dan Daya Saing Usaha

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 3. Investasi dan Daya Saing Usaha

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 6. KUKM dan Daya Saing Industri
5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 6. KUKM dan Daya Saing Industri

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 6. KUKM dan Daya Saing Industri

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 6. KUKM dan Daya Saing Industri

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 6. KUKM dan Daya Saing Industri
5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 6. KUKM dan Daya Saing Industri

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 6. KUKM dan Daya Saing Industri

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 6. KUKM dan Daya Saing Industri

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 6. KUKM dan Daya Saing Industri

7. Pariwisata dan Budaya

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 7. Pariwisata dan Budaya

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 7. Pariwisata dan Budaya

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 7. Pariwisata dan Budaya

16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan | 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan | 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan | 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan | 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan | 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan | 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan | 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 7. Pariwisata dan Budaya

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 7. Pariwisata dan Budaya

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 1. Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 7. Pariwisata dan Budaya

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 7. Pariwisata dan Budaya

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 7. Pariwisata dan Budaya

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 7. Pariwisata dan Budaya

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 7. Pariwisata dan Budaya

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

4. Insfrastruktur
3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaa: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaa: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaa: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaa: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaa: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaa: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaa: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaa: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaa: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 9. Pemantaj Ketahan: Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day Ekonomi Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 12. Penanganan Resiko Bencana
5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 12. Penanganan Resiko Bencana

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 12. Penanganan Resiko Bencana

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 12. Penanganan Resiko Bencana

4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 4. Insfrastruktur

4. Insf Perumahan dan Permukiman

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 4. Insf Perumahan dan Permukiman

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 4. Insf Perumahan dan Permukiman

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 4. Insf Perumahan dan Permukiman

4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah

4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah

4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 4. Insf Perumahan dan Permukiman

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 4. Insf Perumahan dan Permukiman

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insf Perumahan dan Permukiman

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insf Perumahan dan Permukiman

3. Infr: 5. Penanggt Kualitas Pekerja: 4. Insf Perumahan dan Permukiman

3. Infr: 5. Penanggt Kualitas Pekerja: 4. Insf Perumahan dan Permukiman

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 4. Insf Perumahan dan Permukiman

14. Penataan Ruang

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 14. Penataan Ruang

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 14. Penataan Ruang

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 14. Penataan Ruang

4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah

4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 14. Penataan Ruang

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 8. Pela Reformasi Birokrasi

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 8. Pela Reformasi Birokrasi

4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah

4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah

4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 8. Pela Reformasi Birokrasi

11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

10. Pengendalian pencemaran lingkungan dan penyediaan RTH

10. Pengendalian pencemaran lingkungan dan penyediaan RTH

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

10. Pengendalian pencemaran lingkungan dan penyediaan RTH

10. Pengendalian pencemaran 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

13. Penanganan Kemiskinan

4. Kesr 3. Penanggt Sumber l Urusan I 13. Penanganan Kemiskinan

4. Kesr 3. Penanggt Sumber l Urusan I 13. Penanganan Kemiskinan

4. Kesr 3. Penanggt Sumber l Urusan I 13. Penanganan Kemiskinan

4. Kesr 3. Penanggt Sumber l Urusan I 13. Penanganan Kemiskinan

4. Kesr 3. Penanggt Sumber l Urusan I 13. Penanganan Kemiskinan

4. Kesr 3. Penanggt Sumber l Urusan I 13. Penanganan Kemiskinan

4. Kesr 3. Penanggt Sumber l Urusan I 13. Penanganan Kemiskinan

11. Lingkungan

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 11. Lingkungan

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 11. Lingkungan

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaan Umum
3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 5. Penanggt Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 5. Penanggt Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

5. Day 8. Peningkatan Ekonomi Urusan I 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

5. Day 8. Peningkatan Ekonomi Urusan I 3. Investasi dan Daya Saing Usaha
5. Day 8. Peningkatan Ekonomi Urusan I 3. Investasi dan Daya Saing Usaha
5. Day 8. Peningkatan Ekonomi Urusan I 3. Investasi dan Daya Saing Usaha

5. Day 8. Peningkatan Ekonomi Urusan I 3. Investasi dan Daya Saing Usaha

5. Day 8. Peningkatan Ekonomi Urusan I 3. Investasi dan Daya Saing Usaha

8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Desa

Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Desa

Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Desa

Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Desa

Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Desa

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Man 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan l 10. Kesadaran Poliik dan Hukum

2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Keseluruhan Pelayanan Kesehatan

2. Keseluruhan Peningkatan Sumber Kesehatan Pelayanan Kesehatan

2. Keseluruhan Pelayanan Kesehatan

2. Keseluruhan Peningkatan Sumber Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan

2. Keseluruhan Peningkatan Sumber Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan

9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

7. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

7. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

3. Infr 4. Peningka Kualitas | Pekerjaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas | Pekerjaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas | Pekerjaa 4. Insfrastruktur

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas | Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas | Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas | Urusan I 11. Lingkungan

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber | Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber | Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta: Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta: Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta: Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaa 4. Insfrastruktur

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber | Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber | Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

13. Penanganan Kemiskinan

4. Kesr 3. Penanggt Sumber | Urusan I 13. Penanganan Kemiskinan

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Per 7. Pemanta Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Per 7. Pemanta Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

3. Infr 4. Peningka Kualitas | Pekerjaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas | Pekerjaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas | Pekerjaa 4. Insfrastruktur

8. Ref 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Ref 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas | Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas | Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas | Urusan I 11. Lingkungan

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber | Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber | Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 6. KUKM dan Daya Saing Industri

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 6. KUKM dan Daya Saing Industri

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 7. Pariwisata dan Budaya

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 7. Pariwisata dan Budaya

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Per 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Per 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Per 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaa: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaa: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaa: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaa: 4. Insfrastruktur

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 7. Pariwisata dan Budaya

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 7. Pariwisata dan Budaya

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

2. Kes 2. Peningka Sumber l Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber l Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber l Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber l Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaa 4. Insfrastruktur

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas | Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas | Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas | Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas | Urusan I 11. Lingkungan

8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber | Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber | Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

4. Kesr 3. Penanggt Sumber | Urusan I 13. Penanganan Kemiskinan

4. Kesr 3. Penanggt Sumber | Urusan I 13. Penanganan Kemiskinan

3. Investasi dan Daya Saing Usaha

5. Day 8. Peningka Ekonnon Urusan I 3. Investasi dan Daya Saing Usaha

5. Day 8. Peningka Ekonnon Urusan I 6. KUKM dan Daya Saing Industri

5. Day 8. Peningka Ekonnon Urusan I 6. KUKM dan Daya Saing Industri

5. Day 8. Peningka Ekonnon Urusan I 6. KUKM dan Daya Saing Industri

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 7. Pariwisata dan Budaya

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 7. Pariwisata dan Budaya

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentruman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentruman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentruman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentruman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentruman

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta) Ekonnon Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Per 7. Pemanta Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Per 7. Pemanta Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN□

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN□

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 3. Investasi dan Daya Saing Usaha

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan I 3. Investasi dan Daya Saing Usaha

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

8. Ref: 6. Reformas Sumber | Urusan | 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Ref: 6. Reformas Sumber | Urusan | 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan | 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan | 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan | 11. Lingkungan

8. Ref: 6. Reformas Sumber | Urusan | 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Ref: 6. Reformas Sumber | Urusan | 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

2. Kes: 2. Peningka Sumber | Kesehat: 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kes: 2. Peningka Sumber | Kesehat: 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Pen: 1. Peningka Sumber | Pendidik: 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik l 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik l 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta) Ekonnon Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta) Ekonnon Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta) Ekonnon Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber | Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber | Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pendidikan

1. Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

4. Insf Perumahan dan Permukiman

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insf Perumahan dan Permukiman

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Lingkungan

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta) Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta) Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta) Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

1. Pen1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen1 Pelayanan Pendidikan

1. Pen1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen1 Pelayanan Pendidikan

2. Kes1 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 2. Kes1 Pelayanan Kesehatan

2. Kes1 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 2. Kes1 Pelayanan Kesehatan

3. Infr1 4. Peningka Kualitas 1 Pekerjaa1 4. Insfrastruktur

3. Infr1 4. Peningka Kualitas 1 Pekerjaa1 4. Insfrastruktur

3. Infr1 4. Peningka Kualitas 1 Pekerjaa1 4. Insfrastruktur

8. Ref1 6. Reformas Sumber 1 Urusan 1 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Ref1 6. Reformas Sumber 1 Urusan 1 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas 1 Urusan 1 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas 1 Urusan 1 11. Lingkungan

8. Ref1 6. Reformas Sumber 1 Urusan 1 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Ref1 6. Reformas Sumber 1 Urusan 1 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kes1 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats l 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik l 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik l 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tanr 11. Pemant: Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tanr 11. Pemant: Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tanr 11. Pemant: Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tanr 11. Pemant: Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta: Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta: Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta: Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaa: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaa: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaa: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaa: 4. Insfrastruktur

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

2. Kes 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

8. Ref 6. Reformas Sumber 1 Urusan 1 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Ref 6. Reformas Sumber 1 Urusan 1 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Ref 6. Reformas Sumber 1 Urusan 1 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Ref 6. Reformas Sumber 1 Urusan 1 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kes 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kes 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemanti Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraran

9. Tan 11. Pemanti Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraran

9. Tan 11. Pemanti Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraran

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta) Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta) Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta) Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

2. Kes 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

8. Refc 6. Reformas Sumber 1 Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber 1 Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

8. Refc 6. Reformas Sumber 1 Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber 1 Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 1. Penr Pelayanan Pendidikan

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 1. Penr Pelayanan Pendidikan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaa 4. Insfrastruktur

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber | Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber | Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta: Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta: Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehat 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehat 2. Kes Pelayanan Kesehatan

3. Infr 4. Peningka Kualitas | Pekerjaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas | Pekerjaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas | Pekerjaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas | Pekerjaa 4. Insfrastruktur

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

8. Ref: 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Ref: 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

2. Kes: 2. Peningka Sumber | Kesehat: 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kes: 2. Peningka Sumber | Kesehat: 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Pen: 1. Peningka Sumber | Pendidik: 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen: 1. Peningka Sumber | Pendidik: 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen: 1. Peningka Sumber | Pendidik: 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerja: 4. Insfrastruktur

8. Ref: 6. Reformas Sumber | Urusan | 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Ref: 6. Reformas Sumber | Urusan | 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling: 10. Pengenc Kualitas | Urusan | 11. Lingkungan

6. Ling: 10. Pengenc Kualitas | Urusan | 11. Lingkungan

6. Ling: 10. Pengenc Kualitas | Urusan | 11. Lingkungan

8. Ref: 6. Reformas Sumber | Urusan | 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

8. Ref: 6. Reformas Sumber | Urusan | 8. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

2. Kes: 2. Peningka Sumber | Kesehat: 15. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kes: 2. Peningka Sumber | Kesehat: 15. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

4. Kes: 3. Penangg: Sumber | Urusan | 13. Penanganan Kemiskinan

4. Kes: 3. Penangg: Sumber | Urusan | 13. Penanganan Kemiskinan

1. Pen: 1. Peningka Sumber | Pendidik: 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen: 1. Peningka Sumber | Pendidik: 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen: 1. Peningka Sumber | Pendidik: 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan: 11. Pemant: Sumber | Urusan | 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan: 11. Pemant: Sumber | Urusan | 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan: 11. Pemant: Sumber | Urusan | 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan: 11. Pemant: Sumber | Urusan | 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta) Ekonnon Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta) Ekonnon Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 1. Penr Pelayanan Pendidikan

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 1. Penr Pelayanan Pendidikan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaa 4. Insfrastruktur

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta) Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta) Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaa: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaa: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaa: 4. Insfrastruktur

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber | Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber | Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

1. Pen1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen1 Pelayanan Pendidikan

1. Pen1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen1 Pelayanan Pendidikan

2. Kes1.2. Peningka Sumber 1 Kesehata 2. Kes1 Pelayanan Kesehatan

2. Kes1.2. Peningka Sumber 1 Kesehata 2. Kes1 Pelayanan Kesehatan

2. Kes1.2. Peningka Sumber 1 Kesehata 2. Kes1 Pelayanan Kesehatan

3. Infr1.4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr1.4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr1.4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr1.4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

8. Ref1.6. Reformas Sumber 1 Urusan 1 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Ref1.6. Reformas Sumber 1 Urusan 1 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan 1 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan 1 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan 1 11. Lingkungan

8. Ref1.6. Reformas Sumber 1 Urusan 1 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan l 3. Investasi dan Daya Saing Usaha

5. Day 8. Peningka Ekonnor Urusan l 3. Investasi dan Daya Saing Usaha

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

2. Kes 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

8. Refc 6. Reformas Sumber 1 Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber 1 Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

2. Kes 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

5. Day 8. Peningka Ekonnon Urusan I 6. KUKM dan Daya Saing Industri

5. Day 8. Peningka Ekonnon Urusan I 6. KUKM dan Daya Saing Industri

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnon Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnon Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnon Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

5. Day 8. Peningka Ekonnon Urusan I 3. Investasi dan Daya Saing Usaha

5. Day 8. Peningka Ekonnon Urusan I 3. Investasi dan Daya Saing Usaha

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 4. Insfrastruktur

3. Infr: 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa: 4. Insfrastruktur

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

2. Kes: 2. Peningka Sumber l Kesehata: 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kes: 2. Peningka Sumber l Kesehata: 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Pen: 1. Peningka Sumber l Pendidik: 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen: 1. Peningka Sumber l Pendidik: 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemanti Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemanti Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

2. Kes 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerja 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerja 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerja 4. Insfrastruktur

8. Ref 6. Reformas Sumber 1 Urusan 1 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Ref 6. Reformas Sumber 1 Urusan 1 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan 1 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan 1 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan 1 11. Lingkungan

2. Kes 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kes 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Pen 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

2. Kes 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaa 4. Insfrastruktur

8. Refc 6. Reformas Sumber 1 Urusan 1 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber 1 Urusan 1 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehat 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehat 2. Kes Pelayanan Kesehatan

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerja 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerja 4. Insfrastruktur

8. Ref 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Ref 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber | Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber | Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant; Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant; Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant; Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant; Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta; Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta; Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemanta; Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber | Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber | Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber | Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnon Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnon Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnon Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber | Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerja 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerja 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerja 4. Insfrastruktur

8. Ref 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Ref 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Ref 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Ref 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kes 2. Peningka Sumber | Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 7. Pariwisata dan Budaya

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 7. Pariwisata dan Budaya

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant; Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant; Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant; Sumber l Urusan l 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 2. Kesr Pelayanan Kesehatan

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan l 11. Lingkungan

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraran

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraran

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraran

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

2. Kes 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

8. Refc 6. Reformas Sumber 1 Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber 1 Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehats 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

1. Pen 1. Peningka Sumber 1 Pendidik 1. Pen Pelayanan Pendidikan

2. Kes 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

2. Kes 2. Peningka Sumber 1 Kesehata 2. Kes Pelayanan Kesehatan

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insfrastruktur

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insf Perumahan dan Permukiman

3. Infr 4. Peningka Kualitas Pekerjaaa 4. Insf Perumahan dan Permukiman

8. Refc 6. Reformas Sumber 1 Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

8. Refc 6. Reformas Sumber 1 Urusan I 8. Pela Reformasi Birokrasi

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

6. Ling 10. Pengenc Kualitas Urusan I 11. Lingkungan

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

2. Kesr 2. Peningka Sumber l Kesehata 15. Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, KB dan Kependudukan

4. Kesr 3. Penanggt Sumber l Urusan I 13. Penanganan Kemiskinan

4. Kesr 3. Penanggt Sumber l Urusan I 13. Penanganan Kemiskinan

4. Kesr 3. Penanggt Sumber l Urusan I 13. Penanganan Kemiskinan

5. Day 8. Peningka Ekonnon Urusan I 6. KUKM dan Daya Saing Industri

5. Day 8. Peningka Ekonnon Urusan I 6. KUKM dan Daya Saing Industri

5. Day 8. Peningka Ekonnon Urusan I 6. KUKM dan Daya Saing Industri

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 7. Pariwisata dan Budaya

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 7. Pariwisata dan Budaya

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

1. Penr 1. Peningka Sumber l Pendidik 16. Peran Pemuda dan Olahraga

9. Tan 11. Pemant: Sumber l Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

9. Tan 11. Pemant: Sumber | Urusan I 9. Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 5. KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN □

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

7. Perc 7. Pemantaj Ekonnor Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

ka

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

lah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

g

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

ying

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

an

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber l Urusan l 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

tekar

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

kek Kencana

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

thang

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah

8. Refc 6. Reformas Sumber | Urusan I 8. Pelayanan Publik dana Tata Kelola Pemerintah



BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah ini dibagi ke dalam tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing. Penjelasan lebih rinci mengenai indikator kinerja daerah per urusan dapat dilihat pada Tabel indikator kinerja daerah dibawah.

TABEL 9.1
INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2016 - 2020

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Realisasi 2015	Proyeksi				
			2016	2017	2018	2019	2020
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
I.1.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)						
I.1.1.2	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bandung						
1	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	6.096.809,16	6.785.439	7.551.850	8.404.826	9.354.145	10.410.688
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	714.839,97	735.068	755.868	777.257	799.252	821.868
3	Industry Pengolahan/ <i>Manufacturing Industry</i>	44.208.777,89	48.663.661	53.567.460	58.965.410	64.907.308	71.447.966
4	Listrik, Gas dan Air Bersih/ <i>Electricity Gas and Water Supply</i>	1.405.950,27	1.608.147	1.839.422	2.103.957	2.406.537	2.752.633
5	Bangunan/Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.447.356,56	1.653.047	1.887.968	2.156.276	2.462.714	2.812.700
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran/ <i>Trade, Hotel and Restourant</i>	16.615.938,52	19.412.166	22.678.959	26.495.507	30.954.326	36.163.501
7	Pengangkutan dan Komunikasi/ <i>Transport and Communication</i>	3.469.128,60	3.906.095	4.398.100	4.952.078	5.575.835	6.278.158
8	Kuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.471.507,11	1.624.800	1.794.062	1.980.957	2.187.322	2.415.184
9	Jasa-jasa/ <i>Services</i>	5.322.478,89	6.253.774	7.348.022	8.633.735	10.144.414	11.919.423
	Total	80.752.786,97	90.642.197	101.821.712	114.470.004	128.791.851	145.022.122
I.1.1.3	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam DRB atas Dasar Harga Berlaku (HB) Kabupaten Bandung (%)						
1	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	7,55	7,49	7,42	7,34	7,26	7,18
2	Pertambangan dan penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0,89	0,81	0,74	0,68	0,62	0,57
3	Industry pengolahan/ <i>Manufacturing Industry</i>	54,75	53,69	52,61	51,51	50,40	49,27
4	Listrik, Gas dan Air Bersih/ <i>Electricity Gas and Water Suly</i>	1,74	1,77	1,81	1,84	1,87	1,90
5	Bangunan/Konstruksi/ <i>Construction</i>	1,79	1,82	1,85	1,88	1,91	1,94
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran/ <i>Trade, Hotel and Restourant</i>	20,58	21,42	22,27	23,15	24,03	24,94
7	Pengangkutan dan Komunikasi/ <i>Transport and Communication</i>	4,30	4,31	4,32	4,33	4,33	4,33
8	Kuangan, ersewaan dan Jasa perusahaan/	1,82	1,79	1,76	1,73	1,70	1,67
9	jasa-jasa/ <i>Services</i>	6,59	6,90	7,22	7,54	7,88	8,22
	Total	100	100	100	100	100	100
I.1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi, pendapatan Per Kapita dan Inflasi						
1	Pendapatan Perkapita pertahun (Rp)	21.823.511,00	25.199.482	27.833.848	30.790.192	34.111.402	37.846.487
I.1.3	Indikator Makro						
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.534.111,00	3.596.987	3.658.197	3.717.742	3.775.625	3.831.852
2	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,86	1,78	1,70	1,63	1,56	1,49
3	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	5,47	5,58	5,69	5,80	5,92	6,04
4	Inflasi PDRB(%)	4,96	4,81	4,67	4,53	4,3	4,26
5	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	80.752.786,97	90.642.196,93	101.821.711,70	114.470.003,94	128.791.851,27	145.022.121,77
6	PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (juta rupiah)	28.937.408,32	30.551.942,08	32.290.649,44	34.165.059,56	36.187.939,91	38.373.446,12
7	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)		227.119,70	215.964,87	205.357,90	195.271,88	185.681,23
8	Laju Pertumbuhan Investasi (%)		2,70	2,72	2,74	2,76	2,78

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Realisasi 2015	Proyeksi				
			2016	2017	2018	2019	2020
9	IPM	76,45	76,81	77,18	77,55	77,92	78,29
10	Indeks Pendidikan	86,29	85,47*	87,05	87,43	87,81	88,19
11	Rata-rata Lama Sekolah (thn)	9,04	8,90*	9,26	9,37	9,48	9,60
12	Angka Melek Huruf (%)	99,3	99,00*	99,71	99,92	100,13	100,34
13	Angka Harapan Hidup (AHH) (Thn)	71,03	71,23	71,52	71,77	72,01	72,26
	Angka Kematian Bayi	33,64	33,62	33,60	33,57	33,54	33,50
14	Indeks AHH/ Kesehatan	76,72	76,25*	77,54	77,96	78,38	78,80
15	Indeks Daya Beli	66,34	68,72*	66,95	67,26	67,57	67,88
16	Daya Beli (Ribu rupiah)	647,09	648,42	649,75	651,08	652,41	653,75
I.2	Fokus Kesejahteraan Masyarakat						
1.2.1	Perkembangan						
1	Angka Melek Huruf (%)	99,3	99,00*	99,71	99,92	100,13	100,34
2	Rata-Rata Lama Sekolah (thn)	9,04	8,90*	9,26	9,37	9,48	9,60
3	(APK) SD/MI/Sederajat	105,38	105,39	105,40	105,41	105,42	105,43
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	94,67	94,69	94,70	94,71	94,72	94,73
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Sederajat	97,70	97,78	97,82	97,82	97,85	97,98
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Sederajat	82,84	82,87	83,54	83,89	84,24	84,59
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/Sederajat	56,65	57	57,34	57,78	58,98	59,68
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Sederajat	42,16	42,17	44,60	45,32	48,40	50,01
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket A		0,59	0,60	0,61	0,62	0,62
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket B		3,78	3,80	3,82	3,83	3,85
11	Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket C		2,30	2,37	2,44	2,51	2,58
1.2.2	Kondisi Ketenagakerjaan						
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	55,20	55,74	56,30	56,86	57,42	58,00
2	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Laki-laki	81,02	81,82	82,64	83,47	84,30	85,15
3	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan	29,15	29,44	29,74	30,03	30,33	30,64
4	Kesempatan Kerja	92,87	93,80	94,73	95,68	96,63	97,60
5	Kesempatan Kerja laki-laki	94,89	95,84	96,79	97,76	98,74	99,72
6	Kesempatan Kerja Perempuan	87,19	88,07	88,95	89,84	90,74	91,64
7	Pengangguran laki-laki	10,06	9,96	9,85	9,75	9,64	9,54
8	Pengangguran Perempuan	16,96	16,79	16,62	16,45	16,28	16,11
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
II.1.	Fokus Layanan Urusan Wajib						
II.1.1	Pendidikan						
	Persentase Kondisi Ruang Kelas Baik SD/MI	71,37	72,58	73,78	74,99	76,19	77,4
	Persentase Kondisi Ruang Kelas Baik Smp/ MTs	84,59	84,76	84,93	85,11	85,28	85,45
II.1.2	Kesehatan						
	Persentase penyelenggaraan promosi kesehatan (%)	80	80	85	90	95	100

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Realisasi 2015	Proyeksi				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Kesehatan	75,9					77,2
	Persentase PHBS pada rumah tangga (%)	39,90					50
II.1.3	Pekerjaan Umum						
	Rata- Rata Persentase Jalan Mantap (baik dan sedang) (%)	82,79	84,63	86,47	88,32	90,16	92
	Persentase terbangunnya sistem jaringan jalan dan drainase perkotaan koridor Jalan Tol Soroja	0	20	40	60	80	100
	Persentase penanganan drainase skala kawasan dan skala kota	6,7	8,36	10,02	11,68	13,34	15
	Persentase luas kawasan kumuh (%)	9,38	7,51	5,64	3,77	1,87	0
	Akses Aman Terhadap Air Bersih	95,01	100	100	100	100	100
	Akses Aman Terhadap Sanitasi	59	60	75	90	100	100
II.1.4	Penataan Ruang						
	Tersedianya dokumen penataan ruang						
	Persentase keterpaduan antar daerah yang berbatasan mengenai kerjasama perencanaan penyediaan sarana, prasarana dan pelayanan publik	20	36	52	68	84	100
	Persentase luas pemanfaatan lahan budidaya non pertanian yang berijin sesuai rencana tata ruang	55,50	56	56,50	57	57,50	58
II.1.5	Perhubungan						
	Persentase terbangunnya jaringan fiber optik	0	20	40	60	80	100
	Level of Service (LOS)	LOS D (2,83)	LOS D (3)	LOS D (3,2)	LOS D (3,5)	LOS D (3,7)	LOS C (4)
II.1.6	Lingkungan Hidup						
	Persentase Pengendalian Pencemaran Air	54	54,54	55,0854	55,636254	56,19261654	56,75
	Pengendalian Pencemaran Udara	87	87,87	88,7487	89,636187	90,53254887	91,44
	Pengendalian Pengelolaan Limah B3	43	43,43	43,8643	44,302943	44,74597243	45,19
	Persentase volume sampah yang dapat dikelola pemerintah	19,06	24	24	28	32	34
	Persentase luas lahan kritis yang tertanami (%)	66,37	68,03	69,73	71,47	73,26	75,09
	Meningkatnya Persentase Ruang Terbuka Hijau (%)	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24
	Rasio TPU Persatuan Penduduk (1/6)		1:31	1:33	1:37	1:40	1:44
II.1.7	keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
	Cakupan pasangan usia subur peserta KB Aktif	70	80	82,5	85	87,5	90
II.1.8	Sosial						
	Rata- Rata PMKS yang ditangani dan mampu berinteraksi sosial (%)	50,34	50,84	51,34	51,84	52,34	52,84
	Jumlah Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya	37	38	38	39	39	40
II.1.9	Kepemudaan dan Olahraga						
	Atlet yang berprestasi di tingkat nasional	725	731	736	742	748	754
	Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.						

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Realisasi 2015	Proyeksi				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur (%)	20	20,60	21,00	21,85	22,51	23,19
	Jumlah SKPD yang telah ditata secara kelembagaan	72	72	72	62	62	62
	Jumlah kecamatan yang telah memiliki roadmap kewilayahan	0	0	0	31	31	31
	Persentase Penegakan Perda	100	100	100	100	100	100
	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	70	75	75	75	80	80
II.1.10	Ketahanan Pangan						
	Persentase ketersediaan pangan utama (Skor PPH Ketersediaan)	81,30	83,6	86,0	88,30	90,60	92,70
	Jumlah komoditas pertanian yang memiliki daya saing berskala nasional	4	5	6	7	8	9
II.1.11	Pemberdayaan Masyarakat Desa						
	Jumlah desa swasembada/ cepat berkembang	4	5	7	8	9	10
	Jumlah desa swakarya/ desa berkembang	18	19	21	22	23	25
	Jumlah swadaya dalam pembangunan desa	20	30	40	50	60	70
	Jumlah lembaga yang sudah melaksanakan penataan kearsipan	6	6	6	7	8	9
	Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh SKPD	6	6	6	7	8	9
	Jumlah kelompok tani yang berpredikat utama	220	223	255	262	275	288
	Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan	55	58	61	64	67	70
II.1.12	Perindustrian						
	Nilai omzet UMKM-IKM (Rp Trilyun)	3,09	4,24	4,81	5,39	5,96	6,54
C.	ASEK DAYA SAING DAERAH						
1	LPE Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (%)	8,99	9,15	9,30	9,46	9,63	9,79
2	Nilai Investasi (Rp Trilyun)	6,8	7,00	7,20	7,40	7,60	7,80
3	(APK) SD/MI/Sederajat	105,38	105,39	105,40	105,41	105,42	105,43
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	94,67	94,69	94,70	94,71	94,72	94,73
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Sederajat	97,70	97,78	97,82	97,82	97,85	97,98
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Sederajat	82,84	82,87	83,54	83,89	84,24	84,59
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/Sederajat	56,65	57	57,34	57,78	58,98	59,68
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Sederajat	42,16	42,17	44,60	45,32	48,40	50,01
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket A		0,59	0,60	0,61	0,62	0,62
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket B		3,78	3,80	3,82	3,83	3,85
11	Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket C		2,30	2,37	2,44	2,51	2,58
12	Persentase Guru SD/SDLB Berkualifikasi Akademik S1 /D4	74,29	77,43	80,57	83,72	86,86	90
13	Persentase Guru SMP/ SMPLB Bersertifikat Akademik S1/D4	81,89	83,51	85,13	86,76	88,38	90
14	Persentase Guru SMA/SMLB Berkualifikasi Akademik S.1/D-4	79,56	81,65	83,74	85,82	87,91	90
15	Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap program pada dokumen anggaran	94	100	100	100	100	100
16	Persentase korban bencana yang tertangani	75	80	85	90	95	100

Keterangan: *Nilai Target RKPD Murni 2016

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2016



BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten lima tahun kedepan. Dalam implementasinya RPJMD akan menjadi dokumen acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang lebih lanjut diturunkan ke dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Meninjau fungsi strataegis RPJMD dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, perlu adanya kesinambungan pembangunan khususnya untuk menghindari kekosongan RKPD di akhir periode RPJMD. Sehubungan hal tersebut, mengacu pada Permendagri No 54 Tahun 2010, maka perlu ditetapkan adanya suatu pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pedoman transisi dimaksud yaitu bertujuan untuk menyelesaikan masalah- masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani samapi dengan akhir periode RPJMD dan masalah- masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahap pertama masa pemerintahan baru. Adapun penetapan kaidah pelaksanaan berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021.

10.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan pedoman transisi bahwa:

1. Seluruh ketentuan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang termuat/ tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pada tahun berkenaan.
2. Ketentuan indikator kinerja dan indikasi pendanaan dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
3. Ketentuan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pada tahun berkenaan.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Untuk memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2016 – 2021, ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:



1. Seluruh Perangkat Daerah yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung bersama segenap masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program- program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
2. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2016 – 2021 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Bandung yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
3. Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun;
4. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara substansi dalam RPJMD dengan substansi dalam Renstra Perangkat Daerah;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah.
6. Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
7. Terhadap SOTK baru yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat diusulkan program/ kegiatan baru diluar yang ada dalam dokumen RPJMD.